

Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara

Regional
Retribution and
Revenue

Sutianingsih, Shinta Eka Kartika dan Widowati

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram, Indonesia

E-Mail : shintaekakartika@gmail.com

1

ABSTRACT

This study aims to determine the level of growth, effectiveness, contribution, and prediction of revenue (PAD) in North Lombok Regency. The data collection technique uses documentation, namely data on regional retribution and PAD for the years 2014-2019. Data analysis using descriptive analysis. The results show that the growth of regional retribution has increased in 2014 and 2015 by 76.3 percent and 72 percent, respectively. Meanwhile, in 2016-2019, the realization of regional retribution decreased by 56.4 percent, 9 percent, 4.7 percent and 55.3 percent respectively. The level of effectiveness of the collection of regional retribution in 2014 was 114.4 percent (very effective). Meanwhile, in 2015 and 2016, respectively 89.1 percent and 88.2 percent (less effective). And in 2017, 2018 and 2019 respectively 66.9 percent, 74 percent and 39.9 percent or included in the ineffective category. The contribution of regional retribution to PAD in 2014-2019 was 16.82 percent (not good), 22.83 percent (good enough), 7.88 percent, 6.16 percent, 6.76 percent and 2.69 percent respectively (not very good). The prediction of regional retribution for 2020-2022 is obtained by an average revenue for three years, namely IDR 19,474,844,122 or there will be an average increase of 33 percent per year. Meanwhile, the PAD prediction obtained an average revenue of IDR 342,948,257,802 or there will be an average increase of 33 percent per year.

Submitted:
DESEMBER 2020

Accepted:
MARET 2021

Keywords: regional retribution; revenue (PAD); prediction

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, efektivitas, kontribusi, dan prediksi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu data retribusi daerah dan PAD tahun 2014-2019. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi daerah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 76,3 persen dan 72 persen. Sedangkan pada 2016-2019, realisasi retribusi daerah turun masing-masing sebesar 56,4 persen, 9 persen, 4,7 persen, dan 55,3 persen. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2014 sebesar 114,4 persen (sangat efektif). Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing 89,1 persen dan 88,2 persen (kurang efektif). Dan pada 2017, 2018 dan 2019 masing-masing 66,9 persen, 74 persen dan 39,9 persen atau termasuk dalam kategori tidak efektif. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2014-2019 masing-masing sebesar 16,82 persen (kurang baik), 22,83 persen (cukup baik), 7,88 persen, 6,16 persen, 6,76 persen, dan 2,69 persen (tidak sangat baik). Prediksi retribusi daerah tahun 2020-2022 diperoleh dengan pendapatan rata-rata selama tiga tahun yaitu Rp 19.474.844.122 atau akan terjadi kenaikan rata-rata 33 persen per tahun. Sedangkan prediksi PAD memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 342.948.257.802 atau akan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 33 persen per tahun.

Kata Kunci: retribusi daerah; pendapatan (PAD); ramalan

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 1-12
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah mengalami perubahan kedua dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sumber penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian setiap daerah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui PAD, begitu pula dengan pemerintah kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut realisasi PAD Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2018:

Tabel 1 Realisasi PAD Kabupaten Lombok Utara 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)

Sumber PAD	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak daerah	48.825	57.090	76.168	92.645	68.816
Retribusi daerah	13.641	23.461	10.229	9.305	8.864
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.807	2.544	4.073	5.073	3.793
Lain-Lain PAD yang Sah	16.816	19.657	39.279	43.924	49.600
Jumlah PAD	81.090	102.754	129.750	150.949	131.074

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Lombok Utara Tahun 2014-2018

Berdasarkan Tabel 1. realisasi PAD pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan pendapatan dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2018 realisasi PAD pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan karena adanya penurunan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi retribusi daerah pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Realisasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp23.461.718.564 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp8.864.449.689. Penurunan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2018 disebabkan karena adanya gempa bumi yang melanda pulau Lombok, dan Lombok Utara merupakan daerah yang paling terdampak. Bencana gempa bumi yang terjadi pada akhir juli hingga bulan agustus 2018 cukup mempengaruhi pendapatan retribusi daerah karena sebagian besar fasilitas umum yang ada mengalami kerusakan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2018, penurunan retribusi daerah ini terjadi karena penurunan retribusi dari jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu seperti pelayanan kesehatan di puskesmas, penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas lainnya di lingkungan terminal, pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, pelayanan jasa ke pelabuhan, pelayanan tempat rekreasi,

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, dan pemberian izin usaha perikanan kepada badan. Dari jenis retribusi tersebut, yang mengalami penurunan terbesar adalah dari pelayanan tempat rekreasi, dimana target pada tahun 2018 sebesar Rp2.428.000.000, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp274.06.000 atau tingkat efektivitas sebesar 11,29 persen.

Penurunan retribusi terbesar dari pelayanan tempat rekreasi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Mohammad Faozol di Mataram, bahwa ketika gempa bumi terjadi, hampir sebagian besar wisatawan di Tiga Gili meminta untuk dievakuasi keluar dari ketiga pulau kecil tersebut menuju ke daratan Pulau Lombok dan selanjutnya memilih untuk pulang ketempat asalnya. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan menjadi 2,8 juta wisatawan yang terdiri atas 1 juta wisatawan mancanegara dan 1,8 juta wisatawan nusantara, sehingga berimbas pada kehidupan masyarakat lokal yang bekerja di sektor pariwisata.

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan (UU No. 28 Tahun 2009). Berkaitan dengan retribusi daerah, maka salah satu alternatif untuk meningkatkan PAD yaitu melalui retribusi pada sektor pariwisata yaitu pelayanan tempat rekreasi. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah.

Kabupaten Lombok Utara memang memiliki pesona alam yang indah. Hal tersebut mendukung bertumbuhnya usaha di bidang pariwisata. Secara umum Kabupaten Lombok Utara memiliki beberapa atraksi alam yang sangat mempesona. Gili Trawangan dengan pasir putih dan *under water scenery* yang memukau, Gili Meno yang eksotis dengan danau air tawar di tengah-tengah pulau, dan Gili Air dengan terumbu karang yang beraneka ragam. Disamping itu juga tentu ada banyak air terjun seperti Sendang Gile, Tiu Kelep, Sekeper, Tiu Teja, Kerta Gangga, dan lain-lain. Wisata alam yang menjadi primadona adalah wisata pantai yang terpusat di Tiga Gili di Kecamatan Pemenang. Salah satu barometer perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara adalah jumlah hotel dan restoran. Jumlah hotel pada tahun 2018 sebanyak 610 buah dengan kapasitas kamar sebanyak 5.528 kamar tidur. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel di Lombok Utara pada tahun 2018 mencapai 599.540 wisatawan yang didominasi oleh wisatawan mancanegara sebanyak 511.840 wisatawan. Jumlah wisatawan tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 1.003.821 wisatawan (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2019).

Hasil penelitian Sudarmana & Sudiarta (2020) dan Sipakoly (2016) menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula PAD yang akan diterima oleh pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian Safrita (2014) bahwa retribusi daerah baik itu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jayapura. Senada dengan hasil penelitian Yulastuti dan Dewi (2017), kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Denpasar pada tahun 2011-2015 mencerminkan kontribusi penerimaan retribusi daerah yang masih sangat kurang. Sartika dkk (2019) capaian retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kriteria efektif, namun dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil, dan dari kontribusinya terhadap PAD termasuk pada kriteria kurang baik. Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, peneliti termotivasi untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan PAD, tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019, serta prediksi penerimaan retribusi daerah dan PAD di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020-2022.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.
- 2) Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

- 1) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- 2) Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan ke pelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan retribusi dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan retribusi daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:134):

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx = Laju pertumbuhan retribusi daerah pertahun.

X_t = Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun sebelumnya

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2004:135).

Efektivitas adalah mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah dikatakan efektif apabila tingkat efektivitas lebih besar atau sama dengan 100%. Rumus pengukuran efektivitas (Halim, 2004:135).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}{Target Penerimaan Retribusi Daerah} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:141) nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Diatas 100% : Sangat efektif
- 100% : Efektif
- 90%-99% : Cukup efektif
- 75%-89% : Kurang efektif
- kurang dari 75% : Tidak efektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau uang iuran. Sedangkan definisi dari retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 Tahun 2009). Berdasarkan definisi tersebut apabila

dihubungkan dengan retribusi daerah maka kontribusi retribusi daerah merupakan sumbangan yang diperoleh dari pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi retribusi daerah dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan 100% (Halim, 2004:163). Untuk perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan rumus:

$$Pn = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn : kontribusi retribusi daerah tahun tertentu

Xn : realisasi retribusi daerah tahun tertentu

Yn : realisasi PAD tahun tertentu

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sudah baik atau belum, kriteria tersebut diantaranya adalah: (Halim, 2004)

- a. Diatas 50% : Sangat baik
- b. 40%-50% : Baik
- c. 30%-40% : Sedang
- d. 20%-30% : Cukup baik
- e. 10%-20% : Kurang baik
- f. kurang dari 10% : Sangat kurang baik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prediksi dapat diartikan sebagai ramalan atau prakiraan. Prediksi atau peramalan pada dasarnya proses pengestimasiian penerimaan retribusi pada periode mendatang yang dikaitkan dengan beberapa aspek. Prediksi atau peramalan memiliki arti penting baik bagi perusahaan maupun lembaga. Prediksi atau peramalan tersebut untuk memenuhi keperluan pembuatan perencanaan jangka panjang.

Prediksi merupakan peramalan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedang rencana, merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan dilakukan. Prediksi dilakukan hampir semua orang baik itu pemerintah, pengusaha maupun orang awam. Masalah yang diramalkan pun bervariasi seperti perkiraan curah hujan, kemungkinan pemenang dalam pilkada, skor pertandingan atau tingkat inflasi (Subagyo, 2013). Prediksi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan meminimumkan kesalahan meramal yang diukur dengan *Squared error*, *mean absolute*, dan sebagainya. Tahapan atau langkah-langkah melakukan peramalan antara lain :

1. Menentukan masalah yang akan dianalisa dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses analisis tersebut.
2. Menyiapkan data untuk diproses dengan benar
3. Menetapkan metode peramalan yang sesuai dengan data yang telah disiapkan.
4. Menerapkan metode yang sudah ditetapkan dan melakukan prediksi pada data untuk beberapa waktu kedepan.
5. Mengevaluasi hasil peramalan.

Metode *Least Square* (Kuadrat Kecil) adalah metode yang digunakan untuk menentukan persamaan *trend* data yang mencakup analisis *time series* dengan dua kasus data genap dan ganjil (Subagyo, 2013). Persamaan *trend* dengan metode *Least Square*, yaitu:

$$Y^{\wedge} = a + bX$$

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan trend dapat digunakan dua persamaan normal sebagai berikut :

$$\Sigma Y = n. a + b. \Sigma X$$

$$\Sigma XY = a. \Sigma X + b. \Sigma x^2$$

Keterangan :

Y^{\wedge} = data berkala (*time series*) = taksiran data trend

X = Variabel waktu (hari, minggu, bulan atau tahun)

a = nilai trend pada tahun dasar

b = rata-rata pertumbuhan nilai trend pada tiap tahun

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif karena memberikan gambaran tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan PAD, tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan prediksi penerimaan retribusi daerah dan PAD di Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa catatan jumlah target dan realisasi retribusi daerah dan PAD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Variabel penelitian adalah retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan (UU No. 28 Tahun 2009). Jumlah retribusi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jumlah PAD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah dan PAD

Tingkat pertumbuhan retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2013 dijadikan sebagai tahun dasar dalam menentukan tingkat pertumbuhan retribusi daerah tahun 2014. Pada tahun 2013 jumlah realisasi retribusi daerah sebesar Rp7.739.619.801, sedangkan pada tahun 2014 realisasi retribusi daerah sebesar Rp13.641.497.678. Artinya pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang positif (kenaikan) sebesar 76,3 persen dari tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada tahun 2015, jumlah realisasi retribusi daerah sebesar Rp23.461.718.564, artinya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 72 persen dari realisasi retribusi daerah tahun 2014. Sementara itu, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, realiasi retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif (penurunan) masing-masing sebesar 56,4 persen pada tahun 2016, 9 persen tahun 2017, 4,7 persen tahun 2018 dan penurunan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 55,3 persen.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan tahun 2016, penurunan retribusi daerah tahun 2016 disebabkan oleh penurunan retribusi dari pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, retribusi kendaraan bermotor, retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, dan retribusi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Sedangkan penurunan retribusi daerah tahun 2017 disebabkan oleh penurunan retribusi dari pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi fasilitas lainnya di lingkungan terminal, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, retribusi pelayanan jasa ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, dan retribusi pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Penurunan retribusi daerah tahun 2018 disebabkan oleh penurunan retribusi dari penyediaan pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar los, retribusi kendaraan bermotor, retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir, retribusi fasilitas lainnya di

lingkungan terminal, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, retribusi pelayanan jasa ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi pemberian izin trayek, dan retribusi pemberian izin usaha perikanan. Penurunan terbesar berasal dari retribusi pelayanan jasa ke pelabuhan karena pasca gempa pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak lagi melakukan penarikan retribusi di pelabuhan bangsal dan banyak obyek wisata pasca gempa tidak aktif kembali.

Sementara itu, tahun 2019 merupakan masa pemulihan bagi Kabupaten Lombok Utara pasca gempa. Penurunan retribusi daerah pada tahun 2019 disebabkan oleh penurunan retribusi dari pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, retribusi tempat rekreasi, retribusi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, dan retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Penurunan retribusi dari pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) disampaikan juga oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP KLU, Agus Tisno, S.Sos., melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja, Furqon, pada <https://www.suarantb.com/> bahwa pengurangan TKA pascagempa cukup signifikan. Sebelum gempa, jumlah TKA yang tercatat sejumlah 170 orang. Namun pascagempa, jumlahnya tersisa sekitar 36 orang.

Sementara itu tingkat pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang positif (kenaikan) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2013 dijadikan sebagai tahun dasar dalam menentukan tingkat pertumbuhan PAD tahun 2014. Pada tahun 2013 jumlah realisasi PAD sebesar Rp49.619.934.763, sedangkan pada tahun 2014 realisasi PAD sebesar Rp81.090.502.360. Artinya pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 63,4 persen dari tahun 2013. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 26,7 persen pada tahun 2015, 26,3 persen pada tahun 2016 dan 16,3 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13,2 persen dari tahun 2017 dan tahun 2019 kembali mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 12,4 persen. Penurunan PAD pada tahun 2018 disebabkan karena adanya penurunan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dari pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp92.645.659.869, namun pada tahun 2018 turun menjadi Rp68.816.145.279. Begitu pula dengan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2017 sebesar Rp9.305.407.983, namun pada tahun 2018 turun menjadi Rp8.864.449.689. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.073.723.177 namun pada tahun 2018 turun menjadi Rp3.793.981.094.

Penurunan PAD dari pajak daerah disampaikan juga oleh Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar dalam harian <https://www.antaraneews.com/>, bahwa dari 1.216 potensi pajak meliputi hotel, restoran, hiburan dan parkir, terdapat 456 potensi pajak yang tutup sejak bulan agustus sampai dengan desember 2018. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Manajemen Krisis Kepariwisata, Kementerian Pariwisata dalam Puspitasarie dkk (2019) bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang melalui pintu Bandara Internasional Lombok mengalami penurunan yang drastis. Kedatangan wisatawan pasca gempa Lombok dalam kurun waktu satu bulan (6 Agustus – 6 September 2018) seharusnya sebanyak 13.000 wisatawan, namun realisasi hanya 3.000 wisatawan.

Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah

Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2014 sebesar 114,4 persen, tergolong sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 89,1 persen dan 88,2 persen atau termasuk kategori kurang efektif. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 66,9 persen, 74 persen dan 39,9 persen atau termasuk kategori tidak efektif. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sartika dkk (2019) yang menemukan bahwa capaian retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016 termasuk pada

kriteria efektif. Sedangkan Yuliasuti dan Dewi (2017) juga menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Denpasar pada tahun 2011-2015 mencerminkan penerimaan yang sangat efektif.

Tingkat efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam merealisasikan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tidak efektifnya pemungutan retribusi daerah disebabkan karena belum maksimalnya pengelolaan retribusi daerah seperti kurangnya ketersediaan sarana pendukung penagihan retribusi daerah, belum optimalnya pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing SKPD lingkup kabupaten dan kurangnya koordinasi secara sinergis dengan SKPD Penghasil, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Sejalan dengan hasil penelitian Astini dkk (2017) bahwa penyebab tidak tercapainya target pemungutan retribusi adalah pemungutan retribusi yang belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 masing-masing sebesar 16,82 persen, 22,83 persen, 7,88 persen, 6,16 persen, 6,76 persen dan 2,69 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2014 termasuk kategori kurang baik, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2015 termasuk kategori cukup baik, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2016 sampai dengan 2019 termasuk kategori sangat kurang baik karena kurang dari 10 persen.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 sampai dengan 2019 berada pada kategori sangat kurang baik sampai kategori cukup baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sartika dkk (2019) yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016 termasuk pada kriteria kurang baik. Yuliasuti dan Dewi (2017) juga menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar pada tahun 2011-2015 mencerminkan kontribusi penerimaan retribusi daerah yang masih sangat kurang.

Prediksi Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD

Prediksi penerimaan retribusi daerah dan PAD tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa prediksi penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 masing-masing sebesar Rp20.726.638.765, Rp19.474.844.122, dan Rp18.223.049.480. Sementara itu prediksi penerimaan PAD untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 masing-masing sebesar Rp327.193.209.514, Rp342.948.257.802, dan Rp358.703.306.090. Prediksi penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diperoleh rata-rata penerimaan untuk 3 (tiga) tahun yakni Rp19.474.844.122 atau akan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 33 persen per tahun. Demikian halnya dengan prediksi penerimaan PAD untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diperoleh rata-rata penerimaan untuk 3 (tiga) tahun yakni Rp342.948.257.802 atau akan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 33 persen per tahun. Dengan melihat rata-rata prediksi penerimaan retribusi daerah dan PAD, maka kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 6 persen atau termasuk kriteria sangat kurang baik, walaupun dari sisi jumlah penerimaan retribusi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kisnawati dan Irianto (2016) bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Utara selama tahun 2009-2015 masih rendah dari sisi kuantitasnya, begitu pula dengan rata-rata estimasi penerimaan PAD untuk tahun 2016-2020 juga rendah walaupun diprediksikan penerimaan PAD dari segi persentase akan meningkat rata-rata sebesar 20 persen pertahun

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 76,3 persen dan tahun 2015 sebesar 72 persen. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, realiasi retribusi daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar 56,4 persen pada tahun 2016, 9 persen tahun 2017, 4,7 persen tahun 2018 dan penurunan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 55,3 persen.
2. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2014 sebesar 114,4 persen atau termasuk kategori sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 89,1 persen dan 88,2 persen atau termasuk kategori kurang efektif. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 66,9 persen, 74 persen dan 39,9 persen atau termasuk kategori tidak efektif.
3. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 masing-masing sebesar 16,82 persen, 22,83 persen, 7,88 persen, 6,16 persen, 6,76 persen dan 2,69 persen. Pada tahun 2014, retribusi daerah memiliki kontribusi kurang baik terhadap PAD, tahun 2015 memiliki kontribusi yang cukup baik, dan tahun 2016 sampai dengan 2019 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat kurang baik.
4. Prediksi penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diperoleh rata-rata penerimaan untuk 3 (tiga) tahun yakni Rp19.474.844.122 atau akan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 33 persen per tahun. Sementara itu prediksi penerimaan PAD diperoleh rata-rata penerimaan sebesar Rp342.948.257.802 atau akan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 33 persen per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Astini, Yuli., Rusdi., & RA Hannah Syabaneva. 2017. Pengawasan, Kesadaran Retribusi Serta Sarana dan Prasarana Sebagai Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Sampah Di Kabupaten Lombok Barat. *JAA*, Vol. 2, No. 1, hal: 62-75
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. 2019. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2019
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- <https://www.antaraneews.com/berita/934946/lombok-utara-pulihkan-456-potensi-pajak-terdampak-gempa>
- <https://www.suarantb.com/jumlah-tka-di-klu-berkurang/>
- Kisnawati, Baiq., & Irianto. 2016. Estimasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal valid*, Vol 13, No. 3, hal: 326-332
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014.
- . 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015
- . 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
- . 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
- . 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

- , 2019. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Safrita. 2014. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Future*, hal 102-114.
- Sartika, Dewi, Atika Ulfa, & Andre Ilyas. 2019. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, Volume 21 No. 1, hal: 32-53
- Sipakoly, Selly. 2016. Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, Vol 5, No. 1, hal: 32-43
- Subagyo, Pangestu. 2013. *Forecasting: Konsep dan Aplikasi*. Edisi Tiga Cetakan Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Sudarmana, I Putu Agus., & Gede Mertha Sudiarta. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 4, hal: 1338-1357
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yuliasuti, Ida Ayu Nyoman, & Ni Luh Putu Sandrya Dewi. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, Vol.7 No.1, hal: 91-102.

Perbandingan Struktur Modal Perusahaan Property Dan Kontruksi Bangunan Periode 2015-2019

Companies' Capital Structures and Pecking Order

13

Nialena yusniawati, Yuli Chomsatu, dan Suhendro
Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia
E-Mail : nialena0234@gmail.com

ABSTRACT

Capital structure is a comparison of own capital with foreign capital owned by each company. Capital alone can be divided into retained earnings and company ownership. Meanwhile, foreign capital is short-term debt or long-term debt. The good and bad conditions of the company can be determined through the capital structure. Through the capital structure, the company can allocate funds owned for appropriate business activities as well as useful for the continuity of the company. In general, factors that affect the company's capital structure include profitability, liquidity, company size, sales growth, and asset structure. This study aims to find out the different influences of capital structures on property companies and building construction. This research uses property and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The result of this study profitability affects the capital structure of property companies, while in building construction companies profitability has no effect on the capital structure. Liquidity in property companies affects the capital structure. This is the same as the result of building construction companies where liquidity affects the capital structure. In property companies the size of the company has an influence on the capital structure, as well as building construction companies that the variable size of the company affects the capital structure. Sales growth has an influence on the capital structure in property companies, while building construction companies sales growth has no effect on the capital structure. The structure of the property company's assets affects the capital structure. The same indicates that the asset structure of building construction companies affects the capital structure. The difference in the influence of the capital structure of property companies is influenced by profitability, liquidity, company size, sales growth, and asset structure. For the capital structure of building construction is influenced by liquidity, company size, and asset structure. As for variable profitability and sales growth in building construction companies has no effect on the capital structure.

Keywords: *profitability, liquidity, company size, sales growth, asset structure, capital structure*

ABSTRAK

Struktur modal merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Modal sendiri dapat dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan modal asing adalah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Baik buruknya perusahaan dapat ditentukan melalui struktur permodalan. Melalui struktur permodalan, perusahaan dapat mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kegiatan usaha yang sesuai serta bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan antara lain profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh struktur modal pada perusahaan properti dan konstruksi bangunan. Penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan properti, sedangkan pada perusahaan konstruksi bangunan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Likuiditas pada perusahaan properti mempengaruhi struktur permodalan. Hal ini sama

Submitted:
DESEMBER 2020

Accepted:
MARET 2021

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 13-22
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

dengan hasil perusahaan konstruksi bangunan dimana likuiditas mempengaruhi struktur permodalan. Pada perusahaan property ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal, demikian juga halnya dengan perusahaan konstruksi bangunan yang variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan properti, sedangkan pertumbuhan penjualan pada perusahaan konstruksi bangunan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Struktur aset perusahaan properti mempengaruhi struktur permodalan. Hal yang sama menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan konstruksi bangunan berpengaruh terhadap struktur permodalan. Perbedaan pengaruh struktur modal pada perusahaan properti dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset. Untuk struktur modal pada konstruksi gedung dipengaruhi oleh likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur aset. Sedangkan untuk variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan konstruksi bangunan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Kata Kunci: profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, struktur aset, struktur modal

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia telah berkembang pesat, dengan kondisi tersebut perusahaan harus lebih kompetitif dalam bersaing untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham dan meraih keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dengan begitu perusahaan dapat mengantisipasi persaingan tersebut. Upaya untuk mengantisipasi persaingan ini merupakan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Karena setiap perusahaan membutuhkan dana internal maupun eksternal untuk memenuhi kebutuhan dana dan mengembangkan usaha.

Chandrarin & Cahyaningsih (2018) menjelaskan bahwa struktur modal menunjukkan sebuah proporsi sumber pembiayaan perusahaan antara modal dengan hutang. Struktur modal adalah perbandingan modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Modal sendiri dapat dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan, modal asing yaitu hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Menurut Brigham & Houston (2011) menjelaskan bahwa untuk mengembangkan usaha perusahaan membutuhkan modal tambahan yang berupa hutang maupun ekuitas. Kondisi baik maupun buruk perusahaan dapat ditentukan melalui struktur modal. Dengan melalui struktur modal, perusahaan dapat mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kegiatan bisnis yang sesuai serta berguna bagi kelangsungan perusahaan. Brigham & Houston (2011) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu stabilitas penjualan, struktur aktiva, *operating leverage*, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan antara lain profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Perusahaan yang memiliki laba lebih banyak, sehingga perusahaan akan cenderung memilih dana internal atau modal sendiri. Likuiditas adalah kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi tidak akan menggunakan dana eksternal untuk membiayai kegiatan usaha, karena perusahaan akan memilih untuk menggunakan dana internal. Ukuran perusahaan adalah besar dan kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki dana lebih, maka perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh pinjaman. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan dari tahun ke tahun. Perusahaan

yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi, sehingga perusahaan akan menuntut produksi yang tinggi juga. apabila sumber dana perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan usahanya, maka perusahaan akan menggunakan hutang untuk membiayai produksi. Struktur aset adalah perbandingan antara aset tetap dengan total aset yang dapat menunjukkan seberapa besar alokasi dana untuk setiap aset. Perusahaan yang memiliki struktur aset besar, maka perusahaan menggunakan hutang lebih kecil.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan property karena berdasarkan observasi awal perusahaan terdapat ketidaksesuaian antara observasi dengan teori yang digunakan. Dengan adanya perbedaan hasil tersebut sehingga terjadi gap riset dan dapat dilakukan kembali penelitian. Selain itu, Penulis memilih perusahaan konstruksi bangunan dalam penelitian ini. Karena perusahaan konstruksi bangunan mengalami perkembangan pada pembangunan negara besar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan tentu saja melibatkan perusahaan konstruksi bangunan.

Penelitian ini menggunakan teori *pecking order*. Teori *pecking order* ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984. Setelah itu, teori tersebut disempurnakan oleh Myers dan Majluf pada tahun yang sama. Teori *pecking order* menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profit tinggi mempunyai tingkat hutang yang rendah. Dalam teori ini terdapat urutan pendanaan perusahaan yaitu yang pertama dana yang berasal dari dalam perusahaan (internal) berupa laba ditahan, yang kedua dana eksternal yang berupa hutang, untuk yang terakhir dari penerbitan saham baru.

Struktur permodalan adalah pendanaan tetap yang meliputi hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham (Weston & Copeland, 1999). Menurut Munawir (2007) menyatakan bahwa modal merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam modal saham, dimana keuntungannya atau laba ditahan yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutangnya. Munawir (2007) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Profitabilitas adalah daya perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Menurut Husaeni (2018) profitabilitas yaitu membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Horne & Wachowicz (2012) menyatakan bahwa likuiditas adalah suatu rasio yang diperlukan untuk mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang dimiliki perusahaan. sumber daya jangka pendek ini digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

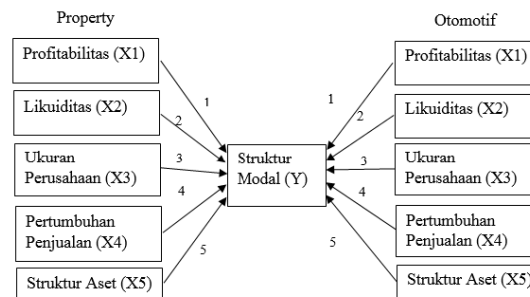
Riyanto (2001) berpendapat bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah variabel yang dapat menggambarkan seberapa besar dan kecil perusahaan berdasarkan total aktiva, log aset, dan lain-lain. Menurut Harahap (2016) pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara jumlah penjualan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan adalah mencerminkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Struktur aset adalah rasio untuk mencerminkan proporsi aktiva tetap dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Puhirta & Yudiantoro, 2018). Struktur aset merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva.

Hipotesis

- H1_a : Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H1_b : Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H2_a : Likuiditas berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H2_b : Likuiditas berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H3_a : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

- H3_b : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H4_a : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H4_b : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H5_a : Struktur Aset berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H5_b : Struktur Aset berpengaruh terhadap Struktur Modal pada perusahaan Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
- H6 : Terdapat perbedaan pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset terhadap struktur modal pada perusahaan Property dan Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

Model Penelitian Empirik



Gambar 1: Model Penelitian Empirik

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah dari objek yang hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan property dan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Struktur modal yaitu struktur atau perbandingan antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang, maka struktur modal bagian dari komposisi keuangan (Husaeni, 2018). Rumus DER sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$$

Variabel Independen

a. Profitabilitas

Munawir (2007) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Profitabilitas adalah daya perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rumus ROA antara lain:

$$ROA = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$$

b. Likuiditas

Menurut Horne & Wachowicz (2012) menyatakan bahwa likuiditas adalah suatu rasio yang diperlukan untuk mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut Fahmi (2015) current rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel yang dapat menggambarkan seberapa besar dan kecil perusahaan berdasarkan total aktiva, log aset, dan lain-lain. Perumusan log alam (LN) total aset adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

d. Pertumbuhan Penjualan

Menurut Harahap (2016) pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara jumlah penjualan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Dalam observasi (Rahmadani et al., 2019) pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan di bawah ini:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan (t)} - \text{Penjualan (t - 1)}}{\text{Penjualan (t - 1)}}$$

e. Struktur Aset

Menurut Puhirta & Yudiantoro (2018) struktur aset adalah rasio untuk mencerminkan proporsi aktiva tetap dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus dari struktur aset sebagai berikut:

$$\text{Struktur Aset} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aktiva}}$$

Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam observasi ini, data sekunder didapat dari laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan property dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Instrumen penelitian ini menggunakan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan aplikasi IBM SPSS 21.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berisi tentang minimal, maksimal, mean, sum, standar deviasi, variance, range, dan sebagainya. Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk mengukur distribusi data dengan cara skewness dan kurtosis.

Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk meramalkan suatu variabel dependen berdasarkan variabel independen.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y : Struktur Modal (DER)
- a : Konstanta
- b₁b₂b₃b₄b₅ : Koefisien Regresi
- X₁ : Profitabilitas (ROA)
- X₂ : Likuiditas (CR)
- X₃ : Ukuran Perusahaan
- X₄ : Pertumbuhan Penjualan
- X₅ : Struktur Aset
- e : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Jumlah sampel yang digunakan pada semua variabel adalah 107 sampel. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu struktur modal (DER), jumlah sampel (N) adalah 107, nilai

minimumnya sebesar 0,066, nilai maximum 2,197, nilai mean 0,76418, dan nilai standar deviasi adalah 0,511478. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas (ROA) yang memiliki nilai minimum 0,000, nilai maximum 0,124, nilai mean 0,04484 dan nilai standar deviasi 0,033470. Likuiditas (CR) mempunyai nilai minimum 0,618, nilai maximum 5,766, nilai mean 2,04536 serta nilai standar deviasi 1,153363. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum 25,892, nilai maximum 31,628, nilai mean 29,51296, dan nilai standar deviasi 1,324662. Pertumbuhan penjualan (SG) yang mempunyai nilai minimum -0,912, nilai maximum 0,593, nilai mean -0,06465 serta nilai standar deviasi 0,358660. Struktur aset (AST) memiliki nilai minimum 0,000, nilai maximum 0,176, nilai mean 0,05002, dan nilai standar deviasi 0,043929.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Property

Variables	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	107	0,066	2,197	0,76418	0,511478
ROA	107	0,000	-0,124	0,04484	0,033470
CR	107	0,618	5,766	2,04536	1,153363
SIZE	107	25,892	31,628	29,51296	1,324662
SG	107	-0,912	0,593	-0,06465	0,358660
AST	107	0,000	0,176	0,05002	0,043929
Valid N (listwise)	107				

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kontruksi Bangunan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	35	0,689	4,343	1,88939	1,048277
ROA	35	0,008	0,247	0,5271	0,043696
CR	35	1,002	2,368	1,51372	0,314913
SIZE	35	28,322	32,454	30,01285	1,326375
SG	35	-0,357	0,901	0,09868	0,258185
AST	35	0,033	0,178	0,09308	0,049933
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 2, jumlah sampel yang digunakan semua variabel yaitu 35 sampel. Variabel dependennya merupakan struktur modal (DER) yang mempunyai nilai minimum 0,689, nilai maximum 4,343, nilai mean 1,88939 dan standar deviasi 1,048277. Variabel independennya yaitu profitabilitas (ROA), nilai minimum 0,008, nilai maximum 0,247, nilai mean 0,05271, serta nilai standar deviasinya 0,43696. Likuiditas (CR) memiliki nilai minimum 1,002, nilai maximum 2,368, nilai mean 1,51372, dan standar deviasi 0,314913. Ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai nilai minimum 28,322, nilai maximum 32,454, nilai mean 30,01285, serta nilai standar deviasi 1,326375. Pertumbuhan penjualan (SG) memiliki nilai minimum -0,357, nilai maximum 0,901, nilai mean 0,09868, dan standar deviasi 0,258185. Struktur aset (AST) nilai minimumnya 0,033, nilai maximum 0,178, nilai mean 0,09308, dan standar deviasi 0,049933.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini, untuk uji normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pada perusahaan property data terdistribusi normal atau uji normalitas telah terpenuhi. Hasil ini sama dengan perusahaan kontruksi bangunan yang juga terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui uji multikolinieritas dengan melihat melalui nilai *tolerance* dan *inflation factor (VIF)*. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,1, ini menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas (Ghozali, 2013). Hasilnya tidak terjadi multikolinieritas baik property maupun kontruksi bangunan. Dalam observasi ini, menggunakan uji Durbin Watson. Hasilnya kedua perusahaan tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini uji

heteroskedastisitas menggunakan teknik uji koefisien korelasi Spearman rho. Property dan konstruksi bangunan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi Linier Berganda

Pada property yang mempengaruhi struktur modal yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset. Sedangkan konstruksi bangunan yaitu likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur aset. Maka modelnya:

$$DER_{Property} = - 1,347 - 2,644 ROA - 0,089 CR + 0,076 SIZE + 0,593 SG + 4,231 AST + e$$

$$DER_{Kontruksi\ Bangunan} = - 6,892 + 1,115 ROA - 1,294 CR + 0,382 SIZE - 0,393 SG - 7,867 AST + e$$

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pada perusahaan property F hitung > F tabel dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan struktur aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Pada konstruksi bangunan F hitung > F tabel dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal.

Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

F Hitung	F Tabel	Sig.	Syarat	Keterangan
Property				
20,766	>2,304	0,000	< 0,05	Model Layak
Kontruksi Bangunan				
20,767	>2,545	0,000	< 0,05	Model Layak

Sumber: Data sekunder yang diolah

Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	t Hitung	t Tabel	Sig.	Syarat	Hasil
property					
H1 _a	-2,367	> -1,983	0,020	< 0,05	Diterima
H2 _a	-2,754	> -1,983	0,007	< 0,05	Diterima
H3 _a	2,414	> 1,983	0,018	< 0,05	Diterima
H4 _a	5,488	> 1,983	0,000	< 0,05	Diterima
H5 _a	4,721	> 1,983	0,000	< 0,05	Diterima
Kontruksi Bangunan					
H1 _b	0,483	> 2,045	0,635	< 0,05	Ditolak
H2 _b	-3,463	> -2,045	0,002	< 0,05	Diterima
H3 _b	4,211	> 2,045	0,000	< 0,05	Diterima
H4 _b	-1,004	> -2,045	0,323	< 0,05	Ditolak
H5 _b	-3,983	> -2,045	0,000	< 0,05	Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Perusahaan property nilai R-squared sebesar 0,383 artinya kelima variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 38,3% terhadap struktur modal, sedangkan variabel sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Sedangkan konstruksi bangunan nilai R-squared sebesar 0,825 artinya kontribusi kelima variabel tersebut terhadap struktur modal sebesar 82,5%, sedangkan variabel sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal

Berdasarkan pengujian data dan asumsi, dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan property. Hal ini sejalan dengan penelitian Chandrarin & Cahyaningsih (2018). Maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah struktur modalnya. Hasil pengujian data dan hipotesis untuk perusahaan konstruksi bangunan dapat diketahui bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Septiani & Suaryana (2018). Perusahaan telah menetapkan struktur permodalan berdasarkan besarnya keuntungan, pengorbanan dari penggunaan dukungan hutang Operasi perusahaan.

Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal

Berdasarkan hasil pengujian data dan asumsi dapat diketahui bahwa likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan property. Sedangkan hasil ini sama dengan perusahaan konstruksi bangunan dimana likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Pertiwi & Darmayanti (2018). Seiring dengan peningkatan hutang jangka panjang, hal itu akan mengurangi penggunaan hutang jangka panjang. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka perusahaan akan mengurangi penggunaan Hutang jangka panjang, menghasilkan likuiditas dan Struktur Modal.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal

Berdasarkan hasil pengujian data dan asumsi dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan property dan konstruksi bangunan. Hal ini sesuai dengan penelitian Septiani & Suaryana (2018). Semakin tinggi dan tinggi Semakin besar perusahaan, semakin baik struktur permodalan perusahaan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal

Berdasarkan output pengujian data dan hipotesis diketahui bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan property. Hasil ini sejalan dengan observasi Chandrarin & Cahyaningsih (2018). Semakin tinggi penjualan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapat perusahaan. Hasil pengujian data dan hipotesis pada perusahaan konstruksi bangunan menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini sesuai dengan penelitian Husaeni (2018). Dalam hal ini investor tidak hanya harus mempertimbangkan ukuran perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan prospek perusahaan, analisa bisnis dan faktor lain untuk membeli saham atau berinvestasi

Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal

Menurut output dari pengujian data dan hipotesis menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan property. Sementara itu, hasil tersebut sama dengan perusahaan konstruksi bangunan dimana struktur aset juga berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan observasi Cipto et al. (2019). Artinya jika semakin besar aktiva tetap perusahaan maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk menggunakan hutang, sehingga struktur modal perusahaan juga akan semakin besar.

Perbedaan Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Struktur Aset terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Property dan Kontruksi Bangunan

Berdasarkan dari hasil pengujian data dan hipotesis untuk variabel profitabilitas pada perusahaan property berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan pada konstruksi bangunan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Likuiditas pada property dan konstruksi bangunan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada perusahaan property dan konstruksi bangunan, ukuran perusahaan sama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil uji pada perusahaan property pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan di konstruksi bangunan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan property dan konstruksi bangunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Awaluddin et al. (2019).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian ini profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan property, sedangkan pada perusahaan konstruksi bangunan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
2. Likuiditas pada perusahaan property dan konstruksi bangunan berpengaruh terhadap struktur modal.
3. Pada perusahaan property ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal, begitu pun perusahaan konstruksi bangunan.
4. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan property, sedangkan perusahaan konstruksi bangunan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
5. Struktur aset perusahaan property serta konstruksi bangunan mempengaruhi struktur modal.
6. Pada perbedaan pengaruh struktur modal perusahaan property dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset. Untuk struktur modal konstruksi bangunan dipengaruhi oleh likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur aset. Sedangkan untuk variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan konstruksi bangunan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, M., Amalia, K., Sylvana, A., & Wardhani, R. S. (2019). Perbandingan Pengaruh Return On Asset, Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Penjualan Dan Managerial Ownership Terhadap Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Domestik Di BEI. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 113–128. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.7965>
- Brigham, F., & Houston, J. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi 11 ed)*. Salemba Empat.
- Chandrarin, G., & Cahyaningsih, D. S. (2018). Identifikasi Struktur Modal Melalui Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.26905/afr.v1i1.2246>
- Cipto, P. K. A., Choeruding, A., & Suryanti, Y. (2019). The Factors That Affecting Structure Capital In Manufacturing Companies: The Study In Indonesia Of 2012-2014. *International Journal of Information, Business and Management*, 11(3), 227–234.
- Effendy, M., & Pamungkas, A. D. (2018). Analisis Beta Saham Harian Terhadap Imbal Saham Harian Sebuah Studi Kasus Saham-Saham LQ45 pada Periode Februari–Juli 2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(1), 33-42.
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivriate dan Program IBM SPSS 21 (Edisi 7 ed.)*. Badan Penerbit UNDIP.
- Harahap, S. . (2016). *Analisis Kritis Manajemen Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Horne, J. C. V., & Wachowicz, J. M. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Husaeni, U. A. (2018). Determinants Of Capital Structure In Companies Listed In The Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 443–456.
- Laksono, M. A., & Hidayat, L. (2018). Analisis Manajemen Aset. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 109-116.
- Munawir, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta.
- Pertiwi, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Aktiva Dan Kebijakan Dividen Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Di Bei. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(6), 3115–3143. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i06.p10>
- Puhirta, Y. A., & Yudiantoro, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Struktur Aset Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada

Perusahaan real estate Dan Properti Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014). *Kajian Akuntansi*, 13(2), 144–155.

Rahmadani, Ananto, R. P., & Andriani, W. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividend Payout Ratio Terhadap Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Property Dan real estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017). *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 82–103.

Riyanto. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE.

Septiani, N. P. N., & Suaryana, I. G. N. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Aset, Risiko Bisnis dan Likuiditas pada Struktur Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 1682–1710. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p02>

Setiawan, H., & Lisias, V. (2009). Evaluasi atas harga pokok produk sampingan dalam kaitannya dengan perhitungan laba perusahaan (study kasus pada CV. Morinda House Bogor). *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 9(2), 85-91.

Weston, J. F., & Copeland, T. E. (1999). *Manajemen Keuangan*. Binarupa Aksara.

Pengaruh Kompetensi Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit

*Auditing Quality,
Competency and
Skepticism*

Jihan Astrid Savira, Rahmawati, Abid Ramadhan
Universitas Muhammadiyah Palopo
E-Mail: jihanastridsvv@gmail.com

23

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of professional competence and skepticism on audit quality. The population and sample of this study were auditors who worked at the Inspectorate Offices of Luwu Raya (Palopo City, Luwu Regency, North Luwu Regency, East Luwu Regency). The sampling technique used a census technique. The sample in this study was auditors who worked at the Inspectorate Office throughout Luwu Raya. The data collection method used a questionnaire. Kueisoner research uses a Likert scale. Data analysis using multiple linear regression analysis. This research is expected to be used as input and consideration for auditors and as a field of information for further research. The results showed that competence and skepticism had a significant positive effect on auditor quality.

**Submitted:
DESEMBER 2020**

**Accepted:
MARET 2021**

Keywords: *competency, skepticism, audit quality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi profesional dan skeptisisme terhadap kualitas audit. Populasi dan sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Luwu Raya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian Kueisoner menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi auditor dan sebagai bidang informasi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan skeptisisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas auditor.

Kata Kunci: kompetensi, skeptisisme, kualitas audit.

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu di raih sebuah perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas sebuah perusahaan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor internal harus mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar, relevan dan dapat dipercaya karena laporan keuangan berguna untuk para pengambil keputusan serta dijadikan sebagai pedoman perbaikan manajemen dan perusahaan.

Menurut (Akbar 2014) auditor internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi. Pada organisasi sektor publik, yang bertindak sebagai auditor internal salah satunya yaitu Inspektorat. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah, Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 23-30
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat sebagai auditor internal diharapkan mampu memberikan kontribusi yang penting sesuai fungsinya sebagai pemeriksa, dengan melaksanakan rencana audit dengan sikap yang professional. Selain itu juga dapat memberikan informasi berupa temuan-temuan audit yang dapat dipercaya sebagai cerminan kualitas auditnya. Audit yang berkualitas akan memberikan informasi yang memadai kepada organisasi pemerintah yang diperiksa tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan dan penyimpangan peraturan perundang-undangan *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara* (2007) yang terjadi dalam sebuah organisasi.

Berbagai pandangan mengenai kualitas audit juga telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut De Angelo (1981) dalam (Akbar 2014) menjelaskan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probability*) seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan auditor akan menemukan salah saji akan tergantung pada pemahaman (kompetensi) auditor atas pengauditan yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit yang dihasilkan. Menurut (Pertiwi 2013) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Beberapa pandangan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi klien berhak melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dan berpedoman pada standar auditing. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit agar tercipta sebuah kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan yang telah diaudit. Ketika kualitas auditor rendah maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan saat mengaudit laporan keuangan.

Beberapa kasus skandal kecurangan manipulasi laporan keuangan rupanya masih terus menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini. Seperti kasus yang masih hangat terjadi (Detik.com.2019) yaitu mantan kepala Inspektorat Bojonegoro Syamsul Hadi divonis 5 tahun penjara karena telah menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan Negara Rp. 1,7 miliar. Syamsul dijadikan tersangka tunggal oleh penyidik kejar karena telah membuat kebijakan anggaran pengawasan internal. Namun kebijakan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang. Sebagai kepala inspektorat, Syamsul Hadi dinilai tidak memberi teladan kepada masyarakat dan tidak professional dalam mengelola keuangan Negara karena menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya yang diberikan untuk melanjutkan kejahatan. Kasus lainnya yang cukup hangat dan menarik dimuat oleh media online (Tirto.id.2019) yaitu kasus perusahaan multifinance PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Dalam kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP) Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan indikasi tersebut membuktikan bahwa kecurangan keuangan masih terus terjadi hingga saat ini. Akibatnya timbul keraguan yang mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan yang sangat mengharapkan laporan keuangan audit yang berkualitas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas auditor diantaranya kompetensi dan skeptisme professional.

Beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompetensi dan skeptisme profesional. Hasil

penelitian menurut Cahyono, dkk (2015), (Abdika, 2015) dan (Datrini, 2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hasil ini cenderung disebabkan karena kompetensi merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor, semakin tinggi pengetahuan auditor tentang audit maka akan mempermudah seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. sementara berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyani, dkk (2105) Ningsih, Sofianti (2015) dan Mutiara (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena kurangnya implementasi atas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

Hasil penelitian menurut (Abdika 2015), (Jaya et al., 2016) dan (Datrini 2017) menyimpulkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sikap skeptis akan mampu membuat auditor lebih berhati-hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari auditee, sehingga dengan hal tersebut membuat kualitas audit semakin baik. Sedangkan menurut penelitian Nandari & Latrini (2015), Firmansyah (2018) dan Tawakkal (2019) hal ini disebabkan karena auditor kurang bersikap cermat dan seksama dalam melaksanakan tugas audit sehingga sikap skeptisme yang dimiliki oleh auditor relatif rendah.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kompetensi dan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat se-Luwu Raya. Manfaat dalam penelitian ini Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mendalam tentang Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat se-Luwu Raya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang analisis itu sendiri. Adapun manfaat praktis Bagi penulis, menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman penulis mengenai Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit dan bagi pihak perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk melihat pengaruh variabel *independent* dan terhadap variabel *dependent*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat se-Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 91 auditor di Inspektorat se-Luwu Raya. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel karena relatif kecil, sampel dalam penelitian ini merupakan auditor yang ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu sebanyak 55 auditor. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel karena pengambilan sampel relatif kecil.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada auditor yang berada pada Kantor Inspektorat se-Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur). Metode ini digunakan karena wilayah penelitian masih berada dalam jangkauan peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuisioner yang disebarkan secara langsung kepada responden. Kuisioner menggunakan Skala Likert lima poin yaitu: Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1).

Pengembangan hipotesis

Hubungan Kompetensi dan Kualitas Audit. Auditor diharapkan mampu mempunyai kompetensi yang memadai sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk

mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Auditor yang berkompenten adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Elfarini 2007) dalam Akbar (2014). Pengetahuan dan lama pengalaman bekerja adalah faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan pengalaman, kenyataan menunjukkan semakin menunjukkan semakin lama seseorang bekerja dan semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seseorang auditor yang memiliki kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) yang memadai akan lebih mengetahui dan memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Kompetensi dan Kualitas Audit menunjukkan bahwa Kompetensi dan Kualitas Hasil Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan penelitian ini dilakukan oleh Furiady & Kurnia (2015), Cahyono, dkk (2015) dan (Abdika, 2015).

H₁: Diduga kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Hubungan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit. Skeptisme Profesional adalah sikap (*attitude*) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI 2011). Seseorang auditor (pemeriksa) tidak boleh menganggap bahwa manajemen organisasi yang diperiksa tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi. Seorang auditor perlu menerapkan sikap skeptisme profesionalnya selama pemeriksaan, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum atau pelanggaran peraturan. Penerapan skeptisme profesional oleh auditor secara memadai dalam setiap pemeriksaan membawa dampak tercapainya hasil audit yang berkualitas. Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Skeptisme Profesional dan Kualitas Audit menunjukkan bahwa Skeptisme Profesional dan Kualitas Hasil Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan penelitian ini dilakukan oleh dan Jaya, et al. (2016).

H₂: Diduga skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment person correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item - Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Hasil Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketetapan untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* > 0,60. Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki

nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kompetensi	X _{1.1}	0,774	0,2656	Valid
	X _{1.2}	0,801	0,2656	Valid
	X _{1.3}	0,687	0,2656	Valid
	X _{1.4}	0,585	0,2656	Valid
	X _{1.5}	0,703	0,2656	Valid
	X _{1.6}	0,770	0,2656	Valid
Skeptisme Profesionalisme	X _{2.1}	0,693	0,2656	Valid
	X _{2.2}	0,776	0,2656	Valid
	X _{2.3}	0,756	0,2656	Valid
	X _{2.4}	0,718	0,2656	Valid
	X _{2.5}	0,796	0,2656	Valid
	X _{2.6}	0,664	0,2656	Valid
Kualitas Audit	Y ₁	0,835	0,2656	Valid
	Y ₂	0,799	0,2656	Valid
	Y ₃	0,612	0,2656	Valid
	Y ₄	0,811	0,2656	Valid
	Y ₅	0,597	0,2656	Valid
	Y ₆	0,834	0,2656	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kompetensi (X ₁)	0,809	0,60	Reliabel
Skeptisme Profesional (X ₂)	0,838	0,60	Reliabel
Kualitas Audit (Y)	0,822	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengaruh variabel independen diantaranya kompetensi dan skeptisme profesional terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Hasil dari model regresi dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,643	4,017		2,151	,038
Kompetensi	1,026	,242	,473	4,239	,000
Skeptisme Profesional	,580	,186	,348	3,117	,003

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 2020

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen diungkapkan oleh rumus berikut:

$$Y = 19,751 + 1,026 X_1 + 0,580 X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Kualitas Audit
- b : Konstanta
- e : Standar error
- x_1 : Kompetensi
- x_2 : Skeptisme Profesional

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial seberapa besar pengaruh antara satu variabel independen dengan variabel dependennya. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka berarti suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Variabel independen meliputi Kompetensi dan Skeptisme Profesional, variabel dependennya yaitu Kualitas Audit. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 3 diatas, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Uji t antara Kompetensi dengan Kualitas audit menunjukkan hasil $t_{hitung} 4,239 > t_{tabel} 1,647$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka diperoleh bahwa Kompetensi Secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
- b. Uji t antara Skeptisme Profesional dengan Kualitas Audit menunjukkan hasil $t_{hitung} 3,117 > t_{tabel} 1,674$ dengan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$, maka diperoleh bahwa Skeptisme Profesional secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut hasil olah data untuk koefisien determinasi.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.506	.487	3.31276

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 2020

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan R^2 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,487 atau 48,7%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang kuat antara variabel Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit. Untuk sisanya sebesar 51,3% dijelaskan pada faktor-faktor diluar model analisis.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit mendukung hipotesis pertama yang menyatakan “kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit”. Berdasarkan hasil uji hipotesis dimana kompetensi audit menunjukkan hasil $t_{hitung} 4,239 > t_{tabel} 1,647$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka diperoleh Kompetensi Secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin kuat dan tinggi Kompetensi auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit sehingga hal ini akan berpengaruh baik terhadap hasil pemeriksaan auditor. Penelitian ini berhubungan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu bersifat rasional. Perilaku seseorang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu sehingga sikap dan karakteristik mampu menghadapi situasi di segala lingkungan. Teori atribusi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dalam penelitian ini variabel kompetensi merupakan faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit dimana seorang auditor harus memiliki kompetensi yang memadai sehingga membantu dalam menghadapi kegiatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Disamping itu, seorang auditor harus memiliki pengalaman dan pengetahuan agar lebih terampil dalam mengerjakan proses audit dan menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Furiady & Kurnia, 2015), Abdika (2015) dan penelitian Datrini (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kualitas audit

Hasil penelitian pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas hasil audit mendukung hipotesis pertama yang menyatakan “skeptisme profesional berpengaruh

terhadap kualitas audit". Berdasarkan hasil uji hipotesis dimana skeptisme Audit menunjukkan hasil $t_{hitung} 3,117 > t_{tabel} 1,674$ dengan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$, maka diperoleh bahwa Skeptisme Profesional secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin kuat dan tinggi Skeptisme Profesional seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit sehingga hal ini akan berpengaruh baik terhadap hasil pemeriksaan auditor. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Variabel skeptisme profesional merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kualitas audit, dimana auditor yang skeptis memiliki sikap yang selalu mempertanyakan setiap kejadian yang dihadapinya, sehingga muncul rasa ragu dan ingin mencari tahu lebih dalam mengenai sesuatu yang dikerjakannya. Dengan demikian, skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh seorang auditor untuk menjalankan proses pengauditan yang dapat mendeteksi dan mencegah kemungkinan kecurangan yang akan terjadi, dengan kemampuan skeptisme yang tinggi tentu saja akan menghasilkan proses audit yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdika 2015), (Jaya et al., 2016) dan (Datrini 2017) yang menyatakan bahwa skeptise profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai kompetensi dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat se-Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur) maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi dan Skeptisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat se-Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdika, C. L. (2015). *Terhadap Kualitas Audit Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Republik Indonesiadan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Perwakilan Provinsi*. 2(2), 1–15.
- Firmansyah, A. (2018). Pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme Profesional, akuntabilitas, fee audit dan Objektivitas terhadap kualitas audit (Doctoral dissertation, Stie Perbanas Surabaya).
- Budiman, H., Yusnaini, Y., & Relasari, R. (2019). Pengaruh Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2), 139–150.
- Cahyono, A. D., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2015). Pengaruh Kompetensi , Independensi , Obyektivitas , Kompleksitas Tugas , Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit. ISSN: 2088-7469. *Malang : Jurnal Reformasi*, Vol. 5(No. 1), 1–12.
- Datrini, N. L. A. S. L. K. (2017). Pengaruh Skeptisme Profesional , Independensi, Kompetensi, Etika, Dan Role Stress Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. *Jurnal Krisna (Kumpulan Riset Akuntansi)*, 9(2301–8879), 1–14.
- Furiady, O., & Kurnia, R. (2015). The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability and Objectivity towards Audit Quality. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 328–335.
- Furiady, Olivia & Kurnia, Ratnawati (2015) *The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability, and Objectivity towards Audit Quality. Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia.*
- <https://m.detik.com>.(2019).

- <https://tirto.id>. (2019)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba 4, Jakarta.
- Jaya, T. E., Irene, & Choirul. (2016). Skepticism, Time Limitation of Audit, Ethics of Professional Accountant and Audit quality (Case Study in Jakarta, Indonesia). *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(3), 173–182.
- Knoers dan Haditono. 1999. “*Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*”. Cetakan Ke-12. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kusharyanti 2003. “Temuan Penelitian Mengenai Kualitas Audit dan Kemungkinan Topik Penelitian di Masa Datang”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Mutiara, I. (2018). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 1(2), 33–39.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. PT. Salemba Empat. Jakarta
- Nandari, A., & Latrini, M. (2015). Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi, Penerapan Kode Etik, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 164–181.
- Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi Dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Audit. (2008). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* |, 21(2), 181–198.
- Pertiwi, R. A. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Sumatera). *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 2–3.
- Robbins, Stephen and Judge, T. (2014). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Scully, S.G. 1993. The Effect of Audit Team Structure and Task Complexity on Auditor Confidence. Western Australia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Tjun, L. T., Marpaung, E. I., & Setiawan, S. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 4 (1).
- Tresno Eka Jaya, Irene & Choirul.(2016). *Skepticism, Time Limitation of Audit, Ethics of Professional Accountant and Audit Quality Case Study in Jakarta, Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research*. Vol 5(3). 173-182

Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI

*Companies
Value and Tax
Avoidance*

Sri Yuliandana, Junaidi, Abid Ramadhan
Universitas Muhammadiyah Palopo
E-Mail: syuliandana35@gmail.com

31

ABSTRACT

This study is a quantitative study that aims to the effect of tax avoidance on firm value in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2018 period. The population in this study were manufacturing companies listed and listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2018 period, totaling 117 companies. The sampling technique in this study was purposive sampling, in order to obtain 25 sample companies. The method used in analyzing the effect of independent variables on the dependent in this study is panel data regression analysis using Eviews 10 software. The results show that tax avoidance has a negative and insignificant effect on firm value. This shows that the higher the tax avoidance done by the company, the lower the firm value. The limitation in this study is that it does not include elements of other variables outside of tax avoidance which may affect firm value.

**Submitted:
DESEMBER 2020**

**Accepted:
MARET 2021**

Keywords: *tax avoidance, firm value, indonesia stock exchange*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 yang berjumlah 117 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 25 perusahaan sampel. Metode yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan. Batasan dalam penelitian ini adalah tidak memasukkan unsur variabel lain di luar penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Kata Kunci: penghindaran pajak, nilai perusahaan, bursa efek indonesia

PENDAHULUAN

Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan setiap periodenya. Deriyarso (2014) menyatakan bahwa peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai bagi perusahaan yang sudah terbuka (*go public*). Tujuan meningkatkan nilai perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai laba yang direncanakan serta dapat meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan nilai dari pendapatan yang diinginkan dimasa yang akan datang dan indikator bagi pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan (Manopo dan Arie, 2016). Hal ini

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 31-42
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan sahamnya dan menarik calon investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu cara manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan menyesuaikan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Bagi Negara pajak merupakan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, dan bagi perusahaan perpajakan merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini berdampak pada perusahaan yang berupaya mendapatkan pengurangan beban pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk mengatur pengeluaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak.

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu strategi dalam perencanaan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk menekan rendah pajak yang dibayarkan dengan melakukan praktik secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Adityamurti dan Ghozali, 2017).

Segala bentuk kegiatan *tax avoidance* dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak, baik kegiatan yang dilegalkan oleh pajak seperti melakukan manajemen pajak dan atau kegiatan ilegal seperti penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak. Selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, *tax avoidance* juga dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. *Tax avoidance* tidaklah gratis terdapat biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi dan adanya potensi hukuman tertentu (Chen *et al*, 2013). Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi oleh manajer dalam memanipulasi laba perusahaan yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Hal ini akan berdampak kepada para investor yang memberikan penilaian rendah bagi perusahaan.

Di dunia ini kasus penghindaran pajak merupakan kasus umum yang terjadi di berbagai negara. Bahkan khusus di Indonesia sendiri penghindaran pajak cukup banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan dengan modus yang beragam, seperti kasus pada perusahaan PT Garuda Metalindo yang dalam neraca perusahaannya menunjukkan bahwa total utang (bank dan lembaga keuangan) mengalami peningkatan. Dalam laporan keuangan per Juni 2016, nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar, meningkat dari akhir Desember 2015 yang hanya berjumlah Rp48 miliar. Emiten yang ditetapkan sebagai saham BOLT ini menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan hutang akan menanggung beban bunga yang harus dibayar, semakin besar hutang maka semakin besar pula biaya bunga yang akan ditanggung perusahaan. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi beban pajak (www.finance.detik.com, 20 November 2019).

Perusahaan di atas melakukan penghindaran pajak dalam batas wajar tanpa melanggar hukum pajak di suatu Negara, hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan laba secara maksimal dengan meminimalkan pajak yang ditanggung sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan dengan cara yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat ketika harga saham naik maka nilai perusahaannya menjadi optimal.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Victory dan Cheisviyani (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Kurniawan dan Syafruddin (2017) menyatakan bahwa perilaku penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa ETR berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, nilai ETR yang rendah mengindikasikan *tax avoidance* yang tinggi berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan.

Terdapat hasil yang bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Juliani (2018) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Fadillah (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh emiten atau perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 117 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013) metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam penelitian ini untuk mendapatkan sampel adalah dengan melihat poin-poin sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 hingga 2018,
2. Perusahaan mengeluarkan atau menerbitkan *annual report* dan *financial statements* selama periode observasi dari tahun 2014 sampai dengan 2018,
3. Perusahaan yang pendapatan sebelum pajaknya selalu positif dari tahun 2014 hingga 2018,
4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah,
5. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.

Operasional Variabel

Tax Avoidance. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan mencari celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash_ETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Cash_ETR = *Cash Effective Tax Rates* sebagai indikator *tax avoidance*

Cash Tax Paid = Beban pajak yang dibayar oleh perusahaan

Earning Before Tax = Laba perusahaan sebelum pajak

Tax Avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu 1 melakukan penghindaran pajak dan 0 tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang dilihat melalui harga sahamnya. Pengukuran nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan rumus Tobin's Q. Tobin's Q adalah salah satu alat ukur atau rasio yang mendefinisikan nilai perusahaan sebagai bentuk dari gabungan nilai antara aset berwujud dan aset tidak berwujud. Tobin's Q yang diukur dengan rumus berikut:

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Keterangan :

Q = nilai perusahaan

EMV = nilai pasar ekuitas

EBV = nilai buku dari total aktiva

D = nilai buku dari total hutang

Nilai perusahaan dinilai berdasarkan rasio Tobin's Q pada tanggal 31 Desember untuk melihat reaksi penghindaran pajak diakhir periode pengamatan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan skala nominal berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai rasio Tobin's Q lebih besar dari 1, maka itu menunjukkan bahwa pasar menetapkan harapan yang tinggi terhadap perusahaan itu dan hal ini bisa menarik kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. Namun jika sebaliknya, nilai rasio Tobin's Q dari perusahaan lebih kecil dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak sanggup atau tidak mampu membuat nilai pasar maksimal. Dengan kata lain, apabila nilai Tobin's Q lebih besar dari 1, maka saham perusahaan dianggap meningkat sangat tinggi. Sebaliknya apabila nilai Tobin's Q suatu perusahaan lebih kecil dari 1, maka saham perusahaan tersebut dianggap semakin rendah atau menurun.

Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji model dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis verifikatif, uji asumsi klasik, analisis regresi dan uji hipotesis. Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (*pooled data*). Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 5 tahun. Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam regresi panel maka harus dilakukan pemilihan model dengan uji chow, uji hausman dan uji *lagrange multiplier* (Ali, 2016). Alat pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *software Microsoft excel*, SPSS 24 dan *Eviews 10*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

<i>Variables</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Tax Avoidance</i>	125	,03	,77	,2707	,11309
Nilai Perusahaan	125	-,47	3,04	,8676	,83841
Valid N (<i>listwise</i>)	125				

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil akhir dari pemilihan sampel penelitian ini diperoleh 25 perusahaan dengan kelengkapan datanya yang kemudian menjadi 125 perusahaan selama 5 tahun penelitian. Data yang ditemukan oleh penulis kemudian diolah untuk mengetahui nilai setiap variabel penelitian. Data yang diolah disajikan dalam bentuk statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 diketahui bahwa variabel independen yaitu *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash_ETR* menunjukkan nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 0,77 sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,2707 dengan standar deviasi 0,11309. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diprosikan dengan Tobin's Q menunjukkan nilai minimum -0,47 dan nilai maksimum 3,04 sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,8676 dengan standar deviasi 0,83841. Seperti yang diketahui bahwa hasil statistik deskriptif di atas menghasilkan nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya dari seluruh variabel yang dimiliki. Hal ini mengidentifikasi bahwa standar *error* dari variabel tersebut rendah karena dilihat dari kualitas data yang cukup baik memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Uji Analisis Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel (*pool*) yaitu data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dengan data seksi silang (*cross section*). Agar data panel memperoleh hasil yang sesuai dan menghasilkan yang terbaik, maka beberapa metode dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan menggunakan data panel. Teknik estimasi model regresi data panel membahas tiga metode yang bisa digunakan yaitu: memilih antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* (Basuki dan Prawoto, 2017:276).

Pendekatan *Common Effect*

Pendekatan *Common Effect* (OLS) tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diestimasikan perilaku data perusahaan sama dalam beberapa kurun waktu (Basuki dan Prawoto, 2017).

Tabel 2 Uji *Common Effect* (OLS)

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cash_ETR</i>	-1,03079	0,698155	-1,476448	0,1424

Seperti yang dapat dilihat pada *output* diatas tabel 2 nilai koefisien *Cash_ETR* sebesar -1,03079 dimana nilai koefisien ini digunakan untuk membentuk persamaan regresi data panel. Selain itu nilai prob *Cash_ETR* yang didapat sebesar 0,1424 yang berarti *Cash_ETR* lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pendekatan *Fixed Effect*. pendekatan ini didasarkan pada intersepsi yang berbeda antar perusahaan, tetapi intersepsi itu sama dalam waktu (*time in variant*). Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*Slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Basuki dan Prawoto, 2017).

Tabel 3 Uji *Fixed Effect* (OLS)

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cash_ETR</i>	-0,555686	0,685607	-0,810502	0,4196

Seperti yang dapat dilihat pada *output* diatas tabel 3 nilai koefisien *Cash_ETR* sebesar -0,555686 dimana nilai koefisien ini digunakan untuk membentuk persamaan regresi data panel. Selain itu nilai prob *Cash_ETR* yang didapat sebesar 0,4196 yang berarti *Cash_ETR* lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pendekatan *Random Effect*. Pendekatan ini mengestimasi data panel dengan asumsi koefisien *slope* konstan dan intersep berbeda antara individu dan antar waktu (*Random Effect*) Basuki dan Prawoto (2017).

Tabel 4 Uji *Random Effect* (OLS)

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cash_ETR</i>	-0,719091	0,646473	-1,112329	0,2682

Seperti yang dapat dilihat pada *output* diatas tabel 4 nilai koefisien *Cash_ETR* sebesar -0,719091 dimana nilai koefisien ini digunakan untuk membentuk persamaan regresi data panel. Selain itu nilai prob *Cash_ETR* yang didapat sebesar 0,2682 yang berarti *Cash_ETR* lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Pemilihan Model

Setelah data mentah diolah menjadi rasio keuangan dan variabelnya telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah memilih model penelitian yang paling sesuai diantara *common effect* (CE), *fixed effect* (FE) dan *random effect* (RE).

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara *fixed effect* dan *common effect* (Ali, 2016). Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk *Cross-Section F*. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 5 Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	3,718399	(24,99)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	80,325789	24	0,0000

Berdasarkan uji Chow di atas Tabel 5, kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Chi square* lebih kecil dari *Alpha* 0,05 sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, model yang paling baik untuk digunakan adalah yang menggunakan metode *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak hipotesis nol, pengujian data akan dilanjutkan dengan uji Hausman.

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengambilan keputusan

dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk *Cross-Section Random*. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Tabel 6 Uji Hausman

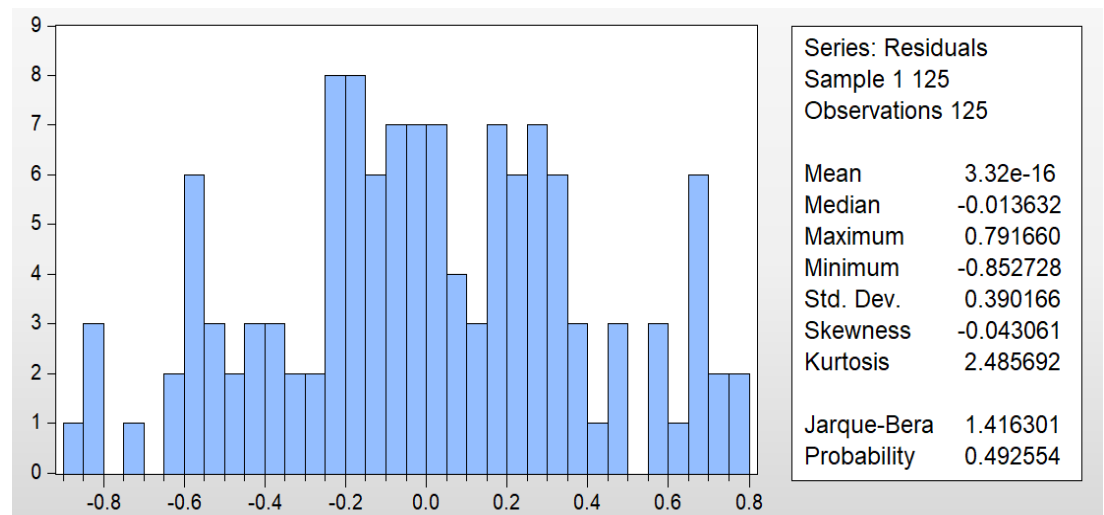
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0,512205	1	0,4742

Nilai *Chi Square Statistics* pada *Cross-section Random* sebesar 0,512205 dengan nilai $p = 0,4742 > 0,05$, sehingga menolak H_a . Jadi berdasarkan uji hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Random Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Di bawah ini adalah pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model dengan nilai residu yang berdistribusi normal. Kriteria dalam mengambil keputusan adalah dengan melihat nilai *probability Jarque-Bera* yang lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.



Gambar 1 Grafik Histogram

Uji normalitas berdasarkan nilai *probability Jarque Berra* (JB) sebesar $0,492 > 0,05$ maka data dapat dikatakan data dalam penelitian ini berdistribusi Normal.

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Ada beberapa cara untuk menguji apakah model regresi yang kita gunakan lolos dari heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji *Glejser* digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas, yang melakukan regresi nilai absolut dengan variabel bebas. Uji *Glejser* dapat ditentukan dari probabilitas nilai absolut residual. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas (Ali, 2016). Berdasarkan hasil uji *Glejser* dapat diketahui nilai signifikan dari variabel bebas *invrsquare_Cash_ETR* memiliki nilai probabilitas $0,6643 >$ dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dirancang untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu selama periode t dan $t-1$. Uji *Durbin Watson* dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam model (Ali, 2016). Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Obs*R-Squared* sebesar $0,043018 > 0,05$, dengan demikian hasil dari uji LM Test tidak mengindikasikan terjadinya autokorelasi.

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.189305	Prob. F(1,123)	0.6643
Obs*R-squared	0.192088	Prob. Chi-Square(1)	0.6612
Scaled explained SS	0.498034	Prob. Chi-Square(1)	0.4804

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 09/03/20 Time: 16:22
Sample: 1 125
Included observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.3654	68.16650	2.352554	0.0202
INVRSQUARE_CASH_ETR	-0.215284	0.494801	-0.435092	0.6643
R-squared	0.001537	Mean dependent var	150.6419	
Adjusted R-squared	-0.006581	S.D. dependent var	717.6459	
S.E. of regression	720.0034	Akaike info criterion	16.01226	
Sum squared resid	63763802	Schwarz criterion	16.05751	
Log likelihood	-998.7662	Hannan-Quinn criter.	16.03064	
F-statistic	0.189305	Durbin-Watson stat	2.018107	
Prob(F-statistic)	0.664258			

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.020828	Prob. F(2,121)	0.9794
Obs*R-squared	0.043018	Prob. Chi-Square(2)	0.9787

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/03/20 Time: 16:21
Sample: 1 125
Included observations: 125
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.078757	70.28104	0.001121	0.9991
INVRSQUARE_CASH_ETR	-0.001191	0.510236	-0.002335	0.9981
RESID(-1)	-0.014040	0.090923	-0.154412	0.8775
RESID(-2)	-0.012327	0.090913	-0.135593	0.8924
R-squared	0.000344	Mean dependent var	2.91E-14	
Adjusted R-squared	-0.024441	S.D. dependent var	733.4110	
S.E. of regression	742.3194	Akaike info criterion	16.08891	
Sum squared resid	66675609	Schwarz criterion	16.17942	
Log likelihood	-1001.557	Hannan-Quinn criter.	16.12568	
F-statistic	0.013885	Durbin-Watson stat	2.000253	
Prob(F-statistic)	0.997754			

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan memiliki model linear atau tidak. Dalam melihat linear atau tidaknya pada penelitian ini menggunakan *Ramsey Reset Test* yakni uji kombinasi non-linear dari nilai yang dihasilkan untuk membantu menjelaskan variabel independen. Uji *Ramsey Reset Test* dilihat dari nilai p value yang ditunjukkan pada kolom *probability* baris *F-statistics* dari nilai probabilitas F hitung yang lebih besar dari 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya. Nilai probabilitas F hitung dapat dilihat pada baris F statistik kolom *probability*.

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai *probability* sebesar $0,7198 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linearitas.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi linear data panel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Effect*. Pemilihan metode *Random Effects* sebagai metode analisis data panel pada

penelitian ini sebelumnya telah diuji melalui uji *chow* dan uji hausman terlebih dahulu, sehingga akhirnya metode *Random Effect* yang paling tepat untuk menguji data panel pada penelitian ini.

Tabel 9 Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: INVR SQUARE_TOBINS_Q C INVR SQUARE_CASH_ETR
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.359613	122	0.7198
F-statistic	0.129321	(1, 122)	0.7198
Likelihood ratio	0.132431	1	0.7159

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	70626.36	1	70626.36
Restricted SSR	66698562	123	542264.7
Unrestricted SSR	66627936	122	546130.6

LR test summary:

	Value
Restricted LogL	-1001.579
Unrestricted LogL	-1001.512

Tabel 10 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Metode *Random Effect*

<i>Dependent Variable: TOBINS_Q</i>				
<i>Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)</i>				
<i>Date: 09/07/20 Time: 22:22</i>				
<i>Sample: 2014 2018</i>				
<i>Periods included: 5</i>				
<i>Cross-sections included: 25</i>				
<i>Total panel (balanced) observations: 125</i>				
<i>Swamy and Arora estimator of component variances</i>				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	1,062387	0,214671	4,948916	0
CASH_ETR	-0,719091	0,646473	-1,112329	0,2682

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{Tobin's Q} = \alpha + \beta * \text{Cash_ETR} + \text{et} \quad \text{Tobin's Q} = 1,062387 - 0,719091 + \text{et}$$

Dimana:

Tobin's Q = Rasio dari nilai perusahaan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

CTER = Tarif pajak efektif sebagai proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*)

et = *Disturbance error*

Dari hasil persamaan diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 1,062387 yang berarti bahwa nilai konsistensi variabel nilai perusahaan sebesar 1,062387. Koefisien regresi *tax avoidance* sebesar - 0,719091 yang menyatakan bahwa pengurangan 1% *tax avoidance* maka nilai perusahaan akan berkurang sebesar - 0,719091. Koefisien regresi tersebut negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh *tax avoidance* (X) terhadap nilai perusahaan (Y) adalah negatif. Berdasarkan nilai probabilitas dari tabel diatas sebesar 0,2682 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* (X) berpengaruh negatif dengan tingkat probabilitas 5 persen terhadap nilai perusahaan (Y).

Koefisien Determinasi (R_2)

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variable Y. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variable independen secara serentak terhadap variable dependen. Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,009998. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance*

tidak berpengaruh atau tidak mampu menjelaskan variasi variabel nilai perusahaan sebesar 1% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis dengan Metode Random Effect

Dependent Variable: TOBINS_Q				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 09/07/20 Time: 22:22				
Sample: 2014 2018				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 25				
Total panel (balanced) observations: 125				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1,062387	0,214671	4,948916	0
CASH_ETR	-0,719091	0,646473	-1,112329	0,2682
Weighted Statistics				
R-squared	0,009998	Mean dependent var		0,444175
Adjusted R-squared	0,001949	S.D. dependent var		0,710002
S.E. of regression	0,70931	Sum squared resid		61,88383
F-statistic	1,242202	Durbin-Watson stat		1,641743
Prob(F-statistic)	0,26722			
Unweighted Statistics				
R-squared	0,015822	Mean dependent var		0,8676
Sum squared resid	95,2394	Durbin-Watson stat		1,145844

Uji Hipotesis

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

Ho : *Tax avoidance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan

Ha : *Tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan

Berdasarkan tabel 11 diperoleh hasil estimasi variabel *tax avoidance* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2682 dengan koefisien -0,719091. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima Ho (menolak Ha) yang artinya secara statistik *tax avoidance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil uji statistik t variabel *tax avoidance* memiliki tingkat signifikansi 0,2682 dengan nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel dependen yakni nilai perusahaan karena tingkat signifikansi variabel *tax avoidance* berada diatas nilai signifikan 0,05. Nilai koefisien sebesar -0,719091 menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada berkurangnya nilai perusahaan. Ini menandakan bahwa hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Dari hasil penelitian tersebut hal ini juga sejalan dengan teori keagenan, dimana jika dari pihak manajer perusahaan ketika ingin melakukan *tax avoidance* berdasarkan *monitoring* dari instirusi maka dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan tersebut akan menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan begitu akan memunculkan adanya asimetri informasi antara pihak *agent* maupun dari *principal*. Sehingga investor kurang tertarik maupun percaya untuk menanamkan modalnya yang mendorong munculnya perusahaan *agency problem* dikedua belah pihak.

Dengan begitu jika semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance* maka dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Karena tingkat *tax avoidance* perusahaan dapat dilihat dari nilai *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) perusahaan tersebut. Jika nilai *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) itu lebih kecil atau dibawah dari tarif pajak 25% sesuai peraturan pemerintah yang berlaku maka perusahaan tersebut terindikasi dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi sehingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan (Ilmiani dan Sutrisno, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilmiani dan Sutrisno (2014), Wardani dan Juliani (2018) dan Fadillah (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan maka semakin menurun nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan. Selain itu, dengan adanya praktik *tax avoidance* investor menganggap bahwa tindakan *tax avoidance* dianggap sebagai manipulasi data keuangan sehingga dapat menjadikan asimetri informasi dan terkena *agency problem* dimana akan berdampak pada penurunan nilai suatu perusahaan di mata investor. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Victory dan Cheisviyani (2016), Kurniawan dan Syafruddin (2017) dan Apsari dan Setiawan (2018) yang menemukan pengaruh positif signifikan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan semakin meningkat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018 dan diperoleh sampel sebanyak 125 pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak mampu menjelaskan atau memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan dilihat dari hasil uji t atau parsial, *tax avoidance* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2682 dengan koefisien -0,719091. Berdasarkan hipotesis yang diajukan menerima H_0 (menolak H_a) yang artinya secara statistik *tax avoidance* berpengaruh negatif dengan tingkat probabilitas lebih dari 5 persen terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan dan penelitian selanjutnya menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar menambah jumlah data dan menghasilkan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E. dan I. Ghozali. 2017. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3): 1–12.
- Agustianawati, P., & Puspitasari, R. (2018). Stock Performance Analysis (Case Study PT ERATEX DJAJA, Tbk–ERTX). In *THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND MANAGEMENT SCIENCE* (p. 107).
- Basuki, A.T. dan Prawoto, N. 2017. *Analisis Regresi*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Budiman, J.S. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 3(12): 35-48.
- Chen, X., N. Hu, X. Wang, dan X. Tang. 2013. Tax Avoidance and Firm Value: Evidence From China. *Nankai Business Review International* 5(1): 25-42.
- Deriyarso, I. dan P. Prasetiono. 2014. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating: Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Doctoral Dissertation. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Fadillah, H. 2018. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi* 4(1): 117-133.

- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gendalasari, G. G. (2020). Uji Kompetensi Di SMK Telekomedika Bogor. *Jurnal Abdimas*, 4(3), 211-220.
- Gendalasari, G. G., & Triandi, T. (2018, December). Strategy For Improving Performance and Competitive Advantages of Export-Based Shoe Msme in Bogor in The Free Trade Competition. In *International Conference On Accounting And Management Science 2018* (pp. 315-321).
- Hidayat, L., Muktiadji, N., & Supriadi, Y. (2020, May). The Knowledge and Students' Interest to Investing in Investment Gallery. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 142-145). Atlantis Press.
- <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2962371/garuda-metalindo-bayar-utang-rp-200-miliar-pakai-hasil-jual-saham> diakses 20 November 2019
- Ilmiani, A. dan C.R. Sutrisno. 2014. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14(1): 30–39.
- Kurniawan, A.F. dan Syafruddin, M. 2017. Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan variabel moderasi transparansi. *Diponegoro Journal of Accounting* 6(4): 94-103.
- Manopo, H. dan F.V. Arie. 2016. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4(2): 485–497.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Merlina, M., & Nuraini, A. (2020). Analisis Persepsi Dosen Akuntansi Dan Mahasiswa Akuntansi Mengenai Peranan Akuntan Di Era Revolusi Industri 4.0. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 4(2), 149-162.
- Muhson, A. 2016. *Pedoman praktikum analisis statistik*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Munawar, A., & Marpaung, B. S. (2013). Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Peningkatan Kemampuan dan Pertumbuhan Perusahaan STUDI KASUS PADA PT. HOLCIM INDONESIA, TBK. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(3), 213-217.
- Nuraini, A., Gendalasari, G. G., & Sastra, H. (2017). Studi Peningkatan Pertumbuhan dan Nilai Perusahaan Sektor Perkebunan Melalui Analisis Kebijakan Dividend an Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(2), 074-079.
- Pamungkas, R., & Puspitasari, R. (2018). Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan jangka panjang (Studi kasus pada PT Ciputra Development Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), 81-87.
- Setiawan, P.E. & Apsari, L. 2018. Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23(17): 65-1790.
- Stella, L. A., & Puspitasari, R. (2020, May). Analysis of Bank Rating with RGEC Method Case Study at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the Period 2013–2017. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 240-245). Atlantis Press.
- Sudirjo, F. 2017. Evaluasi Penerapan Tax Planning untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak dalam Rangka Manajemen Pajak. *Prosiding FEB UNTAG Semarang*.
- Supriadi, Y. (2020). Peningkatan Kapabilitas UMKM Binaan Rumah Kreatif Bogor Dalam Melakukan Analisa Laporan. *Jurnal Abdimas*, 4(1), 51-60.
- Susilawati, N., & Supriadi, Y. (2017). Pengaruh Cash Ratio dan Siklus Konversi Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(2), 115-124.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta.
- Utami, R. D., & Nuraini, A. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Perputaran Total Aset Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 197-206.
- Victory, G. dan C. Cheisviyani. 2016. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014). *Jurnal WRA* 4(1): 755–765.
- Wardani, D.K. dan Juliani. 2018. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Nominal* 7(2): 47–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kelebihan Bayar Pajak

*Tax Overpayment
and Accounting
Information System*

Ririn Miptha Nuryana dan Decky Hendarsyah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Riau, Indonesia
E-Mail: ririnmiftha15@gmail.com, deckydb@gmail.com

43

ABSTRACT

The awareness of taxpayers in paying taxes is very necessary because development in Indonesia requires very large funds, one source of government funds is revenue from the taxation sector so that state revenue can be met and development can continue. This study aims to complement the shortcomings of existing studies and to analyze the effect of the accounting information system (AIS) on tax overpayment (TOP) at the regional financial and asset management agency (RFAMA) of Bengkalis Regency. This study uses a quantitative descriptive method with primary and secondary data sources. The total population at the office of the RFAMA of Bengkalis Regency was 260 people. The sampling technique used purposive sampling, to obtain a sample of 30 people. Data collection techniques using questionnaires, interviews, documentation and literature study. Data analysis using are simple linear regression method, hypothesis testing and coefficient of determination. The results of this study indicate that the AIS have a significant effect on TOP at the RFAMA of Bengkalis Regency. This study can contribute to the office of the RFAMA of Bengkalis Regency in implementing an AIS and minimizing the occurrence of TOP.

Submitted:
DESEMBER 2020

Accepted:
MARET 2021

Keywords: *accounting information systems, tax overpayment, accounting, taxation.*

ABSTRAK

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan, sebab pembangunan di Indonesia memerlukan dana yang sangat besar, sumber dana pemerintahan salah satu adalah penerimaan dari sektor perpajakan, sehingga pendapatan negara bisa terpenuhi dan pembangunan dapat berlanjut. Studi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada dan untuk menganalisa pengaruh sistem informasi akuntansi (SIA) terhadap kelebihan bayar pajak (KBP) pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Studi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Jumlah populasi pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis sebanyak 260 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga didapat sampel sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil studi ini menyatakan bahwa SIA berpengaruh signifikan terhadap KBP pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis. Studi ini dapat memberikan kontribusi pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis dalam menerapkan SIA dan meminimalisir terjadinya KBP.

Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, kelebihan bayar pajak, akuntansi, perpajakan

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia memerlukan dana yang sangat besar, sumber dana pemerintahan salah satu adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar dapat

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 43-52
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak sehingga pendapatan negara terpenuhi dan pembangunan dapat berlanjut. Tetapi disisi lain terdapat kekhawatiran oleh wajib pajak dalam menunaikan pajak, karena disebabkan terdapatnya kasus-kasus penggelapan pajak oleh oknum aparat per pajakan. Oleh sebab itu wajib pajak harus paham dengan pajak dan cara menghitungnya, supaya tidak terjadi penyelewengan dan kesalahan dalam membayar pajak (Mangundap & Tirayoh, 2016). Dalam perpajakan terdapat kejadian dimana nilai pajak yang masuk lebih besar daripada pajak yang keluar, disebut dengan KBP (Lempas, Runtu, & Pusung, 2017; Mangundap & Tirayoh, 2016; Riftiasari, 2019). Kegiatan pengembalian KBP disebut dengan restitusi (Mangundap & Tirayoh, 2016; Usman, 2017). Kebijakan restitusi kepada wajib pajak merupakan suatu dilema, karena dianggap membuka peluang kerugian kas negara (Lempas et al., 2017). Oleh sebab itu agar KBP bisa diminimalisir, wajib pajak hendaknya berperan aktif dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya dan pegawai pajak lebih berhati-hati dalam memproses dan menginput data pajak. Dalam melakukan pengelohan KBP dibutuhkan suatu SIA, agar KBP tersistem dan dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan pelaporannya.

Sampai saat ini studi tentang SIA berhubungan dengan beberapa aspek. Pertama, studi yang melihat pengaruh antara SIA dengan aspek efektivitas, studi ini dilakukan oleh (Herawaty & Sari, 2017; Irton & Purwanto, 2018; Karmila & Hendarsyah, 2019; Pebrianti, Faridah, & Mariantha, 2020; Zulaila & Hendarsyah, 2020). Kedua, studi yang melihat pengaruh antara SIA dengan aspek kinerja, studi dilakukan oleh (Dita & Putra, 2016; Irawati & Ardianshah, 2018; Melasari, 2017; P., Afrizal, & Wahyudi, 2020; Prastika & Purnomo, 2014; Purnata & Suardikha, 2019; Widhawati & Damayanthi, 2018). Ketiga, studi yang melihat pengaruh antara SIA dengan aspek kualitas, studi ini dilakukan oleh (Darma & Sagala, 2020; Eveline, 2016; Gusherinsya & Samukri, 2020; Puteri, Yuliarti, & Nastiti, 2019; Rohmah, Askandar, & Sari, 2020; Wulandari & Hendarsyah, 2020). Keempat, studi yang melihat pengaruh SIA dengan aspek penerimaan, studi ini dilakukan oleh (Angraini & Hendarsyah, 2019; Tambe, Sunarya, & Yusuf, 2018). Sedangkan studi yang membahas mengenai KBP, dilakukan oleh (Lempas et al., 2017; Mangundap & Tirayoh, 2016; Riftiasari, 2019). Melihat dari beberapa aspek tersebut belum banyak studi yang melakukan pembahasan mengenai KBP, apalagi jika dihubungkan dengan SIA.

Studi ini secara khusus membahas mengenai SIA dan KBP yang diterapkan pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis. Selain itu studi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada, dimana masih terdapat celah penelitian selain dari aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu jika SIA dihubungkan dengan KBP. Kemudian studi ini juga bertujuan untuk menganalisa dan menggali pengaruh SIA terhadap KBP pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis. Studi ini didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa SIA dapat mempengaruhi KBP baik dari segi pengembalian maupun pelaporannya, hal tersebut disebabkan terdapatnya komponen dari SIA dalam mempengaruhi KBP. Dengan diterapkannya komponen-komponen SIA tersebut dengan baik maka dapat meminimalisir terjadinya KBP sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyelewengan yang dapat merugikan wajib pajak dan negara.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyat (Mardiasmo, 2016, p. 3). Dalam memungut pajak terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu: (a) pemungutan pajak harus adil; (b) pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang; (c) tidak mengganggu perekonomian; (d) pemungutan pajak harus efisien; (e) sistem pemungutan pajak harus sederhana (Mardiasmo, 2016; Usman, 2017).

KBP terjadi apabila terdapat jumlah pajak masukan yang melebihi pajak pengeluaran dan juga terdapatnya kesalahan pemotongan atau pemungutan yang berupa besarnya potongan yang seharusnya tidak dipotong (Lempas et al., 2017; Mangundap & Tirayoh,

2016; Riftingasari, 2019; Usman, 2017). Restitusi merupakan pengembalian KBP terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak (Mangundap & Tirayoh, 2016; Usman, 2017).

Restitusi dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: (a) wajib pajak mengajukan permohonan restitusi ke kantor pelayanan pajak; (b) kantor pelayanan pajak memeriksa dan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) oleh dewan jenderal pajak (DJP); (c) SKPLB diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan DJP; (d) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir (Riftingasari, 2019). Dalam KBP terdapat kompensasi dimana pajak tahun sebelumnya terdapat kelebihan bayar maka kelebihan tersebut dapat digunakan sebagai utang pajak tahun berikutnya atau KBP tertentu dikompensasikan dengan utang pajak lain pada tahun yang sama (Lempas et al., 2017). Sistem merupakan rangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan (Krismiaji, 2010, p. 1). Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat (Krismiaji, 2010, p. 15). SIA merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan serta memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan tujuan perusahaan (Romney & Steinbart, 2015, p. 36).

SIA mempunyai tujuan untuk: (a) mengamankan aset perusahaan; (b) menghasilkan informasi untuk pihak internal dalam mengambil keputusan; (c) menghasilkan informasi untuk pihak eksternal; (d) menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja pegawai atau organisasi; (e) menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit; (f) menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan; (g) menghasilkan informasi untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian (Putri & Endiana, 2020). SIA memiliki komponen yang terdiri dari: (a) sumber daya manusia; (b) prosedur dan instruksi; (c) data; (d) perangkat lunak; (e) infrastruktur teknologi informasi atau perangkat keras; (f) pengendalian internal dan pengukuran keamanan (Romney & Steinbart, 2015).

Studi yang menyatakan bahwa SIA berpengaruh terhadap efektivitas dikemukakan oleh (Herawaty & Sari, 2017; Irton & Purwanto, 2018; Karmila & Hendarsyah, 2019; Pebrianti et al., 2020; Zulaila & Hendarsyah, 2020), dimana efektivitas berdasarkan variabel *dependent* masing-masing studi. Kemudian studi yang menyatakan bahwa SIA berpengaruh terhadap kinerja baik individual maupun organisasi dikemukakan oleh (Dita & Putra, 2016; Endiana & Sudiartana, 2016; Irawati & Ardianshah, 2018; Jayantara & Dharmadiaksa, 2016; Melasari, 2017; Nengsy, 2018; P. et al., 2020; Pawitri & Latrini, 2019; Prastika & Purnomo, 2014; Purnata & Suardikha, 2019; Suryawan & Suaryana, 2018; Widhawati & Damayanthi, 2018; D. M. A. P. Wiguna & Dharmadiaksa, 2016; P. A. H. Wiguna, Wahyuni, & Atmadja, 2016), sedangkan studi yang menyatakan bahwa SIA tidak berpengaruh terhadap kinerja baik individual maupun organisasi dikemukakan oleh (Amiruddin, Dhanny, & Rafika, 2019; Lukiman & Lestarianto, 2016; Ningsih & Natalia, 2020; Putri & Endiana, 2020; Wahyuni, Marsdenia, & Soenarto, 2016). Selanjutnya studi yang menyatakan bahwa SIA berpengaruh terhadap kualitas dikemukakan oleh (Darma & Sagala, 2020; Eveline, 2016; Gusherinsya & Samukri, 2020; Puteri et al., 2019; Rohmah et al., 2020; Wulandari & Hendarsyah, 2020), dimana kualitas berdasarkan variabel *dependent* masing-masing studi. Kemudian studi yang menyatakan bahwa SIA berpengaruh terhadap pencatatan penerimaan negara bukan pajak dikemukakan oleh (Angraini & Hendarsyah, 2019), sedangkan studi yang menyatakan bahwa SIA tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dikemukakan oleh (Tambe et al., 2018). Dari hasil studi mengenai SIA tersebut, mayoritas menyatakan bahwa SIA sebagai variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent* masing-masing studi, maka dari itu dapat dibentuk hipotesis yaitu: SIA berpengaruh signifikan terhadap KBP pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dimana populasinya berjumlah 260 orang. Studi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana teknik ini bertujuan untuk memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan pegawai yang mengoperasikan SIA yang bernama surat setoran elektronik (SSE), sehingga didapat sampel sebanyak 30 orang, terdiri dari 1 orang bendahara, 1 orang wakil bendahara dan 28 orang staf keuangan. Teknik pengumpulan data pada studi ini menggunakan kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana, uji hipotesis dan koefisien determinasi dengan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SIA

Sejak awal berdirinya kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sudah menggunakan sistem informasi berbasis online, dengan menggunakan perangkat lunak SSE. Saat pertama kali instansi ini menggunakan SSE versi 1, kemudian di *update* menjadi versi 2 dan terakhir beralih ke versi 3 karena terdapat pembaruan yang lebih lengkap dan akurat. Menurut hasil wawancara dengan bendahara BPKAD Bengkalis bahwa terdapat kelebihan setelah menggunakan SIA yaitu secara umum informasi yang disajikan lebih akurat dan tidak memakan waktu yang lama. Sedangkan kekurangan sebelum menggunakan SIA data yang disajikan kurang akurat dan memakan waktu yang lama dalam pengerjaanya.

Data Responden

Kuesioner yang telah diserahkan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bengkalis semua dikembalikan, sehingga didapat data responden berjumlah 30 orang. Setelah data responden diolah, maka data dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Berdasarkan kategori jenis kelamin didapat jumlah laki-laki sebanyak 13 orang (43,33%) dan perempuan sebanyak 17 orang (56,67%). Berdasarkan kategori umur, rentang umur 26 sampai 30 tahun sebanyak 5 orang (16,67%), rentang umur 31 sampai 35 tahun sebanyak 10 orang (33,33%), rentang umur 36 sampai 50 tahun sebanyak 8 orang (26,67%) dan rentang umur diatas 50 tahun sebanyak 7 orang (23,33%). Berdasarkan kategori tingkat pendidikan, Diploma 3 sebanyak 4 orang (13,33%), S1 sebanyak 16 orang (53,34%), S2 sebanyak 9 orang (30%) dan S3 sebanyak 1 orang (3,33%).

Validitas

Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa nilai $\alpha = 0,05$; $n = 30$; $df = n - 2 = 30 - 2 = 28$, sehingga r_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel r dengan hasil sebesar 0,361. Dalam menentukan validitas data diperlukan syarat pengambilan keputusan dalam menyatakan suatu data valid atau tidak. Data dikatakan valid syaratnya apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, selain itu data tidak valid (Siregar, 2013, p. 47). Dari hasil olahan data kuesioner didapat rentang nilai r_{hitung} . Dimana nilai r_{hitung} terendah sebesar 0,471 dan r_{hitung} tertinggi sebesar 0,804. Sehingga data kuesioner dapat dikatakan valid, karena nilai seluruh $r_{hitung} > r_{tabel}$.

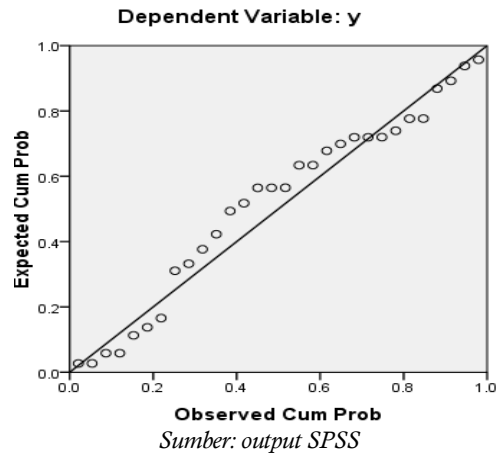
Reliabilitas

Dalam melakukan pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan cara menguji semua hasil pertanyaan kuesioner, dimana kriteria hasil pengujian dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ (Siregar, 2013, p. 57). Dari hasil olahan data kuesioner didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,889, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa data kuesioner secara keseluruhan reliabel.

Normalitas

Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dapat dilakukan menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov*

Test dan analisis grafik *normal P-Plot*. Dalam mengambil keputusan data berdistribusi normal apabila nilai signifikan $> 0,05$ dan titik pada grafik *P-Plot* menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal (Siregar, 2013, p. 243). Dari hasil pengujian *Kolmogrov-Smirnov* didapat nilai signifikan sebesar 0,415, artinya $0,415 > 0,05$. Kemudian pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1. Normal P-Plot

Regresi Liner Sederhana

Berdasarkan Tabel 1 dapat dibentuk persamaan regresi antara variabel SIA dengan KBP yaitu: $Y = \alpha + \beta X$; $Y = 0,026 + 0,417X$, sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai α merupakan nilai konstan sebesar 0,026 yang berarti apabila variabel SIA bernilai nol maka didapat nilai KBP sebesar 0,026. Nilai β merupakan koefisien dari variabel SIA dengan nilai sebesar 0,417 yang berarti setiap penambahan 1 satuan variabel SIA maka nilai variabel KBP akan bertambah sebesar 0,417. Berhubung koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara SIA dengan KBP.

Tabel 1. Coefficients dan Model Summary

Model	α/β	t	Sig.
(Constant)	0,026	0,012	0,990
SIA	0,417	9,783	0,000
R	0,880		
Adjusted R Square	0,766		

Sumber: olahan output SPSS

Uji Hipotesis

Hipotesis diuji menggunakan uji t, dimana pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel *dependent* dengan variabel *independent* secara individual sehingga didapat nilai t_{hitung} , kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk mencari nilai t_{tabel} diperlukan nilai α dan df, dimana $\alpha = \alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$; $df = n-k = 30-2 = 28$, sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Keputusan hipotesis diterima apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< 0,05$ selain itu keputusan hipotesis ditolak (Yusuf, 2014, p. 244). Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada variabel SIA nilai t_{hitung} sebesar 9,783 dan nilai sig. sebesar 0,000, yang artinya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,783 > 2,048$) dan nilai sig. $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis diterima.

Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 2, dimana terdapat nilai korelasi (R) sebesar 0,880, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara SIA dengan KBP, karena nilai korelasi lebih besar dari 0,8 (Sugiyono, 2014). Kemudian nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,766, ini artinya SIA mempunyai pengaruh terhadap KBP yaitu sebesar 0,766 atau sama dengan 76,6%.

Pengaruh SIA Terhadap KBP

Hasil studi menyatakan bahwa hipotesis diterima, ini berarti bahwa SIA berpengaruh signifikan terhadap KBP pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penerapan SIA merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan pajak. Mulai dari mengumpulkan data pajak, menginput dan memproses data sampai menghasilkan informasi berupa laporan. Ketika mengumpulkan data harus diperhatikan tingkat kebenaran data yang diberikan wajib pajak, kemudian menginput data harus berhati-hati dan tidak boleh salah, sehingga informasi atau laporan yang dihasilkan valid.

Dari segi komponen SIA, ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelaporan KPB, karena semua komponen SIA saling berkaitan. Mulai dari segi sumber daya manusia, BPKAD Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan pegawai yang mumpuni. Dari segi prosedur telah dilaksanakan dengan tertib. Dari segi data, sudah melalui validasi, akurasi dan kelengkapan. Dari segi perangkat lunak sudah tersedia aplikasi SSE. Dari segi infrastruktur teknologi informasi baik berupa perangkat keras, jaringan lokal dan internet sudah tersedia dan dapat mendukung pekerjaan. Dari segi pengendalian internal sudah memenuhi standar, tetapi perlu dikaji lebih dalam. Akan tetapi dari semua komponen SIA yang lebih besar pengaruhnya adalah komponen sumber daya manusia atau pegawai, karena mulai dari mengumpulkan data, sampai pembuatan laporan dikerjakan oleh pegawai. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan input data, ini akan mengakibatkan semakin besar KPB. Jika pegawai melakukan keterlambatan dalam memproses dan membuat laporan pajak, ini akan mengakibatkan wajib pajak menjadi kesulitan dalam mengklaim KPB. Jika ada pegawai yang melakukan penyelewengan di area ini maka akan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu semakin baik penerapan SIA maka KPB dapat diminimalisir, sebaliknya jika penerapan SIA tidak diterapkan dengan baik maka KPB akan semakin besar, ini akan mengakibatkan bertambahnya pekerjaan dalam menerbitkan SKPLB, membuat wajib pajak sulit dalam mengklaim KPB, sehingga akhirnya dapat memicu kerugian terhadap wajib pajak dan negara. Penerapan SIA pada BPKAD Kabupaten Bengkalis telah mampu memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari tersedianya informasi yang dibutuhkan akurat, relevan dan tepat waktu sebagai penunjang dalam melakukan pekerjaan di instansi ini. Kemudian BPKAD Kabupaten Bengkalis telah meminimalisir terjadinya KPB dengan mengadakan pelatihan SIA dalam penggunaan perangkat lunak SSE dan mengikuti seluruh peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil studi ini sejalan dengan studi yang telah dilakukan oleh (Angraini & Hendarsyah, 2019; Darma & Sagala, 2020; Dita & Putra, 2016; Endiana & Sudiartana, 2016; Eveline, 2016; Gusherinsya & Samukri, 2020; Herawaty & Sari, 2017; Irawati & Ardianshah, 2018; Irton & Purwanto, 2018; Jayantara & Dharmadiaksa, 2016; Karmila & Hendarsyah, 2019; Melasari, 2017; Nengsy, 2018; P. et al., 2020; Pawitri & Latrini, 2019; Pebrianti et al., 2020; Prastika & Purnomo, 2014; Purnata & Suardikha, 2019; Puteri et al., 2019; Rohmah et al., 2020; Suryawan & Suaryana, 2018; Widhawati & Damayanthi, 2018; D. M. A. P. Wiguna & Dharmadiaksa, 2016; P. A. H. Wiguna et al., 2016; Wulandari & Hendarsyah, 2020; Zulaila & Hendarsyah, 2020) yang menyatakan bahwa SIA berpengaruh terhadap variabel *dependent* pada studi mereka masing-masing, dimana SIA dilihat sebagai variabel *independent*, Hasil studi ini tidak sejalan dengan studi yang telah dilakukan oleh (Amiruddin et al., 2019; Lukiman & Lestarianto, 2016; Ningsih & Natalia, 2020; Putri & Endiana, 2020; Tambe et al., 2018; Wahyuni et al., 2016) yang menyatakan bahwa SIA tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent* pada studi mereka masing-masing, dimana SIA dilihat sebagai variabel *independent*.

PENUTUP

Ternyata SIA jika dihubungkan dengan KPB merupakan suatu hal yang baru dan belum ditemukan studi tentang hal tersebut sehingga studi ini dapat menambah kekurangan studi yang telah ada. Dilihat dari segi korelasi, terjadi hubungan yang sangat kuat antara SIA dengan KPB pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut terbukti dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara SIA dengan KPB pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis dengan besar pengaruh 76,6%. Dengan adanya penerapan SIA yang baik, BPKAD Kabupaten Bengkalis mampu memberikan informasi

yang tepat sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Studi ini dapat memberikan kontribusi pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis dalam menerapkan SIA dan meminimalisir terjadinya KBP.

Studi ini mempunyai keterbatasan baik dari segi waktu maupun ruang lingkup studi, untuk itu diharapkan ada studi lanjutan terhadap KBP selain faktor SIA, seperti pengetahuan wajib pajak, sistem pengendalian internal dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi KBP, karena masih terbuka ruang studi sebesar 23,4%. Diharapkan pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis dapat selalu mengupdate kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan SIA dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dalam mengelola SIA. Kemudian diharapkan pada kantor BPKAD untuk rutin melakukan sosialisasi tentang perhitungan dan pelaporan pajak serta pemahaman arti pentingnya pajak kepada wajib pajak. Selanjutnya diharapkan pada kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis agar dapat menjaga konsistensi penerapan SIA sehingga dapat meminimalisir KBP dan mencegah kerugian terhadap wajib pajak dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., Dhanny, O., & Rafika, R. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda (Studi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda). *Jurnal Eksis*, 15(1), 53–67. Retrieved from <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/262>
- Angraini, D., & Hendarsyah, D. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Terhadap Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 20–36. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.160>
- Darma, J., & Sagala, G. H. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Emptiris di Indonesia). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*, 4(1), 227–237. Retrieved from <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/231>
- Dita, M. A., & Putra, I. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 614–640. Retrieved from <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17695>
- Endiana, I. D. M., & Sudiartana, I. M. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu dan Kinerja UMKM Pengrajin Perak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 6(4), 96–104. Retrieved from <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JUARA/article/view/567>
- Eveline, F. (2016). Pengaruh SAP Berbasis Akrual, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2004>
- Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.94>
- Herawaty, N., & Sari, R. Y. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Penjualan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Survei Pada Kerajinan Batik Di Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 6(2), 131–142. Retrieved from <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/5265>
- Irawati, A., & Ardianshah, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 34–53. <https://doi.org/10.36448/jak.v9i1.997>

- Irton, I., & Purwanto, M. I. (2018). Dampak Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 18(1), 18–26. Retrieved from <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/15>
- Jayantara, I. K., & Dharmadiaksa, I. B. (2016). Pengaruh Kemampuan Teknik Pemakai Dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kinerja Individual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2145–2170. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/22412>
- Karmila, K., & Hendarsyah, D. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Retribusi Boarding Pass Pelabuhan Terhadap Sistem Pengendalian Internal: Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 158–173. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.180>
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Lempas, B. S., Runtu, T., & Pusung, R. J. (2017). Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi Dan Kompesansi Di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 694–702. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18032.2017>
- Lukiman, R., & Lestarianto, J. B. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu Karyawan. *ULTIMA Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(2), 46–65. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v8i2.581>
- Mangundap, P. V., & Tirayoh, V. Z. (2016). Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 98–108. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11566>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Melasari, R. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perbankan Di Tembilahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–15. Retrieved from <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jak/article/view/254>
- Nengsy, H. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial pada Perbankan di Tembilahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–17. Retrieved from <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jak/article/view/244>
- Ningsih, Y., & Natalia, E. Y. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Wook Global Technology. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 935–944. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/28043>
- P., A. D., Afrizal, A., & Wahyudi, I. (2020). Pengaruh Efisiensi Kerja, Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi, Penggunaan Teknologi Informasi dan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual di PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(3), 192–202. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/10810>
- Pawitri, N. M. S., & Latrini, M. Y. (2019). Pengaruh Efektivitas Penggunaan SIA, Pelatihan SIA, dan LOC Internal Pada Kinerja Karyawan LPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2100–2128. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p17>
- Pebrianti, S. L., Faridah, F., & Mariantha, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pada PT Bosowa Berlian

- Motor Makassar. *Economics Bosowa Journal*, 6(002), 56–66. Retrieved from <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/331>
- Prastika, N. E., & Purnomo, D. E. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan. *Jurnal LITBANG Kota Pekalongan*, 7. Retrieved from <https://jurnal.pekalongankota.go.id/index.php/litbang/article/view/86>
- Purnata, I. W. R., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh E-Commerce, Budaya Organisasi, dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada UKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 296–321. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p12>
- Puteri, I. P., Yuliarti, N. C., & Nastiti, A. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bni Cabang Situbondo). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 150–158. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/23071>
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 179–189. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1433.179-189>
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05), 43–51. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, K. I., & Suaryana, I. G. N. A. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 871–897. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p03>
- Tambe, S. R., Sunarya, H., & Yusuf, A. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di kantor Samsat Dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(02), 60–78. Retrieved from <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/77>
- Usman, S. W. (2017). Restitusi Dan Proses Managerial Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Di KPPN Manokwari. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 2(1), 57–67. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v2i1.608>
- Wahyuni, T., Marsdenia, M., & Soenarto, I. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengukuran Kinerja UMKM di Wilayah Depok. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2), 28–47. <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.97>
- Widhawati, A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Budaya Kerja, dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1301–1327. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p18>
- Wiguna, D. M. A. P., & Dharmadiaksa, I. B. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Dengan Budaya Organisasi

- Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), 798–824. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/22407>
- Wiguna, P. A. H., Wahyuni, M. A., & Atmadja, A. T. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Pada PDAM Kabupaten Buleleng Dengan Moderasi Budaya Tri Hita Karana Sebagai Dimensi Budaya Organisasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/8983>
- Wulandari, T., & Hendarsyah, D. (2020). Pengaruh Penerapan SIMSKRD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Retribusi Izin Gangguan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 45–57. Retrieved from http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/view/831
- Yusuf, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zulaila, Z., & Hendarsyah, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengetahuan Pengguna Terhadap Efektivitas SISMIOP Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 20–27. Retrieved from <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/1408>

Pengaruh Lama Usaha dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM

Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Jetis Bantul

Quality of MSMEs'
Financial
Statement

Teguh Erawati dan Lisna Setyaningrum
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
EMail: eradimensiarch@gmail.com

53

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) face several obstacles so that in their business it is difficult to develop, one of which lies in financial management in their business activities so that in presenting financial reports, it creates a separate problem for MSMEs. The purpose of this study was to determine the effect of education level and educational background on the quality of MSME financial reports in Jetis District. The type of research used is quantitative with a descriptive approach. The population in this study were all MSMEs in Jetis District. The data collection method used a questionnaire with a total of 100 respondents. The results of this study provide an explanation that there is a significant positive effect on educational background on the quality of MSME financial reports. Whereas at the level of education is no significant effect on the quality of MSME financial reports.

Submitted:
DESEMBER 2020

Accepted:
MARET 2021

Keywords: Education Level, Educational Background Quality of Financial Statements, MSME

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi beberapa kendala sehingga dalam usahanya sulit untuk berkembang, salah satunya terletak pada pengelolaan keuangan dalam kegiatan usahanya sehingga dalam penyajian laporan keuangan menimbulkan masalah tersendiri bagi UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Jetis. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kecamatan Jetis. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah 100 responden. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Sedangkan pada tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

Kata Kunci: tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan laporan keuangan, umkm

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan perekonomian dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini sedang gencar-gencarnya berada di Indonesia karena dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memperkerjakan masyarakat disekitar yang tidak memiliki pekerjaan. UMKM memiliki peran penting dan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengentaskan dari kemiskinan dan sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Namun, sayangnya banyak UMKM yang tidak memiliki sistem akuntansi yang baik. Usaha akan menjadi sulit berkembang

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 53-60
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

jika hanya terpacu pada penjualan tanpa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Terdapat 80% usaha akan tutup pada tahun ke lima dikarenakan pengelolaan keuangan yang buruk (Kabar24, 2017). Dengan tidak diselenggarakannya laporan keuangan dapat menjadikan penyebab utama UMKM mengalami gagal dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan tidak terdapat peraturan yang mengharuskan melakukan penyusunan laporan keuangan untuk UMKM sehingga menjadikan minimnya penyusunan laporan keuangan tersebut (Muntoro, 1990).

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sejumlah aktivitas akuntansi atau ringkasan transaksi keuangan yang dilakukan selama suatu periode waktu. Saat menentukan laporan keuangan berkualitas tinggi, keahlian akuntansi khusus diperlukan. Laporan keuangan merupakan suatu sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, sehingga harus berkualitas karena interpretasi laporan keuangan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, informasi yang diberikan juga harus berkualitas tinggi. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan (Devy dkk, 2017). Informasi akuntansi dapat berupa laporan keuangan yang sangat bermanfaat untuk banyak hal yaitu untuk mengetahui kinerja kegiatan usaha UMKM, dan menjadi dasar pengambilan keputusan kegiatan usaha UMKM, sehingga manajemen dapat menerapkan strategi yang tepat. dan secara efektif dan efisien melaksanakan aktivitas Operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Said (2009, dalam Wijaya, 2019), karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, kompleksitas proses akuntansi dan kondisi keuangan menjadikan pelaku UMKM beranggapan bahwa melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan tidak penting bagi UMKM. Selain itu keterbatasan yang dihadapi yaitu kurangnya dana untuk memperkerjakan pegawai akuntan dan pembelian software akuntansi yang dapat memudahkan pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan. Seiring berjalannya waktu, persaingan usaha semakin ketat sehingga menuntut UMKM untuk terus bersaing dan menyusun strategi bisnis serta rancangan bisnis yang dapat dilihat dari laporan keuangan. UMKM harus mampu bersaing di era globalisasi dan beradaptasi dengan lingkungan guna meningkatkan kinerja bisnisnya.

Jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan juga bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari informasi yang tercermin pada catatan akuntansi. Banyak penelitian yang telah dilakukan guna meneliti kualitas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rohmah (2016) yang menunjukkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan, sedangkan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2015) menyatakan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Sulistyawati (2020) tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian ini membahas mengenai kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pelaku UMKM di Kecamatan Jetis. Data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa jumlah UMKM per tahun 2020 sebanyak 976 unit usaha di kecamatan jetis. Adapun pertanyaan penelitian yang diutarakan dalam penelitian ini yaitu apakah lama usaha dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Jetis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Jetis.

Dalam hal ini, teori *enterprise* menunjukkan bahwa perusahaan akan dianggap sebagai organisasi sosial, dan operasinya akan menguntungkan banyak pihak terkait. Dalam konsep teori *enterprise* yang menjadi fokus perhatian perusahaan, mengacu pada semua pihak atau pihak yang berkepentingan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Para pihak tersebut meliputi pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor, karyawan dan pihak terkait lainnya. Menurut teori ini,

para pihak harus berhati-hati saat memberikan informasi laporan keuangan. Menurut teori ini, akuntansi seharusnya tidak hanya berfokus pada informasi pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi bagi eksistensi dan kesuksesan perusahaan atau organisasi (Harahap, 2007: 74).

Sedangkan menurut Belkaoui (2006), dalam “*Enterprise Theory*” perusahaan dipandang sebagai suatu institusi sosial yang beroperasi di dalam interaksi kepentingan banyak kelompok. Perusahaan sedapat mungkin dalam operasinya mengakomodasikan perbedaan kutub-kutub kepentingan dari berbagai kelompok sosial yang terkait dengan eksistensi dan prestasi perusahaan. Secara luas, kelompok-kelompok ini terdiri dari pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Bila ditinjau dari perspektif kegunaan laporan keuangan, dapat menggolongkannya dalam tiga kelompok kepentingan: yaitu perusahaan, pemakai laporan keuangan, dan kelompok profesi akuntan. Berbagai kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga perusahaan dalam *Enterprise Theory* dipandang sebagai pusat interaksi dan negosiasi kepentingan berbagai kelompok tersebut. Dari sisi akuntansi, ini berarti bahwa tanggung jawab untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang baik dan akuntabilitasnya harus terdistribusikan secara jujur dan fair kepada seluruh kelompok pemakai laporan keuangan dan masyarakat luas.

Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi mengenai informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu entitas selama kegiatan usaha berlangsung. Menurut Fajri (2013) kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas suatu laporan keuangan dapat diistilahkan baik apabila laporan keuangan berisi mengenai informasi yang telah disajikan pada laporan keuangan tersebut dapat dipahami dengan seksama, serta dapat memenuhi kebutuhan pemakainya untuk pengambilan suatu keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014).

Kualitas laporan Keuangan merupakan hal yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi (Baihaqi, 2017). Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkonsumsikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan dilihat dari seberapa lengkapnya catatan keuangan, kedisiplinan dalam mencatat transaksi, dan komponen laporan keuangan sampai membentuk laporan keuangan

Usaha kecil dan menengah (UMKM) sedang gencar-gencarnya di Indonesia. Pasalnya, UMKM merupakan salah satu badan usaha yang dapat menopang perekonomian Indonesia. UMKM dapat membuka lowongan kerja untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, UKM merupakan salah satu industri yang menopang perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 UMKM dapat diartikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria UMKM tertuang pada pasal 6 Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro. Usaha mikro memiliki kekayaan aset maksimal 50 juta termasuk tanah dan bangunan. Mendapatkan hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta
- 2) Kriteria Usaha kecil. Memiliki kekayaan berish maksimal >50 dan paling banyak 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan tahunan >300 juta ->3,5 milyar
- 3) Kriteria Usaha Menengah. Memiliki kriteria aset >500 juta -10 M dengan omset >2,5 M -50 M. Memiliki hasil penjualan tahunan >300 juta sampai dengan Rp.2 milyar lima ratus ribu rupiah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan juantitatif didapatkan dengan cara memperoleh data berupa angka atau data yang dibuat menjadi angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu berupa jawaban dari kuisioner yang telah diberikan kepada responden mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Jetis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah populasi pada tahun 2020 sebanyak 976 pelaku UMKM, penentuan jumlahresponden dihitung dengan menggunakan rumus *solvin* sehingga didapatkan hasil jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, dan diolah menggunakan software SPSS 20. Uji kualitas data dengan melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalits, uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heteriskedastisitas. Sedangkan untuk meguji hipotesis digunakan uji T, uji F dan uji determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4,44037091
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,042
Kolmogorov-Smirnov Z		,702
Asymp. Sig. (2-tailed)		,708

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa data memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,708. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, data yang dianalisis dalam penelitian ini berdistribusi normal

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
kualitas laporan keuangan * lama usaha	Between Groups	(Combined)	258,547	3	86,182	2,317	,080
		Linearity	140,582	1	140,582	3,779	,055
		Deviation from Linearity	117,965	2	58,982	1,586	,210
	Within Groups		3571,243	96	37,200		
	Total		3829,790	99			
kualitas laporan keuangan * pemahaman akuntansi	Between Groups	(Combined)	1511,789	14	107,985	3,960	,000
		Linearity	1231,042	1	1231,042	45,142	,000
		Deviation from Linearity	280,747	13	21,596	,792	,667
	Within Groups		2318,001	85	27,271		
	Total		3829,790	99			

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Hasil pengujian linieritas antara lama usaha dengan kualitas laporan keuangan menghasilkan signifikansi sebesar 0,210, hubungan antara pemahaman akuntansi dengan

kualitas laporan keuangan menghasilkan signifikansi sebesar 0,667. Hasil pengujian linieritas dari keempat variabel masing-masing baik jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan menghasilkan signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	lama usaha	1,000	1,000
	pemahaman akuntansi	1,000	1,000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa *tolerance* lama usaha adalah 1,000 dan VIF 1,000, dan pemahaman akuntansi mempunyai nilai *tolerance* 1,000 dan VIF 1,005. Semua nilai *tolerance* berada diatas 0,1 dan semua nilai VIF berada dibawah 10. Hal ini menyatakan bahwa dalam model regresi tidak ada korelasi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,179	1,360		1,602	,112
	lama usaha	,095	,176	,054	,537	,592
	pemahaman akuntansi	-,028	,063	-,045	-,445	,657

a. Dependent Variable: Ln_Res2

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas dengan menggunakan uji park, kedua variabel menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05. Variabel lama usaha sebesar 0,592, variabel pemahaman akuntansi 0,657. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil Penelitian

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	48,649	3,658		13,300	,000
	lama usaha	1,143	,474	,196	2,413	,018
	pemahaman akuntansi	1,184	,169	,568	6,998	,000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 48,649 + 1,143 X_1 + 1,184 X_2 + e$$

Persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta menunjukkan angka 48,649. Hal ini mengartikan bahwa variabel kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 48,649 apabila variabel lama usaha dan pemahaman akuntansi sama dengan nol.

Pembahasan

Pengaruh Lama Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini variable Lama Usaha (X1) memiliki nilai koefisien beta sebesar 1,143. Hal ini memberikan arti bahwa setiap peningkatan lama usaha maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 1,143. Dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Sedangkan nilai dari t tabel ($2,413 < 1,661$) dengan signifikansi sebesar 0,018 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 didukung dan H_a tidak didukung, artinya jam kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa durasi usaha tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Lama usaha UMKM secara langsung dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dalam hal ini lama tidaknya umur usaha yang telah ditempuh pelaku UMKM dapat mempengaruhi pandangannya mengenai laporan keuangan. Pelaku UMKM yang memiliki usia usaha yang rendah, sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai laporan keuangan. Sehingga pelaku UMKM tidak dapat menyusun laporan keuangan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2015) yang menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung teori mengenai pengaruh lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan. Secara konsep, menyatakan bahwa semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan mengakibatkan adanya perkembangan usaha yang signifikan kearah yang positif atau negatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif artinya jika lama usaha meningkat, maka kualitas laporan keuangan juga meningkat, karena semakin lama sebuah usaha berdiri semakin sering dalam penggunaan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sehingga usaha yang bersangkutan dapat terus beroperasi atau memiliki kelangsungan hidup usaha yang panjang.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini variable Pemahaman Akuntansi (X_2) memiliki nilai koefisien beta sebesar 1,184. Hal ini memberikan arti bahwa setiap peningkatan pemahaman akuntansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 1,184. Dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Sedangkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($6,996 > 1,661$) dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan sebagai bahwa H_0 didukung dan H_a tidak didukung hal ini berarti pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menerima hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Pemahaman akuntansi pelaku UMKM secara langsung dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai akuntansi dibandingkan dengan pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman akuntansi. Sehingga dapat dinyatakan pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung teori mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan konsep jika seorang pelaku UMKM memiliki pengetahuan akuntansi yang cukup, maka pelaku UMKM akan melakukan pembukuan laporan keuangan dengan baik, terutama untuk pengusaha yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi dan tingkat pendidikan SMA/AMK/MA. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai akuntansi dibandingkan dengan pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman akuntansi. Sehingga dapat dinyatakan pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa F hitung 27,264 dan F tabel sebesar 2,698 dengan signifikansi sebesar 0,000 dengan probabilitas $< 0,05$. Karena F

hitung lebih besar dari F tabel ($27,264 > 2,698$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) maka dapat diartikan bahwa jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1378,173	2	689,087	27,264	,000 ^b
	Residual	2451,617	97	25,274		
	Total	3829,790	99			

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

b. Predictors: (Constant), pemahaman akuntansi, lama usaha

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,600 ^a	,360	,347	5,027

a. Predictors: (Constant), pemahaman akuntansi, lama usaha

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber: Data Primer (2021) diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai R square (R^2) yaitu 0,360. Hal ini menunjukkan bahwa 36% variabel lama usaha dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan 64 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PENUTUP

Dari pengujian secara statistik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lama usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lama usaha dapat dengan sendirinya meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Artinya, lamanya usaha UMKM akan berpengaruh langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dalam hal ini, lamanya pelaku UMKM menggeluti usaha dapat mempengaruhi pandangannya terhadap laporan keuangan. Umur usaha UMKM yang rendah menjadikan kurangnya pengalaman dalam mengelola usaha sehingga dapat mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, UMKM yang memiliki usia rendah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2015) yang menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman akuntansi itu sendiri dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Artinya pemahaman akuntansi pelaku UMKM dapat secara langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memahami akuntansi akan memiliki pengetahuan akuntansi yang lebih baik daripada pelaku UMKM yang tidak memahami akuntansi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, Putra. 2010. Teori Akuntansi : Konsep-Konsep Dasar Akuntansi Keuangan. Buku Satu. Buku Ajar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Baron, R. A., & Donn, B. (2000). Social Psychology (9 ed.). USA: Allyn & Bacon
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. Teori Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.

- Devi, P. S., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. G. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2)
- Fajri, Sri Nurul, 2013. Kualitas Pelaporan Keuangan : Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomi. Jakarta: Selemba Empat
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, S., 2007. Teori Akuntansi, Edisi Revisi. Jakarta: PI. Raja Grafindo Pustaka
- Husaini, A. F. (2017). Pengaruh Modal Kerja, Iama Usaha, Jam Kerja dan Iokasi Usaha terhadap Pendapatan Monza di Pasar Simalingskar Medan. *Jurnal Visioner & Strategis*, 6(2), 111–126
- Ismail, V. Y., & Zain, Y. (2008). Peranan Sikap, Norma Subjektif, dan Perceived Behavioral Control terhadap Intensi Pelajar SLTA untuk Memilih Fakultas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3).
- Julyanda, I., & Rejeki, D. (2018). Pengaruh Jenjang Pendidikan, Ukuran Usaha, Lama Usaha dan Latar Belakang Pendidikan atas Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 17-18
- Lohanda, D. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Iaporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Umkm. *Prodi Akuntansi UNY*.
- Michener, H. A., Delamater, John, D., & Myers, J. D. (2004). *Social Psychologi* 5th. United State: Thomson Learning, Inc.
- Mulyani, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Iaporan Keuangan Pada Umkm Di Kabupaten Kudus Kata. *JDEB*, 11(2), 137–150
- Muntoro, R. K, 1990, *Praktek Akuntansi Keuangan*, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- Nugroho, D. M. (2017). Pengaruh Informasi Dan Sosialisasi Akuntansi, Serta Ukuran Usaha Terhadap Pemahaman UMKM Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada UMKM Batik Di Surakarata). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Putri, A. H. K. (2017). Pengaruh Faktor Iatar Belakang Pendidikan Terhadap KualItas Iaporan Keuangan Melalui Penegtaahuan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ihtiyath*, 1(2), 32–52
- Rohmah, I. U. (2016). Skripsi Analisis faktor yang mempengaruhi umkm dalam penyusunan Iaporan keuangan pada umkm kecamatan kepanjen. *FE UIN Maulana MaIk Ibrahim*.
- Smartdyanda, Ihsan. (2014). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Motivasi, dan Pelatihan Kerja Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Sulistiyawati, Sri. Skripsi Pengaruh Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan, Ukuran Usaha, Pemberian Informasi, dan Sosialisasi Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Kabupaten Tegal). *FE Universitas Pancsakti Tegal*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).
- Wijaya, K. (2019). Pengaruh KualItas Iaporan Keuangan Terhadap Umkm Serta Prospek Implementasi Sak Etap. *Jurnal Ecobisma*, 6(2), 1–21.
- Zakiah, Nidauz. (2020). Skripsi Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Motivasi Kerja dan Pengalaman Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Bojong). *FE Universitas Pancsakti Tegal*

Perbandingan *Return On Asset, Return On Equity, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin* Sebelum dan Semasa Covid-19 Pada PT. Matahari Departement Store, Tbk

Company Financial
Ratios and
Covid-19 Pandemic

61

Jefriyanto

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau
EMail: jefriinfo@gmail.com

Submitted:
DESEMBER 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of covid-19 on profitability at PT. Matahari Department Store, Tbk. Profitability is the ratio used to measure the level of profit obtained from sales and investment. Profitability concerns are Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM) and Net Profit Margin (NPM). The data is secondary data which includes financial reports for 2019 and 2020. The analysis tools is the profitability ratio and for analyzing the data, this study uses a descriptive method. The results of this study indicate that ROA, ROE, GPM, OPM and NPM have decreased between 2019 and 2020. This is because companies no longer have any profits in 2020. This decrease is due to the covid-19 outbreak which has caused national and international economies issues, including PT. Matahari Department Store, Tbk.

Keywords: Profitability, ROA, ROE, GPM, OPM, NPM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya covid-19 terhadap profitabilitas pada PT. Matahari Departemen Store, Tbk. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang didapat dari penjualan dan investasi. Profitabilitas menyangkut Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM) dan Net Profit Margin (NPM). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Alat analisis yang digunakan adalah rasio profitabilitas dan dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, ROE, GPM, OPM dan NPM mengalami penurunan antara tahun 2019 dan 2020. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah tidak lagi membukukan laba pada tahun 2020. Penurunan ini akibat terjadinya wabah covid-19 yang membuat ekonomi nasional dan internasional mengalami penurunan, termasuk PT. Matahari Departement Store, Tbk.

Kata Kunci: Profitabilitas, ROA, ROE, GPM, OPM, NPM

PENDAHULUAN

Pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.01 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan menjadi lebih bermakna, laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunaannya sehingga perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 61-66
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepa tatas laporan keuangan itu sendiri (hery, 2016). Analisis rasio keuangan bagian analisis prestasi yang di dalamnya terdapat penjelasan keterkaitan antar laporan keuangan dengan tujuan menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan rasio dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. (fahmi, 2015)

Kebijakan perusahaan yang menyangkut dengan keuangan, keputusan yang diambil pihak pemangku kepentingan sebaiknya diputuskan berdasarkan rasio keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap keputusan yang dibuat dalam hal keuangan, tidak salah dalam hal memberikan informasi yang berguna kepada pihak-pihak terkait. Sangat Penting untuk berhati-hati dalam memutuskan kebijakan manajemen perusahaan, karena berhubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan. Kesalahan menentukan keputusan, akan berakibat pada kerugian. Pertimbangan keputusan yang dikeluarkan dengan berdasar pada rasio keuangan merupakan langkah yang bijak. Pasalnya, manajemen bisa memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, lebih tahu langkah apa saja yang harus dilakukan agar perusahaan dapat bertahan. Wajar, bila sering menemui perusahaan yang melakukan PHK para karyawannya. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat bertahan selama beberapa tahun ke depan. Disamping itu, rasio keuangan digunakan untuk menyelamatkan aset perusahaan, serta meminimalisir resiko kebangkrutan.

Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Maka untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakanlah rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas. (Kasmir, 2012) mengatakan, rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, karena menunjukkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Setelah mengetahui hasil perkembangan maka akan dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini. Bila sudah berjalan dengan baik maka harus dipertahankan untuk menjadi lebih baik tetapi bila tidak berjalan dengan baik maka pihak manajemen harus berusaha memperbaikinya. Oleh karena itu, rasio ini disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Maulan irwadi (2017) melakukan penelitian tentang analisis rasio unutm menilai kinerja keuangan pada PT Sarwa Karya Wiguna Palembang dengan hasil bahwa GPM terus mengalami peningkatan, kinerja perusahaan sudah baik karena berada diatas standar rasio industri perusahaan sejenis. Perusahaan sudah baik dalam mengendalikan biaya penjualan serta meningkatkan penjualan. Namun untun NPM dan ROI menunjukan bahwa kinerja perusahaahn tidak sehat. Perusahaan tidak dapat menekan biaya-biaya yang tidak perlu sehingga perusahaan tidak mampu memaksimalkan laba bersih yang diperoleh. Perusahaan terlalu banyak melakukan investasi diluar perusahaan.

Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi kebanyakan perusahaan dalam menjalankan usahanya dikarenakan wabah covid-19 yang melanda hampir seluruh penjuru dunia. Banyak pengusaha yang memutuskan memberhentikan karyawan atau bahkan tidak sedikit yang memutuskan menyudahi usahanya. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan dalam hal pembiayaan semua sektor baik internal maupun eksternal dalam keadaan yang kurang memungkinkan. Di kala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemic Covid-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian Negara. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang

bisa dibidang “sangat tidak stabil”. berdasarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk “di rumah saja” maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga pun otomatis meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada Triwulan 1 2020 juga turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negative seiring dengan diberlakukannya PSBB. (kompas.com, 2020)

Kajian penelitian ini menyangkut *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, dan *Net Profit Margin* dengan membandingkan tahun 2019 dan 2020 untuk dapat melihat ada atau tidaknya perbedaan profitabilitas yang signifikan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. Yaitu PT. Matahari Departemen Store, Tbk.

Profitabilitas merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (hery, 2016). Disamping untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, profitabilitas juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Profitabilitas juga merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu.

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu” (Hanafi, 2008:42). Semakin tinggi Return on Asset suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Return on Asset perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi saham, karena Return on Asset berperan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba: **$ROA = \text{Laba Bersih} : \text{Total Aset}$**

Return on Equity mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu” (Hanafi, 2008). Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi, para investor dapat menggunakan indikator ROE sebagai bahan pertimbangan dalam memilih saham atau menanamkan modalnya, karena rasio ini menunjukkan bahwa dengan kinerja manajemen meningkat maka perusahaan dapat mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih sehingga saham perusahaan banyak diminati investor. **$ROE = \text{Laba Bersih} : \text{Total Modal}$**

Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan. (hery, 2016). Semakin tinggi GPM berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan oleh penjualan bersih. GPM merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan. Karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah Gross Profit Margin semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsudin, 2009). **$GPM = \text{Laba Kotor} : \text{Penjualan Bersih}$**

Operating Profit Margin (OPM). Rasio ini menggambarkan beban-beban operasional perusahaan serta harga pokok penjualannya. Menurut Syamsudin (2009) semakin tinggi

Operating Profit Margin akan lebih baik pula operasi perusahaan. Operating Profit Margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. Operating Profit Margin merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan (Syamsudin, 2009). **OPM = $\frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$**

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih (hary, 2016). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan disini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. **NPM = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$**

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Proses tersebut meliputi pengelolaan data, penjabaran hasil penelitian secara deskriptif serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat kualitatif dengan membandingkan antara fakta-fakta yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah PT. Matahari Departemen Store, Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2012) mengatakan Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. atau data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data mentah yang perlu diolah lagi, Dan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan cara studi pustaka dengan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif, menurut Sugiyono (2001) metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, penulis menggunakan alat analisis Rasio Profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Profitabilitas PT Matahari Departemen Store, Tbk. 2019-2020

No	Keterangan	Tahun	
		2020	2019
1	ROA	(0,14)	0,28
2	ROE	(1,5)	0,78
3	GPM	0,71	0,76
4	OPM	(0,15)	0,22
5	NPM	(0,22)	0,17

ROA digunakan sebagai pengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Dari hasil perhitungan ROA dalam table, dapat dilihat jelas bahwa ROA 2019 Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ROA 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 perusahaan tidak mengalami laba. PT Matahari Departemen Store mengalami kerugian -873.181 (dalam jutaan). Jadi, asset 2020 tidak memiliki kontribusi untuk menghasilkan laba bersih. Berbeda hal dengan tahun 2019, dimana asset memiliki kontribusi menciptakan 0,28 laba bersih. ROE digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total modal. Sama halnya dengan ROA, untuk tahun 2020 Modal tidak memiliki kontribusi dalam menghasilkan laba bersih perusahaan. Sedangkan pada tahun 2019 Modal masih berkontribusi 0,78 dalam hal

menghasilkan laba bersih perusahaan. GPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. GPM tahun 2019 lebih baik dari 2020 yaitu 0,76 dan 0,71. Namun pada tahun 2020 perusahaan masih mampu mengantongi laba kotor 0,71 dari total penjualan bersihnya. OPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasi terhadap penjualan bersih. Besarnya laba operasional untuk tahun 2019 adalah 0,22, artinya besarnya laba operasional adalah 0,22 dari total penjualan bersih. hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2020 dimana perusahaan mengalami minus pada laba operasi (-626.706). NPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. NPM tahun 2019 adalah 0,17, artinya penjualan bersih masih mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,17. Berbeda dengan tahun 2020 dimana seperti diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian. Penjualan bersih tidak mampu menciptakan laba bersih perusahaan.

Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan jika dalam situasi terburuk, ekonomi Indonesia bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. dari sektor industri banyak para pengusaha yang bahkan memberhentikan proses produksi diikuti dengan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil penjualan sebelum dan semasa covid-19 terjadi, yaitu 10,276,431 untuk tahun 2019 dan 4,839,058 untuk tahun 2020, dimana penurunan penjualan ini hamper mencapai angka 50%. PT. Matahari departemen Store tahun 2019 masih membukukan laba sebesar 1,366,884. Sedangkan tahun 2020 kerugian yang dibukukan mencapai angka 873,181.

PENUTUP

Analisis profitabilitas yang dilakukan menyangkut ROA, ROE, GPM, OPM, dan NPM di temukan hasil bahwa ROA 2019 Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ROA 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian. Berbeda hal dengan tahun 2019, dimana asset memiliki kontribusi menciptakan 0,28 laba bersih. ROE Sama hal nya dengan ROA, untuk tahun 2020 Modal tidak memiliki kontribusi dalam menghasilkan laba bersih perusahaan. Sedangkan pada tahun 2019 Modal masih berkontribusi 0,78 dalam hal menghasilkan laba bersih perusahaan. GPM tahun 2019 lebih baik dari 2020 yaitu 0,76 dan 0,71. Namun pada tahun 2020 perusahaan masih mampu mengantongi laba kotor 0,71 dari total penjualan bersihnya. OPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasi terhadap penjualan bersih. Besarnya laba operasional untuk tahun 2019 adalah 0,22, artinya besarnya laba operasional adalah 0,22 dari total penjualan bersih. hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2020 dimana perusahaan mengalami minus pada laba operasi (-626.706). NPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. NPM tahun 2019 adalah 0,17, artinya penjualan bersih masih mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,17. Berbeda dengan tahun 2020 dimana seperti diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian. Penjualan bersih tidak mampu menciptakan laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andres, Hendry Maith. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk*. Manado: Jurnal Universitas Sam Ratulangi
- Fahmi, Irham. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Hery, (2016). *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Grasindo.

- Company Financial Ratios and Covid-19 Pandemic* Irwadi, M. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang*. Jurnal Akuntanika, Vol 3 No. 2.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Syafri Harahap, Sofyan. 2008. *Analisa Kristis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Muhammad Aji. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Pada Perusahaan Pengakuisisi, periode 2002- 2003)*. Disertasi. Universitas Diponegoro.
- Rubianti, Nana. (2013). *Analisa Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Admiral Lines Cabang Tanjung Pinang*. Tanjung Pinang: Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji
- 66 _____ Sembiring, H. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Mediasi, 4(1), 68–77.

Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android SI APIK Untuk Menunjang Pelaporan Keuangan UMKM Studi Kasus Pada Umkm Kerupuk Ikan Ibu Sulastri Besuki

Financial
Statement and
Accounting Software

Muhammad Rofiq Hidayah¹, Diyah Probowulan²,
Rendy Mirwan Aspirandi³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No 49, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia

67

Submitted:
DESEMBER 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

This research aims to implement a new accounting system, by using the android-based accounting application Si Apik to meet operational needs in UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri. In addition, this research also aims to compare between the old system and the new system that will be applied to the company. The results of this research are expected to help the company's needs regarding the recording and financial reporting process, so that the company can know the profit or loss obtained by the company. This type of research is qualitative research with descriptive methods. This research uses data collection techniques with interviews, observations and documentation. Based on the results of the research, Si Apik application can be used easily and can meet the needs of the accounting system in UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri and fix the weaknesses of the old system, as well as with the application Si Apik company does not have to bother to make financial statements because in the application Si Apik has automatically made its own financial statements.

Keywords: *Si Apik Application; Preparation of Financial Statements*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem akuntansi yang baru, dengan menggunakan aplikasi akuntansi berbasis android Si Apik untuk memenuhi kebutuhan operasional pada UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru yang akan di terapkan pada perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu kebutuhan perusahaan mengenai proses pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi yang di dapatkan oleh perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi Si Apik dapat di gunakan dengan mudah serta dapat memenuhi kebutuhan sistem akuntansi pada UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri serta memperbaiki kelemahan sistem yang lama, serta dengan adanya aplikasi Si Apik perusahaan tidak perlu susah payah untuk melakukan penyusunan laporan keuangan karena pada aplikasi Si Apik sudah otomatis membuat laporan keuangan sendiri.

Kata kunci : Aplikasi Si Apik; Penyusunan Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Berkembangnya suatu teknologi pada saat ini menuntut berbagai kalangan untuk melakukan suatu perubahan, terutama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan suatu informasi. Saat ini sudah menjadi kebutuhan bahwa teknologi informasi membawa banyak kemudahan bagi para pemakainnya. Kemudahan yang di tawarkan oleh teknologi informasi ini memberikan kemudahan untuk pemrosesan data data keuangan yang semula menggunakan pemrosesan data manual menjadi tersistem dengan adanya

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 67-78
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

bantuan dari teknologi informasi. Teknologi saat ini dapat digunakan dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan software yang di terapkan melalui perangkat keras komputer dan saat ini telah ada fitur yang lebih baru yakni menggunakan aplikasi yang telah tersistem dalam sebuah android yang ada pada smartphone. Tujuan dari perkembangan ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja Sistem Informasi Akuntansi agar sesuai dengan lingkungan perusahaan dimana Sistem Informasi Akuntansi tersebut dijalankan.

Saat ini, ponsel pintar sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha. Salah satu ponsel pintar yang digunakan oleh masyarakat adalah ponsel pintar berbasis android. Selain penggunaannya yang lebih mudah, ponsel pintar berbasis android mempunyai harga yang relative terjangkau bagi masyarakat. Ponsel pintar saat ini banyak menyediakan fitur-fitur yang dikembangkan oleh pengembang aplikasi berbasis android untuk memudahkan bagi para pengguna aplikasi berbasis android, seperti adanya fitur keuangan dan media sosial.

Permasalahan umum yang biasanya dialami oleh pelaku UMKM adalah mengenai pengaturan tata kelola keuangan, baik dari segi pencatatan transaksi sampai pada pelaporan keuangan perusahaan. Terkait dengan permasalahan pengelolaan keuangan yaitu perusahaan tersebut belum pernah melakukan pencatatan transaksi dan belum memiliki sistem pembukuan yang baik. Pemilik UMKM juga mengungkapkan bahwa mereka kesulitan untuk mencatat laporan transaksi karena tidak adanya pengetahuan mengenai pencatatan laporan keuangan dengan baik dan benar.

Sistem yang baik akan berdampak baik pula bagi perusahaan serta dapat mengurangi resiko kesalahan dalam menangani semua transaksi-transaksi yang jumlahnya tidak sedikit dan transaksi yang terjadi secara terus menerus. Aplikasi akuntansi yang baik digunakan untuk mencatat semua transaksi berupa laporan keuangan yang bermanfaat bagi perusahaan. Aplikasi Si Apik menyediakan fitur-fitur laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan arus kas.

UMKM Kerupuk Ikan Ibu sulastri belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Perusahaan ini dari memulai usaha sampai saat ini belum melakukan pencatatan keuangan, semua transaksi penjualan tidak dibuatkan nota penjualan hanya beberapa pelanggan saja yang meminta di buatkan nota, pemilik membuatnya, sehingga bukti transaksi tidak tersipkan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan karena UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri belum melakukan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Padahal dalam kegiatan usaha, laporan keuangan sangatlah penting untuk keberlangsungan usaha. Alasan utama UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri tidak melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah karena mereka beranggapan bahwa mencatat transaksi dan laporan keuangan merupakan hal yang sangat sulit dan juga tidak adanya tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya.

Mulyana (2015), Laporan keuangan adalah sebagai alat penguji dari pekerjaan dibagian pembukuan yang digunakan untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui atas posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.

Android adalah suatu sistem operasi yang merupakan sumber terbuka dan Google merilis kode lisensinya. Rianto (2014:662), mengungkapkan bahwa android adalah sistem oprasi berbasis linux yang di rancang untuk perangkat seluler layar sentuh, seperti telepon pintar dan komputer tablet.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang di lakukan pada saat ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif yang akan dilaksanakan di UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri di Desa Besuki Situbondo. Sekarana dan Bougie (2017:3), berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat. Kalimat tersebut di peroleh dari jawaban yang di peroleh dari wawancara langsung kepada narasumber ataupun bisa melalui observasi

bahkan juga bisa dari informasi yang tersedia dan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti melalui media social atau internet.

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dari pemilik UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri tentang pencatatan transaksi keuangan yang sangatlah penting diterapkan. Serta peneliti ingin menerapkan sistem baru yaitu dengan mencatat transaksi keuangan di UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri menggunakan alat elektronik yang canggih berupa Aplikasi berbasis android yaitu Aplikasi Si Apik, yang sangatlah mudah di gunakan dan mudah dipahami oleh setiap pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Sistem yang Sedang Berjalan

Tahap awal dalam penerapan sistem yang baru adalah melakukan identifikasi terhadap sistem akuntansi yang sedang berjalan di perusahaan. Identifikasi tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan perusahaan dalam menerapkan sistem baru yang akan di terapkan. Hasil identifikasi pada komponen sistem akuntansi. Komponen sistem akuntansi yang sedang berjalan di UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri sebagai berikut:

a) Pengguna

Pengguna sistem akuntansi yang ada di perusahaan adalah pemilik UMKM itu sendiri yaitu Ibu Sulastri. Pemilik UMKM juga berperan sebagai bagian keuangan yang mengatur semua keuangan perusahaan serta mengatur dan mencari karyawan untuk di jadikan pegawai di perusahaannya.

b) Prosedur

Di dalam UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri terdapat prosedur. Prosedur tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Konsumen memilih barang yang terdapat di etalase barang yang ada di perusahaan. Etalase barang tersebut berisi barang dagang yang sudah siap di jual kepada konsumen yang datang langsung ke tempat. Selain itu penjualan juga bisa melihat barang dan memesannya di media sosial yang sudah tersedia di Instagram dan bisa memesannya melalui WhatsApp bagi konsumen yang ingin membeli secara online.
- b. Perusahaan akan memproses pesanan yang telah di lakukan oleh konsumen. Setelah barang jadi, perusahaan akan mengirimkan barang sesuai pesannya ke alamat yang telah diberikan konsumen dengan catatan minimal pembelian 20kg ke atas dan hanya sekitaran kota besuki, atau konsumen bisa datang langsung ke tempat mengambil barang pesannya.

c) Data

Data yang di dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Data tersebut terdiri sebagai berikut:

a. Dokumen

Dokumen tersebut adalah dokumen yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu nota penjualan. Perusahaan memberikan nota tersebut apabila ada konsumen yang meminta di berikan nota saja.

b. Catatan Akuntansi

Di dalam perusahaan, pemilik melakukan pencatatan akuntansi yang di catat dalam sebuah buku. Pencatatan pada buku tersebut berisi tentang daftar nama dan alamat pelanggan, serta penerimaan kas dari konsumen.

d) Perangkat lunak

Pemilik UMKM menggunakan perangkat lunak hanya di gunakan untuk melakukan kegiatan promosi di media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*. Perusahaan belum menggunakan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasionalnya seperti kegiatan pencatatan keuangan.

Analisis Kelemahan

Dalam analisis kelemahan penulis meneliti tentang analisis kelemahan sistem yang sedang berjalan di perusahaan. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu mengidentifikasi

kelemahan tentang sistem akuntansi yang terdapat di UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri. Berikut hasil dari analisis kelemahan yang di peroleh dari hasil wawancara :

- a) Tidak semua transaksi penjualan di buatkan nota. Perusahaan memberikan nota penjualan hanya kepada konsumen yang memintanya saja dan perusahaan juga beranggapan menggunakan kertas yang di jadikan nota dianggap membutuhkan biaya tambahan untuk membeli kertas.
- b) Sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdapat di perusahaan masih belum efektif. Hal tersebut di sebabkan karena perusahaan belum memiliki sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan akuntansi dan kurangnya pengetahuan pemilik UMKM mengenai kegiatan pencatatan laporan keuangan.

Analisis Kebutuhan

Berdasarkan wawancara langsung kepada pemilik UMKM Kerupuk yaitu Ibu Sulastri. Penulis mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu perusahaan memerlukan sistem yang baru untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada sistem yang lama. Berikut analisis kebutuhan UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri :

- a) UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri membutuhkan aplikasi pencatatan keuangan yang mudah dan efisien. Perusahaan juga membutuhkan aplikasi yang dapat di gunakan untuk melakukan pelaporan keuangan yang baik dan akurat pada saat membuat laporan keuangan perusahaan.
- b) Pada sistem yang berjalan, pemilik UMKM Krupuk Ikan yaitu ibu sulastri belum memiliki bukti transaksi yang baik, hal ini dikarenakan tidak semua transaksi di buatkan nota penjualan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam segala kegiatan terutama kegiatan pencatatan transaksi yang ada di perusahaan. Sehingga bukti transaksi penjualan dapat tersampaikan dengan baik.

Analisis Kelayakan Penerapan Si Apik

Penulis menggunakan analisis kelayakan penerapan Si Apik pada perusahaan dengan menggunakan metode kelayakan TELOS. Analisis ini digunakan untuk melihat apakah perangkat lunak ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan oleh pemilik UMKM Krupuk Ikan yaitu Ibu Sulastri.

1. Analisis Kelayakan Teknik

Berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis. Penulis memperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a) Didalam penerapannya, teknologi yang di gunakan pada perusahaan yaitu aplikasi Si Apik ini cukup praktis serta memudahkan penggunanya untuk melakukan pencatatan transaksi. Aplikasi Si Apik ini di katakan aplikasi yang cukup praktis di gunakan karena terdapat pada ponsel yang bisa di bawa ke mana saja.
- b) Pemilik perusahaan memiliki suatu perangkat keras (*hardware*) yaitu berupa ponsel pintar android. Dimana ponsel pintar tersebut sebelumnya hanya digunakan untuk kegiatan promosi di media sosial saja, namun pada saat ini pemilik bisa memanfaatkan ponsel pintar tersebut tidak hanya untuk bahan promosi saja namun juga bisa di gunakan untuk menerapkan sistem yang baru yaitu aplikasi Si Apik untuk mempermudah dalam proses kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

2. Analisis Kelayakan Ekonomi

Pada analisis ini penulis melakukan observasi. Observasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan manfaat serta biaya yang di perlukan apabila perusahaan menerapkan aplikasi Si Apik ini pada perusahaan. Berikut hasil informasi yang di peroleh oleh penulis sebagai berikut :

- a) Untuk mengunduh aplikasi Si Apik ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana di karenakan aplikasi tersebut sudah tersedia pada ponsel pintar dan bisa di unduh secara gratis. Perusahaan hanya perlu modal paket data (pulsa) yang hanya di gunakan untuk mengakses internet yaitu hanya untuk digunakan menginstal aplikasi tersebut. Aplikasi Si Apik sendiri dalam penggunaannya tidak memerlukan koneksi internet.

b) Perusahaan bisa melakukan pencatatan transaksi dengan mudah dan sangat praktis di gunakan. Hal tersebut sebanding dengan penerapan aplikasi tersebut yang bebas biaya untuk mengaksesnya.

3. Analisis Kelayakan Legal atau Hukum

Pada aplikasi akuntansi Si Apik ini merupakan aplikasi yang sudah memiliki standart tersendiri yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Jadi sistem aplikasi Si Apik ini sudah menjadi sistem yang baku, yang sudah diakui dan sudah dapat diterima oleh perbankan serta lembaga keuangan lainnya.

4. Analisis Kelayakan Operasional

Berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis. Penulis memperoleh hasil analisis kelayakan operasional tersebut yaitu pada penerapannya, aplikasi Si Apik dapat memenuhi sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemilik perusahaan. Pada sistem sebelumnya pemilik perusahaan masih belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standart keuangan yang berlaku pada saat ini. Dengan menerapkan aplikasi Si Apik ini, pemilik perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standart yang berlaku pada saat ini. Pemilik perusahaan dalam mengoprasikan aplikasi ini mengaku sangat terbantu sekali dalam hal untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Karena aplikasi ini sangat mudah di gunakan dengan adanya ikon bergambar yang mudah di mengerti.

5. Analisis Kelayakan *Schedhul* atau Jadwal

Pada analisis ini penulis melakukan observasi. Observasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kelayakan jadwal. Berikut informasi yang didapatkan oleh penulis :

- a) Aplikasi akuntansi Si Apik ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja karena aplikasi ini sudah ada di *smartphone*. Sehingga memudahkan penggunaanya dalam menggunakan atau mengoprasikan aplikasi tersebut tanpa ada batasan waktu.
- b) Pengguna aplikasi membutuhkan waktu yang sebentar untuk melakukan pencatatan setiap satu transaksi. Apabila perusahaan menerima banyak pesanan maka transaksi yang di catat oleh pengguna aplikasi memerlukan waktu yang sedikit lama.

6. Hasil Analisis Kelayakan TELOS

Berdasarkan analisis yang di lakukan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu menggunakan teknik analisis TELOS. Aplikasi Si Apik sudah memenuhi semua kebutuhan dalam melakukan pencatatan transaksi. Untuk mendapatkan aplikasi Si Apik dan untuk penerapannya perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Karena aplikasi ini sudah tersedia pada *smartphone* yang bisa di *install* dan di gunakan secara gratis. Dari segi kelayakan teknik bisa di lihat perusahaan mampu menerapkan dan mengoprasikan sistem yang baru yaitu menggunakan aplikasi akuntansi yang ada pada android untuk mencatat semua transaksi. Aplikasi Si Apik ini memang di rancang untuk Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) karena aplikasi ini sangat mudah di gunakan oleh usaha kecil seperti Usaha Krupuk Ikan Ibu Sulastri. Pada saat penulis melakukan observasi mengenai penerapan sistem yang baru yaitu menggunakan aplikasi berbasis android dimana pemilik Usaha Krupuk Ikan yaitu Ibu Sulastri bisa menjalankan aplikasi tanpa adanya kesulitan karena pada aplikasi ini terdapat icon gambar yang mudah di mengerti oleh pengguna.

Hasil Penerapan dan Pengujian Aplikasi Si Apik

Aplikasi Si Apik diterapkan dan diuji pada suatu usaha atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kerupuk Ikan Ibu Sulastri Besuki selama 30 hari, yaitu dimulai dari tanggal 1 November 2020 sampai tanggal 30 November 2020. Berikut adalah hasil penerapan Aplikasi Si Apik pada UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri Besuki :

1. Siklus Pengolahan Data pada Aplikasi Si Apik

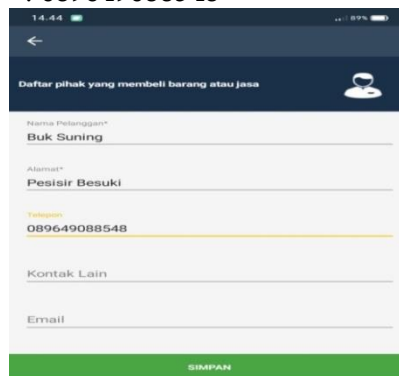
- a. Masukan (*Input*)

Input adalah kegiatan pemrosesan, memasukkan data ke dalam sistem. Pada aplikasi Si Apik semua data yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti data data pelanggan dan data barang dapat di inputkan pada fitur *master data*.

1) Data Pelanggan

Berikut merupakan salah satu contoh dalam melakukan input data pelanggan yang terjadi akibat transaksi penjualan pada tanggal 2 November 2020. Perusahaan menerima pembelian dari pelanggan, sebagai berikut :

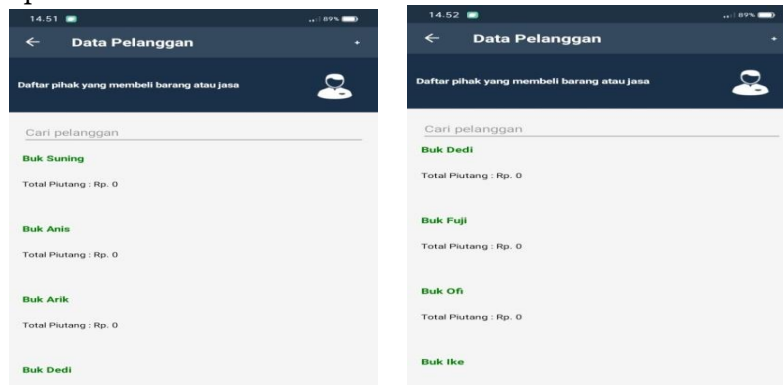
Nama : Buk Suning
Alamat : Pesisir Besuki
No Telepon : 089649088548



Gambar 1. Tampilan Menu Input Data Pelanggan

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri

Berikut merupakan salah satu contoh hasil dari *input* data pelanggan UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri. Periode 1 November 2020 – 30 November 2020.



Gambar 2. Tampilan Menu Data Pelanggan UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri



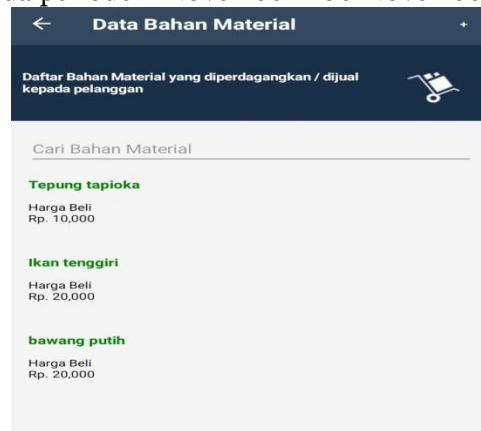
Gambar 3. Tampilan Menu Input Data Bahan material

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri

2. Data bahan material

Berikut merupakan salah satu contoh dalam melakukan input data bahan material. Dengan nama barang sebagaimana Gambar 3.

Berikut merupakan contoh data berupa daftar bahan material yang dipergunakan. Pada periode 1 November – 30 November 2020.



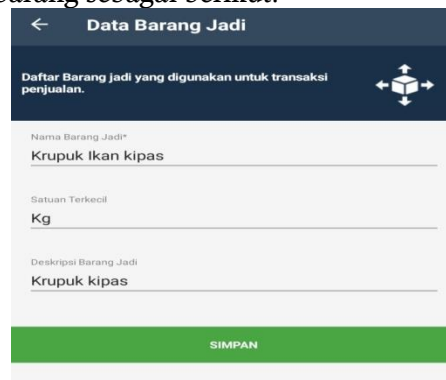
73

Gambar 4. Tampilan Bahan material UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

3. Data barang jadi

Berikut merupakan salah satu contoh dalam melakukan input data barang jadi. Dengan nama barang sebagai berikut.



Gambar 5. Tampilan Menu Input Data Barang jadi

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

Berikut merupakan contoh data berupa data barang jadi yang di gunakan untuk transaksi penjualan. Pada periode 1 November – 30 November 2020.



Gambar 6. Tampilan Barang Jadi UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

b. Proses (*process*)

Proses ialah kegiatan untuk mengolah *input* menjadi *output*. Setelah data di masukkan kedalam sistem, maka data tersebut akan di proses untuk bisa menghasilkan suatu keluaran. Aktivitas proses pada aplikasi Si Apik ini ialah melakukan transaksi penerimaan.

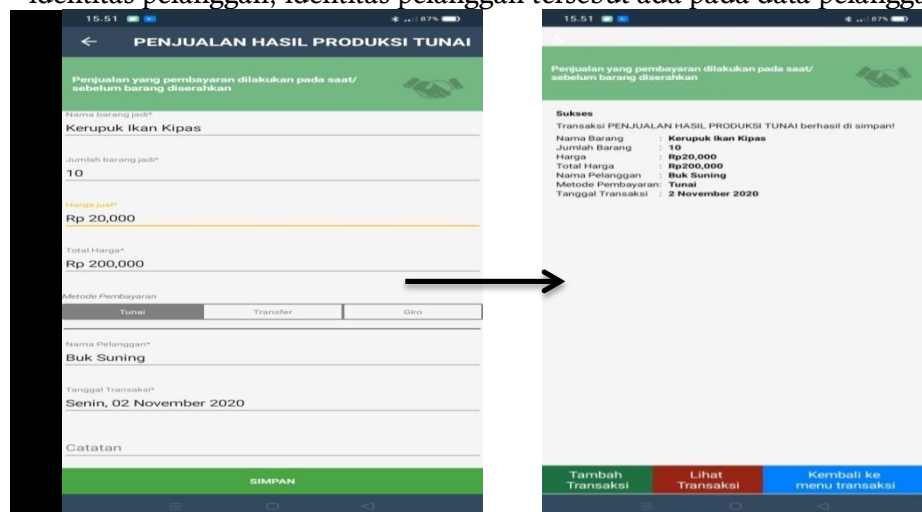
Transaksi penerimaan pada aplikasi ini meliputi transaksi penjualan, transaksi penjualan aset, transaksi penjualan aset, transaksi penjualan hasil produksi secara kredit dan penjualan ekspor hasil produksi. Berikut transaksi penjualan yang di lakukan oleh UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri.



Gambar 7. Tampilan Menu Transaksi Penjualan

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

Berikut merupakan salah satu transaksi penjualan pada tanggal 2 November 2020. Perusahaan mendapatkan pesanan barang dagangan yaitu kerupuk ikan kipas sebanyak 10kg serta kerupuk ikan terete sebanyak 5kg atas nama pelanggan Buk Suning. Untuk melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan atas nama Buk Suning. Pengguna harus terlebih dahulu menginput identitas pelanggan, identitas pelanggan tersebut ada pada data pelanggan.

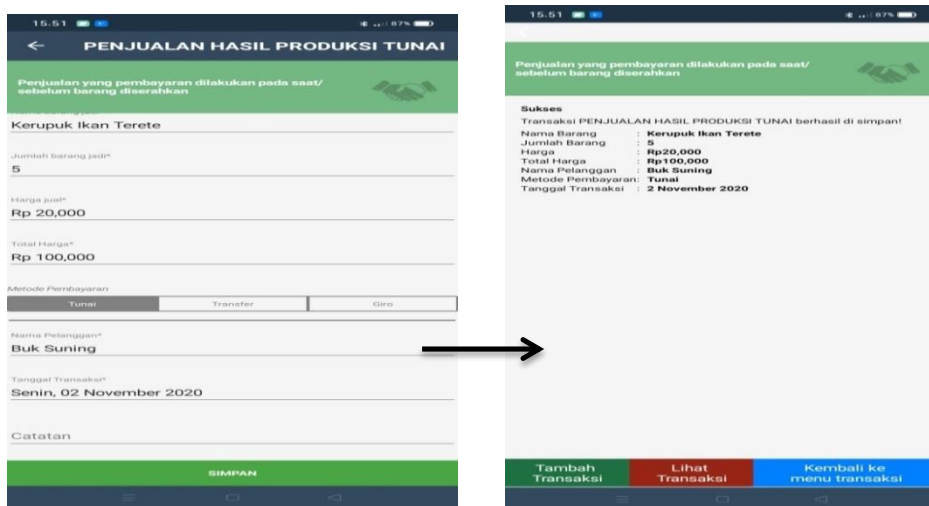


Gambar 8. Proses Transaksi Penjualan Kerupuk Ikan Kipas

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

Dalam melakukan transaksi penjualan, pengguna hanya bisa menginputkan nama barang serta jumlah barang. Harga sudah tersimpan pada *database* data barang, sehingga dalam melakukan transaksi penjualan, total harga sudah otomatis muncul pada saat pengguna menginput barang.

Pengguna hanya bisa menginput satu jenis barang saja pada satu transaksi penjualan. Sehingga untuk menginput penjualan kerupuk ikan terete, pengguna harus menginputkan pada transaksi penjualan yang berbeda. Berikut transaksi penjualan kerupuk ikan terete :



Gambar 9. Proses Transaksi Penjualan Kerupuk Ikan Terete

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

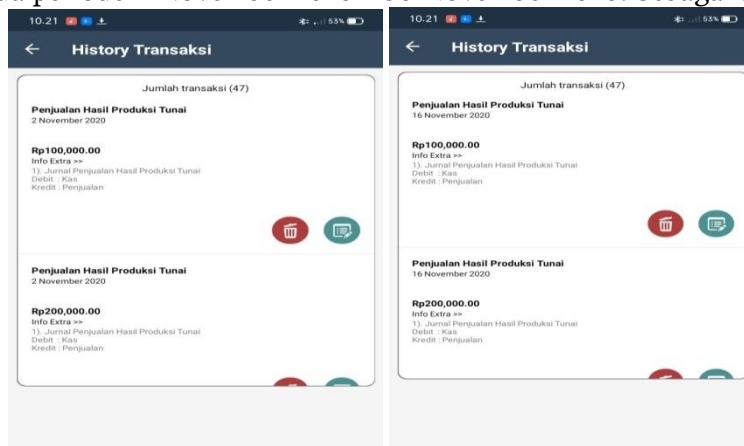
c. Keluaran (*output*)

Output atau keluaran ialah merupakan hasil dari pemrosesan data. Aplikasi Si Apik menghasilkan *output* yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan pada aplikasi ini terbagi menjadi berbagai bentuk, yaitu laporan history transaksi penjualan, laporan posisi keuangan(neraca), laporan laba rugi dan saldo laba.

Hasil dari *output* pada aplikasi ini dapat di *export* ke format lain seperti PDF dan Excel. Hal tersebut memudahkan pengguna untuk mencetak laporan keuangan kedalan bentuk kertas (*hard copy*).

1) *History* Transaksi Penjualan

Berikut merupakan salah satu contoh data berupa *history* transaksi penjualan pada periode 1 November 2020 – 30 November 2020. Sebagai berikut :



Gambar 10. Tampilan Transaksi Penjualan periode November 2020

Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri

2) Laporan Posisi Keuangan (neraca)

Berikut merupakan salah satu contoh data berupa laporan posisi keuangan pada periode 1 November 2020 – 30 November 2020. Sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan (Ne...)	
Per Tahun (November - 2020)	
Jumlah Aset	Rp6,540,000.00
Jumlah Kewajiban, Modal dan Saldo Laba	Rp6,540,000.00
ASET	Rp6,540,000.00
Kas	Rp2,340,000.00
Persediaan Bahan Material	Rp4,200,000.00
KEWAJIBAN	Rp0.00
MODAL & Saldo Laba	Rp6,540,000.00
Saldo Laba	Rp6,540,000.00

Gambar 11. Tampilan Laporan Posisi Keuangan periode November 2020
Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri

3) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Berikut merupakan salah satu contoh data berupa daftar laporan laba rugi dan saldo laba pada periode 1 November 2020 – 30 November 2020. Sebagai berikut:

Krupuk ikan ibu sulastrri Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Periode 1-30 November 2020	
Keterangan	Rupiah
PENGHASILAN	
Penjualan	Rp8,640,000.00
Penghasilan Lain	Rp0.00
Jumlah penghasilan	Rp8,640,000.00
BEBAN	
Beban Bahan Material	Rp4,200,000.00
Beban Tenaga Kerja	Rp2,100,000.00
Beban Sewa	Rp0.00
Beban Transportasi	Rp0.00
Beban Bahan Bakar	Rp0.00
Beban Listrik	Rp0.00
Beban Air	Rp0.00
Beban Telepon	Rp0.00
Beban Penyusutan	Rp0.00
Beban Umum dan Administrasi	Rp0.00
Beban Lain	Rp0.00
Jumlah beban	Rp6,300,000.00
Laba (Rugi)	Rp2,340,000.00
Saldo Laba (Rugi) Awal	Rp0.00
Penarikan Oleh Pemilik	Rp0.00
Saldo Laba (Rugi) Akhir	Rp2,340,000.00

Gambar 12. Tampilan Laporan Laba Rugi & Saldo Laba periode November 2020
Sumber : UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri

Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, sebelum menerapkan sistem yang baru pada perusahaan, sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi di UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastrri masih memiliki kelemahan. Pada sistem yang lama masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya pengelolaan keuangan secara baik, semua pencacatan transaksi akuntansi masih di lakukan secara manual. Perusahaan juga belum melakukan pelaporan keuangan selama usaha di mulai samapai sekarang, serta tidak semua transaksi penjualan di buatkan nota, hanya kalau ada konsumen yang meminta nota penjualan, perusahaan membuatnya.

Adapun fitur yang tersedia pada aplikasi Si Apik ini sudah menggunakan metode yang mudah di pahami jadi untuk para pengguna sudah tidak perlu khawatir lagi atau bingung dalam memilih transaksi, jadi pengguna hanya perlu mengkategorikan transaksi tersebut sudah termasuk golongan pengeluaran atau penerimaan. Dalam aplikasi ini sudah menyajikan tentang laporan keuangan berupa laba rugi dan neraca.

Pada analisis teknik yang di lakukan oleh penulis, aplikasi Si Apik sudah memenuhi semua penilaian pada faktor kelayakan aplikasi yang di terapkan pada perusahaan. Adapun unsur kelayakan yang sudah di nilai oleh penulis yaitu menggunakan kelayakan TELOS, Teknik(*Technical Feasibility*), Ekonomi(*Economic Feasibility*), Hukum(*Law Feasibility*), Operasional(*Operational Feasibility*), Jadwal(*Schedule Feasibility*), sudah memenuhi kriteria kelayakan. Sehingga aplikasi Si Apik dikatan layak untuk di terapkan di UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penulis, penerapan aplikasi Si Apik di UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang di peroleh UMKM Krupuk Ikan Ibu Sulastri antara lain, aplikasi ini membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan mudah. Aplikasi ini juga membantu pemilik usaha untuk mengetahui berapa besar penghasilan yang di dapatkan perusahaan serta juga membantu perusahaan dalam mengarsipkan semua data transaksi secara aman. Aplikasi Si Apik ini juga memudahkan penggunaanya dalam melakukan pencatatan dimanapun dan kapanpun, karena aplikasi ini sudah tersedia pada ponsel.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penerapan dan pengujian aplikasi Si Apik pada UMKM Krupuk Ikan Ibu sulastrri selama 1 bulan atau 30 hari. Aplikasi Si Apik sudah berhasil diterapkan, serta juga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam kegiatan operasional dalam siklus pencatatan transaksi penjualan dan laporan keuangan. Berikut kebutuhan yang terpenuhi di perusahaan :

1. Dengan menerapkan aplikasi Si Apik, perusahaan dapat melakukan semua pencatatan terutama pencatatan transaksi penjualan. Perusahaan bisa menggunakan aplikasi pencatatan akuntansi dengan mudah, praktis dan efisien. Perusahaan juga bisa melakukan pelaporan keuangan yang sederhana yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang belaku pada saat ini.
2. Semua bukti transaksi keuangan sudah tersipkan dengan baik di dalam *database* yang terdapat dalam aplikasi. Perusahaan juga bisa melihat jejak transaksi pada periode yang di inginkan, dimanapun dan kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Lailatul Jannah, Arik Susbiyani, D. P. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Barang Dagang Pada UD Syam Jaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Andrayani, I. P., & Nurendah, Y. (2013). *PROSEDUR PENJUALAN SEPEDA MOTOR PADA DEALER HONDA PT. SANPRIMA SENTOSA BOGOR* (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan).
- Elvira, J, G. (2018). *Analisis Penerapan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android Si Apik Untuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus di GR Souvenir Pundong, Bantul Yogyakarta)*. Skripsi Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta:STIE YKPN.
- Kieso et al, 2011. *Intermediate Accounting 14th Editon*. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodakarya, Bandung.
- Muanas, M., & Mulia, I. (2020). Pendampingan Penguasaan Akuntansi Dasar Bagi Pegawai BPR Mitra Daya Mandiri Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 51-56.
- Rianto, Dedi Rahadi. 2014. *Pengukuran Usability Sistem Menggunakan Use Questionnaire Pada Aplikasi Android*. Jurnal. Perorangan Pascasarjana, Universitas Bina Darma, Palembang.
- Rahardja, dkk. (2018). Penerapan *Software* Akuntnasi Online Sebagai Penunjang Pencatatan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA*. Vol.8 no(2),

- Sekarana, U,R, Bougie. 2017. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat, Edisi Keenam. Jakarta.
- Sukamto, A., & Nurachmad, E. (2020). Pelatihan Persiapan Studi Lanjut Di Jurusan Teknologi Informasi. *Jurnal Abdimas*, 4(1), 61-70.
- Sulistiono, S., & Mashadi, M. (2018). Diversifikasi Perkebunan Kopi Sebagai Tempat Wisata Di Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdimas*, 2(1), 038-042.
- Sulistiono, S., Nurendah, Y., & Mulyana, M. (2019). Mengukur Minat Studi Siswa SMA dan SMK di Kota Bogor Pada Program Studi Kewirausahaan. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 3(1), 1-12.
- Werren, Reeve, E. Duchac, Suhardianto, Kalanjati, Jusuf, D. Djakman. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Restaurant Tax ,
Advertising Tax &
Regional Revenue

79

Eka Yunita dan Yuliandi

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

E-Mail: yuliandi.kesatuan@gmail.com

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

Local Revenue is a source of original revenue derived from the potential of the region it self. Local Revenue is often used as an indicator of a region's progress. If the original income of a region is high, the economy of the area is considered advanced. The higher the Local Revenue received, the less dependency between the Regional Government on the Central Government. The largest revenue potential for Local Revenue is generated from local tax collection. One of the potential local tax revenues in Bogor City is the advertisement tax and restaurant tax. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and contribution of advertisement tax and restaurant tax to Local Revenue in Bogor City and to find out the efforts made by the Bogor City Regional Revenue Agency in increasing its local tax revenue. The research method used is descriptive qualitative method. The result of this research is that the effectiveness of the advertisement tax and restaurant tax collection in Bogor City has been very effective, proven by the average advertisement tax effectiveness ratio of 104.06% and restaurant tax of 103.93%. The contribution of advertisement tax and restaurant tax to Local Revenue in Bogor City is still not good, as evidenced by the average advertisement tax contribution ratio of 1.43% including very poor criteria, and the average restaurant tax contribution of 12.99. % is in the poor criteria. Efforts made by the Bogor City Regional Revenue Agency in increasing advertisement tax revenue and restaurant tax are by collecting taxpayer data, checking tax rates, monitoring tax administration, and building communication and establishing closeness with the community.

Keywords: *effectiveness, contribution, advertising tax, restaurant tax, local revenue*

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah seringkali dijadikan sebagai indikator atas kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan asli suatu daerah tinggi maka perekonomian daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin berkurang tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Potensi pendapatan terbesar Pendapatan Asli Daerah yaitu dihasilkan dari pemungutan pajak daerah. Salah satu pendapatan pajak daerah yang sangat berpotensi di Kota Bogor adalah pajak reklame dan pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak daerahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas dari pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06% dan pajak restoran sebesar 103,93%. Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor masih belum dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan angka rata-rata rasio kontribusi pajak reklame sebesar

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 79-92
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

1,43% termasuk kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 12,99% termasuk kedalam kriteria kurang. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran adalah dengan melakukan pendataan wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, dan membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Kata kunci : efektivitas, kontribusi, pajak reklame, pajak restoran, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri atas puluhan provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang mana masing-masing daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Adapun manfaat dari Otonomi Daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan (Peraturan perundang-undangan otonomi daerah, 2004). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diperlukan penyediaan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Handayani, 2019) Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah dimana Pemerintah daerah tersebut dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (1) Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah seringkali dijadikan sebagai indikator atas kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan asli suatu daerah tinggi maka bisa dikatakan bahwa daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin berkurang tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu dihasilkan dari pemungutan pajak. Di Indonesia ada banyak jenis pemungutan pajak, salah satunya pada lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua golongan yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara sedangkan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dalam undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 2009 (Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah daerah, ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah itu sendiri. Seperti pembangunan jembatan, jalan, penataan taman kota, pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya. Berikut Pajak Daerah yang di terima pemerintah dibagi atas 2 bagian, yaitu: (1) Pajak Propinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan diatas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Pajak Rokok. (2) Pajak

Kabupaten/kota, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan.

Dari semua jenis Pajak Daerah pajak reklame dan pajak restoran dianggap cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor. Dimana kedua pajak tersebut dianggap saling berkaitan. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering (Peraturan Daerah Kota Bogor, 2011).

Sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, Bogor merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Bogor dari berbagai sektor khususnya di sektor perdagangan tumbuh begitu pesat. Jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat semakin maraknya restoran, rumah makan, cafe, coffee shop dan tempat makan lainnya yang baru didirikan di kota Bogor. Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame dan pajak restoran tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan semakin banyak menggunakan media reklame untuk memperkenalkan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka kepada konsumen, begitu juga dengan para pengusaha penyedia tempat makanan/minuman seperti restoran, rumah makan dan cafe tentu akan dikenakan pungutan pajak pada tempat usahanya. Hal ini dapat dilihat dari sudut-sudut kota Bogor baik di pusat kota maupun pinggiran kota banyak terpampang berbagai macam bentuk reklame beserta tempat usaha mereka.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan target dan realisasi Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bogor pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selama lima tahun dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bogor tahun 2010-2014

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)
2010	7.814.400.000	8.015.331.887
2011	9.500.000.000	9.924.574.509
2012	9.500.000.000	10.045.280.964
2013	11.778.862.000	12.276.398.478
2014	13.673.865.000	13.842.141.787

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

Target penerimaan pajak reklame dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Tahun 2012 mengalami realisasi pajak reklame yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 545.280.964 dari nilai target. Pada tahun 2014 mengalami realisasi pajak reklame yang paling rendah yaitu sebesar Rp 168.276.787 dari nilai target, akan tetapi untuk nilai target penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari data tabel diatas terlihat jelas bahwa pajak reklame sangat potensial sehingga setiap tahun mengalami peningkatan target pajak. Peningkatan pajak reklame tidak lepas dari masyarakat modern yang semakin melek akan dunia usaha yang kian menjanjikan nilai omsetnya. Dimana dalam mempromosikan jenis produk/usahanya memerlukan media promosi yaitu reklame.

Jika dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, pajak restoran pun sama setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan dari sisi nilai target dan realisasi pajaknya lebih besar dibandingkan

pajak reklame. Dapat dilihat dari tabel 1.2 nilai target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2010-2014 secara signifikan terus mengalami peningkatan. Ini menandakan bahwa masyarakat di kota bogor memiliki jiwa konsumtif yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa dengan membeli makanan/minuman cepat saji lebih efisien dalam menghemat waktu, selain itu dengan mengkonsumsi makanan cepat saji mereka dianggap lebih berkkelas dan modern. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan pengusaha makanan/minuman saling bersaing untuk menciptakan suatu inovasi makanan/minuman yang menarik dan sesuai untuk selera masyarakat. Maka tidak dipungkiri, banyaknya pelaku usaha di bidang makanan dan minuman ikut serta meningkatkan jumlah tempat makan seperti, restoran, rumah makan, maupun cafe.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bogor tahun 2010-2014

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2010	15.850.000.000	23.342.416.373
2011	23.000.000.000	27.252.802.195
2012	26.465.000.000	39.510.789.644
2013	34.850.000.000	50.035.057.749
2014	44.600.000.000	59.965.768.360

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

Tabel 3 Target dan Realisasi PAD Kota Bogor tahun 2010-2014

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2010	112.203.927.506	127.488.089.831
2011	181.953.035.493	230.449.644.620
2012	211.014.043.190	300.932.470.210
2013	315.010.039.863	464.695.880.485
2014	413.249.212.694	544.835.708.254

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

Pada tabel 1.3 menunjukan bahwa target pendapatan asli daerah mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun dan nilai realisasinya selalu melebihi nilai target. Peningkatan nilai target PAD tidak lain didukung oleh peningkatan pendapatan pajak daerah. Namun selain berpotensi mendapatkan pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah, pajak reklame dan restoran tidak lepas dari masalah-masalah umum yang menghambat efektivitas dan kontribusinya bagi pendapatan asli daerah. Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame adalah masih adanya reklame yang terpasang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perijinannya sudah mati, reklame illegal, reklame terpasang tidak sesuai titik dan standar keamanan dan reklame yang tidak membayar pajak. Masalah umum ini apabila dibiarkan akan berdampak pada tingkat efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan juga tata ruang publik. Maka dalam hal ini diperlukan peran pentingnya ketegasan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pengawasan reklame serta kesadaran para penyelenggara reklame dalam meningkatkan pendapatan pajak.

Sedangkan masalah umum dalam sektor pajak restoran berdasarkan (<https://www.suaramerdeka.com/>, 2019) adalah permasalahan mendasar yang ditemui dalam pemungutan pajak restoran yang paling utama adalah beban pajak yang terkadang masih ditanggung oleh pengusaha. Padahal subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Dalam pengertian lain, Pajak Restoran menjadi beban konsumen yang berbelanja di restoran. Restoran ini mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. Peran pengusaha sebenarnya selaku wajib pungut yang bertugas mengumpulkan pajak dari konsumen dan menyetorkannya ke kas daerah. Dengan beban pajak masih ditanggung oleh pengusaha, diyakini jumlah yang bisa disetor tidak akan banyak. Permasalahan kedua, data laporan WPPajak Restoran yang tidak riil dan jauh di bawah kondisi sebenarnya. Padahal Pajak Restoran tergolong

ke dalam jenis *self assessment system*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Implikasi dari sistem ini, wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri, wajib pajak aktif dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Karena karakteristik inilah terkadang WP menyalahgunakan wewenang. Mereka tidak melaporkan pajak riil yang dipungut. Laporan cenderung di bawah kondisi riil yang sebenarnya. Permasalahan selanjutnya adalah sistem pembukuan di restoran yang tidak tertib dan tidak baik.

Masalah-masalah umum ini perlu dilakukan strategi yang tepat agar pemungutan pajak restoran dapat dilakukan secara optimal. Pertama, perlu ketersediaan data potensi Pajak Restoran secara valid. Dari jumlah hari kerja di restoran, jumlah meja kursi yang tersedia, tarif, sampai kisaran jumlah pengunjung, dan data detail lain. Data ini akan menentukan besar pajak daerah yang dapat dipungut sehingga dapat diketahui besar target penerimaan pada suatu periode. Kedua, mengefektifkan sistem pelaporan melalui e-tax sebagai konskuensi sistem *self assessment*. Prinsipnya, wajib pajak harus dimudahkan dalam melakukan pelaporan pajak terutang dengan tidak memerlukan proses yang rumit. Ketiga, mengefektifkan proses penagihan. Keempat, pemantauan aktivitas perpajakan wajib pajak. Kelima, pemasangan tapping box. Langkah ini juga dalam rangka mengetahui omzet riil restoran. Tapping box adalah alat penangkap transaksi yang tercetak oleh *printer point of sales* yang ditempatkan di antara cash register atau CPU dan printer. Fungsinya mencatat setiap transaksi wajib pajak sebagai dasar penghitungan pajak dan keenam, pemeriksaan pajak, hal ini dimungkinkan jika terlihat indikasi laporan wajib pajak tidak riil. Untuk mengoptimalkan/meningkatkan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran maka perlu dilakukan strategi-strategi dan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui besaran tingkat efektivitas dan tingkat kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Berikut penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sabil, 2017) dengan judul "Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat" menjelaskan bahwa Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 mengalami kenaikan serta melewati target yaitu rata-rata diatas 100 %. Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, masing sebesar 1,449%, 0,940%, 0,971, 0,809% , 0,688%.

Penelitian yang di lakukan oleh (Gerald & Wardhani, 2018) dengan judul "Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor" menjelaskan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor selama tahun 2002 sampai dengan 2010 secara rata-rata selalu lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, yaitu sebesar 44,52% setiap tahunnya. Dan pada laju pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bogor sebesar 3.344 yang diinterpretasikan sebagai rata-rata perkembangan atau peningkatan kontribusi pajak daerah tersebut adalah sebesar 3.344% setiap tahunnya. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh (Triyono, 2018) dengan judul "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu" menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hingga 2017, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di kabupaten Indragiri Hulu secara signifikan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada PAD. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui apakah setelah tahun 2014 hingga lima tahun kedepan yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pendapatan pajak daerah pada sektor pajak reklame dan pajak restoran tetap stabil terus mengalami

peningkatan atau bahkan sebaliknya, lalu peneliti juga ingin menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak reklame dan restoran terhadap PAD. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat pada jenis pajak daerah yang diteliti dan tempat dilakukannya penelitian. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran di Kota Bogor? Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bogor? Serta Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang terletak di Jalan Pemuda No.31 Bogor 16161, Jawa Barat . Peneliti melakukan penelitian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli – 31 Juli 2020. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (Jatsiyah,2018) mengatakan sebagai berikut: Metode kualitatif yaitu metode analisis yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode ini pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan umum, dan menyeluruh kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (<https://idtesis.com/metode-deskriptif>) mengatakan sebagai berikut: Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat depenelitian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sumber Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder. Instrumen dalam pengumpulan data primer adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan staff bagian pengelolaan pajak daerah di kantor BAPENDA. Data sekunder yang diperoleh menggunakan studi literatur untuk memperoleh landasan teoritis dari masalah yang diteliti. Dokumen terkait yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan PAD yang diambil langsung di kantor BAPENDA Kota Bogor khususnya laporan mengenai pajak reklame dan pajak restoran. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendatangi kantor BAPENDA Kota Bogor dan melakukan aktivitas untuk mencari atau mengumpulkan data yang diperlukan. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah PAD, efektivitas dari pajak reklame dan pajak restoran, kontribusi dari pajak reklame dan pajak restoran serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan restoran. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode ini pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan umum, dan menyeluruh kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan (Sugiyono, 2014:409) dalam penelitian (Jatsiyah, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah. Perkembangan perekonomian Kota Bogor yang semakin meningkat setiap tahunnya berpotensi besar pada pendapatan pajak reklame. Berikut data penelitian mengenai target dan realisasi pajak reklame di Kota Bogor selama lima tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Data ini merupakan akumulasi dari beberapa objek reklame yang dipungut di Kota Bogor, diantaranya: reklame papan/bill board/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame berjalan, dan reklame udara.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bogor

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Pencapaian (%)
2015	12.000.000.000	12.486.710.087	4,06
2016	13.000.000.000	13.069.183.675	0,53
2017	10.300.000.000	10.907.808.067	5,90
2018	10.500.000.000	10.926.253.439	4,06
2019	11.000.000.000	11.708.055.331	6,44
Rata-rata		11.819.602.120	4,20

Sumber: Kantor BAPENDA Kota Bogor, 2020

Berdasarkan tabel 4. diatas, target dan realisasi dari pajak reklame tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Bahkan apabila dibandingkan dengan data target dan realisasi pajak di tahun 2014 seperti data di bab 1 ternyata nilai target dan realisasi pajak selama lima tahun berikutnya (Tahun 2015-2019) terus mengalami penurunan dan masih belum ada tanda tanda perubahan peningkatan yang mampu melebihi nilai target dan realisasi pajak seperti di tahun 2014. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan target pajak setiap tahunnya, namun pada nilai realisasi pajak selalu melebihi dari nilai target pajak. Pada tahun 2015 pencapaian realisasi pajak melebihi target pajak yaitu sebesar 4,06%. Di tahun 2016 pencapaian realisasi pajak mengalami penurunan menjadi 0,53%, namun pada nilai target pajak lebih besar dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp13.000.000.000. Di tahun 2017 pencapaian realisasi pajak mengalami kenaikan menjadi 5,90%, namun pada nilai target pajak mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu objek pajak reklame yaitu Reklame Melekat/Stiker tidak dikenakan pungutan pajak. Pada tahun 2018 pencapaian realisasi pajak kembali mengalami penurunan menjadi 4,06%. Di tahun 2019 pencapaian realisasi pajak kembali mengalami kenaikan menjadi 6,44% dan nilai target pajaknya juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp11.000.000.000, di tahun 2019 Reklame Melekat/Stiker sudah kembali dikenakan pungutan pajak.

Jiwa konsumtif masyarakat kota bogor yang cukup tinggi mempengaruhi para pengusaha saling bersaing untuk menciptakan suatu inovasi makanan/minuman yang menarik dan sesuai untuk selera masyarakat. Maka tidak dipungkiri, banyaknya pelaku usaha di bidang makanan dan minuman ikut serta meningkatkan jumlah tempat makan seperti, restoran, rumah makan, maupun cafe. Hal ini tentu berdampak positif bagi PAD khususnya dalam pemungutan pajak restoran. Berikut data penelitian mengenai target dan realisasi pajak restoran di Kota Bogor selama lima tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Data ini merupakan akumulasi dari beberapa objek pajak restoran yang dipungut di Kota Bogor, diantaranya: restoran, rumah makan, cafe, catering/jasa boga

Tabel 5 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bogor

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Pencapaian (%)
2015	73.500.000.000	75.128.975.542	2.22
2016	94.500.000.000	95.415.220.190	0.97
2017	108.695.260.000	110.306.908.127	1.48
2018	128.100.000.000	131.478.976.530	2.64
2019	136.550.494.812	153.467.175.721	12.39
Rata-rata		113.159.451.222	3,94

Sumber: Kantor BAPENDA Kota Bogor, 2020

Berdasarkan tabel 5, target dan realisasi dari pajak restoran tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan disetiap tahun. Jika dibandingkan pada lima tahun sebelumnya tahun 2010-2014 seperti data di bab 1, nilai target dan realisasi pajak restoran ternyata masih tetap konsisten terus mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2019 dapat dikatakan pencapaian nilai realisasi pajak restoran yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pencapaian realisasi pajak melebihi nilai target pajak sebesar 2,22%. Di tahun 2016, nilai pencapaian realisasi pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 0,97% namun pada nilai target pajak mengalami kenaikan

dari tahun 2015. Tahun 2017 pencapaian nilai realisasi pajak kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,48% begitu juga pada nilai target pajak kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2018 pencapaian nilai realisasi pajak masih tetap konsisten mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,64%, pada nilai target pajak juga mengalami kenaikan. Dan di tahun 2019 pencapaian nilai target pajak kembali mengalami kenaikan, dan dapat dikatakan kenaikannya cukup sangat signifikan yaitu sebesar 12,39%, ini merupakan pencapaian realisasi pajak yang paling tinggi di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berikut data realisasi pendapatan asli daerah Kota Bogor selama lima tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 6. Target dan Realisasi PAD Kota Bogor

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Pencapaian (%)
2015	627.815.080.243	627.594.065.141	-
2016	728.030.823.933	783.873.586.219	1,07%
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	1,06%
2018	887.396.041.682	912.197.971.288	1,03%
2019	972.607.288.978	1.012.529.573.960	1,04%

Sumber: Kantor BAPENDA Kota Bogor, 2020

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa target dan realisasi dari pendapatan asli daerah Kota Bogor selama lima tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019 hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2015 pencapaian realisasi masih belum mencapai target yang di tentukan dan di tahun 2018 nilai target PAD mengalami penurunan sebesar Rp30.392.564.768 disebabkan adanya penurunan dari jenis pendapatan PAD yang lain seperti retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan PAD yang sah. Namun meskipun mengalami penurunan target tetapi untuk hasil realisasi PAD yang dicapai di tahun 2018 cukup signifikan yaitu sebesar 1,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada lima tahun sebelumnya tahun 2010-2014 seperti data di bab 1, PAD di kota bogor dapat dikatakan sudah cukup baik dengan membuktikannya pada nilai target dan pencapaian nilai realisasi PAD yang hamir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Upaya-Upaya Meningkatkan Pajak Reklame dan Pajak Restoran

Pencapaian target dan realisasi pajak tidak lepas dari peran aktif para petugas dalam melakukan pemungutan pajak dan rencana-rencana kerja yang di buat oleh pemerintah dalam mengupayakan agar pencapaian nilai target- taraget pajak dapat terus terrealisasi secara optimal dan meningkat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan staf bagian pengelolaan pajak daerah di kantor BAPENDA mengenai upaya dalam meningkatkan pajak reklame dan pajak restoran bagi pendapatan daerah di Kota Bogor, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pendataan Wajib Pajak. Untuk mendapatkan data wajib pajak reklame dan pajak restoran, haruslah dilaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah kota Bogor. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah dengan cara menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Sebelum menertibkan SPTPD, petugas lapangan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap wajib pajak dengan melakukan survey lapangan, pemantauan dan pemeriksaan. Setelah melakukan survey, pemantauan dan pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah kemudian mengeluarkan/memberikan surat resmi kepada wajib pajak perihal kegiatan pendataan objek pajak yang berisikan keterangan batas waktu untuk segera melakukan pendaftaran pajak, biasanya batas waktu yang ditentukan adalah maksimal 30 hari setelah diterbitkan SPTPD kepada wajib pajak. Apabila dalam 30

hari masih belum melakukan pendaftaran pajak, maka Bapenda Kota Bogor akan menertibkan surat peringatan pertama serta diberikan surat undangan ke Bapenda agar wajib pajak mengetahui hasil analisa pendataan. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Diharapkan melalui kegiatan survey lapangan, pemantauan dan pemeriksaan pajak para wajib pajak akan sadar akan kewajibannya untuk membayarpajak.

2. Pemeriksaan Tarif Pajak. Besaran tarif pajak reklame dan restoran telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah kota bogor sebesar 10% untuk pajak restoran dan 25% untuk pajak reklame. Petugas pajak melakukan pemeriksaan tarif pajak dengan melakukan observasi langsung ke lapangan. Observasi lapangan bertujuan untuk penghitungan kasar atas penilaian kebenaran pajak yang sudah dibayar atau pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, apakah jumlahnya sesuai atau masih jauh dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *official assessment* dan *self assessment*. *Official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menetapkan besaran pajak yang terhutang (Pajak reklame). *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terhutang (Pajak restoran). Pemeriksaan tarif pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran para wajib pajak dalam melakukan pembayaran besaran pajak yang terhutang dan tujuan lainnya adalah agar para wajib pajak dapat membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD secara efektif dan signifikan.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pajak. Pengawasan dalam penyelenggaraan pajak dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam pemungutan dan penyelenggaraan pajak. Proses yang dilakukan untuk meningkatkan pajak reklame yaitu dengan melakukan penataan titik/zona pemasangan reklame dan melakukan pemberian sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan, sanksi tersebut adalah berupa pembongkaran reklame. Sedangkan untuk meningkatkan pajak restoran dilakukan dengan penerapan online sistem pelaporan data transaksi usaha untuk wajib pajak restoran dimana setiap transaksi yang dilakukan terhubung secara real time pada sistem BAPENDA. Sehingga setiap akhir bulan dapat diketahui berapa jumlah transaksi dan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak tersebut. Dalam penerapan online sistem telah dilakukan pemasangan alat berupa tapping box pada wajib pajak. Tapping box yang sudah terpasang di Kota Bogor sekitar 200 tapping box.
4. Membangun Komunikasi dan Menjalin Kedekatan Dengan Masyarakat Petugas pajak merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Peran aktif dalam proses komunikasi dan pelaksanaan akan membawa kedekatan tersendiri dengan masyarakat. Kedekatan ini yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa simpati dan menghasilkan rasa kepercayaan masyarakat khususnya wajib pajak. Hal ini tentu akan berpengaruh dan bermanfaat pada pembayaran pajak di Kota Bogor. Dalam proses menjalin kedekatan dengan masyarakat para petugas pajak melakukan sosialisasi secara berkala. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak/masyarakat dapat mengetahui peraturan perpajakan dan untuk menarik kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Dilihat dari tingginya realisasi penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah seringkali dijadikan sebagai indikator atas kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan asli suatu daerah tinggi maka bisa dikatakan bahwa daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin berkurang tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kota Bogor merupakan kota yang

pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya relatif cepat. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Yang mana sumber tersebut adalah berasal dari pajak daerah. Pemerintah Kota Bogor memungut 9 (sembilan) pajak daerah, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan pembangunan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor merupakan badan yang melaksanakan berbagai urusan dibidang pendapatan daerah. Adapun fungsinya adalah membuat atau merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menggunakan sistem *self assessment* dan *official assessment* dalam pemungutan pajak daerahnya, dan untuk pajak reklame sistem pemungutannya menggunakan sistem *official assessment* sedangkan untuk pajak restoran sistem pemungutannya menggunakan sistem *self assessment*. Upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Bogor dalam meningkatkan atau memenuhi target pajak reklame dan pajak restoran adalah dengan melakukan pendataan wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat, dengan tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak yang dimiliki masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, serta uapaya lain yang dilakukan adalah peran aktif para petugas pajak di lapangan. Adapun sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan atau penunggakan pembayaran pajak restoran dan reklame akan dikenakan berupa sanksi administrasi, dan sanksi tegas berupa pembongkaran reklame bagi para wajib pajak yang melanggar aturan pemasangan reklame.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Kota Bogor

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan angka atau presentase mendekati atau sampai melebihi 100%, maka pajak reklame semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor semakin baik. Dibawah ini adalah tabel kriteria perhitungan rasio efektivitas :

Tabel 7. Tingkat Mengukur Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
80%-100%	Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
40%-60%	Tidak Efektif

Sumber: di kutip dari (Oktavia, 2018)

Tingkat efektivitas pajak restoran dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran yang ditetapkan. Dibawah ini disajikan hasil perhitungan untuk melihat kriteria dan rasio efektivitas penerimaan pajak restoran selama lima tahun di Kota Bogor. Tabel 8 menunjukkan bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bogor selama lima tahun hampir selalu mengalami kenaikan. Meskipun di tahun 2016 presentase rasio efektivitas pajak restoran mengalami penurunan, tetapi itu tidak mempengaruhi tingkat kriteria efektivitas pajaknya yaitu mencapai 100,97% yang berarti masih sangat efektif. Melihat tabel tersebut, secara keseluruhan hasil presentase rasio efektivitas pajak restoran pada angka rata-rata mencapai 103,93% maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran di Kota Bogor sangat efektif. Dan ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bogor dalam melakukan pemungutan pajak restoransudah sangat baik.

Tabel 8. Rasio dan Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bogor

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2015	73.500.000.000	75.128.975.542	102,22	Sangat Efektif
2016	94.500.000.000	95.415.220.190	100,97	Sangat Efektif
2017	108.695.260.000	110.306.908.127	101,48	Sangat Efektif
2018	128.100.000.000	131.478.976.530	102,64	Sangat Efektif
2019	136.550.494.812	153.467.175.721	112,39	Sangat Efektif
Rata-rata			103,93	Sangat Efektif

Sumber: (Data Diolah, 2020)

Hasil Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Tingkat penerimaan pajak reklame sangat erat kaitannya dengan banyaknya jumlah media reklame yang terpasang. Semakin tinggi jumlah media reklame yang terpasang maka semakin tinggi pula realisasi pemungutan pajak reklame. Pajak reklame juga merupakan salah satu jenis pajak yang di pengaruhi oleh perkembangan jumlah usaha kuliner seperti restoran, cafe dan tempat makan lainnya. Semakin banyak jumlah usaha kuliner baru yang didirikan maka semakin besar jumlah realisasi dari pajak reklame. Berikut adalah tabel hasil perhitungan untuk melihat kriteria dan rasio efektivitas penerimaan pajak reklame selama lima tahun di Kota Bogor.

Tabel 9 Rasio dan Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bogor

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2015	12.000.000.000	12.486.710.087	104,06	Sangat Efektif
2016	13.000.000.000	13.069.183.675	100,53	Sangat Efektif
2017	10.300.000.000	10.907.808.067	105,90	Sangat Efektif
2018	10.500.000.000	10.926.253.439	104,06	Sangat Efektif
2019	11.000.000.000	11.708.055.331	106,44	Sangat Efektif
Rata-rata			104,20	Sangat Efektif

Sumber: (Data Diolah, 2020)

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Bogor selama lima tahun berfluktuatif, namun untuk kriteria efektivitas dapat dikatakan sangat efektif semua karena angka rasio efektivitas di setiap tahun mampu melebihi 100% atau melebihi target yang telah ditentukan. Pada angka rata-rata rasio efektivitas pun juga sama melebihi 100% yaitu sebesar 104,20%, maka dapat di simpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame selama lima tahun terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2019 di Kota Bogor termasuk kedalam kriteria sangat efektif. Dan ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bogor dalam melakukan pemungutan pajak reklame sudah baik.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bogor

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak reklame dan pajak restoran memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Pendapatan asli daerah merupakan modal dalam bentuk dana bagi setiap daerah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat didaerahnya. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak reklame dan pajak restoran) dengan penerimaan PAD. Apabila perhitungan kontribusi pajak reklame dan restoran menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 50%, maka kontribusi pajak reklame dan restoran semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame Kota Bogor semakin baik.

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bogor. Besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan dibawah ini.

Tabel 10. Tingkat Mengukur Kontribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber: di kutip dari (Oktavia, 2018)

Tabel 11 Rasio dan Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria
2015	627.594.065.141	75.128.975.542	11,97	Kurang
2016	783.873.587.219	95.415.220.190	12,17	Kurang
2017	978.197.741.947	110.306.908.127	11,28	Kurang
2018	912.197.971.288	131.478.976.530	14,41	Kurang
2019	1.012.529.573.960	153.467.175.721	15,16	Kurang
Rata-Rata			12,99	Kurang

Sumber: (Data Diolah, 2020)

Dari tabel 11 diatas, dapat dilihat angka rasio kontribusi pajak restoran secara garis besar terus mengalami kenaikan. Hanya saja di tahun 2017 rasio kontribusi pajak restoran mengalami penurunan yang diakibatkan adanya penerimaan kontribusi dari jenis pajak daerah yang lain meningkat yaitu pada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak hotel. Jika di lihat pada angka rasio kontribusi pajak restoran di setiap tahunnya yaitu tahun 2015 sebesar 11,97%, tahun 2016 sebesar 12,17%, tahun 2017 sebesar 11,28%, tahun 2018 sebesar 14,41%, tahun 2019 sebesar 15,16% sehingga angka rata-rata yang di peroleh sebesar 12,99%, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor termasuk ke dalam kriteria kurang.

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah yang memiliki realisasi pajak yang tinggi dari nilai targetnya, semakin tinggi realisasi pajak reklame maka semakin besar kontribusinya pada pendapatan asli daerah. Untuk melihat seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor, dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan dibawah ini.

Tabel 12 Rasio dan Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria
2015	627.594.065.141	12.486.710.087	1,99	Sangat Kurang
2016	783.873.587.219	13.069.183.675	1,67	Sangat Kurang
2017	978.197.741.947	10.907.808.067	1,12	Sangat Kurang
2018	912.197.971.288	10.926.253.439	1,20	Sangat Kurang
2019	1.012.529.573.960	11.708.055.331	1,16	Sangat Kurang
Rata-Rata			1,43	Sangat Kurang

Sumber: (Data Diolah, 2020)

Dari tabel 12 diatas menunjukkan bahwa rasio kontribusi dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor selama lima tahun terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, yang diakibatkan adanya penerimaan kontribusi dari jenis pajak daerah yang lain meningkat yaitu pada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak bumi dan pembangunan perkotaan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak hotel, dan pajak restoran. Dilihat pada angka rasio kontribusi pajak reklame di setiap tahunnya yaitu tahun 2015 sebesar 1,99%, tahun 2016 sebesar 1,67%, tahun 2017 sebesar 1,12%, tahun 2018 sebesar 1,20%, tahun 2019 sebesar 1,16% sehingga angka

rata-rata yang di peroleh sebesar 1,43%, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor termasuk ke dalam kriteria sangat kurang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor Tahun 2015- 2019, maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06% dan pajak restoran sebesar 103,93%. Ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bogor dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran sudah baik.
2. Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bogor masih belum dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan angka rata-rata rasio kontribusi pajak reklame sebesar 1,43% termasuk kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 12,99% termasuk kedalam kriteria kurang.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran adalah dengan melakukan pendataan wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, dan membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerald, S., & Wardhani, Y. (2018). *Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor*. 2(2), 90–117.
- Handayani, M. (2019). *Pendapatan Asli Daerah* (A. Pratomo, ed.). Poliban Press.
- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1021–1032.
- Jatsiyah, nabilla. (2018). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD di Kabupaten Bogor*.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Mardiasmo. (2016). *Definisi dan unsur pajak* (Perpajakan). ANDI - Yogyakarta.
- Oktavia, D. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bukit Tinggi*.
- Peraturan Daerah. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 dibentuk Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah*. , (1990).
- Peraturan daerah kota bogor. *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah*. , 2 Pemerintah wali kota bogor (2011).
- Peraturan daerah kota bogor. *Tahun 2011 Nomor 3 Seri B Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*. , (2011).
- Peraturan Daerah Kota Bogor. *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 26 Desember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor*. , (2008).
- Peraturan Daerah Kota Bogor. *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. , (2010).
- Peraturan Daerah Kota Bogor. (2011). *Pajak Restoran* (pp. 1–30).
- Peraturan Daerah Kotamadya Bogor. *Peraturan Daerah Kotamadya Bogor Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya DT.II Bogor*. , (1979).

- Peraturan perundang-undangan otonomi daerah. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.* , (2004).
- Peraturan perundang-undangan PAD. *Undang-undang nomor 33 pasal 1 ayat 15 tahun 2004.* , (2004).
- Peraturan wali kota bogor. *Peraturan Wali Kota Bogor nomor 60 tahun 2018 tentang perizinan Penyelenggaraan Reklame.* , (2018).
- Purba, R., & Ginting, R. M. H. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 1(1), 25–31.
- Republika.co.id. (2020). Bogor Tata Ulang Lokasi Pemasangan Reklame. from Ani Nursalikh website: <https://republika.co.id/berita/q3wc86366/bogor-tata-ulang-lokasi-pemasangan-reklame>
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 145–149. from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2230/1703>
- Sidik. (2002). *Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah*. Sugiyono. (2017). *Data Primer*. Sugiyono. (2017). *Data Sekunder*.
- Triyono, A. (2018). *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu*. VII(03), 63–75.
- Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.* , (2009).
- Wijayanti, R., Shodiq Askandar, N., & Amin, M. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). *Boswer 20007*, 14– 27.

Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Pemasaran, Dan Gaji Karyawan Terhadap Hasil Penjualan Studi Kasus pada CV FahmaHair Bogor pada Tahun 2017-2019

Determinant of Sales Revenue in Personal Firm

R. Adelya Pamelda Dan Didit Pradipto

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail: adelya@gmail.com

93

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

At this time, the technology capability is very rapid, which has an impact on every aspect of life, inseparable from the field of business / business. Very tight competition forces each company to do and provide the best for consumers in order to fulfill consumer desires and achieve company goals. In addition, strategies for influencing things are needed, in this case reducing costs and the use of raw materials, target markets, and the ability of employees who are company assets are the keys to an effort to achieve the goals of a company. The purpose of this study is to determine the effect of production costs, marketing costs and employee salaries on sales results. The population in this study is the data for each variable in CV FahmaHair in 2017-2019, in this case, 36 data were obtained where the data were the total variables each month and for 3 years (12 months X 3 years). This study uses a quantitative approach with secondary data sources. Data analysis using SPSS 24 with analytical methods namely descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and the coefficient of determination (R^2). The t test results show that the variable production costs have a significant value of $0.000 < 0.05$ or $sig < 0.05$. This shows that production costs have a significant effect on sales results. In contrast to the marketing cost variable, where the significant value is $0.536 > 0.05$ or $sig > 0.05$. This shows that marketing costs do not have a significant effect on sales results. Employee salary variable has no significant effect on sales results with a significant value of $0.124 > 0.05$ or $sig > 0.05$. From the results of the F test shows that the adjusted R square value is 0.874 or 87.4%, which means that production costs, marketing costs and employee salaries are able to influence sales results by 87.4%. While the remaining 12.6% ($100\% - 87.4\%$) is explained by other factors outside of this research model.

Keywords: *production costs, marketing costs, employee salaries, sales results*

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, dimana kemampuan teknologi sudah sangat pesat yang berdampak pada setiap aspek kehidupan tak terlepas dari bidang usaha/bisnis. Persaingan yang amat ketat memaksa tiap perusahaan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk para konsumen demi terpenuhinya keinginan konsumen dan tercapainya tujuan perusahaan. Selain itu, strategi terhadap hal yang berpengaruh sangat diperlukan, dalam hal ini penekanan biaya serta pemanfaatan bahan baku, sasaran pasar, serta kemampuan karyawan yang merupakan aset perusahaan menjadi kunci dari sebuah usaha pencapaian tujuan suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan. Populasi dalam penelitian ini adalah data tiap variabel pada CV FahmaHair pada tahun 2017-2019, dalam hal ini didapatkan 36 data dimana data tersebut merupakan total variabel tiap bulannya dan selama 3 tahun (12 bulan X 3 tahun). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder. Analisa data menggunakan SPSS 24 dengan metode analisis yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji t menunjukkan bahwa, variabel biaya produksi

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 93-108
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $\text{sig} < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Berbeda dengan variabel biaya pemasaran, dimana nilai signifikan sebesar $0,536 > 0,05$ atau $\text{sig} > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemasaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Variabel gaji karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan yaitu dengan nilai signifikan sebesar $0,124 > 0,05$ atau $\text{sig} > 0,05$. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,874 atau 87,4% yang berarti bahwa biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan mampu mempengaruhi hasil penjualan sebesar 87,4%. Sedangkan sisanya sebesar 12,6% ($100\% - 87,4\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Kata Kunci: Biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan, penjualan.

PENDAHULUAN

Implementasi program penjualan untuk memacu penjualan produk atau jasa suatu perusahaan merupakan persyaratan untuk memenangkan persaingan dalam kondisi perekonomian yang berkembang dengan pesat dan sangat kompetitif. Banyak pengusaha yang mempertimbangkan program penjualan sebagai alat kompetitif yang paling potensial. Tingkat penjualan yang tinggi merupakan hal yang diinginkan bagi setiap perusahaan, bagi sebuah perusahaan dengan tingginya tingkat penjualan yang dihasilkan diharapkan laba yang diperoleh juga meningkat. Philip Kotler dan Kevin Lane mengemukakan dalam penjualan terdapat konsep yang menyatakan bahwa konsumen jangan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen biasanya menampakkan keengganan membeli dan harus dipikat agar membeli lebih banyak, dan bahwa perusahaan harus menggunakan serangkaian alat penjualan dan promosi yang efektif guna merangsang pembelian dalam jumlah yang lebih banyak.

Secara umum, perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi bernilai guna berupa barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan lainnya. CV FahmaHair ini merupakan usaha perorangan, karena usaha ini dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh (tidak terbatas) terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam PSAK No. 21 Tentang Akuntansi Ekuitas dinyatakan bahwa bentuk perusahaan perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan terikat pada hutangpiutang usaha perorangan. Peranan kualitas produk menjadi sangat penting karena perkembangan peradaban manusia sehingga mempengaruhi sikap konsumen dalam pembelian suatu produk, baik produk satuan (produk yang dibuat berdasarkan pesanan) atau produk massa (produk yang dibuat secara terus menerus). Barang yang akan diproduksi suatu perusahaan akan dinilai oleh konsumen, penilaian konsumen antara lain berupa daya tahan atau kekuatan barang, wujud atau model barang serta fungsi barang yang dihasilkan apabila konsumen membeli barang tersebut.

Perusahaan dituntut melakukan berbagai tindakan antisipasi dan efisiensi guna mengurangi ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan dan tetap mempertahankan kegiatan operasional perusahaan dengan berbagai cara, diantaranya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan selera dari masyarakat. Produk yang telah diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maka perusahaan akan memperoleh balas jasa dari penjualan tersebut. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat vital untuk memperhatikan kondisi aspek produksi yang meliputi biaya produksi dan upah bahkan kegiatan pemasaran yang merupakan kunci pokok aktivitas perusahaan dalam menjalankan produksinya dalam kaitannya meningkatkan nilai sekaligus profitabilitas yang signifikan bagi perusahaan dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan perusahaan. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para

pengusaha dalam usahanya mempertahankan hidup usahanya, berkembang dan mendapatkan laba. Pemasaran juga bisa disebut dengan ujung tombak dari sebuah perusahaan, karena berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan usaha tergantung tingkat keahlian di dalam bidang pemasaran, produksi dan keuangan maupun bidang lainnya, selain itu tergantung pula pada kemampuan untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Krisis perekonomian global yang melumpuhkan kondisi keuangan dunia juga menimbulkan dampak pada kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini menimbulkan dampak dari kenaikan biaya-biaya selama proses produksi, biaya produksi mengalami kenaikan terbesar diluar biaya pemasaran dan biaya distribusi, karena pada unsur produksi terdiri dari bahan-bahan baku yang mudah sekali mengalami kenaikan. Kondisi ini bertolak belakang dengan teori yang diungkapkan oleh Sukirno bahwa pengusaha akan memperoleh keuntungan maksimum dengan meminimum biaya produksi. Begitu banyak hal yang patut menjadi pertimbangan dalam menjalankan usaha, terlebih menyangkut harga yang umumnya merupakan suatu hal yang sensitif dalam pemasaran produk atau jasa. Biaya-biaya yang dibebankan meliputi juga biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan dalam penentuan *pricing*. Produk dan jasa dengan kualitas tentunya akan memiliki jaminan kepuasan tinggi yang dapat diterima konsumen, nantinya kepuasan yang diterima oleh konsumen dapat teraplikasi dalam pembelian ulang yang dilakukan.

Setiap biaya pada suatu perusahaan tentu memiliki peran dalam pergerakan suatu usaha. Biaya-biaya yang di keluarkan pasti memiliki hasil imbal balik yang tujuannya untuk menguntungkan perusahaan. Pada era perdagangan bebas dan persaingan global yang semakin banyak digandrungi memaksa setiap perusahaan untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dimana setiap perusahaan harus siap bersaing dalam segi manapun, baik dari segi produk maupun segi mutu perusahaan dalam melakukan pemasaran produk mereka. Persaingan yang semakin kompetitif serta konsumen yang semakin kritis dalam memilih produk, menuntut perusahaan untuk lebih inovatif dalam menghasilkan suatu produk. Dengan kata lain perusahaan harus mampu membuat serta menawarkan produk (barang atau jasa) yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing.

Dari sinilah suatu produk akan dipertimbangkan oleh konsumen, apakah produk tersebut mempunyai keunggulan lain dibanding dengan produk pesaing sejenis yang ada di pasar. Karakteristik inovasi produk dianalisa sebagai keunggulan relatif yang tampak sebagai karakteristik produk yang secara konsisten penting dalam penjelasan penerapan dan keberhasilan output yang dihasilkan. Dengan demikian keberlangsungan dan produksi perusahaan akan berjalan baik sesuai perencanaan dan penganggaran sehingga laba perusahaan sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang telah disusun oleh perusahaan. Agar penelitian dapat terfokus, maka dari itu penulis membatasi diri hanya meneliti hal yang berkaitan dengan biaya produksi, biaya pemasaran, biaya gaji, serta hasil penjualan. Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair tahun 2017-2018.
2. Adakah pengaruh biaya pemasaran terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair tahun 2017-2018.
3. Adakah pengaruh gaji karyawan terhadap hasil penjualan CV FahmaHair tahun 2017-2018.
4. Adakah pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan CV FahmaHair tahun 2017-2018.

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) H_1 : Biaya produksi berpengaruh terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair.
- 2) H_2 : Biaya pemasaran berpengaruh terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair.
- 3) H_3 : Gaji Karyawan berpengaruh terhadap hasil penjualan pada CV Fahma Hair

- 4) H_4 : Biaya produksi, Biaya pemasaran dan gaji karyawan berpengaruh terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair.
- 5) H_5 : Biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan berpengaruh terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV Fahma Hair (*From Real Hair*) yang beralamat di Perumahan Griya Dramaga Asri Blok E4 no.4-5 rt.04/08 desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah mulai dari bulan September 2019-Februari 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan secara khusus melalui wawancara, hasil pengisian kuesioner serta observasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dengan pemilik perusahaan dan bagian pembukuan untuk mendapatkan informasi secara lisan yang berkaitan langsung dengan objek dan masalah yang diteliti pada CV FahmaHair yaitu biaya produksi, pemasaran, dan gaji karyawan, serta data hasil penjualan pada tahun 2017-2018. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada CV Fahma Hair. Data laporan keuangan yang diambil berupa laporan keuangan selama dua tahun yakni pada tahun 2017-2018.

Pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi dalam penelitian yang nantinya digunakan dalam pengukuran variabel. Secara umum pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Biaya produksi (X_1) adalah pengeluaran yang dilakukan selama proses produksi meliputi seluruh dana untuk pembelian *input* dan jasa yang dipakai dalam suatu produksi baik dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Dalam arti lain biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi.
2. Biaya pemasaran (X_2) pengertiannya dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu dalam arti sempit, biaya pemasaran diartikan sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai.
3. Gaji karyawan (X_3) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:85) "Gaji Karyawan merupakan uang yang dibayarkan kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan setiap bulanan".

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil penjualan (Y) yang merupakan jumlah hasil yang diterima oleh perusahaan dalam proses penjualan yang dinyatakan dalam satuan rupiah dalam suatu periode tertentu. Data yang diperoleh dari laporan penjualan dianalisis sedemikian rupa sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis Parsial, Uji Hipotesis Simultan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek dalam penelitian ini terkait dengan hasil perolehan sampel dan data mengenai biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan

pada CV FahmaHair di kabupaten Bogor pada tahun 2017-2019. Kemudian, diperoleh data perusahaan yang sesuai untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Sehingga jumlah keseluruhan data yang digunakan selama periode penelitian adalah sebanyak 36 data (12 bulan x 3 tahun).

Penggunaan *Logaritma Natural* (Ln) dalam tahapan awal penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Jika total dari masing-masing variabel langsung digunakan begitu saja maka akan menghasilkan output data dari nilai variabel akan sangat besar. Dengan *Logaritma natural*, nilai-nilai tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya. Dan untuk menghitung *logaritma natural* dari tiap variabel dapat menggunakan *Microsoft Excel* yang dimana akan menghasilkan nilai (Ln) dengan gambaran sebagai berikut:

1. Pada variabel biaya produksi dengan indikator biaya bahan baku langsung, biaya overhead dan biaya angkut menghasilkan Total Biaya Produksi pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp.62,439,000,- untuk selanjutnya dilakukan *logaritma natural* pada *Microsoft Excel* dengan rumus $=LN(Rp.62,439,000)$ maka akan menghasilkan nilai *Logaritma Natural* dari Total biaya produksi sebesar 17,95. Angka *Logaritma Natural* tersebut tidak merubah proporsi dari angka sebenarnya.
2. Pada variabel biaya pemasaran dengan indikator biaya promosi dan potongan penjualan menghasilkan total biaya pemasaran pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp.17,758,000,- untuk selanjutnya dilakukan *logaritma natural* pada *Microsoft Excel* dengan rumus $=LN(Rp.17,758,000)$ maka akan menghasilkan nilai *Logaritma Natural* dari Total biaya pemasaran sebesar 16,69. Angka *Logaritma Natural* tersebut tidak merubah proporsi dari angka sebenarnya.
3. Pada variabel gaji karyawan dengan indikator gaji karyawan, upah marketing dan tunjangan/bonus menghasilkan total gaji karyawan pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp.15,300,000,- untuk selanjutnya dilakukan *logaritma natural* pada *Microsoft Excel* dengan rumus $=LN(Rp.15,300,000)$ maka akan menghasilkan nilai *Logaritma Natural* dari total gaji karyawan sebesar 16,54. Angka *Logaritma Natural* tersebut tidak merubah proporsi dari angka sebenarnya.
4. Pada variabel penjualan dengan indikator total penjualan periode berjalan menghasilkan total penjualan pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp.210,700,000,- untuk selanjutnya dilakukan *logaritma natural* pada *Microsoft Excel* dengan rumus $=LN(Rp.210,700,000)$ maka akan menghasilkan nilai *Logaritma Natural* dari total penjualan sebesar 19,17. Angka *Logaritma Natural* tersebut tidak merubah proporsi dari angka sebenarnya.

Berikut adalah data yang telah dikumpulkan dari setiap variabel, menggunakan angka *Logaritma natural* dari total tiap variabel:

Tabel 1. Biaya Produksi

NO	BULAN	BIAYA PRODUKSI		
		2017	2018	2019
1	JANUARI	17,95	18,61	17,82
2	FEBRUARI	17,91	18,41	17,31
3	MARET	17,85	18,44	17,07
4	APRIL	17,80	18,72	17,55
5	MEI	17,63	18,52	18,40
6	JUNI	17,66	18,77	18,44
7	JULI	17,20	17,88	18,91
8	AGUSTUS	17,68	18,20	17,50
9	SEPTEMBER	17,80	18,29	18,27
10	OKTOBER	17,62	18,36	17,55
11	NOVEMBER	17,06	17,96	18,66
12	DESEMBER	17,63	18,61	17,70

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2020

Tabel 2. Biaya Pemasaran

NO	BULAN	BIAYA PEMASARAN		
		2017	2018	2019
1	JANUARI	16,69	17,12	17,05
2	FEBRUARI	16,42	16,54	16,49
3	MARET	16,51	16,73	16,55
4	APRIL	16,61	16,97	16,99
5	MEI	16,57	17,06	16,47
6	JUNI	16,77	16,90	16,93
7	JULI	16,03	17,17	16,42
8	AGUSTUS	16,85	17,05	16,91
9	SEPTEMBER	16,86	16,79	16,74
10	OKTOBER	16,78	16,78	16,51
11	NOVEMBER	16,36	16,98	16,97
12	DESEMBER	16,70	17,05	16,55

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2020

Tabel 3. Gaji Karyawan

NO	BULAN	GAJI KARYAWAN		
		2017	2018	2019
1	JANUARI	16,54	1656	16,55
2	FEBRUARI	16,16	16,48	16,48
3	MARET	16,03	16,48	16,48
4	APRIL	16,03	16,69	16,56
5	MEI	15,96	16,61	16,84
6	JUNI	16,03	16,97	16,73
7	JULI	16,55	16,49	16,79
8	AGUSTUS	16,01	16,49	16,55
9	SEPTEMBER	16,07	16,33	16,61
10	OKTOBER	16,12	16,48	16,48
11	NOVEMBER	15,82	16,60	16,68
12	DESEMBER	16,41	16,73	16,79

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2020

Tabel 4. Penjualan

NO	BULAN	PENJUALAN		
		2017	2018	2019
1	JANUARI	19,17	19,55	18,83
2	FEBRUARI	19,12	19,48	18,25
3	MARET	18,98	19,53	17,83
4	APRIL	18,61	19,66	18,35
5	MEI	18,39	19,54	19,05
6	JUNI	18,43	19,74	19,38
7	JULI	17,87	19,05	19,52
8	AGUSTUS	18,51	19,16	18,31
9	SEPTEMBER	18,54	19,18	18,46
10	OKTOBER	18,38	19,45	18,15
11	NOVEMBER	17,62	19,06	19,45
12	DESEMBER	18,41	19,51	18,42

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2020

Dari data yang telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan uji analisis statistik deskriptif kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Selanjutnya analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Analisa data tersebut menggunakan program komputer IBM SPSS 24.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara berkelompok yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki atau diteliti (Riduan, 2010:38). Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013:7), bahwa analisis statistik deskriptif dilakukan sebelum uji asumsi klasik dan uji hipotesis, yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul dari setiap variabel. Statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel independen dan variabel dependen. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. **Descriptive Statistics**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
PENJUALAN	36	17.62	19.74	18.8591	.58544
BIAYA PRODUKSI	36	17.06	18.91	17.9920	.50255
BIAYA PEMASARAN	36	16.03	17.17	16.7464	.25830
GAJI KARYAWAN	36	15.82	16.97	16.4492	.28159
Valid N (listwise)	36				

Sumber: *Output SPSS 24, 2020*

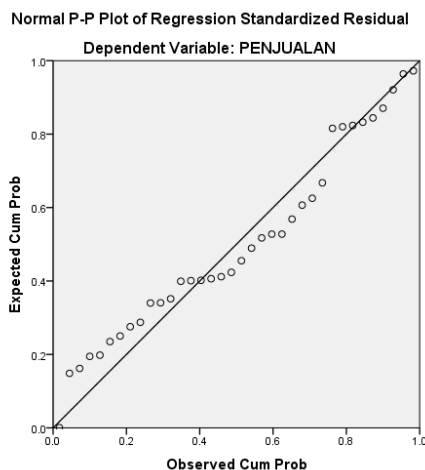
Tabel 5 diatas menunjukkan output SPSS mengenai statistik deskriptif variabel penelitian tahun 2017-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 36. Berdasarkan tabel diatas, penjelasan mengenai statistik deskriptif dari setiap variabel diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya Produksi. Variabel biaya produksi memiliki nilai minimum sebesar 17,06 dan nilai maximum sebesar 18,91. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya biaya produksi berkisar antara 17,06 sampai 18,91. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel biaya produksi adalah sebesar 17,9920, artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $17,9920 > 0,50255$ yang berarti hal ini menjelaskan bahwa data memiliki penyebaran yang merata.
2. Biaya Pemasaran. Variabel biaya pemasaran memiliki nilai minimum sebesar 16,03 dan nilai maximum sebesar 17,17. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya biaya pemasaran berkisar antara 16,03 sampai 17,17. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel biaya pemasaran adalah sebesar 16,7464 artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $16,7464 > 0,25830$ yang berarti hal ini menjelaskan bahwa data memiliki penyebaran yang merata.
3. Gaji Karyawan. Variabel gaji karyawan memiliki nilai minimum sebesar 15,82 dan nilai maximum sebesar 16,97. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya gaji karyawan berkisar antara 15,82 sampai 16,97. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel biaya produksi adalah sebesar 16,4492 artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $16,4492 > 0,28159$ yang berarti hal ini menjelaskan bahwa data memiliki penyebaran yang merata karena tidak memiliki pembedaan yang tinggi.
4. Penjualan. Variabel penjualan memiliki nilai minimum sebesar 17,62 dan nilai maximum sebesar 19,74. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya penjualan berkisar antara 17,62 sampai 19,74. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel penjualan adalah sebesar 18,8591 artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $18,8591 > 0,58544$ yang berarti hal ini menjelaskan bahwa data memiliki penyebaran yang merata karena tidak memiliki pembedaan yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Serangkaian uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah model telah terpenuhi dan terhindar dari hasil penaksiran yang bersifat bias. Model regresi yang baik harus terhindar dari adanya masalah asumsi klasik, agar model regresi yang digunakan representatif dan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Tujuan dari Uji Normalitas ini adalah, untuk menguji apakah data

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik dimana distribusi datanya mengikuti distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui kenormalan data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis statistik, dimana analisis statistik dapat di lihat pada grafik normal probability Plot (P-Plot) dan analisis statistik dapat dilihat dari uji non-parametrik kolmogorov-Smirnov. Dan berikut adalah hasil dari uji normalitas pada penelitian ini:



Sumber : Output SPSS 24, 2020

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot

Deteksi pada normalitas dapat dilihat pada penyebaran data (Titik) pada garis diagonal dari grafik. Penyebaran data yang menyebar pada sekitaran garis diagonal dan mengikuti searah dengan garis diagonal maka dapat menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat dilihat pada gambar 4.1 bahwa data menyebar dan mengikuti arah garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan data dengan uji normalitas terdistribusi dengan normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain analisis grafik pada P-P Plot tersebut, penelitian ini juga menggunakan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji tersebut dapat mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. nilai signifikan yang dimiliki data jika diatas 0,05 maka data tersebut berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Berikut tabel 4.6 yang menunjukkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini:

Tabel 6. Hasil **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19856086
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 24, 2020

Hasil uji di atas memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,200. Artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) hal tersebut menyatakan bahwa data pada penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian atau berdistribusi normal. Hasil uji

ini selaras dengan hasil uji normalitas dengan grafik p-p plot, dimana, keduanya menyatakan hal yang sama yakni data terdistribusi secara normal.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Run Test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada uji Run Test. Dan apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.03172
Cases < Test Value	
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	18
Z	-.169
Asymp. Sig. (2-tailed)	.866

a. Median

Sumber: Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, maka diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,866, artinya Asymp. Sig. (2-tailed) > dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan lawannya nilai *Variance Infation Factor* (VIF) kurang dari 10 berarti data tidak ada masalah multikolinieritas. Tabel 4.8 merupakan hasil dari uji multikolinieritas yang menunjukkan nilai VIF dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

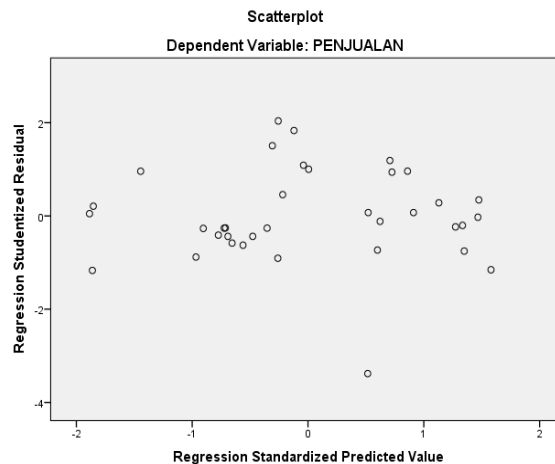
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 BIAYA PRODUKSI	.601	1.664
BIAYA PEMASARAN	.818	1.222
GAJI KARYAWAN	.691	1.447

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber: Output SPSS 24, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada Biaya Produksi sebesar 0,601 Biaya Pemasaran sebesar 0,818 dan gaji karyawan sebesar 0,691. Sedangkan nilai VIF untuk variabel biaya produksi sebesar 1,664 biaya pemasaran sebesar 1,222 dan gaji karyawan sebesar 1,447. Maka, nilai *tolerance* setiap variabel dari masing-masing model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dari hasil pengujian ini dapat dinyatakan bahwa dalam model regresi yang digunakan untuk penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas atau dapat dikatakan memenuhi uji multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*. Berikut adalah hasil Uji Heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot* :



Sumber: Output SPSS 24, 2020

Gambar 2 Scatterplot uji heteroskedastisitas

Dari grafik diatas, dapat terlihat bahwa titik tidak membuat suatu bentuk pola atau menumpuk di satu titik saja, melainkan titik tersebut menyebar secara acak dan tidak menyebar hanya diatas atau dibawah angka 0 sumbu Y saja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Biaya Produksi (X1), Biaya Pemasaran (X2) dan Gaji Karyawan (X3), terhadap hasil penjualan (Y). Berikut hasil pengujian analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 24:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-2.761	2.806		-.984	.332
1 BIAYA PRODUKSI	1.067	.090	.916	11.840	.000
BIAYA PEMASARAN	.237	.150	.105	1.578	.124
GAJI KARYAWAN	-.094	.150	-.045	-.626	.536

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber: Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan hasil uji regresi linier diatas maka diperoleh persamaan regresi linier beganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -2,761 + 1,067X_1 + 0,237X_2 - 0,094X_3 - \varepsilon$$

Dimana :

Y = Hasil Penjualan

a = konstanta dari persamaan regresi

X_1 = biaya produksi, X_2 = biaya pemasaran, X_3 = gaji karyawan

ε = standart error

Dari persamaan regresi yang telah disusun diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah negatif sebesar -2,761 menunjukkan bahwa jika biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan bernilai nol atau ditiadakan maka hasil penjualan sebesar -2,761.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel biaya peoduksi (X1) memiliki nilai positif sebesar 1,067 artinya gaji karyawan memiliki hubungan positif dengan hasil penjualan, semakin naik biaya produksi maka akan semakin meningkat hasil penjualan. Sebaliknya, semakin rendah gaji karyawan maka semakin menurun hasil

- penjualan. Setiap kenaikan gaji karyawan sebesar satu satuan, maka hasil penjualan akan mengalami kenaikan sebesar 1,067 atau 106,7%.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel biaya pemasaran (X2) memiliki nilai positif yaitu 0,237 artinya biaya pemasaran memiliki hubungan positif, semakin naik biaya pemasaran maka akan semakin naik hasil penjualan. Sebaliknya, semakin rendah biaya pemasaran maka akan menurun pula hasil penjualan. Setiap kenaikan biaya pemasaran sebesar satu satuan, maka hasil penjualan akan mengalami kenaikan sebesar 0,237 atau 23,7 %.
 4. Nilai koefisien regresi untuk variabel gaji karyawan (X3) memiliki nilai negatif yaitu -0,094 artinya gaji karyawan memiliki hubungan negatif dan berlawanan dengan hasil penjualan, semakin naik biaya gaji karyawan maka akan semakin menurun hasil penjualan. Sebaliknya, semakin rendah gaji karyawan maka akan semakin meningkat hasil penjualan. Setiap kenaikan gaji karyawan sebesar satu satuan, maka hasil penjualan akan mengalami penurunan sebesar 0,094 atau 9,4%.

Uji Hipotesis

Uji t memiliki tujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} serta melihat nilai signifikan pada taraf kepercayaan 0,05. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Untuk menentukan nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan nilai *degree of freedom* (df) sebanyak 32 (36-4). Dengan menggunakan nilai α dan df yang telah ditentukan, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,03693. Berikut hasil pengujian uji t yang dilakukan menggunakan SPSS 24:

Tabel 10. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.761	2.806		-.984	.332
1 BIAYA PRODUKSI	1.067	.090	.916	11.840	.000
BIAYA PEMASARAN	.237	.150	.105	1.578	.124
GAJI KARYAWAN	-.094	.150	-.045	-.626	.536

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber: Output SPSS 24, 2020

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada variabel biaya produksi diperoleh t_{hitung} sebesar 11,840, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Artinya dalam penelitian ini H_0 diterima dan H_a ditolak, dimana hipotesis yang menyatakan variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Hasil Penjualan) diterima. Dan hipotesis yang menyatakan variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Hasil Penjualan) ditolak.
2. Pada variabel biaya pemasaran diperoleh t_{hitung} sebesar 1,578, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,536 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemasaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Artinya dalam penelitian ini H_a diterima dan H_0 ditolak, dimana hipotesis yang menyatakan variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Hasil Penjualan) diterima. Dan hipotesis yang menyatakan menyatakan variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran

dan gaji karyawan) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Hasil Penjualan) ditolak.

3. Pada variabel gaji karyawan diperoleh t_{hitung} sebesar -0,626, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,124 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaji karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Artinya dalam penelitian ini H_a diterima dan H_0 ditolak, dimana hipotesis yang menyatakan variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Hasil Penjualan) diterima. Dan hipotesis yang menyatakan menyatakan variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Hasil Penjualan) ditolak.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 11 Hasil ANOVA

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.616	3	3.539	82.062	.000 ^b
	Residual	1.380	32	.043		
	Total	11.996	35			

a. Dependent Variable: PENJUALAN

b. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

Sumber: *Output SPSS 24, 2020*

Untuk menentukan f_{tabel} , dengan tingkat signifikansi 5%, $df_1=3$ (4-1) dan $df_2=32$ (36-4) sehingga diperoleh f_{tabel} sebesar 2,90. Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian bahwa f_{hitung} sebesar 11,996 jika dibandingkan dengan f_{tabel} 2,90 maka $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Maka, dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Sehingga hipotesis yang menyatakan “biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan secara simultan berpengaruh terhadap hasil penjualan” diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan untuk menjelaskan variabel hasil penjualan. Dalam penelitian ini digunakan *adjusted R square*.

Tabel 12. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.874	.20766

a. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

b. Dependent Variable: PENJUALAN

Tabel 12 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,874 atau 87,4% yang berarti bahwa biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan mampu mempengaruhi hasil penjualan sebesar 87,4%. Sedangkan sisanya sebesar 12,6% (100%-87,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Pembahasan

Variabel biaya produksi diperoleh t_{hitung} sebesar 11,840, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Variabel biaya pemasaran diperoleh t_{hitung} sebesar 1,578, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,536 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaji karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Variabel gaji karyawan diperoleh t_{hitung} sebesar -0,626, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,124 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut

menunjukkan bahwa gaji karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan.

Secara simultan biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan memiliki f_{hitung} sebesar 11,996 yang lebih besar dari f_{tabel} sebesar 2,90 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka, hal ini dapat dinyatakan bahwa biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan.

Pengaruh Biaya Produksi Terhadap hasil penjualan. Biaya produksi dapat menurun dan hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan hasil penjualan yang diperoleh. Kondisi yang sebenarnya telah membuktikan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh CV FahmaHair dalam rangka memenuhi pesanan konsumen mampu meningkatkan hasil penjualan sebagai akibat berkelanjutan dari meningkatnya permintaan pasar, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen yang berdampak terhadap citra perusahaan yang merupakan hal paling penting dalam menjalankan usaha. Biaya produksi sendiri meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CV FahmaHair mampu menambah biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan permintaan, sehingga permintaan dari konsumenn dapat terpenuhi. Menurut Kotler produk adalah “segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, diminati, dipakai atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan”. Variabel biaya produksi diperoleh t_{hitung} sebesar 11,840, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernawati (2003), yang menyatakan bahwa “Rendahnya biaya produksi dan promosi yang optimal memang secara bersama-sama mempengaruhi penjualan, semakin rendahnya biaya produksi yang diiringi dengan promosi secara optimal maka akan meningkatkan nilai penjualan.

Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap Hasil Penjualan. Terdapat hal penting yang perlu diperhatikan bahwa aktivitas pemasaran sering kali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Contohnya ketika terjadi inflasi, krisis ekonomi, perubahan selera konsumen dan lainnya. Oleh karena perubahan kebutuhan konsumen yang menghendaki pelayanan yang baik dan cepat, maka satu perusahaan akan merubah metode pemasaran yang selama ini dilakukan. Dalam dunia usaha, pesaing mempunyai pengaruh terhadap metode pemasaran yang digunakan oleh sebuah perusahaan sehingga metode pemasaran produk harus fleksibel. Semakin banyak kegiatan pemasaran yang dilakukan maka semakin meningkatkan pesanan yang akan diterima sehingga berdampak pada meningkatnya hasil penjualan. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Susanti (2010) semakin tinggi biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan maka meningkatkan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan. Terkait kesimpulan Susanti, hasil penelitian yang telah dilakukan dengan analisis regresi linier berganda tidak dapat membuktikan teori tersebut. Ini dapat dilihat dari variabel biaya pemasaran diperoleh t_{hitung} sebesar 1,578, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,536 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemasaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan.

Pengaruh Gaji Karyawan Terhadap Hasil Penjualan. Gaji merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan, dimana gaji/upah ini merupakan bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan secara periodik sebagai bentuk pembayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relatif dan tergantung sudut pandangan yang dipakai. Sisi lain dari mencukupi adalah kewajaran, yaitu berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar. Karyawan merupakan salah satu aset utama dalam perusahaan, dimana sebagian besar

kegiatan usaha dilakukan oleh kompeten. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karyawan yang kompeten guna membuat perusahaan mencapai tujuan. Demi berjalannya kegiatan perusahaan dengan baik maka kepuasan karyawan menjadi hal utama, dengan gaji yang memuaskan serta tunjangan yang sepatutnya, hal ini akan meningkatkan kinerja karyawan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaji karyawan diperoleh t_{hitung} sebesar -0,626, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikansi sebesar $0,124 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaji karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Meskipun tidak mempengaruhi secara signifikan, namun gaji karyawan pada perusahaan ini memiliki pengaruh yang dirasa sangat cukup. Karena, perekrutan karyawan pada objek penelitian ini tidak berasal dari karyawan ulung, namun memang bertujuan mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan, untuk nantinya menjadi pengrajin yang berpengalaman, oleh karena itu kenaikan gaji tidak terlalu signifikan dan berdampak signifikan pula pada perusahaan.

Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Pemasaran dan Gaji Karyawan Terhadap Hasil Penjualan. Biaya produksi merupakan suatu kebijakan yang perlu dilakukan dan diperhitungkan dengan benar, dimana pengeluaran dan penekanan pada biaya produksi ini dapat mempengaruhi output perusahaan. Pemilihan bahan baku yang menghemat biaya dengan tidak melupakan kualitas bahan baku tersebut akan meningkatkan volume penjualan serta kepuasan konsumen. Selain itu, biaya pemasaran juga termasuk hal paling penting dimana pemasaran merupakan ujung tombak strategi perusahaan yang sangat menentukan penjualan. Aktivitas pemasaran yang memakan anggaran banyak tidak menjamin keberhasilan jika tidak diiringi dengan *timing* serta strategi yang tepat. Disamping itu, kompensasi kepada karyawan berupa gaji, upah, ataupun bonus menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Dimana hal tersebut banyak atau sedikit mampu meningkatkan kinerja karyawan dan berdampak pada hasil penjualan serta memudahkan perusahaan mencapai tujuan.

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil pengujian bahwa f_{hitung} sebesar 11,996 jika dibandingkan dengan f_{tabel} 2,90 maka $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Maka, dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Dari hasil uji determinasi, diperoleh *adjusted R square* sebesar 0,874 atau 87,4% yang berarti bahwa biaya produksi, biaya pemasaran, mampu mempengaruhi hasil penjualan sebesar 87,4%. Sedangkan sisanya sebesar 12,6% ($100\% - 87,4\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik Ibrahim (2011), dimana hasil dari penelitian tersebut adalah biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan koefisien determinasi (*Ajusted R²*) sebesar 0,733 yang berarti biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan berpengaruh positif terhadap hasil penjualan sebesar 73,3% dan sisanya sebesar 26,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvak Maulana (2016) nilai f_{hitung} sebesar 15,737 lebih besar dari f_{tabel} ($\alpha = 0.05$; *df* regresi = 3; *df* residual = 32) adalah sebesar 2,92 atau $sig < 0,000$ jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen berupa biaya produksi (X_1), biaya pemasaran (X_2) dan gaji karyawan (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap hasil penjualan.

PENUTUP

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan pada CV FahmaHair pada tahun 2017-2019. Sesuai dengan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik tidak terdapat permasalahan yang menyimpang yang berarti data yang

digunakan telah memnuhi syarat untuk model persamaan regresi linier berganda. Terdapat dua hipotesis yang diterima, dan dua lainnya ditolak. Dari seluruh pengujian dan pembahasan yang telah dibuat, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Ditunjukkan dengan di perolehnya t_{hitung} sebesar 11,840, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Tinggi atau rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dapat mempengaruhi hasil penjualan. Karena pada dasarnya biaya produksi adalah senjata yang sangat berpengaruh terhadap hasil output suatu perusahaan, dimana penekanan pada pembiayaan mengenai bahan pokok dengan tidak menghilangkan kualitas sebagai acuan utama, hal tersebut akan membantu memanfaatkan biaya produksi dan meningkatkan output sehingga mendapat hasil penjualan sesuai target anggaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. Biaya pemasaran tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Ditunjukkan dengan di perolehnya t_{hitung} sebesar 1,578, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,536 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemasaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Tinggi rendahnya biaya pemasaran tidak berpengaruh pada hasil penjualan, dikarenakan faktor lain yang tidak mampu menyeimbangi kegiatan pemasaran, seperti target pasar yang tidak tepat serta *timing* yang dirasa kurang pas untuk melakukan kegiatan pemasaran, namun tidak serta merta setiap kegiatan pemasaran tersebut akan gagal, banyak yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat meningkatkan potensi yang di dapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut.
3. Gaji Karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Ditunjukkan dengan di perolehnya t_{hitung} sebesar -0,626, jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,03693 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai signifikan sebesar $0,124 > 0,05$ atau $sig > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaji karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan. Meskipun tidak mempengaruhi secara signifikan, namun gaji karyawan pada perusahaan ini memiliki pengaruh yang dirasa sangat cukup. Karena, perekrutan karyawan pada objek penelitian ini tidak berasal dari karyawan ulung, namun memang bertujuan memperkerjakan karyawan yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan, untuk nantinya menjadi pengrajin yang berpengalaman, oleh karena itu kenaikan gaji tidak terlalu signifikan dan berdampak signifikan pula pada perusahaan.
4. Biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Sebagaimana di perolehnya f_{tabel} sebesar 2,90. Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian bahwa f_{hitung} sebesar 11,996 jika dibandingkan dengan f_{tabel} 2,90 maka $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau $sig < 0,05$. Maka, dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Carter William K., 2015. *Akuntansi Biaya cost counting*, Buku 1 edisi 14. Jakarta. Salemba Empat
- Dessler, Garry., 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, MacananJaya Cemerlang, Jakarta.
- Dummies a willey brand, 2018. *How to use the T - table and F - table to solve statistics problems*. [internet]. [Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020]. Tersedia pada: <https://www.dummies.com/education/math/statistics/how-to-use-the-t-table-to-solve-statistics-problems/>

- Ernawati, 2003. Pengaruh Produksi Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- Ghazali, Imam 2006 *Aplikasi Multivariate dengan program SPSS*, : Badan Penerbit UnDip Semarang.
- Ghazali, Imam. 2017. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Cetakan III. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, T. Hani., 2001. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Hasen Don R. dan Maryanne M. Mowen., 2004. *Akuntansi Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- I Gusti Putu Gde Indra Dinar, Ni Nyoman Yulianthini, Gede Putu Agus Jana Susila, 2016. Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Promosi Terhadap Penjualan UD Tirta di Jembrana.
- Ika Septi Wulandari, 2015. *Pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan petroganik pada CV. Ijo Ngawi*.
- Kieso Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2011. *Akuntansi Menengah*. Edisi ke-12. Penerjemah: Emil Salim. Jakarta: Erlangga.
- Kieso Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2017. *Akuntansi Menengah*. Edisi IFRS. Penerjemah: Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2018. *Akuntansi Menengah*. Edisi IFRS volume 2. Penerjemah: Iis Istianah. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip, 1995 *Marketing jilid I*. ter. Herujati Purwoko, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusumaningrum, Hezti Pratiwi., 2018. *Analisis pngaruh biaya produksi dan biaya pemasaran terhadap laba CV. Tunik Putri*. *Equity jurnal*.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Martani Dwi, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marwasputra, Lestariadi., 2010. *Pengaruh biaya produksi, dan biaya penjualan terhadap hasil penjualan pengrajin keramik di kecamatan Purworejo klampok kabupaten banjarnegara*. Digilib Unnes, Semarang.
- Muktiadji, Nusa dan Eet Yuliati, 2008. Pengaruh Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Penjualan dan Kemampuan. Studi Kasus pada PT. HM.Sampoerna. Tbk.
- Mulyadi., 1995. *Akuntansi Biaya* Edisi 5. Aditya Media, Yogyakarta.
- Rikyta, Erni Suranto, 2015. *Pengaruh biaya produksi terhadap penjualan dan laba operasi pada perusahaan manufaktur*, 2015.
- Swastha, Basu dan Irawan, 2000, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Edisi II, Get. VHI), Liberty Yogyakarta.
- Setiawan dan Kusrini, Dwi Endah, 2010. *Ekonometrika*, Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Sahid Raharjo, 2017. *Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Run Test*. [internet]. [Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020].
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari, 2005. *Analisis Statistik dengan Mocrrosoft Excel Dan SPSS*, Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Taufik, Ibrahim., 2011. *Pengaruh Biaya Produksi Dan Pemasaran Terhadap Hasil Penjualan Pada Anggrek Catering Di Kota Semarang*. Skripsi Manajemen Ekonomi Unnes, Semarang.
- Wulandari, Ika Septi., 2015. *Pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan petroganik pada CV. Ijo Ngawi*, Prosiding.unipma.

Analisis Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha (PSAK 30)

Studi Kasus Pada PT. BFI Finance Indoneisa Tbk.

*Implementation of
Lease Accounting
in Indonesia*

Farid Hardiansyah Haris dan Rachmawaty Rachman
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail: farid.haris@gmail.com

109

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

This study aims to determine the system of financing, recording, and presentation of lease accounting contracts applied by the company whether it has been in accordance with the statement of financial accounting standards 30. The results of the research show that in its operational activities the company uses the method of financing lease, because in the lease contract the company transfers substantially all the risk and rewards associated with the ownership of the asset. In the contract the company recognizes assets in the form of rental receivables in the amount equal to the net rental investment. The receivable from rental receivable treated as principal payment which will be presented in the statement of financial position and the finance lease income to be presented in the statement of financial position and the financial lease income to be presented in the statement of income. In general, the accounting standard 30 which has been described in the note to the financial statement of the company. With the provisions of accounting for leases (PSAK 73) that have been ratified by DSAK-IAI, in 2017 Effective as of 1 January 2020, the company should consider the provisions in the application of the rental accounting policy in the subsequent period.

Keywords : Finance Lease , Statement of Financial Accounting Standard 30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan, pencatatan, dan penyajian kontrak akuntansi sewa yang diterapkan oleh perusahaan serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan metode sewa pembiayaan (financial lease), karena dalam kontrak sewa perusahaan menyatakan adanya pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dalam kontrak tersebut perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok yang disajikan ke dalam laporan laba rugi. Secara garis besar, akuntansi transaksi sewa perusahaan telah sesuai dengan PSAK 30 yang penjelasannya telah dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya ketentuan akuntansi sewa (PSAK 73) yang telah disahkan oleh DSAK – IAI pada tahun 2017 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, maka perusahaan perlu memperhatikan ketentuan tersebut dalam penerapan kebijakan akuntansi sewa pada periode berikutnya.

Kata Kunci : Akuntansi Sewa, PSAK 30

PENDAHULUAN

Ada berbagai macam lembaga keuangan seperti Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan tergolong lembaga yang relatif baru. Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah lembaga/badan usaha yang memberikan atau melakukan kegiatan pemberian dana atau barang modal. Dalam hal

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 109-120
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

ini tentunya lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan angsuran sesuai yang telah disepakati.

Keinginan manusia serta kebutuhan manusia dalam biaya hidup serta modal kadang memaksa konsumen untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Contohnya adalah ketika seseorang konsumen ingin menambah modal usaha dia, biaya menjadi faktor penghalang untuk membesarkan usaha dia, namun jika dia memiliki unit motor dan ada surat BPKB maka dia bisa melakukan kegiatan pembiayaan untuk mendapatkan modal dana dari perusahaan pembiayaan dan melakukan pembayaran secara cicilan dengan tenor yang telah disepakati. Menurut Kasmir (2016, 241) kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep-122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *Leasing* di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha *leasing* di keluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha *leasing* di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 20 1998) yang isinya mengatur tentang usaha *leasing* di Indonesia dan dengan keluarnya kebijakan ini, maka ketentuan mengenai usaha *leasing* sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Kegiatan utama perusahaan *leasing* adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti kendaraan baik itu motor atau mobil dengan disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*.

Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya perusahaan *leasing* dapat membantu masyarakat dalam penyediaan modal, kepada perusahaan/perorangan yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usahanya tanpa harus membayar dengan tunai, tetapi dapat diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu pengembalian antara 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun atau lebih sesuai yang mereka kehendaki itu lebih meringankan bagi masyarakat yang ingin memiliki sebuah kendaraan bermotor. Dengan perkembangan *leasing* tersebut maka dibutuhkannya peranan akuntansi dalam suatu perusahaan sehingga timbul kebutuhan untuk menyediakan standar akuntansi keuangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan penuntun praktik akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi *leasing* dalam laporan keuangan dan menghasilkan suatu laporan keuangan yang wajar serta informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan.

Hal ini dikarenakan akuntansi memberikan informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi berupa laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan sangat memberikan peran penting dalam pengambilan keputusan, baik itu ditingkat manajemen maupun ditingkat *shareholder* atau *investor* terutama yang tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, yang mengatur standar akuntansi *leasing* diatur oleh PSAK 30 yang mengatur standar akuntansi dengan ruang lingkup dan karakteristik dalam laporan keuangan perusahaan yang harus mengacu pada pedoman standar akuntansi keuangan tersebut.

Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah hasil dari catatan historis akuntansi mengenai transaksi yang dilakukan perusahaan dan mencerminkan bagaimana

perusahaan berjalan selama satu tahun periode kebelakang, memperlihatkan posisi *financial* perusahaan, dan rugi labanya perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan perlu dibuat secara *relevan* dan *reliabel* agar dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Melihat semakin berkembangnya kegiatan sewa guna usaha, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk menyediakan suatu standar akuntansi keuangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna usaha dalam laporan keuangan, sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Kegiatan sewa menyewa ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabel-variabel itu misalnya lama masa persewaan, persyaratan pembayaran dan pembelian, ayat-ayat mengenai pembatalan dan sanksi-sanksi, jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran sewa, tingkat bunga yang terkandung dalam perjanjian sewa menyewa, dan pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam sewa guna usaha.

Pada umumnya perusahaan salah dalam mengklasifikasikan apakah transaksi tersebut termasuk dalam *financial lease* atau *operating lease*. Karena untuk menentukan itu merupakan *financial lease* atau *operating lease* kita harus melihat dari jenis transaksinya jika transaksi tersebut mengalihkan kepemilikan aset kepada lesee pada akhir masa sewa itu berarti transaksi tersebut adalah *financial lease* dan jika tidak maka itu adalah transaksi *operating lease*. Dimana perusahaan salah menentukan jenis operasi, yang dimana jika menggunakan metode *financial lease* maka dalam pengakuan awal aset yang di akui berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut, sedangkan dalam *operating lease* lessor menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut.

Ditinjau dari segi kewajiban, metode *capital lease* dapat memperbesar kewajiban yang ada di neraca. Hal ini dikarenakan metode *capital lease* menghendaki aktiva yang disewa guna usaha dicatat disisi debet sebagai aktiva sewa guna usaha dan kewajiban sewa guna usaha dicatat disisi kredit. Dengan sendirinya perhitungan risiko keuangan yang berhubungan dengan kewajiban akan tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan metode *operating lease*. Terkadang perusahaan juga salah dalam menentukan metode yang harusnya di gunakan dalam *financial lease* dan *operating lease* yang seharusnya *financial lease* menggunakan metode anuitas bukan dengan metode garis lurus, jika menggunakan metode garis lurus pada saat masa perjanjian leasing pembayaran uang muka sebagai simpanan jaminan, perusahaan mencatat pada kelompok aset lancar, sehingga di laporan posisi keuangan jumlah aset lancar lebih besar dari yang sebenarnya. Dengan salahnya jenis transaksi dan metode yang digunakan akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan melenceng dari standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 30 yang ada.

Pada kasus penelitian yang dilakukan oleh Putri Rosita (2018) tentang "PENERAPAN PSAK NO.30 TENTANG AKUNTANSI SEWA ASET TETAP PADA PT. RACHMAT KELANTAN SAKTI DI PALEMBANG" menyatakan bahwa sewa yang dilakukan pada PT Rachmat Kelantan Sakti adalah sewa operasi, masalah yang ada pada PT. Rachmat Kelantan Sakti masih menggabungkan aset tetap perusahaan dengan aset tetap yang disewakan dalam satu nama akun, yaitu aset tetap. Seharusnya pada PSAK No. 30 itu harusnya di pisah dan juga Pada saat penelitian ini dilakukan, perusahaan pada tahun 2015-2016 belum melakukan penghitungan penyusutan aset tetap yang disewakan karena perusahaan hanya mencatat kas masuk, yaitu pendapatan sewa, dan kas keluar, yaitu beban pembelian spare part dan beban lain-lain. Menurut PSAK No. 30, perhitungan penyusutan aset tetap yang disewakan dihitung menggunakan metode garis lurus. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), barang modal yang disewakan di laporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Dari hasil penelitian ini juga bisa di ambil bahwa

perusahaan tersebut belum sesuai dengan PSAK No. 30 di karenakan pada perusahaan tersebut tidak melakukan perhitungan penyusutan dari aset tetap yang di sewakan. Hal tersebut terjadi karena pihak manajemen tidak mengetahui metode yang harus digunakan dalam perhiungan aset tetap yang sesuai dengan PSAK No. 30 terkait aset pada pelaporan keuangan sehingga perusahaan belum menghitung biaya penyusutan dari aset tetap yang disewakan tersebut. Lalu dalam hal pencatatan dan pengungkapan dalam pada perusahaan tidak di pisahkannya aset tetap dan aset tetap yang disewakan tentu saja berdampak pada penyusutan aset tetap dan penyusutan aset tetap yang di sewakan tidak terpisah juga.

Oleh sebab itu, metode pembiayaan dengan *capital lease* tidak dapat disamakan dengan perjanjian sewa menyewa biasa seperti halnya pada *operating lease*, sehingga perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan PSAK No.30 dalam rangka penyusunan laporan keuangan perusahaan. Untuk itu guna menjawab berbagai pertentangan dan menjelaskan praktek sewa guna usaha perlu pengkajian dari sisi konsep-konsep akuntansi yang mendasar, sehingga dapat ditentukan perlakuan setiap transaksi sewa guna usaha secara tepat, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi tersebut harus dapat memberikan suatu rangkaian historis dari sumber-sumber ekonomi, kewajiban-kewajiban perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut akan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya. Data keuangan dalam laporan keuangan akan lebih berarti apabila analisis lebih lanjut sehingga dapat memperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang diambil. Dengan demikian analisis akuntansi leasing berdasarkan PSAK No. 30 merupakan analisis yang dilakukan berbagai macam informasi mengenai perlakuan dan pelaporan transaksi akuntansi leasing dalam suatu laporan keuangan perusahaan.

Namun masih banyak perusahaan perusahaan pembiayaan yang masih yang bekum menerapkan PSAK 30 secara benar contohnya sepeti analisis yang dilakukan oleh Meiki sumual dan Dhullo afandi Dengan judul” **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING DAN PELAPORANNYA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DI MANADO**” Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 1. P.T. Astra Sedaya Finance sebaiknya melakukan pemisahan pencatatan penyusutan aktiva tetap dengan aktiva yang disewakan. Sesuai dengan PSAK 30. 2. PT. Astra Sedaya Finance sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan pelaporan yang terkait dengan transaksi leasing, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan antara perlakuan akuntansi dengan menggunakan metode pencatatan perusahaan. Dalam penelitian ini perusahaan belum menerapkan secara konsisten penerapan PSAK 30 secara penuh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan sewa guna usaha pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
3. Untuk Mengetahui penyajian laporan keuangan akuntansi sewa pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di BFI Finance Jalan Raya Tajur No. 118, Tajur, Bogor Timur, Pakuan, Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16141. Waktu penelitian dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data yang diperoleh dari bursa efek indonesia (BEI) berupa laporan keuangan periode 3 tahun terakhir. Metode analisis deskriptif komparatif dalam penelitian ini menggunakan identifikasi

masalah secara terperinci dan sistematis dengan penekanan pada perbandingan hasil riset lapangan dengan teori terkini dan relevan yang diperoleh dari hasil riset kepustakaan. Dimana peneliti akan melakukan perbandingan pada laporan keuangan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. terkait dengan judul penelitian penelitianmaka analisis yang dilakukan adalah membandingkan apakah PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Telah menerapkan akuntansi leasing pada laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No.30 yang berlaku di Indonesia sebagai Standar Akuntansi Leasing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembiayaan sewa guna usaha pada PT. BFI Finance indonesia Tbk.,

Pihak pihak yang terkait dalam pembiayaan yaitu : Konsumen/calon nasabah, Perusahaan *leasing* yang menyediakan dana dan Dealer. Dimana pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Konsumen datang ke *dealer* untuk melakukan negosiasi mengenai kendaraan yang akan di beli. Negosiasi ini meliputi harga, jenis kendaraan beserta seri dan type kendaraan, untuk masalah garansi, suku cadang dan service lain-lain. Negosiasi berlanjut dengan menyerahkan uang muka (*down payment*)
- b. *Dealer* menawarkan barang yang di jual secara tunai atau kredit, menerima sejumlah uang muka (*down payment*) dan mengajukan aplikasi permohonan pembiayaan kepada perusahaan *leasing*.
- c. Bagian *marketing*, menerima aplikasi konsumen dan menginput data aplikasi yang tertera untuk dikirim ke pihak BFI Finance.
- d. Bagian *surveyor*, menerima aplikasi dari *marketing* dan *dealer* dan memproses lebih lanjut dengan melakukan pengamatan fakta lapangan ke calon nasabah dan melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan pembiayaan.
- e. PT. BFI Finance memberikan pencairan dana pembiayaan kepada *dealer* sebagai pelunasan transaksi jual beli kendaraan.
- f. *Dealer* menyerahkan barang kepada nasabah dan sebagai jaminan fasilitas pembiayaan yang diberikan, maka PT. BFI Finance menerima jaminan dari nasabah berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dari kendaraan yang telah dibiayai dan jaminan pokok secara fidusia dengan kepemilikan akan berada pada perusahaan sampai angsuran pembayaran telah disampaikan lunas.
- g. Nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran secara berkala dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya PT. BFI Finance Indonesia menetapkan prosedur aplikasi pembiayaan seperti berikut ini :

1. Prosedur Permohonan Nasabah

Permohonan pembiayaan leasing diajukan pada perusahaan dengan melalui bagian pemasaran atau *marketing* dan juga *costumer service* dengan cara :

- a. Permohonan dari calon nasabah yang diajukan melalui jaringan usaha atau dealer yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Syarat dan ketentuannya adalah :

1. Nasabah perorangan

- a. Formulir aplikasi pinjaman
- b. Fotokopi KTP pelanggan dan pasangan
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Akta Nikah (jika sudah berkeluarga)
- e. Fotokopi NPWP
- f. Fotokopi PBB 2 tahun terakhir / rekening listrik 6 bulan terakhir
- g. Fotokopi rekening tabungan / rekening koran 3 bulan terakhir
- h. Asli slip gaji 3 bulan terakhir / SPPT terakhir

2. Perusahaan

- a. Formulir aplikasi pinjaman
- b. Fotokopi NPWP

- c. Fotokopi PBB 2 tahun terakhir / rekening listrik 6 bulan terakhir
 - d. Fotokopi rekening tabungan / rekening koran 3 bulan terakhir
 - e. Fotokopi izin usaha (SIUP / TDP) / SPPT terakhir
 - f. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
 - g. Fotokopi Akta Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
 - h. Fotokopi identitas komisaris dan direksi
- b. *Dealer* melanjutkan aplikasi ke PT. BFI Finance Indonesia melalui petugas pemasaran atau *marketing di dealer/* jaringan usaha perusahaan dan diterima oleh *credit marketing head* yang kemudian akan dilakukan proses initial data entry untuk melihat apakah konsumen masuk dalam daftar hitam (*black list*). Lalu jika lolos maka akan dilakukan survei pengamatan fakta lapangan.
2. Prosedur Penilaian Kelayakan Calon Nasabah
Untuk menilai kepercayaan calon nasabah, maka dilakukan lah penilaian calon nasabah oleh bagian survei lapangan dengan prosedur sebagai berikut.
- a. Survei dari PT BFI Finance Indonesia melakukan pengamatan fakta lapangan meneliti ke lokasi rumah nasabah untuk menilai kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan. Dan menilai apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.
3. Prosedur Persetujuan
- a. Berdasarkan hasil survei sebagai tim analisis fakta lapangan dan berdasarkan hasil laporan data yang didapat oleh si survei berisi kesimpulan pertimbangan apakah nasabah tersebut layak untuk dibiayai atau tidak.
 - b. Analisis yang dibuat merupakan sebuah kesimpulan yang baik positif ataupun negatif yang berdasarkan fakta lapangan . dan jika layak makan data tersebut akan dibawa kembali ke komite kredit yang dimana bertujuan untuk analisis permohonan pembiayaan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi pembayaran kepada perusahaan secara baik sesuai kesepakatan.
 - c. Komite kredit akan menilai, menganalisis dan memutuskan kesepakatan disetujui atau ditolak atas pengajuan kredit tersebut. Dan komite kredit akan memutuskan apakah kredit yang diajukan diterima atau ditolak. Jika diterima maka proses pengajuan akan dilanjutkan dengan pencairan dana.

Perlakuan Akuntansi oleh Lessor

1. Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa itu didasarkan pada substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Kembali lagi pada dasarnya yaitu jika sewa tersebut disebut sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Tetapi jika suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dalam PSAK 30 ada beberapa hal yang harus diungkap oleh *lessor* dalam menyajikan laporan keuangan terkait sewa pembiayaan yaitu mengenai pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan, serta pengungkapan dan pelaporan sewa guna usaha serta perlakuan akuntansi sewa pada laporan keuangan yang akan penulis analisis bagaimana penyajian laporan keuangan akuntansi sewa pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Jenis sewa pada PT. BFI Finance adalah sewa pembiayaan (*financial lease*) yang dimana pada akhir masa sewa pihak *lessee* berhak memiliki aset yang disewa guna usahakan dan sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Berikut adalah ilustrasi transaksi pencatatan sewa dalam laporan keuanga: Nasabah menginginkan motor bekas untuk keperluan bisnisnya dan konsumen memilih dealer motor dengan salah satu unit yang ingin di beli seharga

Rp. 13.000.000,- serta mengambil tenor 12 bulan/ 1 tahun. Misal DP ditetapkan Rp. 3.000.000,- dan biaya admin adalah Rp. 600.000,- asuransi Rp. 500.000,-

OTR : Rp. 13.000.000,-
 DP : Rp. 3.000.000,-
 Pokok utang : Rp. 11.100.000,-
 angsuran : Rp. 1.105.000,-
 jangka waktu : 12 bulan
 DP : Rp. 3.000.000,-
 Angsuran pertama : Rp. 1.105.00,-
 Asuransi : Rp. 500.000,-
 Admin : Rp. 600.000,-
 Total bunga : (pokok hutang x presentase bunga perbulan x tenor 12 bulan)
 : 11.100.000 x 1.62% x 12 = Rp. 2.157.840,-
 Total hutang : Rp. 13.257.840,-
 Cicilan perbulan : 13.257.840,-/12 = 1.104.820

Tabel 1 : Tabel Skema Angsuran

periode	installment	interest revenue	principle paid	account receivable
1				IDR 13,257,840
1	IDR 1,104,820		IDR 1,104,820	IDR 12,153,020
2	IDR 1,104,820	IDR 196,879	IDR 907,941	IDR 11,048,200
3	IDR 1,104,820	IDR 178,981	IDR 925,839	IDR 9,943,380
4	IDR 1,104,820	IDR 161,083	IDR 943,737	IDR 8,838,560
5	IDR 1,104,820	IDR 143,185	IDR 961,635	IDR 7,733,740
6	IDR 1,104,820	IDR 125,287	IDR 979,533	IDR 6,628,920
7	IDR 1,104,820	IDR 107,389	IDR 997,431	IDR 5,524,100
8	IDR 1,104,820	IDR 89,490	IDR 1,015,330	IDR 4,419,280
9	IDR 1,104,820	IDR 71,592	IDR 1,033,228	IDR 3,314,460
10	IDR 1,104,820	IDR 53,694	IDR 1,051,126	IDR 2,209,640
11	IDR 1,104,820	IDR 35,796	IDR 1,069,024	IDR 1,104,820
12	IDR 1,104,820	IDR 17,898	IDR 1,086,922	-

Jurnal pembelian aset sewa pada *dealer*

Aset sewa guna usaha Rp. 13.000.000,-

Kas Rp. 13.000.000,-

PT. BFI finance tidak menginvestasikan dana tunai kepada dealer, tetapi perusahaan akan mengeluarkan dana pembiayaan pada saat transaksi terjadi.

Jurnal saat transaksi mencatat *lease*:

Piutang sewa pembiayaan Rp. 13.257.840,-

Aset sewa guna usaha Rp. 10.000.000,-

Pendapatan bunga diterima dimuka Rp. 2.757.840,-

Titipan premi asuransi Rp. 500.000,-

Pendapatan administrasi ditangguhkan Rp. 600.000,-

PT. BFI finance mengakui “aset sewa berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto”.

Jurnal untuk mencatat awal sewa perjanjian *lease* pada pembayaran pertama:

Kas Rp. 1.104.820,-

Piutang sewa pembiayaan Rp. 1.104.820,-

Jurnal saat pembayaran angsuran ke 2:

Kas Rp. 1.104.820,-

Pendapatan sewa pembiayaan Rp. 196.879,-

Piutang sewa pembiayaan Rp. 907.941,-

Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto.

2. Penyajian transaksi sewa guna usaha

Dalam melakukan kegiatan operasi perusahaan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan PT. BFI Finance Indonesia sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan, PT. BFI Finance Indonesia tidak memiliki barang untuk diperjual belikan atau pun disewakan kepada konsumen melainkan langsung mengeluarkan dana kepada supplier, dealer atau langsung kepada konsumen pada saat terjadi suatu transaksi sewa. PT. BFI Finance Indonesia melakukan pencatatan aset lease bukan sebagai aset tetap tapi sebagai piutang dan menghentikan pengakuan aset dalam laporan posisi keuangannya. Lain halnya dengan perusahaan yang melakukan metode sewa operasi, yang berarti perusahaan tersebut memiliki barang yang dapat diperjual belikan maupun disewakan kepada konsumen dan harus mencatat aset dalam laporan posisi keuangan serta mengakui penyusutan setiap tahunnya. Pada PT. BFI Finance Indonesia menggunakan metode financial lease atau sewa pembiayaan yang dimana berarti perusahaan mengakui aset berupa piutang dan piutang tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi bersih. Untuk lebih jelasnya penulis akan sajikan laporan posisi keuangan dan pendapatan sewa pembiayaan neto.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan/ Notes	2018	2017*)	
ASET				ASSETS
KAS DAN SETARA KAS	2d,e,4	755.247	225.203	CASH AND CASH EQUIVALENTS
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 157.419 dan Rp 85.492 pada tahun 2018 dan 2017	2d,f,5	11.357.670	9.435.315	FINANCE LEASES RECEIVABLES - net of allowance for impairment losses of Rp 157,419 and Rp 85,492 in 2018 and 2017
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 220.443 dan Rp 151.990 pada tahun 2018 dan 2017	2d,g,6,39	5.922.788	5.739.410	CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - net of allowance for impairment losses of Rp 220,443 and Rp 151,990 in 2018 and 2017
PIUTANG UJARAN	2d,h	105	-	LIARAH RECEIVABLES
PIUTANG LAIN-LAIN - bersih	2d,i,7,39	198.271	414.127	OTHER RECEIVABLES - net
ASET DERIVATIF	2d,j,t,8	110.170	-	DERIVATIVE ASSETS
BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	2k,9	53.430	43.071	PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
ASET UJARAN - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 504 pada tanggal 31 Desember 2018	2l,10	2.332	-	LIARAH ASSETS - net of accumulated depreciation of Rp 504 as of 31 December 2018
ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 349.566 dan Rp 298.954 pada tahun 2018 dan 2017	2m,11	530.145	457.376	FIXED ASSETS - net of accumulated depreciation of Rp 349,566 and Rp 298,954 in 2018 and 2017
ASET TAK BERWUJUD - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 63.772 dan Rp 54.400 pada tahun 2018 dan 2017	2n,12	32.374	20.552	INTANGIBLE ASSETS - net of accumulated amortization of Rp 63,772 and Rp 54,400 in 2018 and 2017
ASET PAJAK TANGGUHAN	2o,15c	68.382	65.588	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2d,13,39	86.391	82.631	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET		19.117.305	16.483.273	TOTAL ASSETS

Sumber : Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk Tahun 2018

Gambar 1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi BFIN

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN		5. FINANCE LEASES RECEIVABLES	
Rincian piutang sewa pembiayaan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:		The details of finance leases receivables to third parties are as follows:	
	2018	2017	
Piutang sewa pembiayaan - bruto	14.159.288	11.724.499	Finance leases receivables - gross
Nilai sisa yang terjamin	8.419.608	6.943.980	Guaranteed residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(2.516.944)	(2.101.622)	Unearned finance lease income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(127.255)	(102.070)	Unamortized transaction costs
Simpanan jaminan	(8.419.608)	(6.943.980)	Security deposits
Jumlah	11.515.089	9.520.807	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(157.419)	(85.492)	Less allowance for impairment losses
Bersih	11.357.670	9.435.315	Net

Sumber : Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk Tahun 2018

Gambar 2 Pengungkapan Pendapatan Sewa Pembiayaan Neto BFIN

Bisa dilihat pada laporan posisi keuangan PT. BFI Finance Indonesia terdapat akun piutang sewa pembiayaan sebesar Rp. 11.357.670 dan jumlah itu sama dengan piutang sewa bersih yang ada di gambar 4.2 yaitu sebesar Rp. 11.357.670. Dengan begitu berarti sudah sesuai apa yang di syaratkan oleh PSAK 30. PT. BFI Finance Indonesia memberlakukan penerimaan piutang sewa pembiayaan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa guna usaha yang diperoleh perusahaan diakui sebagai pendapatan sewa guna usaha dalam laporan laba rugi dan juga mengakui pembayaran pokok dari konsumen akan langsung mengurangi jumlah piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan. Pada PT. BFI Finance Indonesia tidak memisahkan antara piutang lancar dan tidak lancar yang disajikan dalam posisi keuangan.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017*)	
PENDAPATAN				INCOME
Sewa pembiayaan	2d, f, s, 23	2.871.964	2.281.670	Finance lease
Pembiayaan konsumen	2d, g, s, 24	2.021.182	1.654.331	Consumer financing
Syariah	2d, h, s	529	-	Sharia
Keuangan	2d, s	20.217	7.166	Finance
Lain-lain	2d, m, s, 25	104.351	99.150	Others
Jumlah Pendapatan		5.018.243	4.042.317	Total Income

Sumber : Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk Tahun 2018

Gambar 3 Penyajian Pendapatan Sewa Pembiayaan dalam Laba Rugi

3. Pengakuan Awal Akuntansi Sewa

Pada CALK BFIN, untuk akuntansi sewanya, BFIN menyatakan bahwa “Berdasarkan PSAK 30 (revisi2011), suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa dikasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.” PT. BFI Finance Indonesia menjelaskan bahwa perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan piutang sewa bersih. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Itu bisa dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 yang mana piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan piutang sewa bersih sebesar Rp. 11.357.670.

4. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal BFIN

Untuk pengukuran setelah pengakuan awal, BFIN menjelaskan bahwa “pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi perusahaan sebagai lessor dalam sewa pembiayaan”. Untuk penjelasan lebih lanjut, dalam CALK-nya BFIN juga menyatakan bahwa : “Pada saat pengakuan awal, nilai wajar piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima oleh perusahaan pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Investasi dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman uang diberikan dan piutang.”

5. Penyajian dan Pengungkapan BFIN

Rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembiayaan sewa minimum pada tanggal pelaporan. Di samping itu, lessor mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan, untuk setiap periode berikut : (a) kurang dari satu tahun, (b) lebih dari satu tahun, (c) lebih dari lima tahun. Untuk rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembiayaan sewa minimum pada tanggal pelaporan telah disajikan dalam

gambar 2 yang dimana investasi nilai bruto dan nilai kini piutang telah disajikan dalam akhir periode pelaporan. Dan untuk mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan, untuk setiap periode berikut kurang dari satu tahun, lebih dari satu tahun dan lebih dari lima tahun akan disajikan sebagai berikut :

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)	
5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)		5. FINANCE LEASES RECEIVABLES (Continued)	
Angsuran piutang sewa pembiayaan - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:		The installments of finance leases receivables - gross, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:	
	2018	2017	
<= 1 tahun	7.976.514	6.699.641	<= 1 year
1 - 2 tahun	4.441.905	3.690.044	1 - 2 years
> 2 tahun	1.740.869	1.334.814	> 2 years
Jumlah	<u>14.159.288</u>	<u>11.724.499</u>	Total

Sumber : Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk Tahun 2018

Gambar 4. Pengungkapan angsuran piutang pembiayaan bruto BFIN

Yang berarti lessor mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan disetiap periodenya sesuai dengan yang telah diperuntukkan oleh PSAK 30.

1. Penghasilan pembiayaan tangguhan Pada laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia per 31 desember 2018 telah mengungkapkan penghasilan pembiayaan tangguhan yang dimana itu adalah sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui yang disajikan dalam gambar 2.
2. Nilai residu yang tidak dijamin yang diakui sebagai manfaat lessor. Laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia tidak mengungkapkan nilai residu yang tidak dijamin karena nilai residu aset yang dimiliki PT BFI Finance Indonesia adalah nilai residu yang dijamin juga di perhitungkan dalam perhitungan investasi sewa bruto karena merupakan bagian dari pembiayaan sewa minimum.
3. Akumulasi penyisihan piutang tak tertagih atas pembayaran sewa minimum. Gambar 2 telah mengungkapkan akumulasi penyisihan piutang tak tertagih yang mengurangi investasi bersih dalam sewa pembiayaan. Untuk menemukan angka tersebut perusahaan mengungkapkan perhitungan yang akan disajikan dalam gambar berikut :

	2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	12.472	73.020	85.492	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	62.202	153.335	215.537	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(16.546)	(127.064)	(143.610)	Written-off
Saldo akhir	<u>58.128</u>	<u>99.291</u>	<u>157.419</u>	Ending balance
	2017			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	60.306	60.306	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	33.042	92.658	125.700	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(20.570)	(79.944)	(100.514)	Written-off
Saldo akhir	<u>12.472</u>	<u>73.020</u>	<u>85.492</u>	Ending balance
Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah piutang sewa pembiayaan sebesar 1,37% dan 0,90% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.				Percentage of the allowance for impairment losses to finance leases receivables was 1.37% and 0.90% as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Sumber : Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk Tahun 2018

Gambar 5 pengungkapan cadangan penurunan nilai piutang sewa pembiayaan BFIN

4. Rental kontinjen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan PT BFI Finance Indonesia tidak memiliki rental kontinjen sehingga tidak melakukan pengungkapan untuk rental kontinjen.
5. Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material. PT BFI Finance Indonesia cukup mengungkapkan penjelasan secara umum isi perjanjian sewa lessor yang material dalam catatan atas laporan keuangan secara garis besarnya. Pada laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia tertulis bahwa Sebagai jaminan atas piutang sewa pembiayaan yang diberikan, perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor(BPKB) dan faktur atas kendaraan bermotor dan alat berat yang dibiayi oleh perusahaan. Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan. Simpanan jaminan ini akan digunakan sebagai pembayaran pada akhir masa sewa pembiayaan.

Penerapan akuntansi sewa guna usaha yang ditetapkan PT. BFI Finance Indonesia Tbk., secara garis besar telah sesuai dengan PSAK No.30 namun pada dasarnya semua perbandingan antara teori dan praktek tidaklah jauh berbeda. Opini audit dalam laporan keuangan BFIN menyatakan : Laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 desember 2018, serta kinerja keuangan serta arus kas konsolidasi yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai standar akuntansi keuangan di indonesia.

PENUTUP

Dalam pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kriteria klasifikasi sewa yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 30 (Revisi 2011) tentang sewa, transaksi sewa yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (financial lease) yang dimana pada akhir masa sewa pihak lessee berhak memiliki aset yang disewa guna usahakan dan sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
2. Pada awal masa sewa pembiayaan dengan konsumen, perusahaan akan mengakui piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan investasi neto. Piutang tersebut akan berkurang pada saat perusahaan menerima pembayaran cicilan sewa. Penerimaan cicilan merupakan pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Piutang sewa pembiayaan neto setelah di kurangi dengan penurunan nilai piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan pendapatan pembiayaan disajikan dalam laporan laba rugi.
3. Berdasarkan analisis terhadap catatan atas laporan keuangan PT. BFI Finance Indonesia maka dapat diambil kesimpulan penerapan akuntansi sewa guna usaha di PT. BFI Finance Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan PSAK 30.

DAFTAR PUSTAKA

- Bragg, Steven M. 2011 IFRS Made Easy, PT. Indeks. Jakarta
Buku standar akuntansi keuangan (sak) efektif per 1 januari 2017
Dewan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.30 Revisi 2011. IAI, Jakarta.
Hidayat, L., Muktiadji, N., & Supriadi, Y. (2020, May). The Knowledge and Students' Interest to Investing in Investment Gallery. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 142-145). Atlantis Press.
Ikatan Akuntansi Indonesia 2011, ED PSAK 30 (revisi 2011)
Ikatan Akuntansi Indonesia 2014, Pernyataan Standar Aakuntansi Keuangan. Jakarta

- Iriyadi, I., Setiawan, B., & Sutarti, S. (2017). Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer Dan Sekunder) Bagi Mahasiswa Stie Kesatuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Kasmir. 2016. Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi 2014. Rajawali pers. Jakarta
- Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kieso, D.E., Weygant. J.J., dan Wrfeld, T.D 2011, Intermediet Accounting Volume 1 IFRS Edition. Wiley. United States of America.
- Kusuma, R. D. (2020). Pelatihan Optimasi Media Sosial Untuk Peningkatan Omzet UMKM. *Jurnal Abdimas*, 4(3), 251-260.
- Kusumayanti, D., & Wibisono, S. (2020). Pendampingan Promosi Digital Bagi UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 171-180.
- Laporan keuangan Keuangan Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk 2018. Tersedia pada : <http://www.idx.co.id>
- Martani, Dwi DKK. 2014. Akuntansi Keuangan Menengah Buku 1, Edisi 3. Erlangga , Jakarta
- Meiky Sumual ,Dhullo Afandi (2016) ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING DAN PELAPORANNYA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DI MANADO
- Muanas, M., Triandi, T., & Rahmi, S. (2015). ANALISIS PERILAKU BIAYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUBAHAN VOLUME KEGIATAN PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 3(1).
- Muanas, M., & Mulia, I. (2020). Pendampingan Penguasaan Akuntansi Dasar Bagi Pegawai BPR Mitra Daya Mandiri Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 51-56.
- Muanas, M., & Mulia, I. (2020). Peningkatan Pemahaman Pembukuan Koperasi Melalui Pemograman Sederhana. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 160-170.
- Muktiadji, N., & Gendalasari, G. G. (2016). Pengaruh Motivasi Belajar Dan Status Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat Studi Lanjut Siswa/Siswi Sma Dan Smk Di Bogor Pada Bidang Ekonomi Dan Manajemen. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 4(3), 159-173.
- Pamungkas, B., & Iriyadi, I. (2012). Analisa Atas Pelaksanaan Audit Mutu Internal Untuk Mengevaluasi Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 Studi kasus pada PT. Murni Cahaya Pratama. *Jurnal Ilmiah Kesatuan (JIK)*, 9(2).
- Pamungkas, B. (2005). Peranan Internal Audit dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Piutang: Studi Kasus pada PT. Vaksindo Satwa Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 5(1), 14-21.
- Pradana, E. A. A. (2020). PKm-Pendampingan Tehnik Pembuatan Konten Promosi Digital Bagi UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas*, 4(1), 81-90.
- Ria cristine (2013) PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA AKTIVA TETAP PADA PD. BANGUN BITUNG
- Rini annissa (2018) EVALUASI PENERAPAN PSAK 30 (REVISI 2011) TENTANG SEWA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN LESSOR Studi kasus pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Bogor
- Susilawati, N., & Supriadi, Y. (2017). Pengaruh Cash Ratio dan Siklus Konversi Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(2), 115-124.
- Warren, C.S., et al.. 2014. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia

Banks' Earning Management in Indonesia

Studi Kasus Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2016-2018

121

Karina dan Sutarti

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail: karina@ibik.ac.id

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide empirical evidence of the affect of ownership concetration, firms size, and corporate governance mechanisms on earnings management. Ownership concetration was measure by the biggest stock of individual or organization, firms size was measure by natural logaritma of net assets, and corporate governance mechanisms were measure by three variabels (composition of board of commisioner, audit quality were measure by industry specialize audit firm, and composition of audit committee). Earnings management was measure by discretionary accruals use Modified Jones Method. The population of this research is 41 companies in the banking sector which were listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). The research data were collected from banking companies financial statement for the period of 2016 to 2018. Based on purposive sampling method. The reseacrh hypotesis were tested using multiple regression analysis. The results of this research show that firm size, firm of commissioner and proportion of commissioner have significant relationships with earnings management. Next, variables composition of board of commissioner, ownership concetration and specialize audit firm have no significant relationship with earnings management.

Keywords: *ownership concetration, firms size, corporate governance, earnings management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Konsentrasi kepemilikan diukur dengan jumlah saham terbesar yang dimiliki individu atau kelompok, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logaritma dari total aktiva perusahaan dan mekanisme *corporate governance* diukur menggunakan tiga variabel (komposisi dewan komisaris, kualitas audit yang diproksi dengan spesialisasi industri auditor, dan komposisi komite audit). Manajemen laba diukur dengan *discretionary accruals* menggunakan Modified Jones Model. Populasi pada penelitian ini adalah 45 perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur periode tahun 2016-2018. Berdasarkan metode *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 41 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan, proporsi dewan komisaris. Selanjutnya, variabel independen akuntan public, kepemilikan konstitusional, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, *corporate governance*, manajemen laba.

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 121-135
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

PENDAHULUAN

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*, *principal* bertindak sebagai kepala yang memberi wewenang dan *agent* bertindak sebagai yang menjalankan tugas yang diberikan oleh *principal*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat bersifat asimetri *information* dikarenakan di dalam perusahaan *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* sehingga pihak *agent* dapat menyembunyikan informasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Asimetri antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistis, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. dalam hal pelaporan keuangan manajer dapat melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyetatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1989). Sedangkan Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa *earnings management* terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyetatkan para *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Kasus manajemen laba banyak terjadi mulai dari skala nasional sampai dengan skala internasional. Contoh skandal besar berkaitan dengan manajemen laba tingkat internasional yang sangat terkenal adalah kasus Enron yaitu sebuah perusahaan energi di Amerika Serikat. Sebelum perusahaan itu jatuh, Enron tercatat mempekerjakan 21ribu karyawan lebih dari 40 negara bahkan harga sahamnya pernah mencapai US\$ 90 per-lembar saham. Untuk menarik mata investor Enron memanipulasi laporan keuangannya dengan menyembunyikan hutang sebesar \$12 billion (liputan 6,2014). Skandal ini tidak hanya membuat perusahaan mengalami kebangkrutan namun juga mengakibatkan para pelakunya diseret ke pengadilan sebagai pelaku kejahatan ekonomi.

Fenomena mengenai manajemen laba di Indonesia contoh kasusnya adalah pada PT Agis Tbk (Agis). Pada kasus ini Bapepam (badan pengawas pasar modal,2007) AGIS terbukti memberikan informasi yang secara material tidak besar terkait dengan pendapatan dari dua perusahaan yang diakuisisi yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, dimana dinyatakan bahwa pendapatan kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 800 miliar, namun demikian berdasarkan laporan keuangan kedua perusahaan yang akan diambil alih tersebut per 31 maret 2007 total pendapatannya hanya sebesar kurang lebih Rp 466,8 miliar. AGIS juga melakukan pelanggaran terkait laporan keuangan AGIS yang merupakan konsolidasi dari anak-anak perusahaan yang salah satunya adalah PT AGIS elektronik. Dalam laporan laba rugi konsolidasi AGIS diungkapkan pendapatan lain- lain bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari laporan keuangan AGIS elektronik sebagai anak perusahaan AGIS yang tidak didukung dengan bukti-bukti kompeten dan kesalahan prinsip akuntansi. Dengan demikian pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan AGIS elektronik tidak wajar yang berakibat laporan keuangan konsolidasi AGIS juga tidak wajar.

Kasus yang baru saja terjadi terkait manajemen laba di Indonesia yaitu terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). OJK membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018. Hal ini disebabkan karena SNP Tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar alias fiktif. Praktik manajemen laba di perusahaan dapat menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan menurunkan citra perusahaan di mata *stakeholders*. Maka dari itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memonitor masalah tersebut adalah dengan menerapkan *corporate governance* di perusahaan. *Corporate Governance* merupakan cara untuk membawa kepentingan agen (manajer) dan prinsipal (investor)

sejalan dan menjamin agar perusahaan dijalankan bagi kemanfaatan prinsipal (investor) (Mayer,1996).

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya akan menguntungkan banyak pihak (setiawan,2006). Dalam *Corporate Governance*, banyak hal yang di dapat dilakukan untuk membatasi perilaku opportunist manajemen antara lain membentuk dewan komisaris independen. Marihot dan Setiawan (2007) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya semakin banyak anggota dewan komisaris yang independen maka manajemen laba yang dilakukan agen akan semakin kecil. Namun, hasil penelitian Suryani (2010) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu dapat dilakukan dengan menganalisis ukuran dewan komisaris yang diukur secara tepat. Marihot dan Setiawan (2007) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba berpengaruh positif sedangkan menurut Arfan, dan Maburrah (2017) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

Untuk memonitor kinerja manajemen melalui *corporate governance* dapat membentuk komite audit di suatu perusahaan. Chtourou (2001) Melakukan penelitian dengan menguji efektivitas komite audit terhadap manajemen laba, dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil positif berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani dan Aloysius (2007) dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Penelitian Veronica dan Utama (2005) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen yang tinggi dan keberadaan komite audit tidak terbukti dapat membatasi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marihot dan Setiawan (2007) menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu dapat dilakukan juga pengujian ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian Marihot dan Setiawan (2007) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan terhadap manajemen laba memiliki pengaruh negatif sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Utama (2005), artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Selain itu, rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi secara signifikan lebih tinggi daripada rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan lain.

Auditor eksternal yang berkualitas diharapkan mampu membatasi perilaku *opportunistic agent*. Penelitian Welvin dan Herawaty (2008) menyimpulkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun, Meutia (2004) berargumen bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain beberapa hal diatas, struktur kepemilikan konstitusional ternyata juga dapat membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Cornet, Marcus, dan Tehranian (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hermanto (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dalam Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran perusahaan, *Leverage* terhadap manajemen laba. Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba ternyata menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
2. menguji pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan konstitusional, dan proporsi dewan komisaris terhadap manajemen laba.

METODE PENELITIAN

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002;115). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgement sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara menunjukkan langsung pada suatu populasi berdasarkan karakteristik atau ciri yang dimiliki sampel, dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah :

1. Emiten Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2016-2018.
2. Laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.
3. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai ukuran perusahaan, dan *corporate governance* perusahaan dan data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba.

Manajemen laba sebagai variabel dependen penelitian ini merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan inheren yang ada pada akuntansi yang menyebabkan adanya judgement (Setiawati, 2002). Dalam penelitian ini digunakan *discretionary accruals* (DAC) sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Dechow et al dalam Nuryaman (2008) menyatakan bahwa model modified Jones memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendeteksi manajemen laba dibandingkan model yang lain. Poin awal dalam pengukuran *discretionary accruals* adalah menghitung total akrual dimana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. Komponen *discretionary accruals* merupakan bagian dari akrual yang memungkinkan manajer melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek, *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga semakin besar *discretionary accrual*, maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Komponen *discretionary accruals* diantaranya terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty expense*) dan asset modal (*capitalization assets*). Sedangkan komponen *non-discretionary accruals* ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manajer. Total akrual diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary* dan *nondiscretionary* (Midiastuty, 2003), dengan tahapan:

- a. Mengukur total accrual dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi.
$$\text{Total Accrual (TAC)} = \text{laba bersih setelah pajak (net income)} - \text{ arus kas operasi (cash flow from operating)}$$
- b. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*):

$$TAC_t / A_{t-1} = \alpha_1 (1 - A_{t-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1}) + e$$

Dimana :

TAC_t : total accruals perusahaan i pada periode t

A_{t-1} : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REV_t : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

REC_t : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan tahun t

- c. Menghitung *nondiscretionary accruals* model (NDA) adalah sebagai berikut :

$$NDA_t = \beta_1 (1/A_{t-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{t-1}) + e$$

NDA_t : *nondiscretionary accruals* pada tahun t

β : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals

- d. Menghitung discretionary accruals

$$DAC_t : (TAC_t / A_{t-1}) - NDA_t$$

Dimana :

DAC_t : discretionary accruals perusahaan i pada periode t

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan konstitusional, dan proporsi dewan komisaris. Ukuran perusahaan (SIZE) adalah besar kecilnya perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan nilai log total aset perusahaan pada akhir tahun. Ukuran Dewan Komisaris digambarkan oleh Komposisi dewan komisaris (BOD) adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (*outside director*) dan komisaris dari dalam perusahaan (*inside director*). Variabel ini dihitung dengan cara menghitung nilai log total seluruh anggota dewan komisaris di suatu perusahaan. Keberadaan komite audit (AC) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan yang lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Komposisi komite audit diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit dari luar terhadap seluruh anggota komite audit. Kualitas Auditor diukur dengan Spesialisasi Industri KAP (AUDIT) yang menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seorang auditor pada bidang industri tertentu. Auditor tersebut memiliki memiliki pengetahuan yang spesifik dan mendalam serta berpengalaman dalam suatu bidang industri tertentu (Almutari, 2007). Auditor industri spesialis diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan penilaian tentang kejujuran laporan keuangan. Spesialisasi industri auditor diproksi dengan konsentrasi jasa audit auditor pada bidang tertentu. Spesialisasi Industri KAP pada penelitian ini adalah auditor yang memiliki volume klien minimal 15% dari jumlah klien pada kelompok industri tertentu (Mayangsari, 2003). Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor spesialis, dan 0 jika lainnya.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Veronica dan Utama 2005). Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

$INST = (\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusi}) / (\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}) \times 100\%$

Proporsi dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, dan bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak sematamata demi kepentingan

perusahaan (Boediono, 2005). Proporsi dewan komisaris independen diukur dari jumlah persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel atau dengan rumus (Antonia, 2008): Proporsi dew. komisaris independen = (jumlah dewan komisaris independen)/(total anggota dewan komisaris) x 100%. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengambil data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Dengan metode tersebut sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Data penelitian dianalisis menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Uji asumsi klasik nalisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (R²), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2016-2018 yang dipilih dengan *purposive sampling method*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab III diperoleh jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan data observasi sebanyak 123. Ringkasan prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sample

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Populasi Perusahaan Perbankan	45
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan	(1)
Data mengenai variable independen & independen tidak lengkap	(3)
Perusahaan yang terpilih menjadi sample	41
	Jumlah Observasi
Periode 2016-2018 42 Perusahaan x 3 Tahun	123 Observasi

Dari keseluruhan jumlah perusahaan perbankan yang ada di BEI periode 2016-2018, terdapat 41 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan sampel.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini diambil data laporan keuangan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan sampel sebanyak 41 perusahaan perbankan, maka secara pooled cross sectional diperoleh sejumlah 41 perusahaan x 3 tahun = 123 data observasi.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manajemen Laba	123	-.29	.381	.00992	.13932
Ukuran Perusahaan	123	28.353	34.799	31.152	1.7826
Ukuran Dewan Komisaris	123	2.000	9.000	5.000	1.9077
Keberadaan Komite Audit	123	.167	.429	.29865	.052926
Kualitas Auditor	123	.000	1.000	.70732	.45685
Kepemilikan Konstitusional	123	.118	.984	.66623	.22244
Proporsi Dewan Komisaris	123	20.000	80.000	52.674	12.879
Valid N (listwise)	123				

Sumber : Data sekunder yang diolah 2020

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris, sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba. Data variabel diperoleh melalui perhitungan yang diolah berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari BEI. Analisis

statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Hasil analisis dengan statistik deskriptif menghasilkan data sebagaimana tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dari 41 perusahaan yang menjadi sample, didapatkan nilai minimum independensi ukuran perusahaan sebesar 28,35 dan nilai maksimum sebesar 34,79 atau dalam presentase berarti berada di 28% dan 34%. Nilai standar deviasi sebesar 1,78 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel independensi ukuran perusahaan sebesar 31,15 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari pada *mean*.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai minimum ukuran dewan komisaris sebesar 2,00 yang menunjukkan bahwa nilai terendah rasio dewan komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris sebesar 2 orang. Nilai maksimal sebesar 9,00 menunjukkan bahwa nilai tertinggi rasio jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris adalah sebesar 9 orang. Nilai *mean* sebesar 5 menunjukkan bahwa rata-rata rasio anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris adalah sebanyak 5 orang. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,90 atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian dari ukuran dewan komisaris kurang bervariasi. Nilai minimum variabel komite audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan nilai rata-rata sebesar 0,70 sedangkan standar deviasinya sebesar 0,456 atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian dari ukuran dewan komisaris kurang bervariasi.

Pada variabel kepemilikan institusional nilai minimumnya adalah 0,11, nilai maksimum 0,98, *mean* 0,66, dan standar deviasi 0,22. Artinya, kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan sampel paling kecil 11%, paling besar 98%, rata-rata kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan sampel adalah 66%. Standar deviasi yang menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan institusional adalah 11% atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian dari kepemilikan institusional kurang bervariasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai minimum proporsi dewan komisaris independen sebesar 20 yang menunjukkan bahwa nilai terendah proporsi dewan komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris sebesar 20%. Nilai maksimal sebesar 80 menunjukkan bahwa nilai tertinggi rasio jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris adalah sebesar 80%. Nilai *mean* sebesar 52,67 menunjukkan bahwa rata-rata rasio anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris adalah sebesar 52,67%. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 12,87, atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian dari proporsi dewan komisaris independen kurang bervariasi. Secara umum disimpulkan bahwa rata-rata emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen minimum adalah sebesar 30% dilihat dari *mean* yang dihasilkan sebesar 52,87%, bahkan ada perusahaan yang membentuk dewan komisaris independen sebesar 80% atau 80% dari seluruh dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum memenuhi peraturan BAPEPAM dilihat dari nilai minimum yaitu sebesar 20%.

Tabel 3 Frekuensi Kualitas Auditor

Keterangan	Proporsi	Proporsi
	<i>Dummy</i> =1	<i>Dummy</i> =0
Kualitas Auditor	70,73%	29,27%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit auditor *big four* lebih dominan dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan auditor non *big four*, atau sebesar 70,73%. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan yang masuk dalam kelompok big four lebih banyak digunakan, karena dianggap memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang tidak masuk dalam kelompok *big four*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk diuji atau tidak. Persamaan tersebut harus dapat diterima secara ekonometrik maka harus memenuhi asumsi klasik, antara lain dengan menggunakan Uji Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas. Jika keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, berarti model analisis telah layak digunakan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data, pada penelitian ini menggunakan metode uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Menurut Imam Ghozali (2005), bahwa distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan tabel Z tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0.05.
- Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0.05.

Hasil uji normalitas tersebut dapat diketahui dari nilai Unstandardized Residual pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		123	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.12308211	
Most Extreme Differences	Absolute	.077	
	Positive	.077	
	Negative	-.049	
Test Statistic		.077	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.447 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.434
		Upper Bound	.460

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 5 Hasil Uji Multikoloniaritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Ukuran Perusahaan	0.733	1.364	Tidak terjadi multikoloniaritas
Ukuran Dewan Komisaris	0.959	1.043	Tidak terjadi multikoloniaritas
Keberadaan Komite Audit	0.967	1.038	Tidak terjadi multikoloniaritas
Kualitas Auditor	0.735	1.367	Tidak terjadi multikoloniaritas
Kepemilikan Konstitusional	0.957	1.045	Tidak terjadi multikoloniaritas
Proporsi Dewan Komisaris	0.973	1.028	Tidak terjadi multikoloniaritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil pengujian normalitas dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,447 dan tidak signifikan pada 0,447. (karena $p = 0,447 > 0,05$) yang berarti bahwa residual terdistribusi secara normal. Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikoloniaritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas dari nilai VIF adalah 10 dan *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 maka akan terjadi multikoloniaritas dan model regresi tidak layak untuk dipakai. Hasil perhitungan nilai *tolerance* serta VIF dapat diketahui pada Tabel 5. Memperhatikan hasil perhitungan dalam tabel diatas tampak bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen di atas 0,1. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari setiap variabel independen di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini digunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.046	.142		.300	.765
Ukuran Perusahaan	.003	.004	.070	.515	.515
Ukuran Dewan Komisaris	.000	.003	-.010	-1.102	.919
Keberadaan Komite Audit	-.103	.123	-.079	-.836	.405
Kualitas Auditor	-.011	.016	-.072	-.671	.503
Kepemilikan Konstitusional	.023	.029	.072	.766	.445
Proporsi Dewan Komisaris	-2.092E-5	.001	-.004	-.042	.967

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa model regresi bebas dari masalah Heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel independen (Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit, Kualitas Auditor, Kepemilikan Konstitusional, Proporsi Dewan Komisaris) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan *time series*. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson. Output uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,101

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Dari pengujian statistik diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,101 ($du = 1,807$; $4 - du = 2,192$). Nilai D-W statistik berada di daerah bebas autokorelasi, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi, jadi model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi, oleh karena itu model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.591	.253
	Ukuran Perusahaan (X1)	-.018	.007
	Ukuran Dewan Komisaris (X2)	-.016	.006
	Keberadaan Komite Audit (X3)	.143	.220
	Kualitas Auditor (X4)	.011	.029
	Kepemilikan Konstitusional (X5)	.087	.053
	Proporsi Dewan Komisaris (X6)	-.003	.001

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Dari tabel di atas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$DA = 0,591 - 0,018X1 - 0,016X2 + 0,143X3 + 0,011X4 + 0,087X5 - 0,003X6$$

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan (X1), ukuran dewan komisaris (X2), keberadaan komite Audit (X3), kualitas auditor (X4) dan kepemilikan konstitusional (X5) memiliki pengaruh ke arah positif terhadap manajemen laba sedangkan variabel proporsi dewan komisaris (X6) memiliki pengaruh ke arah negatif terhadap manajemen laba. Adapun interpretasi atas persamaan regresi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi ukuran perusahaan (X1) sebesar -0,018 menyatakan bahwa setiap perubahan ukuran perusahaan sebesar 1 % maka manajemen laba akan cenderung turun sebesar -0,018 (-1,8%) dengan anggapan bahwa variabel lain, yaitu ukuran dewan komisaris (X2), keberadaan komite audit (X3), kualitas auditor (X4), kepemilikan institusional (X5), dan proporsi dewan komisaris (X6). Adanya hubungan yang negatif ini, berarti bahwa antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba menunjukkan hubungan yang berlawanan, artinya setiap kenaikan ukuran perusahaan akan cenderung diikuti oleh penurunan manajemen laba dan sebaliknya penurunan ukuran perusahaan cenderung mengakibatkan kenaikan manajemen laba.
2. Koefisien regresi ukuran dewan komisaris (X2) sebesar -0,016 menyatakan bahwa setiap perubahan ukuran dewan komisaris sebesar 1% maka manajemen laba akan cenderung turun sebesar -0,016 (-1,6%) dengan anggapan bahwa variabel lain, yaitu ukuran perusahaan (X1), keberadaan komite audit (X3), kualitas auditor (X4), kepemilikan institusional (X5), dan proporsi dewan komisaris (X6). Adanya hubungan yang negatif ini, berarti bahwa antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba menunjukkan hubungan yang berlawanan, artinya setiap kenaikan ukuran dewan komisaris akan cenderung diikuti oleh penurunan manajemen laba dan sebaliknya penurunan ukuran dewan komisaris cenderung mengakibatkan kenaikan manajemen laba.
3. Koefisien regresi keberadaan komite audit (X3) sebesar 0,143 menyatakan bahwa setiap perubahan ukuran dewan komisaris sebesar 1% maka manajemen laba akan cenderung naik sebesar 0,143 (14,3%) dengan anggapan bahwa variabel lain, yaitu ukuran perusahaan (X1), keberadaan komite audit (X3), kualitas auditor (X4), kepemilikan institusional (X5), dan proporsi dewan komisaris (X6). Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara keberadaan komite audit dengan

- manajemen laba menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan komite audit akan cenderung diikuti oleh kenaikan manajemen laba, dan penurunan manajemen laba cenderung mengakibatkan penurunan komite audit.
4. Koefisien regresi kualitas auditor (X4) sebesar 0,011 menyatakan bahwa setiap perubahan kualitas auditor sebesar 1 maka manajemen laba akan cenderung naik sebesar 0,011 (1,1%) dengan anggapan bahwa variable lain, yaitu ukuran perusahaan (X1), keberadaan komite audit (X3), kualitas auditor (X4), kepemilikan institusional (X5), dan proporsi dewan komisaris (X6). Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara kualitas auditor dengan manajemen laba menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan kualitas auditor akan cenderung diikuti oleh kenaikan manajemen laba dan penurunan kualitas auditor cenderung mengakibatkan penurunan manajemen laba.
 5. Koefisien regresi kepemilikan konstitusional (X5) sebesar 0,087 menyatakan bahwa setiap perubahan kepemilikan konstitusional sebesar 1 maka manajemen laba akan cenderung naik sebesar 0,087 (8,7%) dengan anggapan bahwa variable lain, yaitu proporsi dewan komisaris independen (X1), keberadaan komite audit (X3), kualitas auditor (X4), kepemilikan institusional (X5), dan proporsi dewan komisaris (X6). Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara kepemilikan konstitusional dengan manajemen laba menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan kepemilikan institusional akan cenderung diikuti oleh kenaikan manajemen laba dan penurunan kepemilikan institusional cenderung mengakibatkan penurunan manajemen laba.
 6. Koefisien regresi proporsi dewan komisaris (X6) sebesar - 0,003 menyatakan bahwa setiap perubahan proporsi dewan komisaris sebesar 1% maka manajemen laba akan cenderung menurun sebesar - 0,003 (- 0,3%) dengan anggapan bahwa variabel lain, yaitu proporsi dewan komisaris independen (X1), ukuran dewan komisaris (X2), keberadaan komite audit (X3), kepemilikan institusional (X5), dan kepemilikan manajerial (X6). Adanya hubungan yang negatif ini, berarti bahwa antara proporsi dewan komisaris dengan manajemen laba menunjukkan hubungan yang berlawanan, artinya setiap kenaikan proporsi dewan komisaris akan cenderung diikuti oleh penurunan manajemen laba dan sebaliknya penurunan proporsi dewan komisaris cenderung mengakibatkan kenaikan manajemen laba.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.415a	0.172	0.129	0.12377

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Dari Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,179. Hal ini berarti bahwa 12,9% variabel manajemen laba (*discretionary accruals*) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen (X1), ukuran dewan komisaris (X2), keberadaan komite audit (X3), kepemilikan institusional (X5), dan proporsi dewan komisaris (X6) Sedangkan sisanya sebesar 87,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.52	6	0.087	5.439	.000
	Residual	1.848	116	0.016		
	Total	2.368	122			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 10. Dari Tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa model persamaan ini memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (*discretionary accruals*).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menguji hipotesis maka analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba.

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis Parsial t

Model	t	Sig.
Ukuran Perusahaan	-2.403	.018
Ukuran Dewan Komisaris	-2.566	.012
Keberadaan Komite Audit	.649	.518
Kualitas Auditor	.361	.719
Kepemilikan Konstitusional	1.651	.101
Proporsi Dewan Komisaris	-3.068	.003

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa dari 5 variabel yang dimasukkan dalam model regresi, hanya variabel ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris yang signifikan mempengaruhi manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk ukuran perusahaan sebesar 0,018 ($p < 0,05$), ukuran dewan komisaris 0,012 ($p < 0,05$), dan untuk proporsi dewan komisaris 0,003 ($p < 0,05$). Sedangkan variabel komposisi keberadaan komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan konstitusional ditemukan tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi secara berurutan sebesar 0,518 ($p > 0,05$), 0,719 ($p > 0,05$), dan 0,101 ($p > 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba hanya dipengaruhi oleh variabel konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan kualitas auditor.

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini memiliki 6 hipotesis yang diajukan untuk meneliti praktik manajemen laba perusahaan di Indonesia. Hasil hipotesis-hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Hipotesis pertama (H1) adalah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar -2,403 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 ($p < 0,05$) maka variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba yang berarti **H1 diterima**.

Hipotesis kedua (H2) adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar -2,566 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 ($p < 0,05$) maka variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba yang berarti **H2 diterima**.

Hipotesis ketiga (H3) adalah keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,649 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,518 ($p > 0,05$). maka variabel keberadaan

komite audit berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba yang berarti **H3 tidak diterima**.

Hipotesis keempat (H4) adalah keberadaan kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,361 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,719 ($p > 0,05$). maka variabel keberadaan kualitas auditor berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba yang berarti **H4 tidak diterima**.

Hipotesis kelima (H5) adalah kepemilikan konstusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 1,651 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,101 ($p > 0,05$). maka variabel kepemilikan konstusional berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba yang berarti **H5 tidak diterima**.

Hipotesis keenam (H6) adalah proporsi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar -3,068 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 ($p < 0,05$) maka variabel proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba yang berarti **H6 diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Dari hasil perhitungan variabel ukuran perusahaan (X1) diperoleh nilai t test (thitung) sebesar -2.403 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 (di bawah 0,05). Memperhatikan hasil uji t test ini, maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara statistik mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba dapat diterima. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan natural logaritma nilai pasar ekuitas perusahaan pada akhir tahun berpengaruh signifikan negatif terhadap besaran pengelolaan laba, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil indikasi pengelolaan labanya. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang luas sehingga lebih diperhatikan oleh masyarakat. Akibatnya, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba. Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan (0,012) terhadap tindak manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan perbankan, artinya perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan semakin sedikit. yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara statistik mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba dapat diterima. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan ukuran dewan komisaris akan memberikan kontribusi yang negatif dan signifikan terhadap perubahan manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yu (2006). Hasil ini menandakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, fungsi kontrol dan service akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan. Semakin sedikit dewan komisaris, maka tindak manajemen laba makin banyak, karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Marhot dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Midastuty dan Machfoedz (2003) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan secara signifikan. Penelitian ini memberi hasil yang searah juga dengan Xie, Davidson, Dadalt (2003), Yu (2006), Zhou dan Chen (2004), dan Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan, yang ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan.

Hubungan Keberadaan Komite Audit dengan Manajemen Laba. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti komite audit yang diukur dari persentase jumlah anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan belum dapat mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Klein (2000) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresional yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Begitu juga Carcello et al. (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Wedari (2004) serta Siregar dan Utama (2005) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit independen tidak terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Hal ini diduga disebabkan karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di perusahaan.

Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba. Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chen et al. (2005) yang menemukan bahwa spesialisasi industri KAP belum mampu membatasi terjadinya praktik manajemen laba. Meskipun KAP tersebut diyakini sebagai pihak yang ahli dalam bidang industri tertentu, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pengendalian terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hasil ini tidak konsisten dengan pendapat Dang et al. (2004) dalam Mirna dan Indira (2007) berpendapat bahwa KAP yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang mewakili industri tersebut. Namun hal ini akan membutuhkan pengembangan yang dimiliki oleh KAP spesialis industri maka diharapkan bahwa KAP spesialisasi industri cenderung membatasi manajemen laba.

Pengaruh Kepemilikan Konstitusional terhadap Manajemen Laba. Memperhatikan hasil uji t test diatas, maka hipotesis 5 (H5) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara statistik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Suryani (2010) yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridayani (2008). Selain itu, pandangan Widiatmaja (2010) mengatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang lebih memfokuskan pada current earnings. Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer karena tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan.

Hubungan Proporsi Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba. Memperhatikan hasil uji t test ini, maka hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen secara statistik mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba

dapat diterima. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan proporsi dewan komisaris independen akan memberikan kontribusi yang negatif dan signifikan terhadap perubahan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen terbukti berpengaruh dalam mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dengan semakin banyak anggota komisaris independen, maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini semakin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Palestin (2006) dan Marihot dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba di perusahaan.

PENUTUP

Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Mekanisme corporate governance diprosikan dengan ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab empat serta hasil pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil indikasi pengelolaan labanya. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang luas sehingga lebih diperhatikan oleh masyarakat. Akibatnya, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti peranan dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komposisi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan tidak berdampak pada manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Corporate Governance di perusahaan. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa semakin ahli KAP terhadap industri tertentu maka belum tentu baik audit yang dilakukan perusahaan tersebut. sehingga manajemen laba kemungkinannya kecil untuk terdeteksi. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan pada umumnya investor institusi tidak menjalankan perannya secara efektif sebagai *sophisticated investors* yang dapat melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kinerja manajemen untuk membatasi manajemen dalam mengambil tindakan atau kebijakan yang akan berdampak pada tindakan manajemen laba, jadi hasil pengujian regresi menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh kearah negative secara signifikan terhadap manajemen laba Yang berarti banyaknya jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Periode penelitian hanya sebatas tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saja.
2. Sampel yang diperoleh hanya sedikit, yaitu 41 perusahaan.

3. Karakteristik dewan komisaris dan komite audit secara spesifik tidak disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanita, N. Y. (2010). "Earning Management dalam Hubungan Keagenan". Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia.
- Carcello, Joseph V. et al. 2006. "Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management". <http://papers.ssrn.com/>.
- Chen. et al. 2005. *An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firm's market value and financial performance*. Journal of Intellectual Capital. Vol 6. Issue 2.
- Chtourou, SM., Jean Bedard, dan Lucie Courteau. 2001. "Corporate Governance and Earnings Management". Working Paper.
- Darmawati, Deni. 2003. "Corporate Governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris". Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 5, No. 1, h. 47-68.
- Ghozali, Imam. 2006. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cet. IV". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Klein, A. 2002. "Audit Committee, Board of Director Characteristic, and Earnings Management". <http://papers.ssrn.com/>.
- Midiastuty, P., dan Mas'ud Machfoedz. 2003. "Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba". Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Nasution, M., dan Doddy Setiawan. 2007. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi X.
- Palestin, Shatila Halima. 2006. "Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba".
- Praptitorini, Dyah dan Indira Juniarti. 2007. *Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debit Default, dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Ridayani, Farikha Alifiyah. 2008. "Analisa Variabel-Variabel Corporate Governance yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. Universitas Jember".
- Setiawati, L. (2000). "Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba". Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol 15 . 424-441.
- Suaryana, A. (2001).
- Suryani, Indra Dewi. 2010. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI". Universitas Diponegoro.
- Veronica, Sylvia dan Utama, Sidharta. 2005. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)". Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Wedari, L.K., 2004. "Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba". Simposium Nasional Akuntansi VII.
- Widiatmaja, Bayu Fatma. 2010. "Pengaruh Mekanisme Coperative Governace Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan". Skripsi. Universitas Diponegoro
- Yu, Frank. 2006. "Corporate Governance and Earnings Management". Working Paper
- Yusuf, M. (2017). "Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap manajemen laba". jurnal revisi akuntansi dan keuangan.

Efektifitas Pengendalian Intern Atas Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Kredit Studi Kasus PT BPR Dana Mandiri Bogor

Asri Oktavia dan Sudradjat

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

E-Mail: sudradjat@ibik.ac.id

137

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

Banks as financial institutions have the main function of collecting funds from the public in the form of savings which are not used in the long or short term by customers, but are used to channel funds to the public in the form of loans. In this case the bank makes an accounting system for this supported by implementing internal controls in assessing the effectiveness of controls implemented in the company. Because control is the most important thing to monitor all types of activities carried out in the company. This research method uses a qualitative descriptive method. This qualitative control compares between theory and all types of practice carried out by the company. Describe some of the steps and procedures for internal control of the lending accounting system. The aim is to find out whether internal control has been running effectively or not. The results of this study explain that PT BPR Dana Mandiri Bogor uses a system called NBP, where all types of data input and distribution of funds are input into the system. The NBP system has worked well in practice.

Keywords: *accounting information system, loan, bank*

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang tidak digunakan dalam jangka waktu panjang atau pendek oleh nasabah, tetapi dimanfaatkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman. Dalam hal ini bank membuat sistem akuntansi untuk ini didukung dengan menerapkan pengendalian internal dalam menilai keefektifan pengendalian yang dilaksanakan di perusahaan. Karna pengendalian adalah hal terpenting untuk memantau segala jenis aktifitas yang dilakukan di perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengendalian kualitatif ini membandingkan antara teori dan segala jenis praktek yang dilakukan oleh perusahaan. Mendeksripsikan sebagian langkah-langkah dan prosedur pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penyaluran kredit. Tujuannya untuk mengetahui apakah pengendalian intern sudah berjalan dengan efektif atau belum. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa PT BPR Dana Mandiri Bogor menggunakan sistem yang bernama NBP yang segala jenis penginputan data hingga penyaluran dana di input pada sistem tersebut. Sistem NBP sudah berjalan secara baik dalam praktiknya.

Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, bank, kredit

JIAKES

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin di patuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1993) atau dalam definisi yang lain, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya (Warren & Fees, 2006).

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang tidak digunakan dalam jangka waktu panjang atau pendek oleh nasabah, tetapi dimanfaatkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman yang diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menggunakan jasa kredit dalam bentuk pinjaman berjangka panjang yang bisa menimbulkan resiko dalam pemberian kredit yang sudah dilakukan. dengan adanya resiko dalam pemberian kredit ini pihak bank harus melakukan pengamanan yang bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi resiko tersebut agar tidak terjadi kredit macet. Pengendalian internal dalam perbankan adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan yang berguna untuk menjaga harta kekayaan bank menjamin adanya laporan yang benar dan akurat, meningkatkan kepatuhan akan ketentuan yang berlaku meminimalisir dampak dari suatu kerugian kecurangan serta penyimpangan dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas organisasi. dari pengertian di atas sudah jelas bahwa Pengendalian internal sangat diperlukan dalam manajemen suatu bank, karena Pengendalian internal sebagai patokan dalam mekanisme kinerja bank. kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh aspek dalam perbankan, hal ini meliputi dewan komisaris, direksi maupun seluruh pegawai dari perbankan itu sendiri kegiatan pengendalian sebaiknya diterapkan dalam semua Tingkat atau aspek organisasi dalam perbankan bank diharuskan untuk secara berkala melakukan pemantauan akan kinerja dari Pengendalian internalnya, Apakah pengendalian internalnya berjalan dengan baik atau tidak. Dalam Pengendalian internal risiko kredit salah satu hal yang dapat dilakukan adalah proses analisa kredit. Adapun prinsip-prinsip analisa kredit yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 c + 1c , yang meliputi: Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya, Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, Capital informasi mengenai besar kecilnya modal Capital perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank, Collateral jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank, Conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana perusahaan tersebut beroperasi, Constraint dalam pemberian kredit bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan konstan yang mungkin muncul di lapangan. Selain menganalisa kredit dari sisi nasabah, perbankan juga perlu mengevaluasi rasio kredit macet nya baik bulanan maupun tahunan. Sesuai dengan aturan Bank Indonesia nomor 15/2/FBI//2013 tentang penetapan

status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional menetapkan rasio kredit macet lebih dari 5%.

Pemberian kredit sudah pasti mengandung risiko dan disinilah peran account officer untuk memperkecil atau bahkan menghindari risiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya (Jusuf, 2008:10). Risiko kredit yang dimaksudkan, yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Perkembangan usaha perbankan saat ini juga mendorong kompleksitas kegiatan dalam setiap tahapan operasi perbankan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, risiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit modal kerja adalah kredit yang disalurkan tersebut tidak dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Salah satu cara untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, lancar, dan produktif adalah bank perlu melakukan pengendalian intern perkreditan.

Menurut Rivai (2007:105), "setiap bank wajib melakukan kajian berkala atas efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan. Penerapan pengendalian intern perkreditan juga harus diterapkan pada semua prosedur pemberian kredit (sistem pemberian kredit)." Pengendalian intern merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengkoordinir suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang meliputi struktur organisasi, pembagian wewenang, prosedur-prosedur yang ditetapkan, serta praktik yang sehat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja bank dalam menyalurkan kredit serta meminimalisir terjadinya penunggakan pembayaran kredit. Bank harus dapat mendeteksi risiko kredit macet lebih awal agar tidak menyebabkan kerugian dari banyaknya tunggakan kredit oleh nasabah bagi pihak bank. PT BPR Danamandiri Bogor yang memberikan fasilitas kredit modal kerja juga memiliki risiko kredit dengan adanya tunggakan-tunggakan. Perlunya pengendalian Intern atas prosedur pemberian kredit agar semakin memberikan keyakinan bagi pihak bank atas pemberian kredit yang akan disalurkan, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai pengendalian internal dalam penyaluran kredit pada PT BPR Dana Mandiri Bogor. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit pada PT BPR Dana Mandiri Bogor. (2) Untuk mengetahui mekanisme pengendalian intern pada prosedur penyaluran kredit di PT BPR Dana Mandiri Bogor. (3) Untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern pada prosedur penyaluran kredit di PT BPR Dana Mandiri Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT BPR Dana Mandiri Bogor, perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang berlokasi di Jl Veteran III Ruko Residence Mutiara Kav 1 & 2 Banjarwaru Ciawi Bogor. Penulis melakukan penelitian ini sejak November 2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Menurut Hidayat (2010) penelitian deskriptif ialah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena social dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Spesifik yang dimaksud dalam hal ini adalah lebih dekat pada hubungan, dampak, dan cara penyelesaiannya yang di ungkapkan. Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan agar dapat di olah, dianalisis, dan kemudian disimpulkan. Metode penelitian ini dilakukan pada satu perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyaluran Kredit PT BPR Dana Mandiri Bogor

PT BPR Dana Mandiri Bogor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, khususnya pelayanan micro productive. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran

Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat yang mencakup menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu Bank Perkreditan Rakyat menyediakan dan memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan masyarakat, menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dana atau tabungan dana di bank lain. Untuk memberikan layanan yang optimal dan kepuasan pelanggan dalam bertransaksi maka sampai dengan Tahun 2019 PT BPR Dana Mandiri Bogor sudah memiliki 57 unit wilayah pemasaran dan 7 kantor kas disetiap wilayah kota maupun kabupaten Bogor. Guna memperluas jaringan dan pelayanan yang lebih baik, pada tahun 2015 PT BPR Dana Mandiri Bogor telah membuka cabang di Tangerang Selatan terdapat 18 unit disusul kemudian pada tahun 2018 di Sukabumi terdapat 35 unit.

Perusahaan pastinya dalam melakukan kegiatan operasionalnya memiliki serangkaian sistem dan prosedur yang digunakan dalam mendukung segala kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan oleh pihak manajemen perusahaan PT BPR Dana Mandiri Bogor. Sistem informasi akuntansi pemberian kredit adalah rangkaian dari prosedur untuk memperoleh informasi dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. Pemberian kredit yang dilakukan melalui sistem yang berada di lingkungan PT BPR Dana Mandiri Bogor agar memudahkan dalam pengerjaan bagian pihak intern seperti accounting, admin kredit, dan teller dalam penyaluran kredit yang biasa digunakan pihak internal perusahaan.

Mekanisme Pengendalian Intern pada Prosedur Penyaluran Kredit PT BPR Dana Mandiri Bogor

Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan berhasil mencapai tujuan bula adanya prosedur pengendalian perusahaan yang baik. Pengendalian intern yang baik harus dilakukan oleh semua pihak yang ada didalam perusahaan. Pengendalian intern dapat membantu manajem dalam menghadapi risiko yang akan timbul dalam perusahaan. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan unuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Pada umumnya pengendalian intern tersebut merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan tergantung pada kelengkapan komponen - komponen pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Komponen pengendalian intern yang diterapkan perusahaan PT BPR Dana Mandiri Bogor adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian memegang peranan dalam yang sangat penting dalam dalam pengendalian intern yang sudah disusun oleh perusahaan. Lingkungan pengendalian yang baik menandakan manajemen memiliki kepentingan akan pengendalian intern maka seluruh organisasi akan bertindak teliti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada perusahaan, lingkungan pengendalian PT BPR Dana Mandiri Bogor sendiri sudah cukup baik, Dimana hal ini terdiri dari beberapa kegiatan yang telah diterapkan di PT BPR Dana Mandiri Bogor sebagai berikut:
 - a. Filosofi dan gaya operasi. Melalui aktivitasnya, manajemen harus memberisinyal yang jelas tentang pentingnya pengendalian internal seberapa jauh manajemen mempertimbangkan risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Target penjualan dan laba tidak selalu realistis, maka dari itu para karyawan PT BPR Danda Mandiri Bogor didorong untuk secara agresif memenuhi target penjualan.

- b. Integritas dan nilai etika. Pada yang terjadi di PT BPR Dana Mandiri Bogor prinsip dan nilai etika sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh pemimpin perusahaan. Seluruh karyawan PT BPR Dana Mandiri Bogor memiliki integritas dan nilai yang sangat baik, ini tidak terlepas dari perilaku dan contoh dari pimpinan. Prosedur dan juga kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh karyawan PT BPR Dana Mandiri Bogor. Berikut integritas dan nilai etika yang di laksanakan di PT BPR Dana Mandiri Bogor :
1. Mengenai perekrutan manajemen sangat memperhatikan betul karyawan yang kriteria masuk kedalam lingkungan PT BPR Dana Mandiri Bogor tentunya harus yang memiliki etika baik, etos kerja yang tinggi dan dapat dipercaya. Untuk menjadi karyawan baru PT BPR Dana Mandiri Bogor harus mengikuti serangkaian tes yang diberikan, agar karyawan yang masuk dapat memiliki integritas yang tinggi dan kompeten dalam bidangnya.
 2. Mengenai jam masuk kerja dimulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Untuk absensi karyawan menggunakan finger print maka dari itu pihak manajemen dapat melihat karyawan mana saja yang sering datang terlambat, dan karyawan telah menetapkan sanksi untuk karyawan yang sering terlambat.
 3. Mengenai setiap nasabah yang datang ke PT BPR Dana Mandiri maka manajemen telah menetapkan prosedur dan aturan bahwa harus menangani nasabah dengan baik, sopan dan santun.
 4. Mengenai cara berpakaian manajemenpun telah mengatur secara ketat bagi karyawan laki-laki tidak boleh memiliki rambut gondrong, menggunakan kemeja dan tidak bersepatu kets. Begitupun untuk kayawati tidak boleh menggunakan sepatu yang terbuka, berpakaian sangat diperhatikan. Jika ada yang melanggar aturan tersebut akan segera masuk diberikan sanksi yang tegas.
- c. Komitmen terhadap kompetensi. Komitmen terhadap kompetensi mendorong pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik, karena fungsi-fungsi yang ada diisi oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk penyelesaian suatu kegiatan secara optimal. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi organisasi BPR selalu menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan secara berkelanjutan dan *Reward* yang diberikan setiap tahun oleh BPR Dana Mandiri Bogor terhadap karyawan yang bekerja dengan baik.
- d. Struktur organisasi, metode penetapan otoritas dan tanggung jawab Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendorong adanya standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada *job description*. Adanya pemisahan fungsi untuk menghindari penyimpangan karna jika dalam satu pekerjaan adanya perangkapan tugas maka mudah sekali berlakunya *fraud*.
- e. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dalam praktiknya PT BPR Dana Mandiri Bogor mengelola sumber daya manusia dengan baik. Dengan cara yang dilakukan antara lain yaitu seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
2. Penilaian Risiko. Penilaian risiko merupakan komponen kedua dalam pengendalian intern perusahaan. Dalam penilaian risiko mungkin terjadi pada perusahaan seperti, kecurangan dan penyelewengan, perusahaan telah berantisipasi oelh karna ini PT BPR Dana Mandiri Bogor melakukan penilaian risiko diantaranya:
- a. Memiliki system NBP di PT BPR Dana Mandiri Bogor karna setiap karyawan diberikan *batch* masing-masing untuk mengakses sistem dan password yang

- digunakan hanya diketahui oleh sipemilik *batch* tersebut.
- b. Account officer yang setiap hari berhubungan langsung dengan nasabah secara tidak langsung khawatir terjadinya *fraud*. Maka dari itu manajemen selalu menurunkan pihak audit intern untuk mengakses ke segala jaringan unit yang tersebar di kantor pusat maupun cabang untuk memastikan ke nasabah bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas bank dan melakukan penagihan maupun pelunasan kredit.
 - c. Penerimaan kas yang dilakukan secara tunai dengan cara transfer ke rekening perusahaan guna mengurangi kecurangan.
 - d. Perubahan dalam lingkungan operasional membebaskan tekanan baru atau perusahaan tekanan atas perusahaan tentu berisiko terhadap kinerja staf dan secara otomatis berpengaruh terhadap penjualan produk kredit kelompok mingguan. dalam melaksanakan prekrutan pegawai diharuskan test IQ dan interview untuk mengetahui kualitas karyawan.
3. Aktivitas pengendalian. Adanya pengendalian ini perusahaan dapat menentukan kebijakan dan prosedur serta dapat memastikan bahwa petunjuk dan arahan yang diberikan oleh pemimpin dan manajemen dilaksanakan dengan baik. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, aktivitas pengendalian yang ada pada perusahaan PT BPR Dana Mandiri Bogor yang telah menerapkan prosedur dan kebijakan yang baik. Adapun aktivitas pengendalian intern uang diterapkan oleh perusahaan sebagai berikut:
- a. Bagian accounting bertugas untuk mencatat jurnal transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan
 - b. Bagian teller bertugas untuk melakukan penyediaan dana yang dibutuhkan untuk pencairan
 - c. Bagian admin kkm bertugas untuk menginput segala transaksi pembayaran sampai pelunasan debitur yang dilaporkan oleh account officer melalui whatsapp dan di proses ke sistem NBP
 - d. Bagian account officer bertugas melakukan proses penjualan produk kredit kelompok mingguan dan penagihan angsuran
4. Pengawasan. Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan biasanya pemimpin turun langsung memantau kinerja para karyawan serta melakukan pengawasan. Di PT BPR Dana Mandiri Bogor kepala bagian seperti supervisor akan mengawasi setiap jalannya proses penyaluran dana dan head officer juga melakukan pemantauan tentang ketertiban dalam pemrosesan setiap transaksi yang dilakukan oleh accounting, teller dan admin transaksi kkm mengenai kredit yang disalurkan.
5. Informasi dan komunikasi. Dalam segala jenis kegiatan operasional perusahaan agar kegiatannya berjalan dengan lancar, harus memiliki komponen pengendalian yang terstruktur dan jelas maka kegiatan tidak akan bisa berjalan jika antara komunikasi di dalam lingkup perusahaan tidak berjalan dengan baik. Dari pengamatan yang dilakukan penulis PT BPR Dana Mandiri Bogor memiliki ruang kerja yang cukup rapih agar setiap team yang memiliki lingkup di satu tempat dapat berkomunikasi dengan baik dan mudah tersampaikan. PT BPR Dana Mandiri pun selalu melakukan *briefing morning* di hari jumat guna mendiskusikan pekerjaan yang sudah berjalan di hari senin-kamis dan melihat atas kinerja karyawan mengenai target dan memberikan motivasi agar target meningkat lagi sesuai dengan target perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai komponen yang harus dimiliki di perusahaan maka dapat ditarik hasil pengamatan kegiatan operasional di PT BPR Dana Mandiri Bogor sebagai berikut:

Tabel 1 Kesesuaian Kegiatan Operasional PT BPR Dana Mandiri Bogor dengan Teori

NO	TEORI (COSO)	PRAKTEK PT BPR DANA MANDIRI BOGOR	KET
1	Lingkungan Pengendalian	Lingkungan pengendalian di PT BPR Dana Mandiri Bogor sudah cukup baik dimana yang terjadi dilingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etika, struktur organisasi, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.	Sesuai
2	Penilaian Risiko	Dalam penaksiran resiko mungkin terjadi pada perusahaan seperti, kecurangan dan penyelewengan, perusahaan telah berantisipasi terhadap kecurangan seperti dapat di lacak oleh sistem NBP yang digunakan oleh PT BPR Dana Mandiri Bogor karna setiap karyawan diberikan <i>batch</i> masing-masing untuk mengakses sistem dan password yang digunakan hanya diketahui oleh sipemilik <i>batch</i> . Dan selalu ada pengecekan dari pihak audit internal guna mengurangi kecurangan.	Sesuai
3	Aktivitas Pengendalian	Adanya pengendalian ini perusahaan dapat menentukan kebijakan dan prosedur serta dapat memastikan bahwa petunjuk dan arahan yang diberikan oleh pemimpin dan manajemen dilaksanakan dengan baik	Sesuai
4	Pengawasan	Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan biasanya pemimpin turun langsung memantau kinerja para karyawan serta melakukan Pengawasan	Sesuai
5	Informasi dan Komunikasi	Dalam segala jenis kegiatan operasional perusahaan agar kegiatannya berjalan dengan lancar. PT BPR Dana Mandiri pun selalu melakukan <i>briefing morning</i> di hari jumat guna mendiskusikan pekerjaan yang sudah berjalan di hari senin-kamis dan melihat atas kinerja karyawan mengenai target dan memberikan motivasi agar target meningkat lagi sesuai dengan target perusahaan.	Sesuai

Efektifitas Pengendalian Intern pada Prosedur Penyaluran Kredit di PT BPR Dana Mandiri Bogor

Efektifitas pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan yang diterapkan PT BPR Dana Mandiri Bogor pada saat pemberian kredit kelompok mingguan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat para karyawan yang memiliki kemampuan yang memadai dan berkompeten di bidangnya. Selain itu dalam proses pemberian kredit, Kepala Cabang juga ikut menangani dan mengawasi sehingga proses pemberian kredit kelompok mingguan tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat mencegah atau meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pemberian kredit kelompok mingguan tersebut. Pada Saat Pelunasan Kredit Kelompok Mingguan Prosedur yang ditetapkan pada saat pelunasan kredit kelompok mingguan yaitu pemeriksaan kembali jumlah nominal uang yang di setorkan oleh nasabah kepada account officer. Untuk lebih rincinya pengendalian intern di PT BPR Dana Mandiri Bogor dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Petugas bank yang kompeten dan dapat dipercaya Karyawan PT BPR Dana Mandiri Bogor memiliki kemampuan yang berkompeten dibidangnya masing masing dalam hal pelunasan kredit kepada calon nasabah.
- b. Pemisahan tugas yang memadai Menurut pengamatan penulis sudah cukup baik dimana setiap prosedur dikerjakan oleh karyawan yang berbeda sehingga tidak terdapat karyawan yang memiliki rangkap tugas.
- c. Pemeriksaan Dokumen Pada saat melakukan pelunasan kredit, account officer harus memberikan slip berseri kepada nasabah dengan tanda tangan lengkap untuk menjadi surat bukti pelunasan. Nominal uang harus sesuai dengan collection sheet, setelah melakukan pelunasan segera di laporkan ke admin kredit untuk dilakukannya Drop Out (DO) di sistem. Apabila sesuai, maka proses pelunasan dapat dilakukan.

Informasi dan Komunikasi Sistem pengendalian intern yang efektif memerlukan adanya data keuangan dan operasional internal yng cukup dan juga informasi pasar eksternal tentang kejadian dan kondisi yang relevan, tepat waktu, dapat diakses, dan tersedia dalam format yang konsisten. Selain itu pengendalian intern yang efektif memerlukan saluran yang efektif untuk meyakini bahwa semua pegawai telah memahami dengan baik kebijakan dan prosedur yang menyangkut tugas, tanggung jawab mereka, dan informasi lain yang relevan kepada pegawai yang terkait. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT BPR Dana Mandiri Bogor memiliki sitem informasi manajemen yang dapat menunjang pengendalian keputusan secara effien dan efektif. Pencatatan transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan telah disusun tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sistem komunikasi PT BPR Dana Mandiri Bogor sudah berjalan dengan baik. Para karyawan relah memahami seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu para karyawan yang tidak mentaati atau memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT BPR Dana Mandiri Bogor, maka akan dikenakan saksi sehingga para karyawan akan lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap efektifitas pengendalian intern atas sistem informasi akuntansi penyaluran kredit PT BPR Dana Mandiri Bogor, maka dapat di simpulkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem informasi penyaluran kredit di PT. BPR Dana Mandiri meliputi prosedur pengajuan, analisa, penyediaan dana, penyaluran kredit, penagihan dan pelunasan;
2. Dalam melaksanakan penyaluran kredit, PT. BPR Dana Mandiri telah mengimplementasikan pengendalian intern untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan dicatat sesuai dengan mekanisme sistem yang berlaku;
3. Mekanisme Pengendalian Intern yang telah dilakukan PT BPR Dana Mandiri Bogor cukup baik dan dilaksanakan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Faradila Salim.(2015). *Analisis penerapan system informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian intern pemberian kredit pada Bank Bukopin Manado*
- A Hall James. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta Abdurahmat, (2003). *Pengertian Efektivitas* .Jakarta.PT. Rineka Cipta
- Alimul Hidayat A.A., (2010). *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Heath Books
- Amriassyifa, Maznifar (2013) *Pengaruh factor prosedur audit internal terhadap efektivitas pemberian kredit pada BPR Kabupaten Jember*
- Anastasia Diana, LilisSetiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Astrini, D., Juanda, B., & Achsani, N. A. (2016). Impact Of Redenomination On Price, Volume, And Value Of Transaction: An Experimental Economic Approach. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 19(2), 1-32.
- Azhar Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung. Lingga Jaya
- B, Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Sembilan, diterjemahkan Salemba Empat, Jakarta
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013).*Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Journal “Acta Diurna”
- Cahyono, Bambang, Rudi. (1983). *Pengembang Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Elvina,Muhal (2014) *Tinjauan Efektivitas penerapan system pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk Ulung*
- Eko Komara Kurniawan, Hal: 20-23. *Akuntabilitas Keuangan Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Eko Komara Kurniawan*
- Firdaus, H. Rachmatdan Maya Ariyanti. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung :Alfabeta.
- Gibson ,Ivancevich. Donnely, (1997). *Organisasi dan Manajemen Perilaku Stuktur Proses*, Erlangga,Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. BumiAksa.
- Hidayat, L., Muktiadji, N., & Supriadi, Y. (2020, May). The Knowledge and Students' Interest to Investing in Investment Gallery. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 142-145). Atlantis Press.
- Israk, Muhammad (2016) *Analisis Efektivitas Pemberian Kredit pada PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian*
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jusuf, Jopie. (2008) *Analisis Kredit untuk Account Officer*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kasmir.(2000).*Manajemen Perbankan*. EdisiEnam. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir, (2011), “*AnalisisLaporanKeuangan*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Landasan hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10/1998*
- Marlina, T., & Haryanto, R. A. (2018). Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 85-93.
- Muanas, M., & Mulia, I. (2020). Pendampingan Penguasaan Akuntansi Dasar Bagi Pegawai BPR Mitra Daya Mandiri Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 51-56.

- Mulyadi (1993). *Akuntansi Manajemen Konsep Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua, YKPN Yogyakarta.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta\
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*: Jakarta : Salemba Empat
- Mulyana, M. (2012). Consumer Behaviour: Sukses Dengan Memahami Konsumen.
- Nurendah, Y. (2015). Strategy to Improvement Sustainability of Distinctively Local Snacks Based on Evaluation and Profile Mapping of SMEs Distinctively Local Snacks. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 5(5), 334-338.
- Pamungkas, R., & Puspitasari, R. (2018). Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan jangka panjang (Studi kasus pada PT Ciputra Development Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), 81-87.
- Rainanto, B. H., & Fathiah, R. (2020). PKM Pembekalan Pelaku UMKM Kota Bogor Tentang Strategi Diferensiasi Dan Positioning Untuk Bertahan Dan Menang. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 97-107.
- Ravianto J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara,
- Rivai, Veitzal., (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teorike Praktik*. Jakarta: PT.Raja grafindo Persada.
- S. Carl, Warren, M. James, Reeve, E. Philip, Fees (2006) *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, B., Puspitasari, R., & Manurung, T. M. S. (2016). The existence of Islamic banking in Indonesia from non-muslims perceptions. *ASEAN Marketing Journal*, 81-96.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, Y., & Fazriani, F. (2011). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Profitabilitas PT timah, Tbk dan PT Antam. *Tbk. Bogor*.
- Tata Sutabri. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta
- Veithzal Rivai. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Virdausy, Olivia Zahiroh (2017) *Evaluasi penerapan system internal pada PD BPR Bank Jombang dalam efektifitas pemberian kredit*
- Widoyoko, EkoPutro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi *Financial Distress* Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di BEI 2014-2018

*Financial Distress,
Profit and
Cash Flow*

147

Senny Hardiani Isdina dan Wulan Wahyuni Rosa Putri
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail: senny.isdina@ibik.ac.id

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

The business world in this era is growing rapidly and is followed by increasingly sophisticated technological developments. This development will certainly cause new problems in the industrial sector, one of which is the strengthening of the level of competition. Poor management in a situation like this will pose a threat of bankruptcy for the company. This study aims to examine the effect of profit and cash flow on financial distress in retail trading sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014-2018. The data used in this study were taken from the website www.idx.co.id as many as 20 companies. The method used in this research is logistic regression analysis. A total of 20 companies in this study were sampled, namely retail trade sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014-2018, using purposive sampling with certain criteria. The results of this study indicate that profit has an effect on financial distress while cash flow has no effect on financial distress in retail trading sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. In this study also states that earnings and cash flow simultaneously influence the financial distress of a company.

Keywords: Profit, Cash Flow, Financial distress.

ABSTRAK

Dunia bisnis pada era ini berkembang semakin pesat dan diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan tersebut tentunya akan menimbulkan masalah-masalah baru dibidang industri salah satunya menguatnya tingkat persaingan. Manajemen yang buruk dalam situasi seperti ini akan menimbulkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba dan arus kas terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan sub-sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari website www.idx.co.id sebanyak 20 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Sebanyak 20 perusahaan dalam penelitian ini dijadikan sampel yakni perusahaan sub-sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2018, dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laba berpengaruh terhadap *financial distress* sedangkan arus kas tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sub-sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa laba dan arus kas berpengaruh secara simultan terhadap kondisi *financial distress* suatu perusahaan.

Kata Kunci: Laba, Arus Kas, *Financial distress*.

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 147-158
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048

PENDAHULUAN

Dunia bisnis pada era ini berkembang semakin pesat dan diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan tersebut tentunya akan menimbulkan masalah-masalah baru dibidang industri salah satunya menguatnya tingkat persaingan. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk selalu memperkuat fundamental manajemen agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, sehingga nantinya dapat mengantisipasi kejadian yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Pada kondisi normal, kebangkrutan perusahaan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui tahapan dimana manajemen perusahaan seharusnya mengenali gejala-gejala sejak dini. Kebangkrutan perusahaan dapat terjadi karena perusahaan mengalami masalah keuangan yang dibiarkan berlarut-larut. Sebelum terjadinya kebangkrutan, perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau disebut *financial distress*. Seringkali kali pengertian kesulitan keuangan (*financial distress*) disamakan dengan pengertian kebangkrutan, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kebangkrutan merupakan ketidakpastian perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Sedangkan penurunan kondisi keuangan sebelum perusahaan bangkrut inilah yang disebut sebagai *financial distress*. Perusahaan yang mengalami keadaan *financial distress* biasanya ditandai dengan beberapa kondisi antara lain dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya modal, kesulitan membayar tagihan bank, adanya penundaan pengiriman barang serta perusahaan yang memiliki laba operasi negatif. Kondisi perusahaan yang demikian tentunya menjadi pertimbangan bagi para investor untuk mengambil langkah berinvestasi, dengan cara meninjau kondisi laba perusahaan tersebut.

Industri yang saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan era digital salah satunya adalah industri ritel di Indonesia. Banyaknya bisnis berbasis online menyebabkan industri ritel mengalami pelemahan daya beli yang berimbas pada pendapatan ritel. Selain munculnya pergeseran ke online, biaya produksi juga menjadi salah satu penyebab yang cukup mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Penjualan ritel nasional periode Januari-Juni 2017 mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam cnnindonesia.com, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan industri ritel sepanjang kuartal I tahun 2017 mengalami anjlok sebesar 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dimana penjualan industri ritel mencapai Rp40 triliun, sehingga pada tahun 2017 Arpindo hanya mematok pertumbuhan persis dengan tahun lalu. Melemahnya perekonomian domestik serta berkurangnya daya beli masyarakat mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap industri ritel di Indonesia.

Menurut detik.com pada tahun 2017 bisa jadi tahun yang berat bagi perusahaan ritel di Indonesia karena banyak perusahaan ritel menutup sebagian gerainya atau bahkan mengalami kebangkrutan. Dimulai dengan dihebohkannya masyarakat pada pertengahan tahun 2017 dimana 7-Eleven resmi menutup seluruh gerainya lantaran mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah ekspansi yang dilakukan oleh 7-Eleven yang dinilai terlalu cepat, pasalnya ekspansi ini dibiayai oleh pinjaman sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk operasional bisnis justru digunakan untuk membayar pinjaman beserta bunga yang jumlahnya signifikan, hal ini tentunya berdampak pada kesulitan keuangan perusahaan yang mengganggu baik dari sisi modal kerja perusahaan maupun keseimbangan perusahaan. Selain itu faktor lainnya adalah biaya operasional yang berlebih, dimana 7-Eleven melakukan pembayaran sewa tempat untuk 5-10 tahun kedepan. Pembayaran tersebut dilakukan dimuka, serta 7-Eleven juga melakukan renovasi besar-besaran untuk mengikuti standar 7-Eleven Inc. Hal tersebut akhirnya memberikan dampak negatif bagi perusahaan salah satunya arus kas perusahaan, dimana modal yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional justru dialokasikan untuk biaya sewa 5-10 tahun , padahal seharusnya biaya sewa tersebut bisa dibayarkan per bulan atau pertahun.

Faktor ketiga adalah daya beli masyarakat yang menurun karena pola konsumsi masyarakat yang berubah ditambah lagi kompetitor 7-Eleven yang menawarkan harga yang lebih murah.

Selanjutnya kasus penutupan gerai pun dialami oleh PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang merupakan pelopor ritel pakaian modern di tanah air. Matahari Departemen Store banyak menutup karena mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan laporan kinerja keuangan, Matahari memang terlihat menghadapi tantangan berat. Menurut okezone.com per semester I 2017, penjualan Matahari Department Store menyusut 27,4% menjadi Rp 3,76 triliun jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Keputusan penutupan gerai ini diambil karena perusahaan menganggap beberapa gerai tidak memberikan kontribusi pendapatan signifikan. PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) menutup dua gerainya di kawasan Pasaraya Blok M dan Manggarai pada akhir September 2017 (Koran SINDO, 2017).

Situasi seperti diatas tidak diinginkan oleh para pelaku bisnis karena hal tersebut berarti gejala berakhirnya keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengukur kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaannya agar terhindar dari kegagalan usaha. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membuktikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi financial distress suatu perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan variabel laba dan arus kas. Variabel laba dipilih karena laba suatu perusahaan digunakan sebagai dasar pembagian deviden kepada investornya. Jika laba yang diperoleh perusahaan sedikit atau bahkan mengalami rugi maka pihak investor tidak akan mendapatkan deviden. Hal ini terjadi berturut-turut akan mengakibatkan para investor menarik investasinya karena mereka menganggap perusahaan tersebut mengalami kondisi permasalahan keuangan atau *financial distress*. Dengan kondisi demikian maka laba dapat dijadikan indikator oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Atas dasar ini peneliti ingin membuktikan secara empiris mengenai kemampuan informasi laba dalam memprediksi kondisi *financial distress* suatu perusahaan.

Disamping itu, arus kas juga merupakan laporan yang memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Informasi arus kas dibutuhkan pihak kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran hutangnya. Apabila arus kas suatu perusahaan jumlahnya besar, maka pihak kreditor mendapatkan keyakinan pengembalian atas kredit yang diberikan. Jika arus kas suatu perusahaan bernilai kecil, maka kreditor tidak mendapatkan keyakinan atas kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus, kreditor tidak akan mempercayakan kreditnya kembali kepada perusahaan karena perusahaan dianggap mengalami permasalahan keuangan atau *financial distress*. Dengan kondisi demikian maka arus kas dapat dijadikan indikator oleh pihak kreditor untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Atas dasar ini peneliti ingin membuktikan secara empiris mengenai kemampuan informasi arus kas dalam memprediksi kondisi *financial distress* suatu perusahaan. Penelitian mengenai *financial distress* sudah banyak dilakukan oleh peneliti dari tahun ke tahun dengan hasil dan variabel independen yang beragam. Fanny Nailufar, dkk (2018) mendapatkan kesimpulan bahwa laba berpengaruh terhadap *financial distress* sedangkan arus kas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Taofik Al Alhidayat (2014) dengan judul "Penggunaan Laba dan Arus Kas Untuk Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Pada Perusahaan Manufaktur" mempunyai hasil yang berbeda dimana model laba dan arus kas berpengaruh untuk memprediksi kondisi *financial distress*. Tidak konsistennya penelitian-penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk menggunakan variabel laba dan arus kas, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan hasil yang terbaru. Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui pengaruh Laba terhadap *Financial distress* pada

perusahaan. (2) Untuk mengetahui pengaruh Arus kas terhadap *Financial distress* pada perusahaan. (3) Untuk mengetahui pengaruh Laba dan Arus kas secara simultan terhadap *Financial distress* pada perusahaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh dari web bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id/>. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu, variabel *dependent* dan variabel *independent*. Variabel dependen berupa variabel financial distress dalam penelitian ini diukur menggunakan angka *dummy* dengan kriteria yang diberikan adalah angka 0 untuk kategori perusahaan *Non Financial Distress*, dan angka 1 bagi perusahaan yang tergolong mengalami *Financial Distress*. Indikator *Financial Distress* dalam penelitian menggunakan laba bersih sebelum pajak, dimana perusahaan yang mengalami kondisi financial distress adalah perusahaan yang memperoleh laba bersih sebelum pajak negatif selama satu periode, sedangkan perusahaan yang tidak mengalami kondisi financial distress ditandai dengan terjadinya laba bersih sebelum pajak positif selama satu periode. Laba sebelum pajak digunakan karena untuk menghindari penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode. Variabel independen berupa laba diukur dengan menggunakan rasio laba sebelum pajak dibagi dengan beban bunga, hal ini dipilih karena untuk melihat sejauh mana laba perusahaan bisa berkurang tanpa menyulitkan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar bunga. Sedangkan variabel independen berupa arus kas diukur dengan mengacu pada penelitian Novianita (2017) yaitu menggunakan angka arus kas operasi yang disajikan dalam laporan keuangan dibagi dengan beban total aset.

Populasi dalam adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018. Sampel yang diambil berdasarkan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Sampel adalah perusahaan-perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Sampel telah mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2014-2018.
3. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan yang lengkap dikeluarkan dari sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa laporan publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pada seluruh perusahaan sub sektor perdagangan eceran (ritel) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2018 yang telah didokumentasikan dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Data tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang didapatkan melalui internet, yaitu <http://www.idx.co.id/>. Data yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut yaitu: laba sebelum pajak, beban bunga, total aset, dan kenaikan (penurunan) bersih kas atau setara kas aktivitas operasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis atau data yang dibuat oleh pihak lain. Data tersebut antara lain :

1. Daftar nama seluruh perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2014-2018 yang terdapat dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).
2. Data laporan keuangan auditan masing-masing perusahaan periode tahun 2014-

2018 yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Dalam penelitian ini digunakan bantuan berupa *software* aplikasi SPSS 24 For Windows. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis statistik deskriptif sedangkan untuk pengujian hipotesisnya menggunakan regresi logistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai deskripsi data dari keseluruhan variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif menghasilkan informasi berupa nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan proses penentuan sampel yang dilakukan dengan kriteria tersebut maka diperoleh 20 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan selama 5 tahun sehingga total keseluruhan data sebanyak 100 data. Dari keseluruhan sampel sebanyak 32 sampel atau 32% mengalami kondisi financial distress sedangkan sisanya atau sebanyak 68% tidak mengalami kondisi financial distress. Berikut hasil uji statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 24:

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LB	100	-.89	11.00	1.1015	2.70629
AK	100	-.47	5.00	.3336	.78286
DFD	100	0	1	.32	.469
Valid N (listwise)	100				

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Nilai minimum variabel kondisi *financial distress* adalah 0 dan nilai maksimum variabel kondisi *financial distress* adalah 1, hal ini dikarenakan variabel dari financial distress adalah variabel dummy, dimana angka 1 didapat untuk perusahaan yang mengalami financial distress dan angka 0 didapat untuk perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Rata-rata (mean) dari variabel kondisi *financial distress* adalah sebesar 0,32 Sedangkan standar deviasi *financial distress* adalah sebesar 0,47. Nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari standar deviasi $0.47 > 0.32$ yang menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki sebaran dan fluktuasi yang tinggi.

Selanjutnya untuk variabel laba memiliki nilai minimum -0,89 dan nilai maksimum 11,00. Rata-rata variabel laba adalah 1,10 dengan standar deviasi sebesar 2,7 artinya ukuran penyebaran variabel laba adalah 2,7 dari data penelitian. Untuk variabel arus kas memiliki nilai minimum -0,47 dan nilai maksimum 5. Rata-rata variabel arus kas adalah 0,33 dengan standar deviasi 2,78, artinya ukuran penyebaran variabel arus kas adalah 2,78 dari data penelitian.

Analisis Regresi Logistik

Tabel 2 Data sampel penelitian

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	100	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	100	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		100	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan proses penentuan sampel yang dilakukan dengan kriteria tersebut maka diperoleh 20 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan selama 5 tahun sehingga total keseluruhan data sebanyak 100 data. Pada

Tabel 2 terlihat bahwa tidak ada missing cases dalam penelitian sehingga total keseluruhan sampel atau sebanyak 100 data dapat digunakan.

Tabel 3 Koefisien Regresi

Original Value	Internal Value
Non financial distress	0
Financial distress	1

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy, sehingga terdapat 2 kategori untuk variabel *financial distress* yaitu 1 dan 0. Pada Tabel 3 terdapat 2 kategori pengkodean untuk variabel *financial distress*, dimana kategori “financial distress” digunakan untuk perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* dan diberi angka 1, sedangkan “non *financial distress*” adalah perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* dan diberi kode 0.

Uji multikolinearitas

Tabel 4 Hasil uji Multikolinearitas

		Constant	LB	AK
Step 1	Constant	1.000	-.033	-.122
	LB	-.033	1.000	-.911
AK	-.122	-.911		1.000

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Pengujian multikolinearitas merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk melihat apakah ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi ditabel Correlation Matrix, yang mana jika nilai koefisien korelasi > 0,90 maka terdapat multikolinearitas sehingga hasil yang diperoleh nanti tidak bias maka variabel tersebut harus segera dikeluarkan dari model regresi (Yuanita, 2010). Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa tidak ada korelasi antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,90, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas dan hasil yang diperoleh tidak bias pada model yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji -2 Log Likelihood

Tabel 5 Uji -2 Loglikelihood Block 0

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	125.399	-.720
	2	125.374	-.754
	3	125.374	-.754

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 125.374

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Tabel 6 Uji -2 Loglikelihood Block 1

Iteration		-2 Log likelihood	Constant	Coefficients LB AK	
Step 1	1	111.594	-.939	.405	-.681
	2	110.906	-1.020	.539	-.984
	3	110.882	-1.020	.572	-1.061
	4	110.882	-1.020	.574	-1.065
	5	110.882	-1.020	.574	-1.065

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 125.374

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Pada Tabel 5 menunjukkan nilai Uji -2 Loglikelihood yang dihasilkan pada saat block 0 yaitu sebesar 125,374, sedangkan Tabel 6 menunjukkan nilai -2 loglikelihood pada saat block 1 atau pada saat variabel independen dimasukkan yaitu sebesar 110,882. Hal ini menunjukkan nilai -2 loglikelihood awal atau pada saat block 0 lebih besar dari pada nilai -2 loglikelihood pada saat variabel independen dimasukkan atau block 1, artinya terjadi penurunan sebesar 14,492. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa model penelitian baik atau fit dengan data.

Hosmer and Lemeshow Test

Tabel 7 Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.622	8	.690

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Dalam menilai kelayakan model regresi dapat dilihat dari tabel Hosmer and Lemeshow Test. Pada Tabel 7 menunjukkan nilai Hosmer and Lemeshow Test adalah sebesar 5,622 dan tingkat signifikan sebesar 0.690. tingkat signifikansi yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih dari 0.05 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah menerima H₀, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini baik.

Koefisien Determinasi

Tabel 8 Uji Koefisien determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	110.882 ^a	.135	.189

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Besar nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan dengan nilai Nagelkerke's R Square. Tujuan dari pengujian ini untuk menilai seberapa besar variabel dependen yaitu *financial distress* mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen berupa laba dan arus kas dalam penelitian. Tabel 8 menunjukkan nilai Nagelkerke's R Square sebesar 0,189. Hal ini menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 18,9%, sedangkan sisanya sebesar 81,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Omnibus Test of Model Coefficient

Tabel 9 Pengujian Omnibus Test of Model Coefficient

Step 1		Chi-square	df	Sig.
	Step	14.492	2	.001
	Block	14.492	2	.001
	Model	14.492	2	.001

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Pengujian Omnibus Test of Model Coefficient digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Tabel 9 menunjukkan nilai omnibus test of model coefficient dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah menerima H₁, artinya variabel laba dan arus kas berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen berupa *financial distress*.

Uji Regresi Logistik

Tabel 10 Hasil Uji Regresi

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	LB	.574	.233	6.035	1	.014	1.775
	AK	-1.065	.654	2.654	1	.103	.345
	Constant	-1.020	.250	16.627	1	.000	.361

a. Variable(s) entered on step 1: LB, AK.

Sumber: hasil output IBM SPSS 24, 2020

Model regresi yang terbentuk dapat dilihat pada nilai estimasi parameter *Variabels in The Equation* . Berdasarkan Tabel 10 diatas dapat disusun model regresi logistik sebagai berikut :

$$\text{DFD} = -1,020 + 0,574\text{LB} - 1,065\text{AK}$$

Nilai Koefisien regresi variabel Laba adalah positif 0,574. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Laba sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan variabel kondisi *financial distress* sebesar 0,574 dengan asumsi variabel independen lain konstan. Nilai koefisien regresi variabel Arus Kas adalah sebesar negatif 1,065, artinya setiap kenaikan variabel arus kas sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan variabel kondisi *financial distress* sebesar 1,065 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 9 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Laba memiliki nilai signifikansi 0,014 , artinya nilainya berada di bawah 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa laba berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2. Pengujian hipotesis kedua

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Arus kas memiliki nilai signifikan 0,103, artinya nilainya berada dibawah 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa arus kas berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* ditolak, yang berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa Arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*.

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan laba terhadap *Financial Distress*. Hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan laba berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil analisis menunjukkan bahwa arah koefisien positif dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis pertama dapat diterima, artinya penggunaan laba berpengaruh terhadap *financial distress*. Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laba dapat mempengaruhi perusahaan dalam memprediksi kondisi *financial distress*.

Variabel laba yang didapat dari rasio laba merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dibagi total aset, artinya nilai rasio laba yang besar menunjukkan bahwa perusahaan sangat efektif dalam mengelola aset untuk memperoleh laba dan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik, namun sebaliknya jika rasio laba yang dihasilkan kecil artinya perusahaan kurang efektif dalam mengelola aset untuk memperoleh laba dan kinerja perusahaan kurang baik. Dengan demikian nilai rasio laba yang besar menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan dalam kondisi *financial distress rendah*, hal ini sejalan dengan teori sinyal bahwa rasio laba yang rendah akan memberikan sinyal bahwa perusahaan kemungkinan dalam kondisi *financial distress*, karena penggunaan aset yang tidak efektif akan menambah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan menunjukkan penurunan dari kinerja perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan dalam kesulitan keuangan besar. Sebaliknya nilai rasio laba yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan bahwa kemungkinan perusahaan dalam kondisi *financial distress* adalah rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nailufar, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa laba berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan yang agak memprihatinkan dari suatu perusahaan, akan menjadikan sinyal atau *early warning* bagi perusahaan bahwa mereka dapat mengalami tekanan keuangan atau *financial distress* pada tahun berikutnya. Namun, Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Septy (2017) yang mengatakan laba

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Dalam penelitian Septy laba dinilai tidak cukup meyakinkan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*, karena perubahan laba yang terjadi pada perusahaan cenderung stabil sehingga laba dianggap tidak membawa dampak besar terhadap kondisi *financial distress*.

Pengaruh arus kas terhadap Financial Distress. Hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa arus kas berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil analisis menunjukkan bahwa arah koefisien negatif dengan tingkat signifikan yang lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil analisis tersebut hipotesis kedua ditolak, artinya arus kas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Variabel arus kas dihitung dengan membandingkan arus kas dari aktivitas operasi dengan total aset, rasio arus kas tersebut nyatanya tidak dapat memperlihatkan kondisi *financial distress* perusahaan. Hal ini disebabkan informasi yang didapat dari arus kas cukup kompleks, karena laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, pendanaan dan investasi. Laporan arus kas dari aktivitas operasi hanya menunjukkan informasi mengenai operasional perusahaan, artinya jika kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi tinggi dapat dikatakan bahwa penerimaan kas dari hasil penjualan lebih besar dari pada pengeluaran kas untuk beban operasi, hal tersebut menunjukkan kas bersih yang didapat perusahaan tinggi, namun kondisi tersebut belum memperlihatkan gambaran yang pasti mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang pada pihak ketiga, sehingga belum bisa memprediksi apakah perusahaan dalam kondisi *financial distress* atau tidak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuningtyas (2010) yang menyimpulkan bahwa arus kas tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Hal ini disebabkan karena arus kas dari kegiatan operasi hanya menunjukkan rincian mengenai kegiatan operasional yang dijalankan perusahaan dan belum menggambarkan dalam kondisi keuangan yang buruk yang menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Hasil berbeda didapatkan oleh Halim (2017) yang memberikan kesimpulan bahwa arus kas berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*, artinya arus kas mempunyai kemampuan dalam memprediksi kondisi *financial distress* suatu perusahaan.

Pengaruh laba dan arus kas terhadap kondisi Financial Distress. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba dan arus kas berpengaruh secara simultan dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Laporan laba rugi perusahaan menggunakan dasar akrual, sedangkan laporan arus kas menggunakan dasar kas, sehingga laporan arus kas dapat dijadikan sebagai laporan pengimbang laporan laba rugi. Maka dari itu penilaian yang tepat atas prestasi suatu perusahaan tidak hanya dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang positif dari kegiatan operasinya. Jika perusahaan menghasilkan laba namun arus kas yang negatif, maka terdapat indikasi bahwa perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya, sebaliknya jika rasio laba yang dihasilkan kecil namun arus kas dari operasi positif juga dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan, karena dikhawatirkan investor tidak percaya lagi terhadap perusahaan akibat penundaan pembagian dividen. Hal tersebut sesuai dengan teori sinyal bahwa laba dan arus kas dapat memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan, dengan memberikan sinyal-sinyal bahwa perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nailufar (2018) yang menyimpulkan bahwa laba dan arus kas berpengaruh secara simultan terhadap kondisi *financial distress* dengan signifikansi sebesar 0,002.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara variabel laba dan variabel arus kas terhadap variabel kondisi *financial distress* baik

secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laba berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*
Hal ini menunjukkan bahwa laba yang diukur menggunakan rasio laba bersih sebelum pajak dibagi total aset berpengaruh terhadap *financial distress*, artinya didukung secara statistik dalam penelitian ini. Hal tersebut karena rasio laba yang rendah yang dihasilkan perusahaan menunjukkan perusahaan kurang efektif dalam mengelola aset untuk memperoleh laba, sehingga perusahaan menunjukkan kinerja yang kurang baik dan bisa jadi akan menambah biaya yang dikeluarkan, hal tersebut nantinya akan memberikan sinyal bahwa perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Sebaliknya perusahaan yang memiliki rasio laba tinggi artinya efektif dalam mengelola aset untuk memperoleh laba, hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan baik dan perusahaan tidak dalam kondisi kesulitan keuangan.
2. Arus kas berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*
Hal ini menunjukkan bahwa arus kas yang diukur menggunakan rasio arus kas operasi dibagi total aset tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, artinya tidak didukung secara statistik dalam penelitian. Hal ini disebabkan informasi yang didapat dari arus kas operasi hanya menunjukkan mengenai kas bersih dari kegiatan operasional perusahaan, dan belum memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan biaya lain yang timbul dari hutang tersebut. Sehingga hal tersebut belum mampu memprediksi perusahaan apakah dalam kondisi *financial distress* atau tidak.
3. Laba dan arus kas berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress*
Hasil penelitian ini menunjukkan laba dan arus kas berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil ini sejalan dengan teori sinyal bahwa rasio dari laba dan rasio arus kas akan memberikan sinyal-sinyal kepada perusahaan mengenai apakah perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, R. et. al. 2012. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Alih Bahasa : Nurul Husnah, Wailah Abdullah. Salemba Empat, Jakarta.
- Muqodim, 2005. *Teori Akuntansi*, Edisi 1. Ekonisia. Yogyakarta: Ekonisia.
- Indira, Septy. et. Al. 2017. Pengaruh Laba, Arus Kas dan *Corporate Governance* Terhadap Kondisi *Financial Distress*. Universitas Khairun , Ternate, Maluku Utara. Jurnal Akuntansi vol. 13.
- Nailufar, Fany. 2018. Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi *Financial Distress* Studi Kasus Pada Perusahaan Non Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol. 2 No. 2
- Haryanto, Mamang. 2018. Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi *Financial Distress*. AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 3 No. 1
- Rizkiyah, Shirly. 2018. Pengaruh Laba, Arus Kas, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Kondisi *Financial Distress*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 7 No. 1
- Nandrayani, Novita. 2017. Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi *Financial Distress*.
- Noviantita, Azizah. 2017. Pengaruh Laba dan Arus Kas dan Struktur kepemilikan terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Zulandari, Nining. 2016. Analisis Pengaruh Model Laba Dan Model Arus Kas Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Diss. Universitas Andalas, 2016.
- Wahyuningtyas, Fitria, and Jaka ISGIYARTA. 2010. Penggunaan Laba dan Arus Kas untuk Memprediksi Kondisi *Financial Distress* (Studi Kasus pada Perusahaan Bukan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2008). Diss. Universitas Diponegoro, 2010.

- Fanni Djongkong dan Maria Rio Rita. 2014. Manfaat Laba dan Arus Kas dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI; Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Diponegoro.
- Reeve, James et al. 2010. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia; Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso. 2008. Akuntansi Intermediate. Edisi kedua belas Jilid I. Erlangga: Jakarta.
- Rahmat. 2009. Laba Akuntansi. <http://blog.re.or.id/labaakuntansi.thm>. Diakses tanggal 13 April 2020.
- Atmini, Sari. 2005. Manfaat Laba dan Arus Kas Untuk Memprediksi Kondisi *Financial Distress* pada Perusahaan *Textile Mill Products* dan *Apparel and Other Textile Products* yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*, 15-16 September 2005.
- Bayu. 2009. Makalah Artikel Ekonomi Indonesia: Artikel Tentang Laba. Diakses pada tanggal 5 September 2019]. Tersedia pada: <http://cafeekonomi.blogspot.com/2009/09/artikel-tentang-laba.html>.
- Hery. 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Laba. 2008. Internet. Diakses pada tanggal 5 September 2019. Tersedia pada: <http://kelompoklaba.wordpress.com/2008/08/27/laba/>.
- Brahmana,R. 2007. *Identifying Financial Distress Condition in Indonesia Manufacture Industry*. *Jurnal of Accounting*
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFPE.
- Laba. 2008. <http://kelompoklaba.wordpress.com/2008/08/27/laba/>. Diakses tanggal 3 Maret 2010.
- Fauzi. 2017. Diakses pada 09 November 2019 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170404181823-92-204942/kuartal-i-2017-penjualan-industri-ritel-melot-20-persen>
- Sugianto. 2017. Diakses pada 10 Oktober 2019. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3644595/matahari-tutup-gerai-di-pasaraya-manggarai-dan-blok-m-akhir-bulan-ini>
- www.idx.co.id**
- Hidayat, L., Muktiadji, N., & Supriadi, Y. (2020, May). The Knowledge and Students' Interest to Investing in Investment Gallery. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 142-145). Atlantis Press.
- Marlina, T., & Haryanto, R. A. (2018). Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 85-93.
- Muanas, M., & Mulia, I. (2020). Pendampingan Penguasaan Akuntansi Dasar Bagi Pegawai BPR Mitra Daya Mandiri Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 51-56.
- Mulyana, M. (2012). Consumer Behaviour: Sukses Dengan Memahami Konsumen.
- Nurendah, Y. (2015). Strategy to Improvement Sustainability of Distinctively Local Snacks Based on Evaluation and Profile Mapping of SMEs Distinctively Local Snacks. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 5(5), 334-338.
- Pamungkas, R., & Puspitasari, R. (2018). Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan jangka panjang (Studi kasus pada PT Ciputra Development Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), 81-87.
- Purba, J. H. V., & Sulistiono, S. (2013). Pengaruh Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(1), 85-92.

- Rainanto, B. H., & Fathiah, R. (2020). PKM Pembekalan Pelaku UMKM Kota Bogor Tentang Strategi Diferensiasi Dan Positioning Untuk Bertahan Dan Menang. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 97-107.
- Setiawan, B., Puspitasari, R., & Manurung, T. M. S. (2016). The existence of Islamic banking in Indonesia from non-muslims perceptions. *ASEAN Marketing Journal*, 81-96.
- Fauzi, R. C., Patriani, Y., Tiblola, J., & Munawar, A. (2020). Neo-Nepotism In Business Which Reduces the Quality Of Democracy. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(11), 1758-1763.
- Murdihardjo, L., Nurjanah, Y., & Rendy, R. (2020, May). Implementing INTACS Dynamics Enterprise Resources Planning System for Financial Statements. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 228-233). Atlantis Press.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331-342.
- Purba, J. H. V. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN ANALISA DATA PANEL PADA MULTI-BISNIS DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2017. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(1), 15-27.
- Meyliza, M., & Efrianti, D. (2020). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 57-66.

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Menunjang Kelancaran Proses Produksi Dan Penjualan Studi Kasus Pada PT. Damar Bandha Jaya Corp. Bogor

*Production, Sales
and Accounting
Information System*

159

Fikri Hermawan dan Dessy Evianti
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail : fikri.hermawan@ibik.ac.id

Submitted:
JANUARI 2020

Accepted:
MARET 2021

ABSTRACT

The accounting information system for raw material inventory implemented by the company can be useful for company leaders and managers, especially in making decisions to determine the steps to be taken by the company, especially in the production and sales process activities. The research object is PT. Damar Bandha Jaya is engaged in the livestock industry which is located on Jl. Soemantadiredja, Pamoyanan, Bogor Selatan. The purpose of this study is to determine and study the accounting information system for raw material inventory applied to the company, to determine the smooth running of the company's production process, and to determine the role of the production process in supporting smooth sales. The research method is descriptive and qualitative. The results of this study indicate that the application of the raw material inventory accounting information system is adequate. It can be seen from the complete elements of the accounting information system for the supply of raw materials in the form of forms and records, tools and personnel, as well as adequate reports. And the implementation of the production process has been smooth, which supports sales so that there is a growth in 2019 of 1.12%. This is also supported by the role of the production division in checking production results and machine maintenance.

Keywords: *Accounting Information Systems, Inventory, Production Process, Sales*

ABSTRAK

Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi para pimpinan dan manajer perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan menentukan langkah - langkah yang akan diambil oleh perusahaan diantaranya dalam kegiatan proses produksi dan penjualan. Objek penelitian adalah PT. Damar Bandha Jaya bergerak di bidang industri peternakan yang terletak di Jl. Soemantadiredja Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan pada perusahaan dan untuk mengetahui kelancaran proses produksi perusahaan serta untuk mengetahui peranan proses produksi dalam mendukung kelancaran penjualan. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku sudah memadai. Dapat dilihat dari lengkapnya unsur-unsur sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku berupa formulir dan pencatatan, alat dan kepegawaian serta laporan-laporan yang tersusun. Dan pelaksanaan proses produksi sudah berjalan dengan lancar dimana mendukung penjualan sehingga terjadi pertumbuhan penjualan di tahun 2019 sebesar 1,12%. Dan hal ini didukung pula oleh peran divisi produksi dalam memeriksa hasil produksi serta perawatan mesin.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, Proses Produksi, Penjualan

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 159-172
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha saat ini di Indonesia mengalami persaingan yang cukup ketat di segala bidang, bahkan dalam bidang industri maupun jasa. Dalam menghadapi persaingan ini, perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat berperan penting atas adanya aktivitas proses produksi dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Proses produksi merupakan proses perubahan bentuk dan meningkatkan daya guna dari suatu bahan baku menjadi barang-barang yang sudah diolah dan siap dipasarkan dengan melibatkan faktor-faktor produksi dalam pelaksanaannya. Keterlibatan faktor-faktor produksi merupakan hal yang sangat penting untuk diarahkan kepada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga membawa dampak yang sangat besar bagi efektifitas proses produksi dan penjualan perusahaan. Proses produksi dan penjualan dapat berlangsung secara berkesinambungan apabila kebutuhan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi dapat terpenuhi.

Pada perusahaan manufaktur yang besar, proses produksi yang mereka miliki bisa jauh lebih kompleks atau lebih rumit. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan manufaktur membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mereka memudahkan proses bisnis dan juga proses produksi mereka sehingga dapat mengembangkan potensi atau peluang yang mereka miliki. Dengan banyaknya proses bisnis serta proses produksi yang dimiliki oleh tiap perusahaan manufaktur pastinya akan memberikan berbagai macam masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan seperti, mesin produksi terjadi kerusakan dan tidak bisa dioperasikan serta ketersediaan bahan baku yang tidak memadai. Kesalahan-kesalahan seperti ini dapat berdampak kepada target produksi yang tidak tercapai. Menurut perusahaan masalah target produksi tidak tercapai adalah masalah paling besar yang dihadapi produksi karena dapat berdampak buruk pada beberapa hal seperti mempengaruhi profit perusahaan, hilangnya kepercayaan pelanggan dan stabilitas pekerjaan.

Menurut pendapat Handri Mulya, (2010:214) Persediaan dalam sebuah perusahaan merupakan aset yang cukup besar nilainya. Keberadaannya dalam sebuah perusahaan juga mengandung berbagai implikasi dilihat dari ada atau tidaknya persediaan tersebut. Jika persediaan dalam perusahaan ada dan jumlahnya cukup besar, maka implikasi biaya untuk menjaga keberadaan persediaan tidak dapat dihindari. Sebaliknya jika persediaan dalam perusahaan tidak tersedia, maka proses produksi dan penjualan tentu akan menjadi terganggu. Perusahaan yang baik dalam mengelola persediaan adalah perusahaan yang tidak memiliki persediaan barang dagang. Sedangkan menurut Kieso, et all (2015:402) persediaan (*Inventory*) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki perusahaan untuk di jual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual.

Proses produksi dan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang dapat berperan penting bagi kelancaran proses produksi dan penjualan. Sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan adalah sistem informasi akuntansi yang menyajikan informasi atas persediaan bahan baku. Informasi akuntansi sebagai informasi yang dibutuhkan manajer dalam pengambilan kebijakan harus benar-benar dapat diyakini kebenarannya dan disajikan tepat waktu.

Setelah melalui proses produksi dan menjadi barang jadi, selanjutnya adalah proses penjualan. Kualitas produksi dan strategi penjualan yang baik adalah kunci yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar dapat mendorong peningkatan penjualan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi, perusahaan bisa mendapatkan laba yang optimal. Dimana laba dan kepuasan pelanggan merupakan ukuran penilaian dari keberhasilan suatu perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan.

Masalah-masalah yang akan muncul dalam penjualan suatu produk antara lain yaitu kesulitan dalam memprediksi permintaan produk yang mengakibatkan barang yang diproduksi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan sehingga tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan yang berdampak pada kekecewaan, masalah selanjutnya kualitas produk yang kurang bagus demi mengurangi biaya produksi.

Akibatnya akan menurunkan profitabilitas, sebab pelanggan yang tidak puas akan berhenti melakukan pembelian, dan permasalahan penentuan jalur distribusi yang paling efektif dan efisien, hal ini menjadi permasalahan dalam penjualan, karena apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan jalur pendistribusian akan menghambat proses penjualan kepada pelanggan.

Sistem informasi memiliki peran sangat penting bagi proses bisnis Perseroan mulai dari proses marketing, tahap produksi sampai ke distribusi. Dalam prosesnya PT. Damar Bandha Jaya Corp senantiasa mengembangkan sistem informasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan tujuan menghadirkan produk yang berkualitas secara berkelanjutan dan dapat memenuhi harapan konsumen. Penerapan Sistem informasi dilakukan pada tataran operasional dan fungsional dengan menyusun program kerja yang menunjang strategi bisnis Perseroan.

Menurut Devi Apriany (2014) dengan judul penelitian “Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Produksi Pada PT. Armindo Caturpratama”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan dan manajer perusahaan terutama dalam pengambilan sebuah keputusan dan dalam menentukan langkah – langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan terutama dalam melaksanakan aktivitas proses produksi agar berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu sistem informasi persediaan bahan baku diharapkan dapat menjadi unsur pendukung bagi suatu perusahaan dalam menunjang kelancaran produksi.

Sedangkan menurut Achmad Jawaahirul Mustofa, Tri Lestari, Siti Rosyafah (2015) dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Kelancaran Proses Produksi pada UD. Bintang Terang Surabaya” yang menyimpulkan bahwa tidak adanya prosedur dan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran bahan baku yang memadai menyebabkan terjadinya kelebihan pemakaian bahan baku yang dapat merugikan perusahaan, dan jika fungsi-fungsi persediaan belum dijalankan dengan baik oleh perusahaan, nantinya akan berdampak kekosongan bahan baku dalam kelancaran proses produksi.

Melihat perkembangan industri peternakan yang terus tumbuh dengan sangat cepat di Indonesia PT. Damar Bandha Jaya melihat peluang yang sangat besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Kunci perusahaan untuk mempertahankan produknya adalah meningkatkan mutu produksi. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang mempunyai mutu dan kualitas yang lebih unggul dengan pesaingnya. Produk yang dihasilkan perusahaan menjadi tolak ukur kemajuan perusahaan. Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan proses produksi sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu yang tinggi. Meskipun PT. Damar Bandha Jaya telah berusaha untuk mempertahankan produknya dan meningkatkan mutu produksinya, PT. Damar Bandha Jaya masih mengalami masalah dari ketersediaan bahan baku dan masalah mengenai kriteria berat ayam hidup yang akan di produksi yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi dan menghambat proses penjualan kepada pelanggan.

PT Damar Bandha Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di Industri Peternakan salah satu anak perusahaan dari PT Jambu Raya Corporation yang wilayah kerjanya menyebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan berpusat di Kota Bogor dan memiliki banyak pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dikenal sebagai *stakeholders* perusahaan. Produk yang dihasilkan oleh Jambu Raya ini adalah hasil pangan yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak pernah berhenti mengkonsumsinya, untuk itu seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya permintaan, perusahaan terus berkembang positif ke arah kemajuan, jumlah produksi pun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan perusahaan yang terus meningkat menandakan perusahaan wajib memperhatikan stok persediaan bahan baku guna memperlancar proses produksi dan penjualannya. Suatu perusahaan yang telah berjalan harus memonitor kegiatan dan

hasil produksinya secara cermat dan teliti untuk menjaga nama baik perusahaan dari produk yang dihasilkan. Pengadaan bahan baku sangat penting bagi perusahaan karena jumlah permintaan yang bersifat fluktuatif, hal tersebut untuk mendukung kelancaran produksi dan penjualan sehingga tidak terjadi keterlambatan produk dan menghindari keterlambatan pengiriman barang pada konsumen. Perseroan menganut kebijakan penyediaan stok bahan baku minimum yang harus tersedia di setiap pabrik yang dimiliki. Penyimpanan bahan baku diatur dalam Standar Operasi Prosedur sesuai dengan tingkat keawetan, keamanan, dan sifat bahan baku tersebut. Oleh sebab itu sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku diharapkan dapat menjadi unsur pendukung bagi perusahaan dalam menunjang kelancaran proses produksi dan penjualan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang diterapkan oleh PT. Damar Bandha Jaya Corp.
2. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku terhadap kelancaran proses produksi pada PT. Damar Bandha Jaya Corp.
3. Untuk mengetahui peranan proses produksi dalam menunjang penjualan pada PT. Damar Bandha Jaya Corp.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti adalah di PT. Damar Bandha Jaya yang beralamat di Jl. Soemantadiredja No.16 RT 02/RW 02 Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan. Waktu yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian serta perolehan data sebagai bahan proposal skripsi ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2020.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu : Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Adapun beberapa cara mengumpulkan data primer yang dilakukan oleh peneliti : Wawancara dan Pengamatan (*Observation*). Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer, yaitu mengambil secara langsung ke objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan berupa kualitatif, dimana metode deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas” (Sugiyono 2015:29).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku pada PT. Damar Bandha Jaya Corp

PT. Damar Bandha Jaya merupakan salah satu anak perusahaan PT. Jambu Raya yang bergerak di bidang industri peternakan yang menghasilkan produk berupa ayam potong dan memiliki produk sampingan seperti kaki ayam, kepala ayam, ati ampela ayam, dan lain-lain. Sistem pencatatan persediaan bahan baku pada PT. Damar Bandha Jaya menggunakan Perpetual Inventory System. Pencatatan persediaan bahan baku ini dilaksanakan setiap waktu baik terhadap pemasukan maupun pengeluaran bahan baku. Metode penilaian persediaan bahan baku yang digunakan PT. Damar Bandha Jaya adalah metode FIFO (First in First Out). Dalam metode ini, biaya terakhir akan diperhitungkan terhadap penjualan yang telah terjadi. Jadi material yang pertama masuk atau diterima dikeluarkan terlebih dahulu, karena itu persediaan yang masih ada

dinilai dengan harga pokok dari pembelian material terlebih dahulu, sedangkan pengeluaran material dinilai dengan harga pokok dari pembelian terakhir. Fasilitas penyimpanan persediaan bahan baku pada PT. Damar Bandha Jaya disimpan pada gudang tertutup berupa ayam yang sudah dipotong untuk dimasukkan ke mesin pendingin. Gudang tertutup ini ditujukan khusus untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan persediaan bahan baku. Dipimpin oleh seorang Kepala Gudang yang bertanggung jawab kepada Manager Produksi.

Klasifikasi persediaan bahan baku pada PT. Damar Bandha Jaya diklasifikasi berdasarkan kelompoknya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Persediaan Bahan Baku pada PT. Damar Bandha Jaya

Bahan Baku Utama			
1	Ayam Hidup		
Bahan Baku Pembantu			
1	Es Balok	22	Plastik PE 17x35
2	Solar Broiler	23	Plastik Seal 20x35x0.6
3	Solar Broiler	24	Plastik PE 28x50
4	Solar Genset	25	Plastik seal 10x20x0.6
5	Sarung Tangan Kain	26	Plastik seal 10x15x0.6
6	Sarung Tangan Sensi	27	Plastik PE 25x35
7	Sarung Tangan Merah	28	Plastik PE 28x50
8	Sepatu Boots Baru	29	Plastik PE 11X22
9	Celemek	30	Plastik PE 14x20
10	Masker Kain	31	Bumbu Tradisional A (FK 01)
11	Handglove Plastik	32	Bumbu Tradisional A (250gr)
12	Topi Kain	33	Bumbu Geprek Juara (1250gr) FC 03
13	Clorin Produk	34	Marinasi FC Internal (800gr)
14	Sabut Kawat	35	Marinasi FC Ole (FC 01)
15	Garam	36	Marinasi Dasar (FM 01)
16	Karung 60x100	37	Bumbu Chicken Strip
17	Karung 50x80	38	Bumbu Kari (1200gr) (FK 04)
18	Plastik Merah	39	Bumbu Spesial Sambal (FP 01)
19	Plastik Roll	40	Bumbu Brine Ori (FB 04)
20	Plastik sampah 60x100x0.5	41	Marinasi FC Eksternal (800gr)
21	Plastik PE 14x35	42	Sabun Cuci Tangan

Prosedur Pembelian sampai Penerimaan Bahan Baku

Pembelian bahan atau *Purchase Order* (PO) adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Formulir yang digunakan dalam prosedur ini adalah formulir *purchase order* (PO).

1. Kepala bagian pembelian melakukan pemesanan pembelian, dan membuat dokumen pesanan pembelian serta kontrak pembelian untuk diserahkan kepada bagian pemasok dan melakukan pengecekan atas kontrak pembelian.
2. Bagian keuangan melihat dokumen kontrak pembelian yang sudah dicek, setelah itu bagian keuangan melakukan pembayaran kontrak pembelian, dokumen slip pembayaran kontrak pembelian digunakan untuk membuat surat jalan dan menyiapkan bahan baku, setelah itu dokumen surat jalan diberikan kepada pemasok. Pada bagian ekspedisi membuat berita acara serta melakukan proses pengiriman, dan dokumen berita acara diberikan kepada kepala bagian pembelian.
3. Berita acara yang sudah ada diserahkan untuk dilakukan penimbangan bahan baku, terdapat tiga dokumen tiket timbangan. Tiket timbangan bagian ekspedisi membuat kwitansi penagihan, dokumen kwitansi penagihan selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukannya pembayaran kepada pihak ekspedisi dan mendapatkan slip pembayaran. Pada bagian pabrik melakukan pengecekan dan pembongkaran bahan baku serta membuat dokumen data bahan baku, lalu data tersebut diserahkan kepada bagian pembelian, di pembelian membuat laporan

penerimaan bahan baku. Hasil laporannya, berkaitan dengan penerimaan bahan baku yang diterapkan kepada staf bagian pembelian.

Prosedur Pengeluaran Bahan Baku

Pengeluaran bahan baku merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk. Formulir yang digunakan dalam prosedur ini adalah formulir permintaan dan pengeluaran bahan baku.

1. Dimulai dari bagian produksi. Bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku dan mengeluarkan surat permintaan bahan baku. Surat permintaan bahan baku yang dikeluarkan 2 rangkap, rangkap 1 untuk bagian gudang, dan 1 lagi untuk bagian produksi.
2. Bagian gudang menerima surat penerimaan bahan baku dan membuat 2 rangkap surat pengiriman bahan baku. Yang pertama untuk dikirimkan ke bagian produksi beserta bahan bakunya, dan yang kedua untuk draft file dibagian gudang. Setelah itu pihak gudang membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang. Bukti penerimaan dan permintaan & pengeluaran bahan baku dibuat 2 rangkap, yang pertama untuk dikirimkan ke bagian akuntansi, dan kedua untuk menjadi draft file untuk bagian gudang. Bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku dan dibuat 2 rangkap lagi untuk dikirimkan ke bagian akuntansi dan menjadi draft file dibagian gudang.
3. Pihak produksi mendapat surat pengiriman bahan baku beserta bahan baku yang diminta dan memproduksi bahan baku hingga menjadi barang jadi. Setelah barang tersebut jadi, pihak produksi mengirimkan barang jadi kepada bagian gudang.
4. Bagian gudang menerima barang jadi lalu pihak gudang membuat laporan barang jadi. Hasil dari laporan barang jadi tersebut dikirimkan ke bagian akuntansi.
5. Bagian akuntansi menerima bukti permintaan dan permintaan & pengeluaran bahan baku, laporan persediaan bahan baku, dan laporan barang jadi dari bagian gudang. Bukti-bukti dan laporan-laporan yang diterima oleh bagian akuntansi menjadi dasar untuk pihak akuntan membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang. Hasil dari laporan permintaan dan pengeluaran BG (Barang Gudang) dibuat 2 rangkap oleh bagian akuntansi. Yang pertama, untuk diberikan kepada manajer dan yang kedua untuk menjadi draft file dibagian akuntansi.

Vendor

Vendor merupakan pihak eksternal dari suatu perusahaan yang menjual bahan baku atau bahan mentah, menjual jasa, menjual barang jadi atau barang yang telah diolah yang nantinya akan digunakan untuk proses produksi perusahaan. Vendor biasanya memiliki harga dan kebijakan khusus, serta beberapa tidak menjual langsung secara eceran kepada konsumen akhir. Untuk dapat bekerja sama, pihak vendor menawarkan proposal penawaran terlebih dahulu ke perusahaan. Biasanya perusahaan akan menilai dari segi harga dan kualitas barang serta jasa yang ditawarkan. Terkadang ada juga perusahaan yang justru menawarkan kerjasama kepada vendor.

Proses Produksi

Formulir yang digunakan dalam prosedur ini adalah formulir permintaan barang.

1. Proses bongkar keranjang isi ayam hidup dari armada penangkapan di susun di atas meja konveyor bongkar.
2. Proses pemindahan ayam hidup dari keranjang tangkap ke keranjang terbuka.
3. Proses penimbangan ayam hidup di keranjang terbuka.
4. Proses penggantungan ayam hidup.
5. Proses penyembelihan ayam hidup.
6. Proses perebusan ayam pasca sembelih.
7. Proses pencabutan bulu ayam pasca perebusan dan dikerjakan oleh mesin plucker.
8. Proses pencabutan bulu sisa secara manual dan dikerjakan oleh orang dari proses pencabutan bulu oleh mesin plucker.
9. Proses pemotongan kepala secara manual dan dikerjakan oleh orang.
10. Proses perobekan perut secara manual dan dikerjakan oleh orang.

11. Proses pengeluaran jeroan secara manual dan dikerjakan oleh orang.
12. Proses pemotongan kaki/ceker secara manual dan dikerjakan oleh orang.
13. Proses pencucian karkas nonchlorine dan dikerjakan oleh mesin screw washing.
14. Proses pencucian karkas dengan chlorine dan dikerjakan oleh mesin screw washing.
15. Proses pendinginan karkas dan dikerjakan oleh mesin screw chilling.
16. Proses penirisan karkas pasca pendinginan dan dikerjakan oleh mesin dryer.
17. Proses pemilahan karkas berdasarkan berat karkas dan dikerjakan oleh mesin grader.
18. Proses distribusi hasil produksi RPA menggunakan kendaraan angkut dan dikerjakan oleh orang.

Data Hasil Produksi

Produksi PT. Damar Bandha Jaya Corp dilakukan di dua wilayah di pulau Jawa yaitu di wilayah Bogor dan Cebongan (Yogyakarta). Berikut hasil produksi dalam dua periode tahun 2018 sampai 2019:

Tabel 6 Data Total Produksi/Kg Wilayah Bogor dan Cebongan Pertahun 2018 - 2019

Bulan	Wilayah	Tahun 2018	Tahun 2019	Presentase
Januari	Bogor dan Cebongan	669.865	794.957	19%
Februari	Bogor dan Cebongan	916.767	735.527	-20%
Maret	Bogor dan Cebongan	534.428	745.061	39%
April	Bogor dan Cebongan	539.720	628.215	16%
Mei	Bogor dan Cebongan	562.600	358.363	-36%
Juni	Bogor dan Cebongan	613.528	526.222	-14%
Juli	Bogor dan Cebongan	658.733	689.410	5%
Agustus	Bogor dan Cebongan	626.344	543.175	-13%
September	Bogor dan Cebongan	797.258	671.294	-16%
Oktober	Bogor dan Cebongan	810.225	848.555	5%
November	Bogor dan Cebongan	703.531	767.908	9%
Desember	Bogor dan Cebongan	734.467	750.808	2%
Total		8.167.466	8.059.494	-1%

Pencapaian produksi/kg pada PT. Damar Bandha Jaya pada tahun 2018 dan 2019 setiap bulannya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, dan secara total dalam setahun mengalami penurunan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar -1%.

Unsur-unsur Kelancaran Proses Produksi dan penjualan pada PT. Damar Bandha Jaya Corp

Proses produksi dan penjualan yang dilaksanakan oleh PT. Damar Bandha Jaya dapat dikatakan lancar, karena telah ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Produksi dan Operasi. Pada PT. Damar Bandha Jaya kegiatan penyusunan rencana produksi dan operasi ini merupakan kegiatan awal dalam pengoperasian sistem produksi dan operasi yang dilakukan oleh kepala bagian produksi. Kegiatan penyusunan rencana ini telah dilaksanakan dengan baik,

- terlihat dari adanya penetapan target produksi, *schedulling* (Penjadwalan), prosedur penerimaan penjualan (PP), dan *Follow up* (Tindak lanjut).
2. Perencanaan dan pengendalian persediaan bahan. Kelancaran kegiatan produksi dan penjualan pada PT. Damar Bandha Jaya sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan baku yang dibutuhkan bagian produksi dan operasi. Kelancaran tersebut ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan baku serta rencana dan pengendalian persediaan yang dilakukan. Jika baik kegiatan produksi akan berlangsung dengan lancar dan kegiatan penjualan akan berlangsung lancar pula. Pengendalian persediaan disini dimaksudkan untuk mengamankan persediaan bahan baku mulai dari penerimaan, penyimpanan dan pengeluarannya baik itu fisik maupun secara kualitas serta pencatatan atas transaksi persediaan.
 3. Pemeliharaan / perawatan (maintenance) mesin dan peralatan. Pada PT. Damar Bandha Jaya terdapat bagian teknis mesin yang melakukan pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan sebelum dan sesudah proses produksi. Terlihat dari adanya pengecekan dan perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang ada pada mesin dan peralatan yang ada pada perusahaan, serta penyesuaian atau penggantian komponen (*spare part*) yang baru pada fasilitas tersebut. Sehingga fasilitas mesin dan peralatan yang ada di PT. Damar Bandha Jaya selalu diusahakan dalam kondisi atau keadaan siap dipergunakan dalam proses produksi setiap saat.
 4. Pengendalian mutu. Pada PT. Damar Bandha Jaya telah terdapat pengendalian mutu yang baik, hal ini dapat terlihat dari adanya badan pengawas produksi, divisi R&D yang selalu memeriksa kualitas produk dengan baik untuk dipasarkan dan bagian analisa bahan baku produksi yang bertugas mengecek dan memeriksa kualitas baik atau tidaknya bahan baku tersebut. Kegiatan ini bertujuan agar bahan baku yang akan diproduksi dan produk jadi yang dihasilkan dapat sesuai dengan mutu dan standar yang berlaku di PT. Damar Bandha Jaya sehingga dapat dihindari adanya ketidakpuasan (klaim) dari para konsumen atas produk yang di terima atau dikonsumsi.
 5. Manajemen tenaga kerja. Pada PT. Damar Bandha Jaya terdapat manajemen tenaga kerja yang baik. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi dan pembagian tugas yang jelas antar masing-masing bagian yang berhubungan dengan proses produksi dan penjualan.

Prosedur Penjualan Tunai

Dokumen-dokumen surat order penjualan, *outstanding order*, tanda terima, memo perintah yang dilampirkan bersama dengan surat jalan, kartu stok barang, rekapan persediaan, laporan penjualan, rekapan penjualan, dan nota penjualan.

1. Bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan yang datang langsung ke kantor atau melalui telepon dan menerima uang muka dari pelanggan.
2. Bagian penjualan mencatat pesanan pada *Sales Order* (SO) sebanyak dua rangkap (SO rangkap 1 untuk pelanggan, SO rangkap 2 diberikan bagian keuangan) dan mencatat pada *Outstanding Order* (OO) serta membuat tanda terima (TT) dua rangkap (TT rangkap 1 untuk pelanggan dan TT rangkap 2 diberikan bagian keuangan). *Outstanding Order* diarsip berdasarkan nomor dokumen.
3. TT rangkap 2, SO rangkap 2, dan uang diberikan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membuat Nota Penjualan (NP) dua rangkap berdasarkan SO rangkap 2. Uang akan disetorkan ke bank dan bukti setoran akan diberikan ke bagian akuntansi untuk diarsip berdasarkan tanggal. NP rangkap 1 dan SO rangkap 2 diberikan ke bagian penjualan. NP rangkap 2 dan TT rangkap 2 diarsip berdasarkan tanggal.
4. Bagian penjualan menerima NP rangkap 1 dan SO rangkap 2 dari bagian keuangan serta membuat surat jalan (SJ) tiga rangkap dan memo perintah. SO rangkap 2 diarsip berdasarkan nomor. Setelah itu, barang dikirim atau tidak tergantung permintaan dari pelanggan.

5. Jika barang dikirim, SJ, memo perintah, dan NP rangkap 1 akan diberikan kepala gudang. Kepala gudang menandatangani surat jalan dan mengkoordinasi mandor untuk memproses pengiriman barang. Memo perintah diarsip berdasarkan tanggal.
6. SJ dan NP rangkap 1 diberikan ke mandor dan kemudian mandor akan mengkoordinasi buruh untuk menyiapkan dan memuat barang pada truk. Surat jalan dan NP rangkap 1 diberikan kepada bagian pengiriman lalu menuju ke lokasi pelanggan.
7. Barang diturunkan ke lokasi pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani surat jalan dan menagih pelanggan. Jika sebelumnya pelanggan sudah memberikan uang muka, maka bagian pengiriman menerima TT rangkap 1 dan bukti transfer dari pelanggan. SJ rangkap 2 dan NP rangkap 1 diberikan kepada pelanggan.
8. Bagian pengiriman kembali ke gudang dengan membawa bukti transfer dari pelanggan beserta dengan SJ rangkap 1 dan rangkap 3, TT rangkap 1 yang kemudian diberikan kepada kepala gudang.
9. Kepala gudang menerima SJ rangkap 1, rangkap 3, TT rangkap 1, dan bukti transfer serta meng-update kartu stok barang berdasarkan SJ rangkap 3 dan membuat rekapan persediaan berdasarkan SJ rangkap 3. Rekapan persediaan diberikan kepada bagian penjualan dan SJ rangkap 3 diarsip berdasarkan tanggal.
10. SJ rangkap 1 diberikan ke bagian penjualan supaya dapat meng-update Outstanding Order bahwa barang telah diterima pelanggan. SJ rangkap 1 diarsip berdasarkan tanggal dan OO diarsip berdasarkan nomor
11. TT rangkap 1 dan bukti transfer diberikan ke bagian keuangan dan diperiksa dengan NP rangkap 2 yang telah diarsip. TT rangkap 1 diarsip berdasarkan tanggal. Bukti transfer dan NP rangkap 2 diberikan ke bagian akuntansi.
12. Bagian akuntansi menerima bukti transfer dan NP rangkap 2. Bagian akuntansi membuat rekapan penjualan (harian) berdasarkan NP rangkap 2 supaya dapat dicek dengan bukti transfer dan membuat laporan penjualan (bulanan) agar dapat dilihat oleh pemilik. NP rangkap 2, rekapan penjualan, dan bukti transfer diarsip berdasarkan tanggal dan siklus penjualan tunai ini berakhir.
13. Jika barang tidak dikirim, pelanggan datang dan bagian penjualan mengecek TT rangkap 1 dan SO rangkap 1 yang dibawa pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani SJ. SJ rangkap 2, SJ rangkap 3, memo perintah, SO rangkap 1 dan NP rangkap 1 diberikan kepada pelanggan. Bagian penjualan meng-update OO bahwa barang sudah diambil pelanggan. SJ rangkap 1 diarsip bagian penjualan berdasarkan tanggal dan OO diarsip berdasarkan nomor.
14. Pelanggan menuju ke bagian keuangan dan bagian keuangan menerima NP rangkap 1, TT rangkap 1, dan uang dari pelanggan. Bagian keuangan memeriksa uang dengan NP dan TT rangkap 1. NP rangkap 1 diberikan ke pelanggan dan NP rangkap 2 diberikan ke bagian akuntansi. Uang dibawa bagian keuangan untuk disetorkan ke bank. TT rangkap 1 diarsip berdasarkan tanggal dan bukti setoran diberikan ke bagian akuntansi.
15. Pelanggan menuju ke kepala gudang dan kepala gudang menerima NP rangkap 1, SJ rangkap 3, dan memo perintah dari pelanggan sebagai bukti bahwa barang telah dilunasi pelanggan dan barang dapat diambil. Kepala gudang mengkoordinasi mandor untuk menyiapkan barang dengan memberikan SJ rangkap 3.
16. Mandor mengkoordinasi buruh untuk menyiapkan barang dan dimuat pada truk pelanggan. Barang dibawa pelanggan bersama dengan SJ rangkap 2 dan NP rangkap 1. SJ rangkap 3 dikembalikan ke kepala gudang.
17. Kepala gudang meng-update kartu stok barang berdasarkan SJ rangkap 3 dan membuat rekapan persediaan berdasarkan kartu stok barang. Rekapan persediaan diberikan kepada bagian penjualan dan SJ rangkap 3 diarsip berdasarkan tanggal.
18. Bagian akuntansi menerima bukti setoran dan NP rangkap 2 dari bagian keuangan serta membuat rekapan penjualan (harian) berdasarkan NP rangkap 2 supaya dapat dicek dengan bukti setoran dan membuat laporan penjualan (bulanan) agar dapat

dilihat oleh pemilik. NP rangkap 2, rekapan penjualan, dan bukti setoran diarsip berdasarkan tanggal dan siklus penjualan tunai ini berakhir.

Prosedur Penjualan Kredit

Pada penjualan Kredit ini perusahaan memberikan jangka waktu pembayaran (*Term of Payment*) kepada pelanggan yaitu n/7 sampai n/45. Dokumen-dokumen yang terkait antara lain surat order penjualan, *Outstanding Order*, surat pesanan barang/*purchase order* (PO), rekapan persediaan, kartu piutang, memo perintah yang dilampirkan bersama dengan surat jalan, kartu stok barang, laporan penjualan, dan rekapan penjualan.

1. Bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan yang datang kantor, melalui telepon, atau mengirim *Purchase Order* (PO) melalui fax. Bagian penjualan dapat melihat rekapan persediaan untuk melihat ketersediaan barang yang dipesan pelanggan.
2. Bagian penjualan mempertimbangkan batas kredit dengan melihat kartu piutang dari bagian akuntansi. Jika kredit tidak disetujui, maka pelanggan disarankan untuk membeli secara tunai. Jika pelanggan tidak mau membeli tunai, maka siklus penjualan kredit ini akan berakhir.
3. Jika kredit disetujui, bagian penjualan mencatat pesanan pada *Sales Order* (SO) sebanyak dua rangkap dan pada *Outstanding Order* (OO). Bagian penjualan mengotorisasi kredit dengan memberikan stempel & tanda tangan dan selanjutnya pelanggan diminta menandatangani SO. SO rangkap 1 diberikan kepada pelanggan dan SO rangkap 2 diarsip bagian penjualan berdasarkan nomor SO. OO diarsip berdasarkan nomor.
4. Bagian penjualan membuat surat jalan (SJ) tiga rangkap dan memo perintah berdasarkan SO rangkap 2. Setelah itu, barang dikirim atau tidak tergantung permintaan dari pelanggan. Jika barang dikirim, SJ dan memo perintah diberikan kepala gudang agar dapat mengkoordinasi mandor untuk menyiapkan barang pesanan. Memo perintah diarsip berdasarkan tanggal.
5. SJ diberikan kepada mandor supaya buruh dapat menyiapkan barang dan memuat pada truk. Barang dan SJ dibawa bagian pengiriman menuju lokasi pelanggan.
6. Barang diturunkan di lokasi pelanggan dan pelanggan diminta menandatangani SJ. SJ rangkap 2 diberikan kepada pelanggan, SJ rangkap 1 dan rangkap 3 dibawa kembali oleh bagian pengiriman kembali ke gudang.
7. Bagian pengiriman memberikan SJ rangkap 1 dan rangkap 3 ke kepala gudang. Kepala gudang meng-update kartu stok barang berdasarkan SJ rangkap 3 dan membuat rekapan persediaan berdasarkan kartu stok barang. Rekapan persediaan diberikan ke bagian penjualan dan SJ rangkap 3 diarsip berdasarkan tanggal.
8. SJ rangkap 1 diberikan kepada bagian penjualan supaya bagian penjualan dapat meng-update *Outstanding Order* bahwa barang telah diterima pelanggan dan diarsip berdasarkan nomor serta mencari SO rangkap 2. SJ rangkap 1 kemudian diberikan ke bagian keuangan supaya dapat membuat faktur penjualan.
9. Bagian penjualan memberikan SO rangkap 2 ke bagian akuntansi supaya dapat meng-update kartu piutang. SO rangkap 2 diarsip bagian akuntansi berdasarkan nomor SO dan kartu piutang diarsip berdasarkan nama pelanggan serta siklus penjualan kredit ini berakhir.
10. Jika barang tidak dikirim, pelanggan datang dan bagian penjualan memeriksa SO rangkap 1 yang dibawa pelanggan. Pelanggan diminta menandatangani SJ. SJ rangkap 2, SJ rangkap 3, dan memo perintah diberikan kepada pelanggan.
11. Pelanggan menuju ke kepala gudang dan kepala gudang mengecek SJ rangkap 3, dan memo perintah yang dibawa pelanggan. Kepala gudang mengkoordinasi mandor untuk memproses pengiriman barang dengan memberikan SJ rangkap 3.
12. Mandor mengkoordinasi buruh agar barang dapat dipersiapkan dan dimuat pada truk pelanggan. Barang berserta dengan SJ rangkap 2 dan SO rangkap 1 dibawa oleh pelanggan. SJ rangkap 3 dikembalikan ke kepala gudang.

13. Kepala gudang menerima SJ rangkap 3 dan meng-update kartu stok barang berdasarkan SJ rangkap 3 serta membuat rekapan persediaan berdasarkan kartu stok barang. Rekapan persediaan diberikan bagian penjualan. SJ rangkap 3 diarsip berdasarkan tanggal.
14. Bagian penjualan memberikan SJ rangkap 1 kepada bagian keuangan supaya dapat membuat faktur. Bagian penjualan meng-update Outstanding Order bahwa barang telah diterima pelanggan, mengarsip OO berdasarkan nomor serta mencari SO rangkap 2. SO rangkap 2 diberikan bagian akuntansi.
15. Bagian akuntansi menerima SO rangkap 2 dan meng-update kartu piutang. SO rangkap 2 diarsip berdasarkan nomor SO dan kartu piutang diarsip berdasarkan nama pelanggan serta siklus penjualan kredit berakhir.

Data Penjualan

Berikut ini merupakan data hasil penjualan PT. Damar Bandha Jaya Corp Periode tahun 2018 sampai tahun 2019:

Tabel 7 Data Penjualan tahun 2018-2019

Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Presentase
Januari	30.628.285.602	30.932.006.820	0.99%
Februari	32.753.665.483	28.972.914.369	-11.54%
Maret	29.321.635.227	32.159.777.330	9.68%
April	31.442.631.705	30.698.810.255	-2.37%
Mei	30.682.976.336	33.100.919.965	7.88%
Juni	28.986.256.772	32.565.372.829	12.35%
Juli	33.635.924.678	28.368.624.935	-15.66%
Agustus	30.523.476.380	32.723.890.344	7.21%
September	29.386.342.695	29.218.252.715	-0.57%
Oktober	31.257.876.580	31.358.372.468	0.32%
November	31.183.091.704	32.472.534.386	4.14%
Desember	32.497.229.178	33.903.038.717	4.33%
Total	372.299.392.340	376.474.515.133	1.12%

Pencapaian penjualan PT. Damar Bandha Jaya pada tahun 2018 dan 2019 setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara total dalam setahun mengalami peningkatan penjualan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,12%. Kenaikan dan penurunan penjualan disetiap bulannya dikarenakan salah satu faktornya adalah kondisi permintaan bahan baku untuk produksi dari produk tersebut. Kesulitan pemenuhan bahan baku ini terkait kepada kriteria berat dari ayam potong yang akan diproduksi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab I - Bab IV yaitu sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku yang terapkan oleh PT. Damar Bandha Jaya Corp telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan persediaan bahan baku, meliputi direktur utama, general manager, divisi keuangan dan akuntansi, divisi pembelian/bagian pengadaan, dan divisi produksi. Dimana mereka telah memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang mereka miliki.
 - b. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan persediaan bahan baku antara lain alat tulis kantor (ATK), telepon, mesin faximile, mesin penghancur kertas, mesin fotokopi, kalkulator, software Easy Accounting System dan komputer yang paling utama sebagai pengolah data dan penyimpanan data.
 - c. Formulir yang digunakan dalam kegiatan persediaan bahan baku meliputi *purchase order* (PO), permintaan pembelian, formulir masuk gudang formulir

- keluar gudang, surat jalan, formulir permintaan barang, dan formulir pengeluaran barang.
- d. Catatan yang digunakan dalam kegiatan persediaan bahan baku meliputi pencatatan pada kartu persediaan, jurnal dan buku besar.
 - e. Prosedur-prosedur dalam kegiatan persediaan bahan baku meliputi prosedur pembelian bahan baku, prosedur penerimaan bahan baku, dan prosedur pengeluaran bahan baku.
 - f. Laporan yang digunakan dalam kegiatan persediaan bahan baku terlihat dari adanya laporan penerimaan bahan baku, laporan persediaan bahan baku, laporan barang jadi, laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang.
2. Proses produksi yang dilaksanakan oleh PT. Damar Bandha Jaya Corp telah lancar. Hal ini terlihat dari:
 - a. Adanya penyusunan rencana produksi dan operasi berupa penetapan target produksi, *schedulling* (Penjadwalan), prosedur penerimaan penjualan (PP), dan *Follow up* (Tindak lanjut).
 - b. Adanya perencanaan dan pengendalian persediaan bahan berupa perencanaan, pengadaan bahan baku serta pengendalian atas persediaan bahan baku yang dilaksanakan dengan baik.
 - c. Adanya pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan, oleh teknisi mesin yang melakukan pemeliharaan atau perawatan mesin serta penggantian komponen (*sparepart*) dan peralatan sebelum dan sesudah proses produksi.
 - d. Adanya pengendalian mutu, dimana perusahaan memiliki badan pengawas produksi, dan divisi R&D yang selalu memeriksa kualitas produk dengan baik untuk dipasarkan.
 - e. Adanya manajemen tenaga kerja, berupa pemisahan fungsi dan pembagian tugas yang jelas antar masing-masing bagian.
 3. Peranan proses produksi pada PT. Damar Bandha jaya Corp sudah menunjang penjualan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan di tahun 2019 sebesar 1,12%. Kondisi ini didukung oleh peranan divisi produksi dalam pengecekan hasil produksi sebelum dilakukan penjualan dan pemeliharaan mesin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Achmad Jawaahirul Mustofa, Tri Lestari, Siti Rosyafah (2015). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Kelancaran Proses Produksi pada UD. Bintang Terang Surabaya*. Jurnal Ilmiah
- Ahyari, Agus. (2010). *Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi.*, Edisi Empat, Yogyakarta, BPFE.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ardana, Cenik dan Hendro Lukman. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Assauri, Sofjan, (2011). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assauri, Sofjan. (2016). *Manajemen Operasi Produksi (Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan)*. Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhar Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya
- Baridwan, Zaki. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*, edisi kedua. Yogyakarta: BPFE
- Basu Swastha Dharmmesta. (2014). *Manajemen Pemasaran*. BPFE: Yogyakarta.
- Benno Safinus Ginting (2016). *Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Terhadap Proses Produksi Pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Cabang Medan*. Jurnal Ilmiah
- Bodnar, George H., dan William S. Hopwood. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

- Devi Apriany (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Produksi Pada PT. Armindo Caturpratama*. Jurnal Ilmiah
- Dini Hediani (2016). *Pengaruh Persediaan Bahan Baku Terhadap Proses Produksi Pada Perusahaan PT. Sinjaraga Santika Sport (Triple S)*. Jurnal Ilmiah
- Frandi Wijaya, M. Wimbo Wiyono dan Muchamad Taufiq (2019). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Menunjang Kelancaran Proses Produksi Pada CV. Mirai Alam Sejahtera*. Jurnal Ilmiah
- Gelinas, Ulrich & Dull, B. Richard, (2012). *Accounting Informations System, 9th ed.* South Western Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, USA. P. 19
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE
- Heizer, Jay and Render Barry, (2015). *Manajemen Operasi : Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*, edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: CAPS
- Hery, (2016). *Analisis Laporan Keuangan*: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Kieso, Donald E., Jerry J, Weygant & Terry D. Warfield. 2015. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN
- Krismaji, (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keempat, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Lilis, Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Mai Syaroh (2019). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Terhadap Kelancaran Proses Produksi Pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk*. Jurnal Ilmiah
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Mulya, Hadri. 2010. *Memahami Akuntansi Dasar Edisi 2 : Pendekatan Teknis Siklus Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hidayat, L., Muktiadji, N., & Supriadi, Y. (2020, May). The Knowledge and Students' Interest to Investing in Investment Gallery. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 142-145). Atlantis Press.
- Marlina, T., & Haryanto, R. A. (2018). Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 85-93.
- Muanas, M., & Mulia, I. (2020). Pendampingan Penguasaan Akuntansi Dasar Bagi Pegawai BPR Mitra Daya Mandiri Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 51-56.
- Mulyana, M. (2012). Consumer Behaviour: Sukses Dengan Memahami Konsumen.
- Nurendah, Y. (2015). Strategy to Improvement Sustainability of Distinctively Local Snacks Based on Evaluation and Profile Mapping of SMEs Distinctively Local Snacks. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 5(5), 334-338.
- Pamungkas, R., & Puspitasari, R. (2018). Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan jangka panjang (Studi kasus pada PT Ciputra Development Tbk). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(2), 81-87.
- Purba, J. H. V., & Sulistiono, S. (2013). Pengaruh Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(1), 85-92.

- Rainanto, B. H., & Fathiah, R. (2020). PKM Pembekalan Pelaku UMKM Kota Bogor Tentang Strategi Diferensiasi Dan Positioning Untuk Bertahan Dan Menang. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 97-107.
- Setiawan, B., Puspitasari, R., & Manurung, T. M. S. (2016). The existence of Islamic banking in Indonesia from non-muslims perceptions. *ASEAN Marketing Journal*, 81-96.
- Fauzi, R. C., Patriani, Y., Tiblola, J., & Munawar, A. (2020). Neo-Nepotism In Business Which Reduces the Quality Of Democracy. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(11), 1758-1763.
- Murdihardjo, L., Nurjanah, Y., & Rendy, R. (2020, May). Implementing INTACS Dynamics Enterprise Resources Planning System for Financial Statements. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 228-233). Atlantis Press.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331-342.
- Purba, J. H. V. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN ANALISA DATA PANEL PADA MULTI-BISNIS DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2017. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(1), 15-27.
- Meyliza, M., & Efrianti, D. (2020). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 57-66.
- Romney, M.B, dan Steinbart, P.J (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Ahli Bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Salemba Empat, Jakarta.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Samryn, L. M. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Edisi IFRS. Jakarta: Rajawali Pers
- Stevenson, W.J., Chuong, S.C. (2014) *Manajemen Operasi Perspektif Asia*, Edisi 9, Salemba Empat and MC Graw Hill Education, Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Capital Intensity* Sebagai Variabel Moderasi

*Tax aggressiveness,
Profitability and
Capital Intensity*

Muhamad Apep Mustofa¹ Maryam Amini² & Syahril Djaddang³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah, Depok, Indonesia

Email : maryam.amini@stiehidayatullah.ac.id

173

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability on tax aggressiveness and the effect of profitability on tax aggressiveness with capital intensity as a moderating variable. The population used in this study is coal mining industry companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. Researchers used purposive sampling method with a total sample of 40 samples from 17 companies that have been selected. The results show that intensity capital can moderate the effect of profitability on tax aggressiveness. And also profitability has an effect on tax aggressiveness.

Keywords: Profitability, Capital Intensity, and Tax Aggressiveness

Submitted:
MARET 2021

Accepted:
APRIL 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dan pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan *capital intensity sebagai variabel moderasi*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri pertambangan batu bara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan total sampel 40 sampel dari 17 perusahaan yang telah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity dapat memoderasi* pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Dan juga profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi/sumbangan yang setiap wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan wajib menyetorkannya kepada negara. Adapun menurut UU KUP pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pendapatan negara atas pajak ialah sumber pendanaan terbesar yang diharapkan pemerintah dalam membangun negeri guna kemakmuran bangsa. Dari pajak tersebut pemerintah dapat menjalankan programnya dengan tujuan meningkatkan perekonomian melalui infrastruktur pembangunan, aset publik dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya pendapatan pajak negara sehingga berdampak pada target pajak yang tidak tercapai. Seperti yang diberitakan oleh kabar harian online cncindonesia.com dimana penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun kembali tak capai target APBN 2018 sebesar Rp 1.424. Yang mana di tahun 2017 penerimaan pajak pun belum mencapai targetnya yaitu hanya tercapai 89,4% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun. Kejadian ini mejadi salah satu akibat dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan terutama oleh perusahaan.

Dalam katadata.co.id disebutkan, dibalik besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara terdapat kontribusi pajak yang sangat minim. Ditambah data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan *tax ratio* dari kontribusi industri

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 173-178
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048

pertambangan batu bara pada 2016 hanya 3,9% dari target tax ratio 10,4%. Hal tersebut menunjukkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan batu bara masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Data tersebut sejalan dengan data dari penulis terkait tingkat agresivitas pajak untuk industri pertambangan sektor batu bara, seperti grafik dibawah ini.



Gambar 1. Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat kenaikan tingkat agresivitas pajak. Artinya pada tahun tersebut terdapat penghindaran pajak yang meningkat pada perusahaan pertambangan batu bara sebesar 0,13 di tahun 2017 dan meningkat menjadi 0,24 pada tahun 2018. Maka terlihat jelas bahwa tindakan agresivitas perusahaan dapat merugikan negara, sebab mengurangi pendapatan negara atas pajak yang diperuntukkan untuk kemakmuran bangsa. Sayangnya agresivitas pajak ini dinilai positif oleh perusahaan, karena perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar atas kemampuannya menghindari kewajiban perpajakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* adalah aktivitas dari perusahaan yang berhubungan dengan investasi melalui aset tetap (Novitasari dan Shelly, 2017). Ayu dan Putu (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak". Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mustika (2017) yang memperoleh hasil bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada *agresivitas* pajak.

Dalam struktur perusahaan, stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait aktifitas perusahaan yang mempengaruhinya, yang mana menurut Friedman (1962) tujuan utama perusahaan ialah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ghazali dan Chariri (2007), teori stakeholder merupakan teori yang tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan itu sendiri, namun harus mementingkan kepentingan stakeholder baik itu pemegang saham, *supplier*, kreditor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Adapun cara untuk memperhatikan kepentingan tersebut dengan mentaati peraturan yang dibuat salah satunya yaitu taat membayar pajak tanpa melakukan agresivitas pajak.

Menurut UU Perpajakan Nasional, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat baik pribadi maupun badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang. Adapun sistem perpajakan yang dianut Indonesia yang mencerminkan tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban perpajakan perusahaan dengan merekayasa laba melalui perencanaan pajak

baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak yang berada dalam *grey area* apakah ia menghindari pajak dengan memanfaatkan kelemahan hukum.

Hanafi dan Halim (2009:83) mengartikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan terkait penjualan, asset dan ekuitas. Dimana perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi kerap kali mendapat perhatian di kalangan masyarakat maupun pemerintah, yang berakibat pada tingginya beban pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab perusahaan akan menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Peneliti menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) untuk menghitung profitabilitas.

Suatu perusahaan dalam meningkatkan profitnya dengan didasarkan pada keputusan keuangan yang dinilai melalui *capital intensity*. Dimana *capital intensity* mampu mengukur seberapa besar modal yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. Adapun dana yang dihasilkan bersumber dari perolehan aktiva tetap baik penurunan maupun peningkatan atau dalam kata lain *capital intensity* menunjukkan besaran asset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Pengukuran variabel ini penulis menggunakan rasio total asset tetap/total asset x 100%.

Pengembangan Hipotesis

Menurut (Nugraha dan Meiranto, 2015) perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar harus siap dengan pajak yang akan dibayarkan. Pendapatan yang diperoleh Perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan (Ardyansah 2014). ETR penulis gunakan sebagai indikator beban pajak Perusahaan. ETR yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang dibayar menjadi rendah, sehingga laba Perusahaan tetap tinggi. Maka dari itu perusahaan akan melakukan Agresivitas Pajak demi mengurangi beban pajak tinggi yang harus dibayar sehingga laba yang diperoleh perusahaan tetap tinggi. H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian ini menggunakan Intensitas Aset Tetap yang mana pada umumnya akan mengalami penyusutan, karena untuk mengecilkan pajak yang dibayar manajer kerap menggunakan biaya depresiasi. Adapun cara lain untuk mengurangi pajak perusahaan yaitu dengan berinvestasi asset. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan Perusahaan mungkin menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional Perusahaan (Adisamartha dan Noviari, 2015). H₂: *Capital Intensity* dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batu bara periode 2014-2018 yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sample dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Perusahaan terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI), b) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan selama tahun 2014-2018. c) Perusahaan pertambangan batu bara yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut di BEI selama 2014-2018. d) Laporan keuangan perusahaan yang memuat informasi secara lengkap.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian statistik deskriptif dengan menggunakan uji hipotesis dan model regresi yaitu analisis regresi linear berganda. Variable independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas dengan menggunakan ROA sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. *Capital intensity* sebagai variable moderasi yang diukur dengan formula total asset, untuk mengukur faktor memperkuat atau memperlemah terhadap variable dependen yaitu agresivitas pajak.

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan menggunakan IBM SPSS 25. Model yang digunakan dalam penelitian

Tax aggressiveness, Profitability and Capital Intensity

ini menggunakan persamaan regresi linear berganda yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_1X_1*Z_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Agresivitas Pajak
- X₁ = Profitabilitas
- Z₁ = Capital Intensity
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien regresi variable independen
- ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan industry pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun objek penelitiannya yaitu laporan tahunan perusahaan periode 2014 sampai dengan 2018 dengan jumlah sampel 40.

Analisa Data

Tabel 2
Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Probability	Sig.
ROA	0.080354	0.0335	0.05
CAPINT	0.083587	0.1492	0.05
C	0.907295	0.0323	0.05

Sumber : data diolah

Pembahasan

Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan table 2 diketahui bahwa profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,08 dan nilai probability sebesar 0,1492 lebih kecil dari nilai sig (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan level signifikan 5%. Maka dari itu H₁ yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak diterima.

Dengan demikian hasil diatas sejalan dengan penelitian Prasista dan Setiawan (2016) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya, perusahaan mencoba untuk mempertahankan laba dengan melakukan agresivitas pajak. Dimana hal tersebut mengakibatkan beban pajak menjadi kecil sehingga menimbulkan laba setelah dikurangi beban pajak tersebut menjadi tinggi, yang artinya kinerja perusahaan tersebut berhasil.

Pengaruh Capital Intensity yang memoderasi profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan table 2 diketahui bahwa *capital intensity* memiliki nilai koefisien sebesar 0,08 dan nilai probability sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai sig (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif memoderasi profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan level signifikan 5%. Maka dari itu H₂ yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif memoderasi Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak diterima.

Adapun penelitian I Made, I Putu dan Sukma (2017) memiliki hasil yang sejalan dengan yang uji penulis dimana capital intensity berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. Yang artinya perusahaan lebih memilih berinvestasi pada asset, sehingga perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya melalui depresiasi aktiva tetap. Dimana tingginya depresiasi aktiva tetap mampu mengurangi laba sebelum pajak, hal ini disebabkan oleh preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi asset tetap. Sayangnya hal tersebut membuat ETR perusahaan menjadi rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dan *Capital Intensity* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Saran yang diperuntukkan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya: adanya penambahan data perusahaan, peneliti selanjutnya dapat menggunakan data perusahaan selain industri pertambangan, dan menambahkan banyak variabel lain dalam meneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Atami, A. G. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Manajemen Laba. dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jom Fekon*, 4(1), 2965–2979.
- Evianti, D. (2019). Perancangan SOP Divisi Keuangan Dalam Menunjang Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas PT. Smartelco Solusi Teknologi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(3), 361-368.
- Ferina, V., & Amrulloh, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Industri Property dan Real Estate Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 227-236.
- Fadillah, D. N., & Triandi, T. (2019). Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan PSAK No. 24 (revisi 2013) dan Dampak Perubahannya terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 246-257.
- Firmansyah, I., & Pramiudi, U. (2020). Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Informasi Penjualan Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 1-8.
- Ghozali. (2005). *Analisis Multivariate dengan SPSS* (UNDIP, ed.). Semarang.
- Jatikusuma, M., & Nurjanah, Y. (2020). Penggunaan Metode Beneish Ratio Index Untuk Mendeteksi Kecurangan Pada Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 177-186.
- Jessica, & Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. *Tax & Accounting Review*, 5(2), 193–203.
- Kodey, D. K., Rosita, S. I., & Sari, E. I. (2020). Pengaruh Hutang dan Modal Kerja terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 127-136.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Muanas, M., & Sufriyanti, F. (2018). Peranan Sistem Aplikasi FASt Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Dagang (Studi Kasus pada PT KEA Panelindo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 53-62.
- Mulyana, M., Hakim, D. B., & Hartoyo, S. (2020). Entrepreneurial Activities And Performance Of Rice Farming In Bojongpicung Sub-District, Cianjur Regency. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 4528-4535.
- Nataldy, C., & Pardede, R. P. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Premi dan beban klaim Sesuai PSAK No. 28 pada PT. Asuransi Astra buana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 258-265.
- Purba, J. H. V., Ratodi, M., Mulyana, M., Wahyoedi, S., Andriana, R., Shankar, K., & Nguyen, P. T. (2019). Prediction Model in Medical Science and Health Care. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8, 815-818.
- Priscilia, A., & Agoes, S. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. I(3), 979–987.
- Rosalia, R., & Zulkarnain, P. D. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Potensi Daerah dan Aset Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 167-176.

- Reminda, A. D. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL REPONSIBILITY , PROFITABILITAS , UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015). *JOM Fekon, Vol. 4(2)*, 4279–4293.
- Septiani, S., & Herawati, H. (2020). Peranan Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT Yudhistira Ghalia Indonesia-Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(2)*, 207-216.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi, 23(1)*, 10–19. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>
- Yuliandi, Y. (2019). Analisis Penyebab Pembetulan Spt Ppn Sebagai Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Spt Ppn.(Studi Kasus Pt. Pgp). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 7(1)*, 239-245.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

*Zakat, Muslim
Perception and
Tax Deduction*

179

Slamet Wahyuni¹ Muhammad Saddam² & Syahril Djaddang³

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah, Depok, Indonesia

Email : syahril.djaddang@stiehidayatullah.ac.id

Submitted:
MARET 2021

Accepted:
APRIL 2021

ABSTRACT

The aim of this study is to explore the factors that influence the perception of the Muslim community on tax reduction through zakat in Indonesia. This research was conducted on taxpayers registered at KPP Pratama Depok City, by taking samples directly in the field, using a questionnaire as a data collection tool. This study found that the halal-haram aspects of Islamic Sharia had no influence on the Muslim community's perception of the taxable income reduction system through zakat. In addition, religiosity does not have a significant positive impact on the perception of the Muslim community towards this system. This research offers unique findings that can help in leveraging practices in Muslim countries and to understand their people's perceptions of the tax reduction system.

Keywords: Perception, Muslim community, taxable income, religiosity, zakat, tax deduction

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Muslim terhadap pengurangan pajak melalui zakat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Depok, dengan mengambil sample secara langsung di lapangan, dengan penggunaan kuesioner sebagai alat pendataan. Penelitian ini menemukan bahwa aspek halal-haram dari Syariah Islam tidak memiliki pengaruh pada persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem pengurangan penghasilan kena pajak melalui zakat. Selain itu, religiusitas tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap persepsi masyarakat Muslim terhadap sistem ini. penelitian ini menawarkan temuan unik yang dapat membantu dalam memanfaatkan praktik di negara-negara Muslim dan untuk memahami persepsi masyarakat mereka mengenai sistem pengurangan pajak.

Kata kunci: Persepsi, masyarakat Muslim, penghasilan kena pajak, religiusitas, zakat

PENDAHULUAN

Tujuan zakat dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari tujuan perpajakan. Perpajakan dan zakat memiliki perbedaan pada sumber yuridiksi, pondasi hipotesis, tujuan, tarif, dan alokasi peruntukan (Abu Bakar & Rashid, 2010). Walaupun demikian zakat dalam fungsinya adalah "pajak" dalam agama Islam yang dibebankan pada anggota masyarakat kaya untuk dibagikan kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan serta penerima lain berdasarkan tolok ukur menurut Al-Qur'an. Zakat memiliki fungsi untuk mempertahankan kemakmuran sosial ekonomi orang miskin dan yang membutuhkan (Al-Mamun et al., 2019).

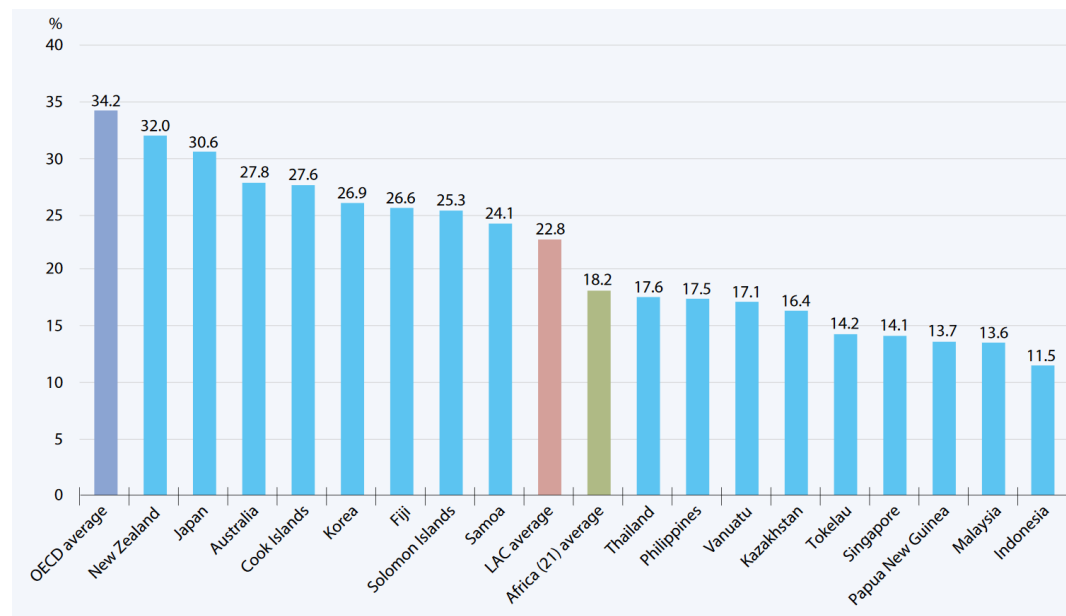
(Fauzia, 2013) dalam (Adib, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat lima model pengelolaan zakat di era kontemporer ini, yaitu *pertama*, dikumpulkan dan dikelola oleh

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 179-184
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048

negara dengan konsekuensi adanya kewajiban; *kedua*, dikelola oleh swasta dan diatur kewajibannya dalam peraturan; *ketiga*, dikelola secara sukarela oleh negara; *keempat*, dikelola secara sukarela oleh swasta; *kelima*, dikelola dengan sukarela secara individual. Di Indonesia zakat dikelola oleh negara dan swasta, metode pengelolaan campuran ini tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana negara memiliki andil pengelolaan melalui BAZNAS dibantu oleh Lembaga swasta atau LAZ yang telah eksis terlebih dahulu. Selain itu Undang-undang tersebut juga mengatur tentang insentif pajak bagi masyarakat Muslim yang membayar zakat, dimana zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. insentif ini diberikan agar wajib pajak tidak terkena kewajiban atau beban ganda.

Peraturan tersebut selain dibuat untuk meningkatkan gairah Muslim dalam membayar zakat melalui lembaga resmi juga dibuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak muslim dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari potensi zakat sebesar 217 Triliun namun baru 1% yang berhasil dihimpun dari potensi yang ada (Rulian et al., 2015). Demikian juga rasio pajak Indonesia yang rendah dimana pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat terbawah *tax ratio* disbanding negara-negara Asia Pasifik (OECD, 2019).



Gambar 1 Tax ratio Negara-negara Asia Pasifik

Dengan adanya dorongan pemerintah terhadap zakat serta adanya zakat sebagai insentif pajak, performa penerimaan zakat dan pajak seharusnya menjadi lebih baik.

Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi dimana manajemen tidaklah hanya termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan individu dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah dan Lembaga amil zakat selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dan Lembaga amil (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah dan Lembaga amil yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Persepsi oleh (Schifmann, L.G. Kanuk, 2008) sebagai suatu proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menjelaskan rangsangan sensorik untuk menjadi lebih baik memahami dunia. Proses persepsi membantu kita untuk memahami orang lain; mengapa mereka memiliki ide atau kepercayaan yang berbeda dan mengapa mereka ingin ketat pada posisi atau membatasi sistem kepercayaan mereka; dan juga membantu kita untuk

memhormati kepentingan orang lain dalam hal yang sama penting untuk menghindari konflik (Bokeno, 2011). Persepsi penerima zakat dan manajemen lembaga zakat sangat penting karena mereka adalah pengguna akhir dari layanan zakat dan manajemen ialah pihak yang mengimplementasikan pelayanan yang tepat untuk terwujudnya kinerja yang baik (Wahid, 2011)

Agama sangat penting bagi setiap individu dan dianggap sebagai pilar permanen yang ada dalam kehidupan orang percaya selamanya. Agama adalah salah satu aspek yang paling nyata dalam masyarakat yang memotivasi setiap aspek gaya hidup seseorang, kepercayaan, sikap dan juga perilaku (Hanzaee et al., 2011). (Torgler, 2006) membahas bahwa religiusitas adalah aspek penting yang mempengaruhi moral pajak, yang dirwayatkan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Penulis yang digunakan berbagai ukuran seperti kehadiran gereja, pendidikan agama, peserta aktif sebuah gereja atau lembaga keagamaan, persepsi religiusitas, pengawasan agama dan percaya pada gereja. (Muslichah, 2015) menyebutkan bahwa Semakin tinggi derajat religiusitas, semakin kuat efek penyederhanaan pajak pada perilaku kepatuhan. Religiusitas sangat penting karena menentukan kognisi dan perilaku individu. Agama adalah pengaruh kuat pada perilaku manusia dan penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang terkait dengan agama yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku.

Halal berasal dari kata Arab yang menunjukkan hal-hal yang dapat diterima dalam Islam dan diizinkan oleh hukum Islam, Dalam Islam, sangat penting untuk menjaga halal dan menjauhkan diri dari haram setiap aspek kehidupan (Wilson, 2014). Wilson, 2014 juga menyatakan bahwa hati nurani dan akuntabilitas manusia dapat menjadi area penting di mana halal dapat memainkan peran penting. Karena itu, penting untuk mengkonfirmasi status produk apakah produknya halal atau haram. Masalah halal dan haram sangat penting bagi umat Islam, karena berkaitan dengan klaim agama. Karena itu, memberlakukan hukum apa pun atau peraturan tentang halal atau masalah haram dari umat Islam perlu diperhitungkan (Halim et al., 2014)

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini difokuskan pada data primer yang telah dikumpulkan di KPP Pratama Kota Depok dengan menggunakan kuesioner tertutup. Riset menggunakan skala Likert. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear.

Variabel dependen penelitian ini yaitu persepsi tentang zakat sebagai pengurang pajak yang diprosikan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Saya merasa dapat menerima dan dengan senang hati perihal pemotongan pajak melalui zakat
2. Cara membayar zakat dan mendapatkan potongan pajak dari pembayaran tersebut dapat dimengerti
3. Saya percaya insentif zakat sebagai pemotong pajak dapat memotivasi Muslim untuk membayar zakat dan pajak mereka.

Terdapat dua variabel Independen dalam penelitian ini yaitu :Varibel pertama adalah *religiusitas* yang diprosikan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Ketaatan saya kepada agama mempengaruhi saya untuk patuh membayar zakat dan pajak
- b. Saya memotivasi orang lain untuk menggunakan zakat sebagai potongan pajak agar tidak terjadi *double taxation*
- c. Buku dan informasi mengenai keagamaan saya mempengaruhi saya untuk menggunakan zakat sebagai pemotong pajak

Variabel keduanya adalah *Halal Haram* yang diprosikan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Saya sangat taat terhadap halal dan haram dalam Islam
- b. Saya bertanya kepada ahlinya terkait dengan status halal dan haram suatu transaksi

- c. Saya yakin zakat sebagai potongan pajak diijinkan atau halal menurut agama saya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari wajib pajak muslim yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Depok. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner yang diisi oleh 30 responden.

Hasil Uji Kualitas Data

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Masyarakat Muslim

Keterangan		x1.1	x1.2	x1.3	X1total
x1.1	Pearson Correlation	1	.071	-.134	.552**
	Sig. (2-tailed)		.708	.481	.002
	N	30	30	30	30
x1.2	Pearson Correlation	.071	1	.000	.631**
	Sig. (2-tailed)	.708		1.000	.000
	N	30	30	30	30
x1.3	Pearson Correlation	-.134	.000	1	.512**
	Sig. (2-tailed)	.481	1.000		.004
	N	30	30	30	30
X1total	Pearson Correlation	.552**	.631**	.512**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.004	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat muslim memiliki indikator yang berkorelasi kuat terhadap variabel induknya. Variabel Religiulitas pun demikian, seluruh indikatornya berkorelasi kuat terhadap variabel induknya. (Lihat Tabel 2). Pada tabel 3 ditampilkan nilai korelasi indikator-indikator variabel halal-haram yang menunjukkan adanya hubungan kuat indikator tersebut dengan variabel induknya. Sehingga berdasarkan ketiga tabel tersebut, seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil uji reliabilitas data, ditampilkan pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat kehandalan yang dibuktikan dengan nilai cronbach's alpha 0,650 yang melebihi nilai 0,6. Dengan nilai tersebut, seluruh variabel telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji selanjutnya.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Religiulitas

Keterangan		x2.1	x2.2	x2.3	x2total
x2.1	Pearson Correlation	1	-.218	-.056	.465**
	Sig. (2-tailed)		.247	.767	.010
	N	30	30	30	30
x2.2	Pearson Correlation	-.218	1	-.018	.503**
	Sig. (2-tailed)	.247		.923	.005
	N	30	30	30	30
x2.3	Pearson Correlation	-.056	-.018	1	.585**
	Sig. (2-tailed)	.767	.923		.001
	N	30	30	30	30
x2total	Pearson Correlation	.465**	.503**	.585**	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.005	.001	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Halal-Haram

Keterangan		y1.1	y1.2	y1.3	Ytotal
y1.1	Pearson Correlation	1	-.189	.236	.589**
	Sig. (2-tailed)		.317	.209	.001
	N	30	30	30	30
y1.2	Pearson Correlation	-.189	1	-.071	.445*
	Sig. (2-tailed)	.317		.708	.014
	N	30	30	30	30
y1.3	Pearson Correlation	.236	-.071	1	.684**
	Sig. (2-tailed)	.209	.708		.000
	N	30	30	30	30
Ytotal	Pearson Correlation	.589**	.445*	.684**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.014	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.652	4

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ytotal	.259	30	.000	.863	30	.001

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Regresi

Tabel 6 Hasil Uji Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F
1	.189 ^a	.036	-.036	.87016	.612

Pembahasan

Berdasarkan pengujian di atas, dapat dilihat bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Mamun & Haque, 2015) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak. Berikutnya adalah Aspek Halal dan Haram, menurut pengujian diatas dapat dilihat bahwa Halal dan Haram tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak. hasil uji tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Mamun et al., 2019) yang menyatakan bahwa Aspek Halal dan Haram memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia yang *notabene* nya penduduk Muslim terbesar di dunia, religiusitas dan Halal Haram tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah jumlah responden yang sangat sedikit dan alat uji yang digunakan tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai implikasi dari penelitian ini maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti

adalah 1). Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah responden, 2). Alat uji disarankan menggunakan SEM, 3). Menjadikan variable Halal Haram sebagai variabel pemoderasi dan menambahkan proksi setiap variable.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, N. B., & Rashid, H. M. A. (2010). Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/10.5539/ijef.v2n3p76>
- Adib, C. (2017). Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 28.
- Al-Mamun, A., Haque, A., & Jan, M. T. (2019). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0104>
- Al-Mamun, A., & Haque, A. K. M. A. (2015). Perception of muslim consumers towards tax deduction through Zakat in malaysia: an empirical investigation on muslims in Malaysia. *Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System, March*, 532–549. <http://irep.iium.edu.my/46767/>
- Bokeno, R. M. (2011). Learning in conflict: Revisiting the role of perception. *Development and Learning in Organisations*, 25(2), 15–17. <https://doi.org/10.1108/14777281111108227>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fauzia, A. (2013). *Faith and The State : a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*.
- Halim, M., 'Afifi bin A., Mohd, K. W. binti, Salleh, M. M. M., Yalawae, A., Omar, T. S. M. N. S., Ahmad, A., Ahmad, A. A. binti, & Kashim, M. I. A. bin M. (2014). Consumer Protection of Halal Products in Malaysia: A Literature Highlight. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 68–78. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1109>
- Hanzaee, K. H., Attar, M. M., & Alikhan, F. (2011). Investigating the effect of gender role attitude on the relationship between dimensions of religiosity and new product adoption intention. In *World Applied Sciences Journal* (Vol. 13, Issue 6, pp. 1527–1536).
- Muslichah. (2015). *The effect of tax simplification on taxpayers' compliance behavior: religiosity as moderating variable*. 19(2), 98–108.
- OECD. (2019). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*.
- Purba, J. H. V., Ratodi, M., Mulyana, M., Wahyoedi, S., Andriana, R., Shankar, K., & Nguyen, P. T. (2019). Prediction Model in Medical Science and Health Care. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8, 815-818.
- Rulian, N. A., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Muzaki dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 3(1), 20–33. <https://doi.org/10.29244/jam.3.1.20-33>
- Schiffmann, L.G. Kanuk, H. (2008). *Consumer Behaviour: A European Outlook*. Prentice Hall.
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Wahid, H. (2011). Localization of Zakat Distribution and The Role of Mosque: Perceptions of Amil and Zakat Recipients in Malaysia. *International Zakat Forum 2011*, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Wilson, J. A. J. (2014). The <I>halal</I> phenomenon: An extension or a new paradigm? *Social Business*, 4(3), 255–271. <https://doi.org/10.1362/204440814x14103454934294>

Pengaruh *CEO Power* Dan *Political Connections* Terhadap Pemilihan Auditor Berkualitas

*Auditor, CEO
Power and Political
Connections*

Slamet Wahyudi¹ Dede Nursaman² & Syahril Djaddang³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah, Depok, Indonesia

Email : dede.nursaman@stiehidayatullah.ac.id

185

ABSTRACT

Financial statements must be presented fairly and can be trusted. Improving the quality of financial statements can be done by appointing the services of an independent auditor. This study aims to analyze and find empirical evidence of the effect of CEO power and political connections on the selection of quality auditors. The sample in this study consisted of 45 annual reports of LQ45 index companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018 period. The analysis technique used logistic regression. The results showed that CEOs who have stronger power than share ownership in the companies they lead tend to choose quality auditors. However, political connections through share ownership by the government have no effect in selecting quality auditors in LQ45 index companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

**Submitted:
MARET 2021**

**Accepted:
APRIL 2021**

Keywords: auditor selection, CEO power, political connections

ABSTRAK

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Peningkatkan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara penunjukan jasa auditor independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh CEO power dan political connections terhadap pemilihan auditor berkualitas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 45 laporan tahunan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Teknik analisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan CEO yang memiliki power lebih kuat dari kepemilikan saham pada perusahaan yang dipimpinnya cenderung memilih auditor berkualitas. Namun political connections melalui kepemilikan saham oleh pemerintah tidak berpengaruh dalam memilih auditor berkualitas di perusahaan index LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata Kunci : pemilihan auditor, CEO power, political connections

PENDAHULUAN

(Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, & Siregar, 2012) mengatakan tujuan dari penyajian laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berkaitan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk para pemilik kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Adanya kebutuhan atas informasi keuangan yang berkualitas mengakibatkan pentingnya perusahaan menggunakan jasa auditor independen sebagai perantara kepentingan pemilik dengan manajemen (Arens et al., 2015). Auditor independen melakukan fungsi pengawasan dan menguji informasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen sehingga informasi yang sampai kepada para pemilik kepentingan adalah informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Berkaitan dengan audit yang diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. (DeAngelo, 1982) mengatakan audit merupakan faktor yang sulit diukur kualitasnya secara langsung, adapun proksi yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas audit yaitu ukuran dari kantor akuntan publik, dimana semakin besar ukuran kantor akuntan publik,

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 185-190
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048

maka kantor akuntan publik tersebut akan memberikan layanan audit dengan kualitas lebih tinggi. (Balsam et al., 2005) mengatakan kualitas audit dapat diproksikan dengan *brand* auditor. *Brand* auditor yang hingga kini dikenal adalah *big 4* yang menjadi acuan kualitas audit karena auditor yang memiliki afiliasi dengan auditor *big 4* dipercaya memiliki standar yang tinggi dalam menerapkan proses audit sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.

Tabel 1 Pemilihan auditor perusahaan jasa *non* keuangan yang terdaftar di BEI

Tahun	Non Big 4	Big 4	Grand Total
2015	41	19	60
2016	39	21	60
2017	39	21	60
2018	40	20	60
Grand Total	159	81	240

Berdasarkan data diatas menunjukkan pada perusahaan jasa *non* keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018 lebih banyak perusahaan yang menggunakan jasa auditor *non big 4* yaitu 159 dibandingkan perusahaan yang menggunakan jasa auditor *big 4* yaitu 81. Hal ini menjadi sebuah fenomena dimana perusahaan yang terdaftar di BEI dengan kepemilikan saham yang dimiliki masyarakat umum dan diharapkan menyajikan laporan keuangan yang telah dipersiapkan dengan baik dan diaudit secara transparan oleh auditor berkualitas dalam hal ini *big 4* masih lebih banyak memilih auditor *non big 4*.

Adanya fenomena pemilihan auditor *non big 4* oleh perusahaan jasa *non* keuangan yang terdaftar di BEI ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan analsia lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam memutuskan untuk memilih auditor *big 4* atau *non big 4* sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pemegang kepentingan.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan auditor diantaranya (Ouyang et al., 2015) mengungkapkan bagaimana peranan *CEO* dalam pemilihan auditor. Hasilnya *CEO* yang memiliki *power* lebih kuat cenderung memilih auditor berkualitas sebagai sinyal untuk memberikan laporan keuangan yang sangat berkualitas. Dilain pihak penelitian mengani *CEO power* yang dilakukan di Indonesia oleh (Palembangan & Dewi, 2017) mengatakan dengan adanya kekuasaan *CEO* yang tinggi, perusahaan cenderung memilih auditor *non big 4*.

Berikutnya (Guedhami et al., 2014) mengidentifikasi perusahaan publik yang memiliki *political connections* lebih memilih audior *big 4* demi menunjukkan bahwa orang dalam perusahaan ingin meningkatkan transparansi akuntansi untuk meyakinkan investor dari luar bahwa mereka menahan diri dari memanfaatkan koneksi untuk menguasai sumber daya perusahaan. Sementara (Habib et al., 2017) mengatakan transaksi dengan pihak yang berelasi sebagai faktor pendorong perusahaan yang memiliki koneksi politis untuk memilih auditor *non big 4*.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh *CEO power* dan *political connections* terhadap pemilihan auditor berkualitas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

(Jensen & Meckling, 1976) mengatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik (investor) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa hal atas nama pemilik (investor) dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada mereka. Hubungan tersebut ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan (kepentingan pemilik) sementara agen cenderung memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara agent dan principal.

Dalam bukunya (Arens et al., 2015) mengatakan *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. *CEO* di Indonesia perannya lebih dikenal dengan direktur utama yakni orang yang memimpin dan bertanggung jawab menentukan strategi dan visi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan serta dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Atas tanggung jawabnya tersebut *CEO* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi kelangsungan perusahaan ke depan termasuk dalam pemilihan auditor.

Merujuk dari literatur (Finkelstein, 1992) mendefinisikan *power* dari dimensi keuangan perusahaan adalah kapasitas seseorang untuk mengerahkan kehendaknya dimana kapastias itu terdiri dari empat sumber kekuasaan yaitu kekuasaan struktural, kekuasaan kepemilikan, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan kehormatan. *CEO power* dapat didefinisikan sebagai sejauh mana kapasitas *CEO* dalam mengerahkan kehendaknya untuk memimpin perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai apa yang dikehendaki. (Faccio, 2006) menyebutkan *political connection firms* dapat dilihat sebagai suatu kondisi dimana suatu perusahaan setidaknya salah satu dari *top officer*, pemegang saham besar atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus yang ternama. (Anugerah Endriawan Sudarno, 2015; Prayugi, 2015) mengatakan perusahaan dengan kepemilikan oleh negara (BUMN) tidak lepas dari unsur politik sehingga dianggap memiliki koneksi politik yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis termasuk pemilihan auditor.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan *LQ45* yang terdaftar di BEI periode 2018
 - b. Memiliki data lengkap untuk semua variabel penelitian dalam periode penelitian
- Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik, dikarenakan pengujian menggunakan variabel dependen dengan ukuran *binary* atau *dummy*. Variabel dependen yaitu pemilihan auditor yang diproksikan dengan auditor *big 4* dan *non big 4*. Variabel Independen pertama adalah *CEO power* yang diproksikan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh direktur utama dalam perusahaan. Pengukuran yang dilakukan dengan memberikan angka 1 jika CEO memiliki kekuasaan struktural dan kekuasaan kepemilikan dari suatu perusahaan, kemudian angka 0 jika CEO hanya memiliki kekuasaan struktural atau sama halnya jika direktur utama hanya menjabat sebagai CEO. Variabel independent kedua adalah *political connections* yang diproksikan dengan perusahaan yang memiliki hubungan politik melalui kepemilikan oleh negara. Pengukuran yang dilakukan dengan memberikan angka 1 jika perusahaan adalah BUMN, kemudian angka 0 jika perusahaan adalah bukan BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang masuk dalam indeks *LQ45* periode Juli-Desember 2018 sehingga jumlah sampel sebanyak 45.

Analisa Data

Tabel 2 Hosmer and Lemeshow's Test Goodness of Fit Test

<i>Chi square</i>	<i>Df</i>	<i>Sig.</i>
0,004	2	0,998

Sumber : data diolah

Nilai *chi square* tabel untuk derajat bebas (df) 2 pada taraf signifikan 0.1 adalah sebesar 4,605. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui nilai *chi square hosmer and lemeshow* 0,004 dengan signifikan 0,998 dan derajat bebas (df) 2. Dari hasil uji *hosmer and lemeshow's test goodness of fit test* pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *chi square* kurang dari nilai tabel *chi square* ($0,004 < 4,605$) dan signifikan lebih besar dari α ($0,994 > 0,1$) yang berarti tidak ada perbedaan antara model dengan data observasi sehingga dapat disimpulkan bahwa model dengan data layak (*fit*) untuk digunakan.

Tabel 3 Variabel in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)
<i>CEOPOW</i>	1,317	0,749	3,094	1	0,079	3,733
<i>POLCON</i>	-,0257	0,713	0,130	1	0,719	0,773
<i>Constant</i>	0,500	0,487	1,052	1	0,305	

Sumber : data diolah

Tabel 3 diatas merupakan tabel yang digunakan untuk menguji hipotesis dimana jika nilai *wald* lebih besar dari nilai *chi square* tabel atau nilai signifikansi dibawah *alpha* yang ditentukan maka variabel tersebut dianggap berpengaruh signifikan. Nilai *chi square* tabel untuk derajat bebas (df) 1 pada taraf signifikansi 0,1 adalah sebesar 2,705. Taraf signifikansi atau *alpha* yang digunakan adalah 0,1 hal ini karena sampel yang digunakan hanya 45 dan 1 periode yaitu 2018. Variabel *CEO power (CEOPOW)* memiliki nilai *wald* lebih besar dari nilai *chi square* tabel ($3,094 > 2,705$) dengan signifikansi dibawah *alpha* ($0,079 < 0,1$) sehingga dapat dikatakan *CEO power* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan auditor berkualitas. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu *CEO power* berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas. Variabel *political connections (POLCON)* memiliki nilai *wald* lebih kecil dari nilai *chi square* tabel ($0,130 < 2,705$) dengan signifikansi diatas *alpha* ($0,719 > 0,1$) sehingga dapat dikatakan *political connections* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan auditor berkualitas. Hasil ini menolak hipotesis yang diajukan yaitu *political connections* berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terbukti *CEO power (CEOPOW)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan auditor berkualitas pada perusahaan yang masuk kedalam indeks *LQ45* di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga dapat diketahui *CEO* yang mempunyai saham pada perusahaan yang dipimpinnnya cenderung untuk menggunakan auditor berkualitas yaitu *big 4* pada perusahaan yang masuk kedalam indeks *LQ45* di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ouyang et al., 2015) yang mengatakan *CEO* yang memiliki *power* lebih kuat cenderung memilih auditor berkualitas. *CEO* yang memiliki *power* lebih kuat dengan kepemilikannya di perusahaan memberikan sinyal kepada para pemegang kepentingan bahwa perusahaan berupaya menyajikan laporan yang sangat berkualitas dengan memilih auditor *big 4*. Selain itu, perusahaan menjadi sangat diminati investor, hal ini terbukti dengan sampel yang diambil yaitu perusahaan yang masuk kedalam indeks *LQ45* di Bursa Efek Indonesia dimana hanya perusahaan dengan kapitalisasi besar yang masuk dalam indeks tersebut.

Berikutnya *political connections (POLCON)* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor berkualitas. Hipotesis yang diajukan tidak terdukung, sehingga dapat diketahui perusahaan yang memiliki *political connections* melalui kepemilikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas yaitu *big 4* pada perusahaan yang masuk kedalam indeks *LQ45* di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan (Guedhami et al., 2009) yang mengidentifikasi perusahaan publik yang memiliki *political connections* lebih memilih auditor *big 4* demi menunjukkan bahwa orang dalam perusahaan ingin meningkatkan transparansi akuntansi untuk meyakinkan investor dari luar bahwa mereka menahan diri dari memanfaatkan koneksi untuk menguasai sumber daya perusahaan. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana

kepemilikannya adalah masyarakat umum mendapatkan tuntutan untuk menggunakan auditor berkualitas tanpa melihat adanya kepemilikan oleh pemerintah, hal ini juga dapat dilihat dari sampel yang menunjukkan dari 15 perusahaan BUMN 10 diantaranya memilih auditor *big 4*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *CEO* yang memiliki *power* lebih kuat melalui kepemilikan saham di perusahaan yang dipimpinnya cenderung memilih auditor berkualitas perusahaan yang masuk kedalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Namun penelitian ini juga menemukan tidak ada hubungan antara *political connections* melalui kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap pemilihan auditor berkualitas oleh perusahaan yang masuk kedalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang masuk kedalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan hanya satu periode yaitu 2018. Selain itu penelitian ini hanya meneliti dua variabel independen yaitu *CEO power* dan *political connection*. Sebagai implikasi dari penelitian ini maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 1). Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan menggunakan proksi lain untuk *political connections* 2). Penelitian disarankan menggunakan sampel selama lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Endriawan Sudarno. (2015). Pengaruh tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan kap dan penetapan fee audit pada perusahaan yang terdaftar di bej. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(1), 1–8.
- Arens, A. A., Elder, & Beasley. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance. Pendekatan Terintegrasi* (15th ed.). Erlangga.
- Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. S. (2005). Auditor Industry Specialization and Earnings Quality. *SSRN Electronic Journal*, 1–46. <https://doi.org/10.2139/ssrn.436260>
- DeAngelo, L. E. (1982). Mandated successful efforts and auditor choice. *Journal of Accounting and Economics*, 4(3), 171–203. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(82\)90008-8](https://doi.org/10.1016/0165-4101(82)90008-8)
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Finkelstein, S. (1992). Power in Top Management Teams. *The Academy of Management Journal*, 35(3), 505–538. <https://doi.org/10.1057/9781137294678.0702>
- Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. (2009). Auditor choice in privatized firms : Empirical evidence on the role of state and foreign owners. *Journal of Accounting and Economics*, 48(2–3), 151–171. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.08.003>
- Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. (2014). Auditor choice in politically connected firms. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 107–162. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12032>
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections, related party transactions, and auditor choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. V. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat.
- Ouyang, B., Liu, Z., & Sun, C. (2015). CEO Power and Auditor Choice. *International Journal of Finance & Banking Studies* (2147-4486), 4(4), 44–51. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v4i4.39>

- Purba, J. H. V., Ratodi, M., Mulyana, M., Wahyoedi, S., Andriana, R., Shankar, K., & Nguyen, P. T. (2019). Prediction Model in Medical Science and Health Care. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8, 815-818.
- Palembangan, C., & Dewi, C. N. (2017). Kekuasan CEO Dan Pemilihan Auditor. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 13(2).
- Prayugi, G. (2015). Pengaruh Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, Dan Earnings Management Terhadap Tipe Auditor Dan Audit Fees. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(2), 109–122.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 15–26. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26>

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan

*Firm Value and
Corporate Social
Responsibility*

Muhlis¹, Karlina Sari Gultom²

^{1,2}Program Studi Manajemen, STIE Dewantara Bogor-Jawa Barat

Email : mmuhlis2013@gmail.com

191

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of disclosure of Corporate Social Responsibility (SCR) on the value of state-owned enterprises (BUMN) in the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used is data from three mining companies in the 2013-2018 period. The reference for CSR disclosure in this study uses the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines which consist of 3 indicators, namely economic indicators, environmental indicators and social indicators. The analysis technique of this research use multiple linear regression. The partial test results show that environmental indicators and social indicators have an effect on firm value. Simultaneous test results show that CSR has an influence on firm value. Social indicators are indicators that have the greatest influence on firm value.

**Submitted:
MARET 2021**

**Accepted:
APRIL 2021**

Keywords: *firm value, corporate social responsibility, economic indicators, environmental indicators, social indicators*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (SCR) terhadap nilai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data tiga perusahaan pertambangan pada periode 2013-2018. Acuan pengungkapan CSR dalam penelitian ini menggunakan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) yang terdiri dari tiga Indikator yaitu indikator ekonomi, indikator lingkungan dan indikator sosial. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa indikator lingkungan dan indikator sosial yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Indikator sosial merupakan indikator yang memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: nilai perusahaan, *corporate social responsibility*, indikator ekonomi, indikator lingkungan, indikator sosial

PENDAHULUAN

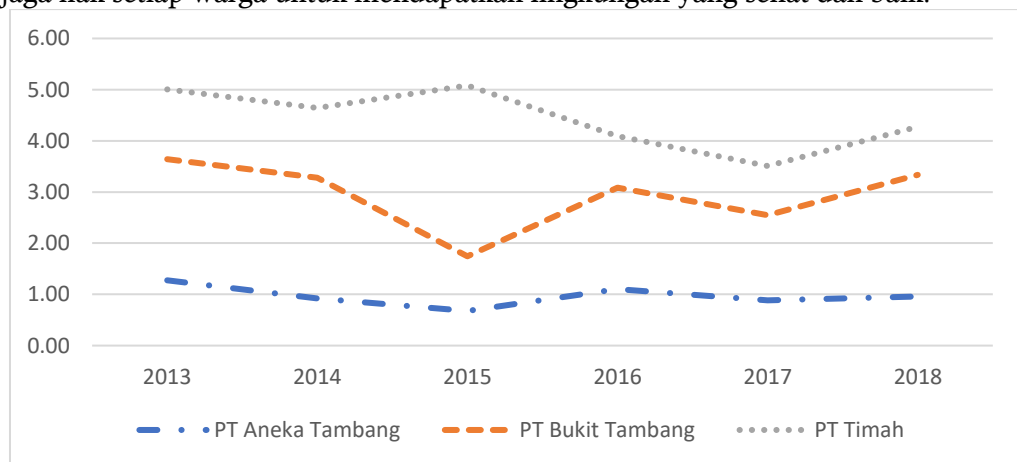
Secara umum setiap perusahaan memiliki tujuan utama dalam menjalankan roda perusahaan, dimana tujuan utama sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan (profit). Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menaati semua peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, mulai dari aturan perburuhan hingga aturan kelestarian lingkungan. Industri pertambangan merupakan industri yang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan CSR. Tanpa menamfikan dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Selama ini industri pertambangan dianggap sebagai sumber kerusakan lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam, dan hanya mementingkan keuntungan semata. Kemajuan teknologi informasi sekarang ini menurut Wahjudi dan Sukmasari (2014) memudahkan masyarakat

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 191-198
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 - 3048

dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. Jika perusahaan tidak menunjukkan komitmen sosial yang baik di suatu daerah, informasi ini akan cepat tersebar luas ke berbagai penjuru dunia yang akibatnya akan terbentuknya citra yang negatif. Sebaliknya, jika perusahaan menunjukkan komitmen sosial yang tinggi terhadap kegiatan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan, penanggulangan bencana alam, maka akan terbentuk citra positif bagi perusahaan. Salah satu konsep dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang perlu dilakukan sebagai komitmen antara pimpinan dan bawahan yang populer dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keberhasilan CSR sendiri dapat diukur melalui indikator yang disebut dengan corporate social performance. Salah satu konsep dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang perlu dilakukan sebagai komitmen antara pimpinan dan bawahan yang populer dikenal dengan CSR. Keberhasilan CSR sendiri dapat diukur melalui indikator yang disebut dengan corporate social performance.

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam mengelola sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan perusakan lingkungan. Perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia ada yang dimiliki oleh perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Beberapa perusahaan tambang yang dimiliki BUMN diantaranya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Tambang Tbk dan PT Timah Tbk. Pada Gambar 1 dapat dilihat kondisi nilai perusahaan dari tahun 2013-2019 dengan trend yang menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan, salah satunya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Listiyani (2017) menyebutkan pertambangan salah satu kegiatan pembangunan ekonomi yang mengacu kepada pembangunan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya rentan terhadap pencemaran perusakan lingkungan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengatur dalam proses pertambangan sehingga terjaga hak setiap warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik.



Sumber: Indonesia Stock Exchange (2019)

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Nilai Perusahaan Pertambangan Tahun 2013-2018

Perusahaan pertambangan yang dijadikan objek penelitian hanya perusahaan pertambangan yang berada di bawah naungan BUMN, karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki amanat yang diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang mengharuskan setiap BUMN melakukan penyisihan masing-masing maksimal 3% dari laba bersih setelah pajak untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perusahaan yang tetap menjalankan berkomitmen menjalankan CSR akan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Ghoul et al (2011) menyebutkan bahwa semakin tinggi kegiatan CSR yang diungkapkan oleh

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai saham. Peningkatan nilai saham dikarenakan apresiasi positif dari pasar terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas CSR. CSR akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan melalui penambahan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. (Mc Williams dan Siegel, 2001; Scholtens, 2008). Menurut Sujana (2017) kondisi keuangan perusahaan tidak dapat menjamin keberlanjutan pertumbuhan perusahaan. Kegiatan para pemangku kepentingan perusahaan dalam aktivitas sosial dan lingkungan akan menjamin keberlanjutan perusahaan. Pengungkapan aktivitas CSR oleh perusahaan merupakan media yang informatif bagi pemegang saham yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan perusahaan (Walter, 2014; Lii and Lee, 2012). Rustiarini (2010) menyebutkan penyusunan informasi pengungkapan CSR sangat penting bagi peningkatan nilai perusahaan.

Cheng dan Christiawan (2011) menyebutkan bahwa konsep pelaporan pengungkapan CSR yang digagas oleh GRI merupakan konsep *sustainability report*. Metode *triple bottom line* digunakan dalam *sustainability report*, dimana dalam pelaporan pengungkapan CSR tidak hanya melaporkan perspektif ekonomi tetapi harus juga melaporkan perspektif lingkungan dan sosial. Harga saham yang merupakan indikator dari kinerja manajemen tidak lagi dilihat dari pendapatan laba yang diperoleh, tetapi harus mencapai nilai sosial dan lingkungan sesuai *triple bottom line* (Elkington, 1997). Sehingga menurut Kamil dan Antonius (2012) CSR merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai kinerja sosial dan lingkungan.

Nilai perusahaan merupakan indikator nilai pasar saham yang sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. Terdapatnya peluang investasi dapat merupakan sinyal positif dari pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, kondisi ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Tobin's q merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yang merupakan bagian kinerja perusahaan. Tobin's q menunjukkan suatu kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Nilai Tobin's q merupakan gambaran suatu peluang kondisi investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, et al 1989) atau merupakan potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin, 1969).

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berkaitan dengan penelitian ini, variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen yang diuraikan sebagai berikut: Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan (Y) yang diukur menggunakan proksi rasio Tobin's Q. dan Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab adanya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Indikator GRI yang digunakan yaitu: indikator ekonomi (X1) yang dilihat dari 200 indikator, indikator lingkungan (X2) yang dilihat dari 300 indikator dan indikator sosial (X3) yang dilihat dari 400 indikator.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan periode 2013-2018 perusahaan BUMN pada sektor pertambangan yang masih aktif pada periode 2019. Perusahaan tambang yang terpilih adalah 1) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, 2) PT Bukit Tambang (Persero) Tbk dan 3) PT Timah (Persero) Tbk. Data-data tersebut dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji-uji yang dilakukan adalah sebagai berikut: Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji hetroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji auto kolerasi), Uji regresi linier berganda, Uji hipotesis (uji t dan uji f), Uji determinasi

PEMBAHASAN

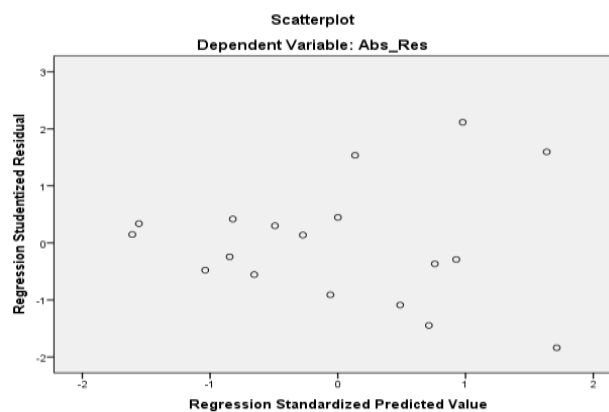
Uji normalitas dalam pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara

normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil uji dapat diketahui nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.200. Nilai Sig tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0.05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.49001525
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.110
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik *scatterplot*. antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Berdasarkan hasil uji *scatterplot* pada Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 2 dengan hasil uji untuk variabel indikator ekonomi memiliki nilai tolerance sebesar 0.765 dan VIF sebesar 1.307, indikator lingkungan memiliki nilai tolerance sebesar 0.764 dan VIF sebesar 1.308, Indikator Sosial memiliki nilai tolerance sebesar 0.711 dan VIF sebesar 1.406 dapat dikatakan semua variabel tidak terjadi multikolinearitas. Variabel bebas tidak terjadi multi kolineritas dapat dilihat apabila nilai tolerance diatas 0.05 dan nilai VIF dibawah 5.00.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		<i>Tolerance</i>	VIF
Indikator Ekonomi		0.765	1.307
Indikator Lingkungan		0.764	1.308
Indikator Sosial		0.711	1.406

Uji autokorelasi dilakukan untuk menghindari terjadinya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya dalam suatu regresi linier. Dalam regresi linier disyaratkan tidak terjadi autokorelasi, jika terdapat maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat

dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* dapat dilihat pada Tabel 6 dengan nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1.889. Sedangkan nilai dari tabel *Durbin-Watson* dengan signifikansi 0.05 dan jumlah data (n) = 18, serta k =3 (jumlah variabel independen) diperoleh nilai dl sebesar 0.9331 dan du 1.6961. Nilai du sebesar 1.6961 lebih kecil dari *Durbin-Watson* (d) sebesar 1.889 dan lebih kecil dari 4-du (1.6961 < 1.889 < 2.3039) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
<i>(Constant)</i>	-1.666	1.422		-1.172	0.261
<i>Indikator Ekonomi</i>	1.111	1.366	0.169	0.813	0.430
<i>Indikator Lingkungan</i>	-4.305	1.505	-0.594	-2.860	0.013
<i>Indikator Sosial</i>	6.866	2.092	0.707	3.282	0.005

Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis regresi linear berganda di atas dapat diperoleh persamaan regresi dengan rumus yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -1.666 + 1.111 X_1 - 4.305 X_2 + 6.866 X_3 + \varepsilon$$

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 3 dapat dilihat variabel yang memiliki tanda negatif hanya indikator lingkungan, sedangkan indikator ekonomi dan indikator sosial memiliki arah yang positif. Tanda ini menunjukkan arah dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari koefisien regresi dapat diketahui bahwa indikator sosial dengan nilai paling besar (6.866), sehingga indikator sosial merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat dilihat pada Tabel 3 dengan melihat hasil t-hitung atau nilai signifikan dari variabel bebas. Ho diterima bila t-hitung \leq t-tabel atau nilai signifikan \geq 0.05. Ho diterima memiliki arti bahwa indikator ekonomi/lingkungan/sosial secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nilai t-(14, 0.05) yang diperoleh dari table t untuk model dalam penelitian ini adalah 1.761. Hasil uji t untuk model penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	t-tabel	t-hitung	Keputusan
Indikator Ekonomi (X1)	1.761	0.813	Ho diterima
Indikator Lingkungan (X2)	1.761	-2.860	Ho ditolak
Indikator Sosial (X3)	1.761	3.282	Ho ditolak

Berdasarkan hasil uji-t maka indikator lingkungan dan indikator sosial yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN sektor pertambangan. Indikator lingkungan memiliki pengaruh dengan tanda negatif yang berarti setiap kenaikan indikator lingkungan sebesar 4.305 satuan maka akan terjadi penurunan nilai perusahaan sebesar satu satuan. Sedangkan indikator sosial memiliki pengaruh dengan tanda positif yang berarti setiap kenaikan indikator sosial sebesar 1.111 satuan maka akan terjadi peningkatan nilai perusahaan sebesar satu satuan. Indikator ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa investor tidak cukup yakin dengan informasi sukarela seperti pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh manajemen, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa investor tidak menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk *decision making*. Hal ini disebabkan karena perusahaan BUMN pada sektor pertambangan pastinya akan memiliki keuntungan/*profit* yang besar. Dengan demikian, indikator ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Indikator lingkungan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, hal ini sesuai dengan sifat perusahaan pertambangan yang sangat erat hubungannya dengan

sumber daya alam dan lingkungan. Perusahaan pertambangan yang sifatnya melakukan perubahan struktur terhadap alam dan lingkungan dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sehingga semakin banyak pengungkapan indikator lingkungan akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Indikator sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan semakin besar pengungkapan indikator perusahaan dan disajikan dalam laporan tahunan perusahaan akan membuat investor lebih tertarik terhadap perusahaan. Tertariknya investor terhadap perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Indikator sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini juga membuktikan keberadaan perusahaan yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 5. Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	0.404	3	0.135	1.275	0.321
Residual	1.476	14	0.105		
Total	1.880	17			

Hasil uji f dapat dilihat pada Tabel 5, Uji simultan atau uji f digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriteria dari uji f adalah Ho diterima jika nilai f-hitung \leq f-tabel atau nilai signifikan \geq 0.05. Ho diterima memiliki arti CSR tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai f-hitung dapat dilihat pada Tabel 5 dengan nilai 1.275 dan nilai f tabel (3, 14, 0.05) diperoleh dari tabel f dengan nilai 3.34. Sehingga hasil uji f pada model penelitian ini menolak Ho yang memiliki arti secara bersama-sama indikator ekonomi, indikator lingkungan dan indikator sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan Benne dan Moningga (2020) yang menyebutkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Begitu juga Saputra dan Setiawan (2017) menyebutkan pengungkapan CSR pada laporan lebih luas akan meningkatkan nilai perusahaan.

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0.734	0.538	0.439	0.5399705	1.889

Hasil uji determinasi dapat dilihat pada Tabel 6. dengan memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.439. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variasi perubahan variabel indikator ekonomi, indikator lingkungan dan indikator sosial dapat menjelaskan variasi perubahan nilai perusahaan sebesar 43.9 persen, sedangkan 56.1 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dengan berdasarkan indikator GRI menunjukkan bahwa secara parsial indikator lingkungan dan indikator sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN sektor pertambangan, sedangkan indikator ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN sektor pertambangan. Secara simultan indikator GRI tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN sektor pertambangan. Dari variabel yang berpengaruh maka indikator sosial memiliki pengaruh yang paling besar terhadap nilai perusahaan BUMN sektor pertambangan. Dalam penelitian ini perubahan variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan sebesar 43.9 persen oleh indikator GRI.

DAFTAR PUSTAKA

Benne, K., K., & Moningga, P. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel

- Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI. *Klabat Accounting Review*, 1(1), 56-70.
- Amanda, A. L., Efrianti, D., & Marpaung, B. (2019). Analisis Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laba Dan Rugi Terhadap Koefisien Respon Laba (Erc) Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), 188-200.
- Astrini, D., Juanda, B., & Achسانی, N. A. (2016). Impact Of Redenomination On Price, Volume, And Value Of Transaction: An Experimental Economic Approach. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 19(2), 1-32.
- Cheng, M., & Christiawan, Y., J. (2011). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Abnormal Return. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 23-35.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business*, Capstone, Oxford.
- Ghoul, E., I., Sadok, O., Guedhami, C., Y., Chuck, K., & Mishara, D., R. (2011). Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital. *Journal of Banking & Finance*, 35 (9), 2388-2406.
- Haruman, T. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. Pontianak: *Simposium Nasional. January-Februari*, 2-17.
- Kamil, A., & Antonius, H. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility. *Media Riset Akuntansi*, 2(1), 2-17.
- Karina, K., & Sutarti, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 111-120.
- Lang, L., H., P., Stulz, R., M., & Walkling. (1989). Managerial Performance, Tobin's q, and the Gains from Successful Tender Offers. *Journal of Financial Economics*, 137-154.
- Lii, Y., & Lee, M. (2012). Doing Right Leads to Doing Well: When the Type of CSR and Reputation Interact to Affect Consumer Evaluations of the Firm. *Journal of Business Ethics*, 105(1), 69-81.
- Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara. *Jurnal Al'Adl*, 9(1), 67-86.
- Marlina, T., & Haryanto, R. A. (2018). Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 85-93.
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. *The Academic of Management Review*, 21(5), 117-127.
- Mulyana, M., & Sulistiono, S. (2016). Analisis Determinasi Adopsi E-Commerce Dalam Pemberdayaan Pengrajin Alas Kaki di Ciomas Kabupaten Bogor.
- Rainanto, B. H., & Fathiah, R. (2020). PKM Pembekalan Pelaku UMKM Kota Bogor Tentang Strategi Diferensiasi Dan Positioning Untuk Bertahan Dan Menang. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 97-107.
- Rustiarini, N., W. (2010). Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaanan. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. AKPM_12*.
- Saputra, W., S., & Setiawan, T. (2018). Pengaruh Corporate social responsibility disclosure (CSR D), Nilai perusahaan dan profitabilitas. *Balance Vocation Accounting Journal*, DOI: 10.31000/bvaj.v2i1.963.
- Scholtens, B. (2008). A Note on the Interaction between Corporate Social Responsibility. *Ecological Economics*, 68, 46-55

- Stella, L. A., & Puspitasari, R. (2020, May). Analysis of Bank Rating with RGEC Method Case Study at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the Period 2013–2017. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 240-245). Atlantis Press.
- Sujana. (2017). Pengaruh CSR dan Kepemilikan Managerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Sukanto, A., & Nurachmad, E. (2020). Pelatihan Persiapan Studi Lanjut Di Jurusan Teknologi Informasi. *Jurnal Abdimas*, 4(1), 61-70.
- SYAFITRI, H. W., Nurendah, Y., & Mashadi, M. (2013). *STRATEGI PELAYANAN PADA PENJUALAN SEPEDA MOTOR HONDA PADA PT. SANPRIMA SENTOSA BOGOR* (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan).
- Tobin's, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, 12- 29.
- Wahyudi, H., S., & Sukmasari, M., P. (2014). Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 3(1), 13-24.
- Walter, B., L. (2014). Corporate Social Responsibility Communication: Towards a Phase Model of Strategic Planning. *Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice*. DOI: [10.1108/S2043-9059\(2014\)0000006022](https://doi.org/10.1108/S2043-9059(2014)0000006022).

Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Taxpayer
Compliance and
Tax Policies

Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil

STIE Muhammadiyah Jakarta

E-Mail : nining1975@yahoo.com dan , firhanseafa@gmail.com

199

Submitted:
MARET 2021

Accepted:
APRIL 2021

ABSTRACT

The e-filing policy is made to make it easier for individual taxpayers to report their tax returns, tax sanctions that will pressure individual taxpayers to continue to comply, and awareness of taxpayers also needs to be increased because of awareness of taxpayers. The population used in this study is the Individual Taxpayer registered at the Setiabudi Tax Office IV. In this study using the Probability sampling method with a simple random sampling type. The data source in this study is the taxpayer as the respondent chosen randomly. This research is using Primary data needed is data related to the variables use, with 112 respondents.. This study uses the partial least square (PLS). The test results show that e-filing policy has a positive effect on taxpayer compliance, the existence of the E-Filing Policy makes it easier for individual taxpayers to report their SPT annually and saves time, cost and effort Tax Sanction has a negative effect on Taxpayer Compliance, there are still many individual taxpayers who ignore the existence of tax sanctions and there are still many taxpayers who are given sanctions for not reporting their SPT on time and Taxpayer Awareness has an effect on Taxpayer Compliance. that the awareness of individual taxpayers, the higher the understanding and implementation of tax obligations, thereby increasing compliance. From the results obtained e-filing policy variables and Taxpayer Awareness have a positive effect on the compliance of individual taxpayers

Keywords: E-Filing Policy, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Kebijakan e-filing dibuat untuk memudahkan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT nya, sanksi perpajakan yang akan menekan wajib pajak orang pribadi untuk terus patuh, dan kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan karna dengan adanya kesadaran wajib pajak orang pribadi, Pada penelitian ini menggunakan metode Probability sampling dengan jenis simple random sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai responden yang dipilih secara acak. Penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan data data perhitungan yang diperoleh, dengan jumlah responden 112. Penelitian ini menggunakan Model *Partial Least Square* (PLS). Tujuan Penelitian bertujuan untuk menguji kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Setiabudi IV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kebijakan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan adanya Kebijakan *E-Filing* memudahkan Wajib Pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT setiap tahun nya dan lebih menghemat waktu, biaya, serta tenaga Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, masih banyak Wajib Pajak yang menghiraukan adanya Sanksi Perpajakan dan masih banyak Wajib Pajak yang diberikan Sanksi karna tidak Melaporkan SPT tepat waktu. dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi semakin tinggi maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan. Dari hasil yang didapat

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 9 No. 1, 2021
pg. 199-206
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048

variabel Kebijakan e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : kebijakan e-filing, sanksi perpajakan, kesadaran, kepatuhan, wajib pajak

PENDAHULUAN

Tercapainya rencana penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran serta wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dalam sistem pemungutan pajak. Penerimaan pendapatan dari pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2009 :4) menyatakan bahwa Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu, faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-Undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Contoh jika Wajib Pajak baik badan maupun wajib pajak orang pribadi membayar dan melaporkan pajak tertanggungnya tepat waktu, maka Wajib Pajak orang pribadi tersebut dapat dianggap patuh.

Tabel 1 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2015	100%	81,97%	81,97%
2	2016	100%	81,60%	81,60%
3	2017	100%	89,68%	89,68%
4	2018	100%	92,24%	92,24%
5	Per Oktober 2019	100%	64,56%	64,56%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2015-2019

Menurut Susanto (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, Pemerintah memberikan fasilitas pelayanan elektronik salah satunya adalah E-filing. Fasilitas E-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui system online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktur Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk memperhitungan, pengisian, sekaligus penyampaian SPT. E-Filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak.

Penyampaian SPT melalui pelayanan e-filing atau e-SPT pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP- 05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain 2 (dua) jenis SPT Tahunan WP OP 1770 S dan 1770 S, untuk jenis SPT lainnya dilaporkan melalui

Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal ini penulis menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman, Almunawaroh, dan Marliana (2015) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyida (2014) menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Rusmadi (2017) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu membuat penerimaan negara meningkat drastis. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ngadiman & Huslin (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Winerungan (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Suharyono (2019) mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

E-Filing adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP) (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). E-Filing pajak merupakan suatu bentuk pengadopsian teknologi yang dilakukan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal administrasi perpajakan guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam undang- undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Sutedi (2011 : 221), sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono : 2010 ; 68). Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (fikriningrum 2012). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak orang pribadi sangat minim di Indonesia, banyak wajib pajak orang pribadi yang ragu melaporkan sebagian hasil yang didapatkan oleh wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak. Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berbunyi : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Soemitro (2004) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi tabestand yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dalam rangka UU PPh 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Subjek pajak adalah orang atau badan yang berkedudukan di Indonesia. Obyek pajak merupakan setiap tambahan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengembangan Hipotesis

202

Pengaruh Kebijakan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.. E-Filing merupakan sistem yang dibuat untuk mendukung terselenggaranya good governance, sesuai dengan tujuan modernisasi perpajakan. Sistem e-Filing dirancang untuk mengurangi dan menghilangkan interaksi langsung antara wajib pajak dengan aparat pajak sehingga potensi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat dicegah. E-Filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurlaela (2018) dan Agustiningasih, Isroah (2016) bahwa penerapan E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

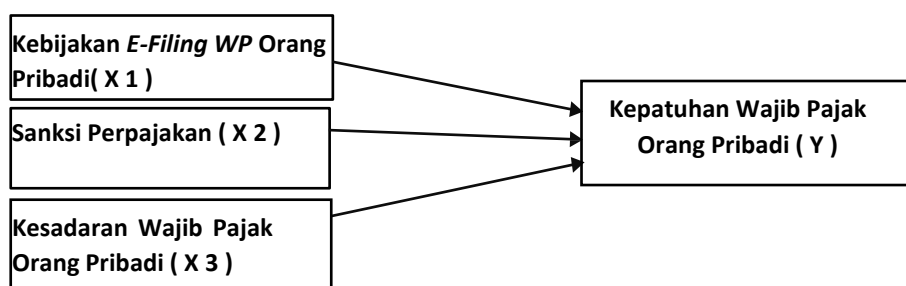
Hipotesis 1 : Kebijakan E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Diharapkan dengan adanya peraturan sanksi yang diterapkan tersebut dapat membuat wajib pajak orang pribadi semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Tryana (2015) dan Nurlis (2015) bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. **Hipotesis 2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi.**

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jatmiko (2016), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2016) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi

Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak. Hipotesis 3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (pengaruh kebijakan E-filling, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak) terhadap variabel *dependen* (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistika. Variabel-variabel yang diteliti berkenaan dengan topik pembahasan adalah: (1) Kebijakan E-filling wajib pajak orang pribadi sebagai variabel *independent* (X_1), (2) Sanksi perpajakan sebagai variabel *independent* (X_2), (3) Kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel *independent* (X_3), (4) Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel terikat atau *dependent variable* (Y)

Penelitian dilakukan pada Desember 2019 – Agustus 2020, di kantor pajak pratama Setiabudi IV, Tebet Jakarta Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Setiabudi IV, Tebet Jakarta Selatan. Jumlah populasi Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan bulan Desember 2019 adalah 58.752 orang. Untuk menentukan ukuran sampel minimal dari populasi terpilih, periset menggunakan tabel rumusan yang dikembangkan oleh Rea & Parker dalam Fuad Mas'ud (2004, 82). Berdasarkan tabel rumusan tersebut, sampel yang diperlukan dari populasi 58,752 Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar sampai dengan bulan Desember 2019 di KPP Pratama Jakarta Setiabudi IV pada tingkat Keyakinan (*confidence level*) 95% dan dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) 5%; didapatkan ukuran sampel yang diperlukan/generalisasi populasi (n) sebanyak 97.

Rumus untuk melakukan penyesuaian n (yakni, n') adalah:

$$n' = \frac{n}{(e)(r)}$$

Estimasi Ukuran Sampel Penelitian:

$e = 90\%$ Populasi target akan bersedia untuk mengisi kuesioner

$r =$ Tingkat tanggapan (*responden rate*) = sekitar 87%

$$N'(\text{penyesuaian } n) = \frac{97}{(90)(87)} = 122,81$$

Jadi, jumlah sampel yang diperoleh untuk memenuhi ukuran sampel minimal (n) adalah 123 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan yang bersifat tertutup kepada responden karena telah disediakan alternatif jawaban yang mungkin dipilih sehingga responden merasa mudah dalam mengisi kuesioner. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu urvai dengan kuesioner dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi (R-Square), Hasil Penelitian T - Statistik.

Peneliti menggunakan tiga variabel *independen* yaitu variabel kebijakan E-filing wajib pajak orang pribadi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel sanksi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memadai untuk menguji hubungan dengan variabel *dependen* (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Untuk tujuan pada penelitian ini dapat menggunakan Model *Partial Least Square* (PLS) dibandingkan dengan AMOS, LISREL, dan *software* SEM. Tahapan-tahapan pengujian hipotesis 1 sampai dengan 3 adalah sebagai berikut: (1) Menyatakan hipotesis penelitian secara statistic, (2) Menentukan tingkat signifikansi (sebesar 5%), (3) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis. Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan Jika $p\text{-value} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, (4) Menarik simpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah responden yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berdomisili di wilayah KPP Pratama Jakarta Setiabudi IV. Jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar sampai dengan Desember 2019 adalah sebanyak 58,752 dengan sampel minimal sebanyak 96. Peneliti telah menyebarkan sebanyak 200 kuesioner dengan kuesioner yang kembali sebanyak 143 kuesioner dan yang dapat diolah adalah sebesar 112 kuisioner.

Tabel 1 Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase%
1.	Perempuan	34	30%
2.	Laki-Laki	78	70%
	Jumlah	112	100%

Sumber: Data Primer, Diolah 2020

Tabel 2 Klasifikasi Responden berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan	Jumlah Responden	Presentase %
1	Rp 500.000 - Rp 2.900.000	47 Responden	42 %
2	Rp 3.000.000 - Rp 5.000.000	34 Responden	30 %
3	Rp 7.100.000 - Rp 10.000.000	31 Responden	28 %
	Jumlah	112 Responden	100 %

Sumber : Data Primer, Diolah 2020

Tabel 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah Responden	Presentase%
1.	17 - 25 Tahun	52 Responden	46%
2.	26 - 35 Tahun	31 Responden	28%
3.	36 -50 Tahun	22 Responden	20%
4.	> 50 Tahun	7 Responden	6%
	Jumlah	112 Responden	100%

Sumber: Data Primer, Diolah 2020

Tabel 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1	Mahasiswa	43 Responden	38%
2	Karyawan Swasta	31 Responden	28%
3	PNS	16 Responden	14%
4	Wirausaha	2 Responden	2%
5	Lain nya	20 Responden	18%
	Jumlah	112 Responden	100%

Sumber : Data Primer, Diolah 2020

Tabel 5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA / SMK / MA Sederajat	54 Responden	48%
2	Diploma	4 Responden	4%
3	Sarjana	54 Responden	48%
Jumlah		112 Responden	100%

Sumber : Data Primer, Diolah 2020

Hasil Analisis Deskriptif Jawaban responden

Tabel 6 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Variabel	Distribusi Jawaban (%)				Min	Max	Rata-	Standar	
	1	2	3	4				Rata	Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	3.41	8.87	21.33	44.11	22.28	8	40	30.21	5,326
Kebijakan Efilling	0.26	3.01	24.05	50.10	22.58	17	35	27.41	3.878
Sanksi Perpajakan	3.52	8.76	21.13	44.31	22.28	11	25	18.82	2.997
Kesadaran wajib pajak	2.53	4.43	27.09	46.15	19.59	6	30	22.53	3.903

Sumber: Data primer diolah 2020

Tabel 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	No Pertanyaan	R-Hitung	>/<	R-Tabel
Kebijakan E-Filing (X 1)	1	0,960	>	0,361
	2	0,944	>	0,361
	3	0,965	>	0,361
	4	0,947	>	0,361
	5	0,903	>	0,361
	6	0,893	>	0,361
Sanksi Perpajakan (X 2)	1	0,937	>	0,361
	2	0,959	>	0,361
	3	0,955	>	0,361
	4	0,947	>	0,361
Kesadaran Wajib Pajak (X 3)	1	0,917	>	0,361
	2	0,972	>	0,361
	3	0,954	>	0,361
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4	0,967	>	0,361
	5	0,900	>	0,361
	1	0,937	>	0,361
	2	0,933	>	0,361
	3	0,958	>	0,361
	4	0,975	>	0,361
	5	0,932	>	0,361
	6	0,956	>	0,361

Sumber Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa distribusi jawaban responden mengenai sistem kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah sebagai berikut: setuju (44,11%), sangat setuju (22,28%), netral (21,33%), tidak setuju (8,87%) dan sangat tidak setuju (3,41%). Urutan yang tertinggi hingga yang terendah mengenai kebijakan Efilling sebagai berikut: setuju (50,10%), netral (24,05%), sangat setuju (22,58%), tidak setuju (3,01%) dan tidak setuju (0,26%). Urutan yang tertinggi hingga yang terendah mengenai sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: setuju (44,31%), sangat setuju (22,28%), netral (21,13%), tidak setuju (8,76%) dan sangat tidak setuju (3,51%). Sedangkan urutan yang tertinggi hingga terendah mengenai kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut : setuju (46,15%), netral (27,09%), sangat setuju (19,59%), tidak setuju (4,43%) dan sangat tidak setuju (2,53%).

Uji Asumsi dan Kualitas Data Penelitian

Hasil Pengujian Validitas Instrumen disajikan dalam Tabel 7. Dalam penelitian, suatu variabel dikatakan cukup reliabilitas bila variabel tersebut mempunyai nilai konstruk reliability lebih besar dari 0,6. Namun, untuk penelitian tahap awal nilai cronbachs alpha lebih dari 0,5 dianggap mempunyai reliabilitas yang baik (Wati, 2018).

Tabel 8 Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbachs Alpha*

Variabel	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
Kebijakan E-Filing	0,977	0,971
Sanksi Perpajakan	0,973	0,964
Kesadaran Wajib Pajak	0,975	0,968
Kepatuhan Wajib Pajak	0,978	0,982

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Evaluasi *goodness of fit model* penelitian diukur dengan menggunakan nilai R-Square (R²). *Inner Model* menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan *substantive theory*.

Tabel 9 R- Square

Konstruk	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,909	0,903

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 10 Result Of Inner Weight

Konstruk	Sampel Asli (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviasi (STDEV)	T-Statistik (O/STDEV)	Pvalues
Kebijakan E- Filing > Kepatuhan Wajib Pajak	0,344	0,348	0,164	2.101	0,036
Sanksi Perpajakan > Kepatuhan Wajib Pajak	-0,114	-0,109	0,148	0,769	0,442
Kesadaran Wajib Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak	0,742	0,733	0,135	5.504	0,000

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai t-statistik sebesar 2.101 yang lebih besar dari T-tabel 1.67591 (2.101 > 1.67591). Nilai Probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.036 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 yang berarti variabel Kebijakan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai original sample of estimate adalah positif yaitu 0.344. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan *E-Filing* berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Kebijakan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **Diterima**.

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai t-statistik sebesar 0,769 yang lebih kecil dari T-tabel 1.67591 (0,769 < 1.67591). Nilai Probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,442 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 yang berarti variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai original sample of estimate adalah negatif yaitu -0.114. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **Ditolak**.

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai T-statistik sebesar 5.504 yang lebih kecil dari T-tabel 1.67591 (5.504 < 1,67591). Nilai Probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai original

sample of estimate adalah positif yaitu 0.742. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **Diterima**.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman, Almunawaroh, dan Marlina (2015) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian terdapat hipotesis diterima. Disimpulkannya bahwa semakin tingginya Kebijakan *E-Filing* diterapkan di KPP Setiabudi IV maka semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin banyak Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan *E-Filing* di KPP Setiabudi IV akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya Kebijakan *E-Filing* memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT setiap tahun nya dan lebih menghemat biaya, serta tenaga.

Hasil Penelitian Winerungan (2017) yang menyatakan Sanksi Perpajakan berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian terhadap hipotesis ditolak. Disimpulkannya bahwa Sanksi Perpajakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak namun pada hasil penelitian berbanding terbalik, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Setiabudi IV, masih banyak Wajib Pajak yang menghiraukan adanya Sanksi Perpajakan dan masih banyak Wajib Pajak yang diberikan Sanksi karna tidak Melaporkan SPT tepat waktu.

Hasil Penelitian Jatmiko (2016), Kesadaran Wajib Pajak atas kebijakan perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian Muliari dan Nugroho (2016) semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan untuk Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

PENUTUP

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kebijakan *E- Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis kedua bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Hipotesis ketiga kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian terdapat hipotesis diterima. Disimpulkannya bahwa semakin tingginya Kebijakan *E- Filing* diterapkan di KPP Setiabudi IV maka semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin banyak Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan *E-Filing* di KPP Setiabudi IV akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya Kebijakan *E-Filing* memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT setiap ahun nya dan lebih menghemat biaya, serta tenaga.

Hasil pengujian terhadap hipotesis ditolak. Disimpulkannya bahwa Sanksi Perpajakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak namun pada hasil penelitian berbanding terbalik, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Setiabudi IV, masih banyak Wajib Pajak yang menghiraukan adanya Sanksi Perpajakan dan masih banyak Wajib Pajak yang diberikan Sanksi karna tidak Melaporkan SPT tepat waktu. Hasil pengujian terhadap hipotesis diterima, disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi semakin tinggi maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan untuk Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Isroah (2016) Jurnal Nominal, Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, Jurnal Nominal,
- Damanik, D. N. (2020). Analisis Penggunaan E-Filling untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Perpajakan 1(2), 19-27.
- HIDAYAT, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada WPOP Berstatus mahasiswa FEB Di Universitas Mercu Buana kelas Regular 2 yang memiliki NPWP) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta).
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Sengguh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(07).
- Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- Lina Nurlela (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut, Jurnal Akuntansi Wahana.
- Murdihardjo, L., Nurjanah, Y., & Rendy, R. (2020, May). Implementing INTACS Dynamics Enterprise Resources Planning System for Financial Statements. In *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)* (pp. 228-233). Atlantis Press.
- Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 5(1), 45-55.
- Patricia, M. B. S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Purba, J. H. V. (2020). Does Chinese Vegetable Oil Consumption Have Positive Implications for the Indonesia-China Trade Balance?. *Integrated Journal of Business and Economics*, 4(1), 36-44.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 1112-1140.
- Rusdiyana, R., & Munawar, A. (2012). ANALISIS PENGELOLAAN AKTIVA TERHADAP KINERJA PENDAPATAN PER LEMBAR SAHAM (EPS). *Jurnal Online Mahasiswa-Manajemen*, 1(2).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18-22.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. E- Jurnal Akuntansi, 1239-1269.